



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN**



# LPPD

**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**



**TAHUN  
2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2023**

**INDIKATOR KINERJA KUNCI  
DAN DAFTAR ASET SARANA  
PRASARANA DALAM  
KABUPATEN MERANGIN  
LAMPIRAN  
LAPORAN PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH  
(LPPD)  
KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2022**

**TAHUN  
2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2023**



## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Pertama-tama dan yang utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan rahmat-Nya jualah, **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2022** ini dapat disusun sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada Pemerintah, disusun sebagaimana diatur dalam ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Adapun tujuannya adalah sebagai keterangan dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pemerintah Pusat menyangkut pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, tepatnya selama Tahun Anggaran 2022. Oleh karenanya, laporan ini, merupakan “progres Report” (catatan kemajuan) dalam bentuk laporan kinerja Penyelenggaraan





Pemerintah dan penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Merangin yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2022 sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintah yang bersih, dan yang kesemuanya dalam rangka, secara bertahap **Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju “Merangin MANTAP Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”** serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam Laporan ini juga disampaikan Indikator Kinerja Kunci yang merupakan instrument sistem pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih bersama-sama dengan seluruh stakeholders pembangunan Daerah, namun juga tidak dapat dipungkiri tentu masih banyak aspirasi masyarakat Kabupaten Merangin yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Untuk itu kritik dan saran membangun serta petunjuk dari Pemerintah terhadap laporan ini sangat diharapkan yang nantinya akan menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam rangka perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Kabupaten Merangin di masa yang akan datang.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi, kajian dan informasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Merangin selama Tahun Anggaran 2022, oleh seluruh komponen yang membutuhkan.

**Wabillahi Taufiq Wal Hidayah**

**Wassalamu'alaikum Wr. W**

**BUPATI MERANGIN**



**H. MASHURI S.Pd.,MM**



# K a b u p a t e n MERANGIN

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.1.1 Penjelasan Umum .....	2
A. Undang-undang Pembentukan Daerah .....	2
B. Data Geografais Wilayah .....	6
C. Jumlah Penduduk .....	13
D. Jumlah Kecamatan dan desa/Kelurahan Kabupaten Merangin .....	14
E. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah .....	16
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	21
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	29
A. Permasalahan strategis Pemerintah Daerah serta Visi dan Misi Kepala Daerah .....	29
B. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencana Jangka Menengah .....	31
C. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan .....	53
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	53
A. Pendidikan .....	53
B. Kesehatan .....	54
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	58
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	61
E. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	65
F. Sosial .....	69
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>70</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	70
A. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....	71
B. Angka Kemiskinan .....	83
C. Angka Pengangguran .....	85
D. Pertumbuhan Ekonomi .....	85
E. Pendapatan Perkapita .....	89
F. Indeks Gini .....	89
G. Indeks Pembangunan Gender .....	91





# K a b u p a t e n MERANGIN

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....	92
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	93
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	93
A. Urusan Pendidikan .....	162
B. Urusan Kesehatan .....	168
C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	178
D. Urusan Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman .....	184
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat .....	185
F. Urusan Sosial .....	189
G. Urusan Tenaga Kerja .....	192
H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan PA .....	194
I. Urusan Pangan .....	195
J. Urusan Pertanahan .....	201
K. Urusan Lingkungan Hidup.....	201
L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil..	204
M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	207
N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana..	213
O. Urusan Perhubungan .....	216
P. Urusan Komunikasi dan Informatika .....	218
Q. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....	220
R. Urusan Penanaman Modal .....	223
S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga.....	225
T. Urusan Statistik .....	226
U. Urusan Kebudayaan .....	227
V. Urusan Perpustakaan .....	228
W. Urusan Kearsipan .....	230
X. Urusan Kelautan dan Perikanan .....	232
Y. Urusan Pariwisata .....	233
Z. Urusan Pertanian .....	235
AA. Urusan Perdagangan .....	244
BB. Urusan Perindustrian .....	246
2.3.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang.....	247
A. Urusan Perencanaan .....	251
B. Urusan Keuangan .....	253
C. Urusan Pengadaan .....	258
D. Urusan Kepegawaian .....	258
E. Urusan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah ....	261
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	263
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja .....	265
B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	266
C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	267



# K a b u p a t e n MERANGIN

D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah .....	268
E. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja yang telah dicapai) .....	277
F. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .....	286
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>292</b>
A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .....	293
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi ..	293
C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	297
3.1 Tugas Pembantu Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten .....	288
3.2 Permasalahan dan Kendala .....	305
3.3 Saran dan Tindak Lanjut .....	306
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM .....</b>	<b>308</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>655</b>

 **BAB I**

# PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Daerah menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban untuk menyampaikan LPPD kepada Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini, merupakan **“Progress Report”** dalam bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Merangin yang dicapai, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Terkait tahapan dan sistematika penyusunan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



## 1.1 Latar Belakang

### 1.1.1 Penjelasan Umum

#### A. Undang-undang Pembentukan Daerah

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Merangin Tahun 2022 disusun untuk memenuhi ketentuan dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
- b) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
- l) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.09/2020 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan paska Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi



Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 672);

- m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- o) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Hari Lahir Kabupaten Merangin;
- p) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
- q) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3);
- r) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 10);

- s) Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);
- t) Peraturan Bupati Merangin Nomor 120 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 120);
- u) Peraturan Bupati Merangin Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020 Nomor 62);

#### B. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, wilayah Kabupaten Merangin terletak pada titik koordinat antara 101°32'39"–102°38'35" Bujur Timur dan 1°39'23"–2°46'9" Lintang Selatan. Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kota Bangko dengan jarak dari Kota Jambi (ibukota Provinsi Jambi) ±256 Km. Secara administrasi wilayah Kabupaten Merangin berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Tebo (Permendagri Nomor 81 Tahun 2016), Kabupaten Bungo (Permendagri Nomor : 82 Tahun 2016)

Sebelah Selatan Kabupaten Muko Muko (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013), Kabupaten Bengkulu Utara (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013), Kabupaten Lebong (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013).

Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun (Permendagri Nomor 62 Tahun 2019), Kabupaten Musi Rawas Utara (Permendagri Nomor: 131 Tahun 2017).

Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci (Permendagri Nomor 80 Tahun 2016).

Kabupaten Merangin memiliki Luas wilayah 7.554,24 Km<sup>2</sup> berdasarkan lampiran luasan batas Permendagri dan terbagi menjadi 24 Kecamatan. Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Jangkat sebesar 951.54 Km<sup>2</sup> atau sebesar 12,60% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin, diikuti oleh Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Lembah Masurai masing-masing sebesar 733.28 Km<sup>2</sup> dan 672.9 Km<sup>2</sup>.

Selanjutnya, kabupaten Merangin secara administratif pemerintahannya berdasarkan perkembangan wilayah-wilayah pemekaran Kecamatan baru, untuk nama Kecamatan dan luas wilayah Kecamatan sampai dengan tahun 2022 tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Nama-nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas	
			km <sup>2</sup>	%
1	2	3	6	7
1	Jangkat	Muara Madras	951.54	12,60
2	Sungai Tenang	Rantau Suli	649.48	7,73
3	Muara Siau	Pasar Ma. Siau	631.36	8,53
4	Lembah Masurai	Pasar Masurai	672.9	8,97
5	Tiang Pumpung	Sekancing	290.42	3,58
6	Pamenang	Pamenang	329.92	4,51
7	Pamenang Barat	Sp. Limbur Merangin	188.38	2,60
8	Renah Pamenang	Meranti	93.65	1,40
9	Pamenang Selatan	Tambang Mas	152.18	2,18
10	Bangko	Bangko	166.17	2,19



11	Bangko Barat	Pulau Rengas	192.08	2,56
12	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	194.42	1,45
13	Nalo Tantan	Sungai Ulak	101.65	2,69
14	Sungai Manau	Sungai Manau	279.79	3,85
15	Renah Pembarap	Simpang Parit	93.65	3,55
16	Pangkalan Jambu	Tigo Alur Pangkalan Jambu	403.52	5,56
17	Tabir	Pasar Rantau Panjang	350.5	4,34
18	Tabir Ulu	Muara Jernih	208.75	2,86
19	Tabir Selatan	Rawa Jaya	191.73	2,56
20	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	183.29	2,07
21	Tabir Timur	Sungai Bulian	93.74	1,42
22	Tabir Lintas	Mensango	113.26	1,50
23	Margo Tabir	Margo	120.94	1,67
24	Tabir Barat	Muara Kibul	733.28	9,63
Total			7.554,24	100

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Merangin 2022

Sedangkan jika melihat jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan ke Kota Bangko sebagai Ibu Kota Kabupaten Merangin, pusat pemerintahan Kecamatan paling jauh adalah pusat pemerintahan Kecamatan Jangkat Timur yaitu Rantau Suli sejauh 157 KM, sedangkan pusat pemerintahan Kecamatan paling dekat adalah pusat pemerintahan Kecamatan Nalo Tantan yaitu Sungai Ulak dengan jarak 5 KM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2 Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Kota Bangko

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Km)
1	2	3	4
1.	Jangkat	Muara Madras	137
2.	Jangkat Timur	Rantau Suli	157
3.	Muara Siau	Pasar Muara Siau	45
4.	Lembah Masurai	Pasar Masurai	62
5.	Tiang Pumpung	Sekancing	32
6.	Pamenang	Pamenang	32
7.	Pamenang Barat	Simpang Limbur	15

8.	Renah Pamenang	Meranti	26
9.	Pamenang Selatan	Tambang Emas	31
10.	Bangko	Pasar Atas Bangko	0
11.	Bangko Barat	Pulau Rengas Ulu	12
12.	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	8
13.	Nalo Tantan	Sungai Ulak	5
14.	Sungai Manau	Sungai Manau	42
15.	Renah Pembarap	Simpang Parit	28
16.	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	58
17.	Tabir	Pasar Rantau Panjang	28
18.	Tabir Ulu	Muara Jernih	42
19.	Tabir Selatan	Rawa Jaya	33
20.	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	38
21.	Tabir Timur	Sungai Bulian	68
22.	Tabir Lintas	Mensango	14
23.	Margo Tabir	Tanjung Rejo	30
24.	Tabir Barat	Muara Kibul	58

Sumber Data : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2022

Untuk memberi gambaran kondisi geografis Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Merangin



Kondisi geologi Kabupaten Merangin berdasarkan formasi geologi terdiri dari endapan permukaan, batuan sedimen, batuan metamorf, batuan gunung api, batuan terobosan. Berdasarkan analisis geologis Penekoek (1969), Kabupaten Merangin termasuk dalam kategori cekungan semangko.

Karena itu, di Kabupaten Merangin banyak terdapat deposit endapan bahan tambang, baik yang berupa batuan mineral maupun migas. Jenis bahan tambang tersebut adalah minyak bumi, air raksa, emas, bentonit, marmer, basa dan sebagainya. Bahan-bahan tambang tersebut sampai saat ini belum semuanya dieksplorasi, namun berdasarkan hasil sementara sudah sebagian besar terindikasi.

Sedangkan untuk kondisi topografi Kabupaten Merangin secara umum terbagi dalam 3 bagian, yaitu dataran tinggi, dataran sedang dan dataran rendah. Sedangkan berdasarkan kemiringan lereng /wilayah, Kabupaten Merangin terbagi dalam 4 kategori yaitu:

- 1) Kemiringan lereng 0 – 2 % dari jumlah 10,15 % dari luas wilayah Kabupaten Merangin. Klasifikasi kemiringan ini sebagian besar Kecamatan Tabir, Tabir Timur, Tabir Ilir, Tabir Selatan, Bangko, Batang Mesumai, Bangko Barat, Pamenang, Pamenang Barat, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Manau.
- 2) Kemiringan Lereng 2–15% berjumlah 31-61% dari luas Kabupaten Merangin yang sebagian besar Kecamatan Bangko, Bangko Barat, Batang Mesumai, Nalo Tantan, Pamenang, Pamenang Barat, Tabir, Tabir Timur, Tabir Ilir, Renah Pembarap, Pangkalan jambu dan Sungai Manau serta Muara Siau.
- 3) Kemiringan Lereng 15–40% lebih kurang 22,31% dari luas Kabupaten Merangin dengan penyebaran hamparan ke seluruh wilayah kecamatan, akan tetapi yang paling dominan di Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang, Lembah Masurai, Muara Siau, Renah Pembarap, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Tabir Ulu dan Bangko serta Bangko Barat.



- 4) Kemiringan Lereng > 40% merupakan persentase terbesar yaitu berkisar 35,93% dari luas Kabupaten Merangin, penyebarannya terdapat di Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang, Pangkalan Jambu, Sungai Manau, Muara Siau dan Tabir Ulu.

Musim hujan di Kabupaten Merangin berkisar antara bulan Juni sampai September Tahun berikutnya. Musim Kemarau berkisar antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Dibagian timur dan utara kabupaten merupakan daratan rendah dengan temperatur 30°C. Sedangkan bagian barat adalah termasuk dalam deretan pegunungan Bukit Barisan yang temperaturnya maksimum 28°C. Iklim Kabupaten Merangin bertipe A (*Smitch Ferguson*) dengan curah hujan pada daratan rendah berkisar antara 2.200 mm sampai 3.200 mm, sedangkan pada daerah perbukitan curah hujan antara 1.600 mm sampai 3.600 mm per tahun.

Wilayah Kabupaten Merangin, banyak dialiri sejumlah sungai kecil, sedang dan besar di berbagai penjuru. Namun demikian, secara umum arah alirannya rata-rata menuju ke sebelah Timur. Sedangkan daerah hulu sungai biasanya berada di bagian (pegunungan) ke arah Barat (daerah rendah) yang merupakan daerah hilir, akhirnya bermuara ke Sungai Batang Hari. Karena itu, sungai Batanghari merupakan muara dari sungai-sungai diwilayah bagian barat yang merupakan hulu sungai sekaligus sebagai daerah pegunungan atau dataran tinggi. Sungai Besar antara lain sungai Batang Tabir, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Telentam, Batang Tembesi dan sejumlah besar terbagi dalam anak-anak sungai kecil dan sedang. Disamping sungai terdapat pula Danau dan Rawa yang memiliki kekayaan hayati, seperti Danau Pauh dan Danau Depati Empat yang terdapat di Kecamatan Jangkat, sedangkan

rawa-rawa banyak tersebar di dataran rendah seperti Kecamatan Tabir, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur dan Pamenang. Selain itu, juga banyak danau yang banyak dikenal di Kabupaten Merangin antara lain terdapat Danau Lebak, yang secara etimologis terjadi akibat adanya *meandering* (Pengelokan) sungai yang mengalami perpindahan pada waktu tertentu. Danau Lebak ini banyak di jumpai pada sepanjang sungai dataran rendah, seperti sungai Tabir dan sebagainya.

Sedangkan berdasarkan sistem sungai yang mengalir di Kabupaten Merangin dapat diklasifikasikan atas dua kelompok, yaitu sistem sungai yang merupakan bagian hulu dari sungai utama, seperti DAS Air Liki dan DAS Batang Tabir dan Sistem sungai yang merupakan Sistem DAS utama seperti DAS Merangin. Sebagian daerah yang dilalui oleh beberapa sungai besar, maka Kabupaten Merangin memiliki potensi air permukaan yang cukup melimpah. Kondisi ini dicerminkan oleh sebagian besar sungai-sungai yang ada disepanjang tahun dapat dikatakan tidak mengalami kekeringan. Disamping potensi sungai yang sangat besar, di beberapa wilayah kondisi air sungai dan air permukaan banyak terjadi *over land flow*. Maka banyak di beberapa wilayah sering dijumpai terjadinya banjir dan genangan.

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif dari komposisi fraksi liat, debu dan pasir yang menyusun masa tanah komposisi dari fraksi ini menentukan kualitas medan dan kualitas pengelolaan tanah tersebut. Tekstur tanah secara umum dapat diklasifikasikan antara halus, sedang dan kasar, sedangkan daerah gambut tidak mempunyai tekstur. Tekstur tanah di Kabupaten Merangin terdiri dari tekstur tanah halus, tersebar di Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Sungai Manau, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat dan Kecamatan

Pamenang. Untuk tekstur sedang terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Merangin sedangkan tanah gambut hanya terdapat di Kecamatan Tabir, Pamenang, dan Tabir Ulu. Kedalaman efektif tanah akan membatasi perkembangan dan kebebasan perakaran tanaman dan menentukan pertumbuhan serta produktifitas tanaman. Kedalaman efektifitas tanah dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu <30 cm, 30–60 cm, 60–90cm dan 90cm. Kedalaman efektif kurang dari 30 cm hanya dapat digunakan untuk rumput-rumputan atau tidak diusahakan, sedangkan pada kedalaman efektif 30–60cm, terbatas hanya untuk tanaman semusim yang berakar pendek (palawija dan padi-padian) untuk tanaman keras tidak cocok karena akan menyebabkan pertumbuhan yang kerdil penetrasi akar akan terhalang. Tanah gambut tahap kedalaman efektif hanya dibedakan tebalan gambutnya. Di Kabupaten Merangin sebagian besar kedalaman efektif tanahnya lebih dari 90 cm dan tersebar disetiap Kecamatan.

### C. Jumlah Penduduk

Sebagai gambaran umum terhadap kependudukan di Kabupaten Merangin, sampai dengan Tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Merangin 373.472 jiwa. Dari perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Merangin bahwa jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, pada tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Merangin mengalami peningkatan sebesar 0,49%, dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Merangin Pada Tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Merangin adalah 355.719 jiwa. Bertambahnya penduduk ini dapat diakibatkan oleh pertumbuhan alami maupun pengaruh migrasi. Sebagai muaranya dari penambahan itu, maka jumlah penduduk terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Adapun gambaran



perkembangan distribusi penduduk di Kabupaten Merangin berdasarkan Kecamatan pada tahun 2020 s/d 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020 s/d 2022

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Tahun			Ket
		2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1	Jangkat	9.420	9.43	10.469	
2	Jangkat Timur	9.409	9.41	49.962	
3	Muara Siau	10.06	10.10	10.636	
4	Lembah Masurai	13.875	13.82	11.141	
5	Tiang Pumpung	4.684	4.67	30.847	
6	Pamenang	33.476	33.67	35.144	
7	Pamenang Barat	17.294	17.39	17.905	
8	Renah Pamenang	14.416	14.46	14.596	
9	Pamenang Selatan	10.430	10.47	10.821	
10	Bangko	48.857	49.02	49.962	
11	Bangko Barat	10.985	10.98	11.402	
12	Nalo Tantan	16.988	17.55	18.989	
13	Batang Masumai	10.702	10.78	11.885	
14	Sungai Manau	10.216	10.24	11.141	
15	Renah Pembarap	12.987	13.08	13.611	
16	Pangkalan Jambu	6.409	6.414	6.852	
17	Tabir	28.594	28.59	30.847	
18	Tabir Ulu	8.144	8.116	8.510	
19	Tabir Selatan	29.313	29.51	30.103	
20	Tabir Ilir	8.861	8.831	9.584	
21	Tabir Timur	7.908	7.934	7.975	
22	Tabir Lintas	8.112	8.159	8.427	
23	Margo Tabir	13.604	13.62	13.889	
24	Tabir Barat	9.305	9.386	9.686	
	Total	354.0	355.7	373.472	

Sumber : Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun 2022 (BPS Kab. Merangin)

Untuk melihat Proyeksi perkembangan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Merangi Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Tahun 2022

NO	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1	0-4	16.173	15.574	31.747
2	05-09	16.269	15.794	32.063
3	10-14	16.395	15.566	31.961
4	15-19	15.872	15.240	31.112
5	20-24	15.484	14.561	30.045
6	25-29	14.473	14.956	29.429
7	30-34	14.276	15.387	29.663
8	35-39	14.244	14.175	28.419
9	40-44	13.524	12.692	26.216
10	45-49	11.835	11.500	23.335
11	50-54	10.081	9.288	19.369
12	55-59	8.306	7.777	16.053
13	60-64	6.505	5.960	12.465
14	65-69	4.313	3.693	8.006
15	70-74	2.361	2.100	4.461
16	75+	1.739	1.464	3.203
	TOTAL	181850	175.727	357.577

Sumber : Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun 2022 (BPS Kab. Merangin)

Dari tabel diatas Jumlah penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2022 yang mendominasi pada umur 5-9 Tahun dengan komposisi 16.269 jiwa, sedangkan yang terendah jumlah penduduk pada kelompok umur 75 Tahun Keatas dengan komposisi 3.203 penduduk.

Sedangkan untuk melihat perkembangan Luas Wilayah, banyaknya penduduk, Kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Merangin dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Perkembangan Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Merangin Tahun 2020 s/d Tahun 2022

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km)
1	2	3	4	5
1	2020	354.052	7.554,24	46,87
2	2021	355.719	7.554,24	47,09
3	2022	373.472	7.554,24	47,47

Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2022

Jika dilihat dari tabel di atas, dengan bertambah jumlah penduduk di Kabupaten Merangin mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2021 kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin sebesar 47,09 Jiwa/Km, kemudian pada tahun 2022 sebesar 47,47 Jiwa/Km. Jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Merangin yang mencapai 7.554,24 Km<sup>2</sup>, penduduk Kabupaten Merangin masih terasa luas untuk lahan pertanian dan pemukiman. Namun apabila hal ini tidak mendapat perhatian akan dapat menyebabkan dampak-dampak lain akan muncul dari meningkatnya tingkat kepadatan penduduk seperti berkurangnya ketersediaan lahan, menurunnya udara bersih, Kerusakan Lingkungan, berkurangnya air bersih, kekurangan makanan dan lain sebagainya.

#### D. Jumlah Kecamatan dan desa/Kelurahan Kabupaten Merangin

Secara Administrasi Pemerintahan, pembagian wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Kabupaten Merangin meliputi 24 wilayah pemerintahan Kecamatan. Salah satu upaya meningkatkan peran pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten Merangin juga telah menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan tingkat desa sebanyak 205 desa dan tingkat kelurahan sebanyak 10 kelurahan. Upaya

Pemekaran Kecamatan yang juga diiringi dengan pemekaran desa ini diharapkan mampu memperpendek rentang kendali, jarak dan waktu guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, kabupaten Merangin secara administratif pemerintahannya berdasarkan perkembangan wilayah-wilayah pemekaran Kecamatan baru, untuk nama Kecamatan dan luas wilayah Kecamatan sampai dengan tahun 2022 tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6 Nama-nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	2	3	4	5
1	Jangkat	Muara Madras	11	-
2	Sungai Tenang	Rantau Suli	14	-
3	Muara Siau	Pasar Ma. Siau	17	-
4	LembahMasurai	Pasar Masurai	15	-
5	Tiang Pumpung	Sekancing	6	-
6	Pamenang	Pamenang	13	1
7	Pamenang Barat	Sp. Limbur Merangin	8	-
8	Renah Pamenang	Meranti	4	-
9	Pamenang Selatan	Tambang Mas	4	-
10	Bangko	Bangko	4	4
11	Bangko Barat	Pulau Rengas	6	-
12	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	7	-
13	Nalo Tantan	Sungai Ulak	10	-
4	Sungai Manau	Sungai Manau	10	-
15	Renah Pembarap	Simpang Parit	12	-
16	Pangkalan Jambu	Tigo Alur Pangkalan Jambu	8	-
17	Tabir	Pasar Rantau Panjang	6	5
18	Tabir Ulu	Muara Jernih	6	-
19	Tabir Selatan	Rawa Jaya	8	-
20	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	7	-
21	Tabir Timur	Sungai Bulian	4	-
22	Tabir Lintas	Mensango	5	-
23	Margo Tabir	Margo	6	-
24	Tabir Barat	Muara Kibul	14	-
Total			205	10

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Merangin 2022



E. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Merangin memiliki 32 Perangkat Daerah yang terdiri dari :

Tabel 1.7 Nama-nama Perangkat Daerah di Kabupaten Merangin

No	NAMA OPD	ALAMAT	WEBSITE
1.	Inspektorat Daerah	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	inspektorat.meranginkab.go.id
2.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Jl. Jend.Sudirman Km. 03 Bangko	dpupr.meranginkab.go.id
3.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		dukcapil.meranginkab.go.id
4.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	Jl. Puskesmas Pematang Kandis Km. 02 Bangko	dpmptsptk.meranginkab.go.id
5.	Dinas Kesehatan	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dinkes.meranginkab.go.id
6.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dikbud.meranginkab.go.id
7.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jl. H.M Kamil (Jam Gento Lt. II) Kel. Pasar Atas Bangko	diskominfo.meranginkab.go.id
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dpmd.meranginkab.go.id
9.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jl. Jend.Sudirman Km. 06, Sungai Ulak Bangko	damkar.meranginkab.go.id
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jl. Pemuda Komplek IBRD Km. 02 No 01 Bangko	dinsosppa.meranginkab.go.id
11.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 01 Bangko	

12.	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Diponegoro Km. 03 Bangko	ketpangan.meranginkab.go.id
13.	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dlh.meranginkab.go.id
14.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	
15.	Dinas Perhubungan	Jl. Lintas Sumatera Km. 06 Simpang Arboretum Dusun Mudo, Bangko	dishub.meranginkab.go.id
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dkukmpp.meranginkab.go.id
17.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga		disparpora.meranginkab.go.id
18.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	disarsipus.meranginkab.go.id
19.	Dinas Perikanan	Jl. Jend.Sudirman Km. 03 Bangko	
20.	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Jl. Pemuda Komplek IBRD Bangko	dtph.meranginkab.go.id
21.	Dinas Peternakan Dan Perkebunan		disnakbun.meranginkab.go.id
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Pemuda Komplek IBRD Bangko	satpolpp.meranginkab.go.id
23.	RSUD Kol. Abundjani	Jl. Kesehatan	rsdkolabundjani.meranginkab.go.id
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Jend.Sudirman No.04 Bangko	bappeda.meranginkab.go.id
25.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jl. Sultan Hasanuddin No.02 Bangko	bkpsdmd.meranginkab.go.id
26.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Jend.Sudirman Km. 04 Bangko	bpkad.meranginkab.go.id
27.	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Jl. Jend.Sudirman No. 05 Bangko	bpprd.meranginkab.go.id

28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Lintas Sumatera Km. 06 Desa Langling, Kec. Bangko	bpbd.meranginkab.go.id
29.	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Jl. Jend.Sudirman No. 01 Bangko	balitbang.meranginkab.go.id
30.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jl. Jend.Sudirman No. 08 Bangko	kesbangpol.meranginkab.go.id
31.	Sekretariat Daerah	Jl. Jend. Sudirman No. 01 Bangko	-
32.	Sekretariat DPRD	-	-

Berdasarkan Undang –undang 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan. Kemudian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Adapun gambaran jumlah pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2021 tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8 Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Merangin Pergolongan Sampai Dengan Tahun 2022

N0	Pangkat/Golongan	Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	I/A (Juru Muda)	2	1	2
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	-	2
3	I/C (Juru)	5	1	6
4	I/D (Juru Tingkat I)	3	-	3
	Golongan I	<b>12</b>	-	<b>13</b>
5	II/A (Pengatur Muda)	33	8	41
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	58	27	85
7	II/C (Pengatur)	127	63	190
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	143	271	414
	Golongan II	<b>361</b>	<b>369</b>	<b>730</b>
9	III/A (Penata Muda)	272	447	719
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	282	426	708
11	III/C (Penata)	325	450	775
12	III/D (Penata Tingkat I)	460	635	1095
	Golongan III	<b>1339</b>	<b>1958</b>	<b>3297</b>
13	IV/A (Pembina)	305	335	640
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	195	269	464
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	29	2	31
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	-	1
17	IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
	Golongan IV	<b>530</b>	<b>606</b>	<b>1136</b>
	Jumlah 2022	<b>2242</b>	<b>2914</b>	<b>5176</b>

Sumber :BKPSDM Kab. Merangin Tahun 2022

#### F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun Pendapatan daerah dimaksud terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Penyusunan anggaran tahun 2022 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Secara keseluruhan Pendapatan daerah Kabupaten Merangin untuk tahun 2022 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.327.970.016.609,70 Realisasi Rp. 1.319.533.844.169,- (Satu Triliun Tiga Ratus Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) dari target yang ditetapkan ini berarti melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 100,64%.

Adapun anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.9 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022

	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2022	REALISASI	LEBIH/(KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	1.319.533.844.169,-	1.327.970.016.609.70	8.436.172.44.70	100,46 %
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	140.670.249.862,-	116.712.550.950,70	23.957.698.911.30	0.01
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	37.589.744.000,-	28.572.619.327.45	9.017.124.672,55	0.01
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6.894.347.922.00	4.223.871.096,65	2.670.476.825,35	0.01
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.100.359.765.00	7.100.359.765,78	0,78	0.01
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	89.085.798.175,00	76.815.700.760.82	12.270.097.414	0.01
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.176.863.594.307,00	1.209.257.465.659,-	32.393.871.352.00	0.97
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.089.876.209.520,00	1.118.725.234.640,00	28.849.024.120,00	0.97
<b>4.2.2</b>	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	86.987.384.787,00	90.532.231.091	3.544.846232,00	0.96
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2000.000.000,00	2000.000.000,00	0,00	0.1
4.3.1	Pendapatan Hibah	51.003.034.646,00	49.052.476.300,00	1.950.558.346.00	1.03
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Merangin Tahun 2022

\*Data Sementara Anaudit BPK RI Perwakilan Jambi

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah

yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena system pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
- 2) Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

- 5) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah;
- 6) Memberikan *reward and punishment*, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib Pajak Daerah;
- 7) Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung sistem, prosedur dan pelayanan;
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;
- 9) Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;
- 10) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 11) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 12) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- 13) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- 14) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama.

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Berdasarkan pengelompokan, untuk realisasi belanja daerah Kabupaten Merangin pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 1.10 Alokasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun Anggaran 2022

Kode	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5	6
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	952.285.942.832,00	888.224.976.697,40	64.060.966.234,60	0.01
5.1.1	Belanja Pegawai	554.705.191.528,00	526.735.638.444	27.969.553.084,00	0.10
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	304.368.172.358,00	306.227.317.743,40	34.140.854.614	0.99
5.1.3	Belanja Bunga	6.209.544.210	6.209.544.210,00	90,00	1
5.1.4	Belanja Subsidi				
5.1.5	Belanja Hibah	51.003.034.646	49.052.476,300	1.950.558.346	1.03
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	45.805.292.815	43.977.186.671	1.828.106.144	1.04
5.2	BELANJA MODAL	78.682.602.837	73.706.411.814	4.976.191.023	1.06
5.2.1	Belanja Modal Tanah	254.214.066	249.810.800	4.403.266	1.01
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.282.652.042	23.692.032.524	1.590.619.518	1.06
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	23.138.609.969	21.395.823.253	1.742.786.716	1.08
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24.802.441.818	24.645.828.895	156.612.923	1.00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.694.684.942	3.518.291.542	176.393.400	0.10
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	1.510.000.000	204.624.800	1.305.375.200	7.37

Sumber: BPKAD Kab. Merangin Tahun 2022

\*Data Sementara Anaudit BPK RI Perwakilan Jambi

Pengelompokan dan Realisasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah pada setiap OPD Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan OPD Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2022

NO	O P D	BELANJA			%
		ANGGARAN	REALISASI	Lebih/(kurang)	
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	358.466.981.738	350.657.754.624	7.809.227.114	1.02
2	Dinas Kesehatan	61.203.380.480	88.059.199.523	26.855.819.045	0.69
3	Dinas Peternakan dan Perkebunan	13.426.328.203	9.765.760.673	3.660.567.330	1.37
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.000.000.000	380.000.000	620.000.000	2.63
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.525.632.923	11.198.473.563	3.327.159.360	1.29
6	Satuan Polisi Pamong Praja	9.366.271.840	9.008.608.180	357.663.660	1.03
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.229.576.200	6.066.904.528	162.671.672	1.02
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.796.688.540	4.752.159.312	44.529.228	1.00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.809.428.093	4.699.716.569	44.529.228	1.23
10	Dinas Ketahanan Pangan	3.564.514.725	3.104.507.574	460.007.151	1.14
11	Dinas Lingkungan Hidup	12.767.416.640	12.600.894.591	166.522.094	1.01
12	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil	5.978.144.200	5.647.413.609	330.730.591	1.05
13	Dinas Pemberdayaan	13.179.094.076	12.040.710.441	1.138.383.635	109
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan	14.686.703.400	14.101.628.840	585.074.560	104
15	Dinas Perhubungan	5.069.319.341	4.632.263.211	437.056.130	109
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.875.251.172	5.577.652.721	297.598.351	1.05
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	4.709.801.275	4.566.526.095	142.700.085	1.03
18	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan	7.470.801.257	5.866.139.243	1.604.662.014.	1.27
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah	3.108.894.980	2.089.837.881	1.019.057.099	1.48
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.167.053.000	2.988.840.617	168.212.382	1.05
21	Dinas Perikanan	7.740.121.272	5.564.115.978	2.176.005.294	1.39

22	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	29.730.457.155	23.593.534.664	6.336,922.491	1.27
23	Inspektorat Daerah	10.000.100.000	10.322.051.126.	321.951.126	0.96
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.068.640.820	8.416.476.745	345.835.925	0.95
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	83.193.065.721	83.193.065.721	-	1.00
26	Badan Pengelola Pajak dan	42.808.444.000	37.808.444.000	5.000.000.000	1.13
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	7.668.836.492	6.932.028.356	736.808.136	1.10
28	Kesbangpol	4.531.210.112	4.627.652.656	96.442.545	0.97
29	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.313.642.700	3.569.440.714	255.798.014	0.92
30	Sekretariat Daerah	32.116.867.040	36.672.502.096	4.555.635.056	0.87
31	Sekretariat DPRD	37.383.690.747	45.770.875.867	8.387.185.120	0.81
32	Kantor Camat Bangko	9.626.760.200	9.203.551.935	423.208.265	1.04
33	Kantor Camat Bangko Barat	1.926.387.800	1.856.323.703	70.064.097	1.03
34	Kantor Camat Batang Masumai	1.666.923.400	1.484.855.501	182.067.899	1.12
35	Kantor Camat Jangkat	2.308.126.900	2.306.928634	1.198.266	1.00
36	Kantor Camat Jangkat Timur	1.920.707.600	1.564.690.842	356.016.758	1.22
37	Kantor Camat Lembah Masurai	1.727.361.626	1.772.176.088	5.185.538	1.00
38	Kantor Camat Margo Tabir	1.172.232.800	1.313.101.439	140.868.639	0.89
39	Kantor Camat Muara Siau	2.020.653.000	2.150.323.912	129.670.912	0.93
40	Kantor Camat Nalo Tantan	1.458.091.400	1.417.323.507	40.767.893	1.02
41	Kantor Camat Pamenang	3.470.690.750	3.402.373.178	31.682.428	0.99
42	Kantor Camat Pamenang Barat	1.649.735.200	1.738.925.790	89.190.590	0.94
43	Kantor Camat Pamenang Selatan	1.491.282.000	1.434.333.503	56.948.497	1.03
44	Kantor Camat Pangkalan Jambu	1.575.606.200	1.523.147.652	52.458.548	1.03
45	Kantor Camat Renah Pamenang	1.310.300.800	1.256.944.952	53.355.848	1.04
46	Kantor Camat Renah Pembarap	1.671.039.400	1.582.820.428	88.218.972	1.05
47	Kantor Camat Sungai Manau	1.729.899.200	1.643.141.732	86.757.468	1.05
48	Kantor Camat Tabir	7.576.846.800	8.316.108.300	793.261.500	0.91
49	Kantor Camat Tabir Barat	1.677.996.200	1.653.531.612	24.464.588	1.01

## Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2022

50	Kantor Camat Tabir Ilir	1.585.188.800	1.332.646.808	252.541.992	1.18
51	Kantor Camat Tabir Lintas	1.557.579.600	1.614.827.160	57.247.560	0.96
52	Kantor Camat Tabir Selatan	1.529.882.800	1.350.775.487	179.107.313	1.13
53	Kantor Camat Tabir Timur	1.335.909.200	1.342.352.479	6.443.279	0.99
54	Kantor Camat Tabir Ulu	1.644.172.200	1.697.273.056	53.100.856	0.96
55	Kantor Camat Tiang Pumpung	1.657.171.300	1.650.393.596	6.777.704	1.00
<b>JUMLAH</b>		<b>876.246.903.318</b>	<b>868.561.999.886</b>	<b>72.683.775.341</b>	

Sumber :BPKAD Kab. Merangin Tahun 2022

\*Data Sementara Anaudit BPK RI Perwakilan Jambi

### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

#### A. Permasalahan strategis Pemerintah Daerah serta Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pada dasarnya merupakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara bertahap dan berkesinambungan melalui pelaksanaan pembangunan. Ungkapan visi, pada hakekatnya ditujukan tidak hanya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga diarahkan secara sistematis untuk menghadapi perubahan yang muncul dimasa mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas.

Berdasarkan gambaran umum, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Kabupaten Merangin saat ini, Visi-Misi Kabupaten Merangin yang tertuang pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023, yaitu:

## “MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG PERTANIAN DAN PARIWISATA 2023”

Kata ‘MANTAP’ pada rumusan visi merupakan singkatan dari : Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, Profesional. Setiap kata pada singkatan tersebut memiliki makna sebagaimana diuraikan berikut :

### MAJU :

Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Merangin yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.

### AMAN :

Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Kabupaten Merangin, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam. tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

### NYAMAN :

Sikap dan kondisi masyarakat kabupaten merangin yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

### TERTIB :

Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat tali undang tambang teliti yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.



**AMANAHAH :**

Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Merangin yang Religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural

**PROFESIONAL :**

Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Merangin yang pada hakekatnya merupakan suatu gambaran terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merangin selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

- 1) Mengembangkan sumberdaya bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar berbasis tata ruang, kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
- 4) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju *world class government*

#### B. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencana Jangka Menengah

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana tahunan program pemerintah daerah (RKPD). Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas

atau gabungan program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program- program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perencanaan pembangunan membutuhkan sinergitas rencana antara rencana pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kapasitas serta tingkat kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kabupaten Merangin dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2022.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Merangin menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani;
- 2) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan;
- 3) Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;
- 4) Meningkatnya realisasi investasi;
- 5) Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal;
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat;
- 7) Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan;
- 8) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
- 9) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
- 10) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS;
- 11) Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 12) Menurunkan tingkat pengangguran;
- 13) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi

Tabel 1.12 Hubungan Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Merangin

NO	MISI	TUJUAN	ASARAN
1	2	3	4
1.	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian, Perikanan dan pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri dan Perdagangan Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM Meningkatnya realisasi Investasi Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya Local
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan.	Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan
3.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.	Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Menurunkan tingkat Pengangguran
4.	Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif , bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan



- 4) Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan RKP Tahun 2022 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, maka fokus pembangunan diarahkan kepada Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi, Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial dan Reformasi Sistem Ketahanan Bencana, dengan sasaran dan target yang harus dicapai antara lain:

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,13% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 0,91%
- 2) Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 5,95% tingkat pengangguran terbuka 5,86%
- 3) Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 22,03%, Jawa-Bali 76,44%, Kalimantan 9,09%, Sulawesi 82,88%, Nusa Tenggara 69,46%, Maluku 70,22% dan Papua 61,39%

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, - 21 - menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan

kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

- 3) Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law terutama menerbitkan 2 undang-undang pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
- 4) Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan

- b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - 2) Peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - 3) Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) Peningkatan pemenuhan energi domestic; dan
  - 5) Pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
  - 2) Pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) Penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) Pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) Pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 3) Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian,

- perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
- 4) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - 5) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 6) Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
- 1) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
  - 2) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - 3) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - 4) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - 3) Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
  - 4) Peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha; dan



- 5) Peningkatan nilai tambah usaha social
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital; 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - 5) pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
  - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - 3) pengelolaan impor;
  - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
  - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
  - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan

- 7) peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
  - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
  - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
  - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata;
  - 5) reformasi fiskal; dan
  - 6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

Dengan berpedoman tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2021 tentang **"Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah"**, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 antara lain:

- 1) Pembangunan Ekonomi Daerah; dengan arah kebijakan yaitu :
  - a) Meningkatkan nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana
  - b) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan
  - c) Meningkatkan investasi sektor riil padat karya
- 2) Pembangunan Infrastruktur; dengan arah kebijakan yaitu:
  - a) Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan
  - b) Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak

- c) Meningkatkan rasio elektrifikasi
  - d) Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan
  - e) Meningkatkan infrastruktur penunjang sektor kesehatan
- 3) Peningkatan sumberdaya manusia; dengan arah kebijakan yaitu:
- a) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan Luar Biasa
  - b) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas dan gizi masyarakat
  - c) Mendorong pembangunan gender
  - d) Meningkatkan daya saing tenaga kerja
- 4) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan ketahanan bencana; dengan arah kebijakan yaitu:
- a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
  - b) Penerapan good mining practice
  - c) Pencegahan dan pengendalian bencana alam dan bencana non alam (fokus karhutlah dan pandemi penyakit)
- 5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dengan arah kebijakan yaitu:
- a) Meningkatkan tata kelola layanan publik
  - b) Meningkatkan akuntabilitas
  - c) Meningkatkan kemampuan ASN
  - d) Meningkatkan kamtibmas

Sejalan dengan perubahan Tema Nasional dan tema Provinsi Jambi terkait dengan penanganan Covid-19 Maka tema RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2021 **“Pemulihan Ekonomi berbasis Pertanian dan Pariwisata serta Reformasi Sistem Kesehatan Daerah”**.

Prioritas Kabupaten Merangin Tahun 2021 diselaraskan dengan kebijakan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan nasional antara lain :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi ditengah kondisi ekonomi global

yang berjalan lambat akibat pandemi COVID-19;

- 2) Mempercepat pemulihan dampak Pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antarwilayah;
- 3) Perluasan akses dan ketahanan ekonomi penduduk miskin, rentan dan terdampak Covid-19 terhadap aset produktif;
- 4) Peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, dengan mengutamakan perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja yang terdampak pandemi Covid-19; dan
- 5) Penanggulangan bencana serta kontingensi dalam rangka pemulihan pascapandemi Covid-19.

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Prioritas Kabupaten Merangin Tahun 2021 secara garis besar diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah antara lain:

- 1) Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Pariwisata; dengan fokus Kawasan sentra lumbung beras, Agrowisata/geowisata, Menjaga kualitas dan kontinuitas produksi kopi serta pemasaran, Fasilitasi replanting sawit, Penuntasan sarana dan prasarana pariwisata, serta Pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pengembangan IKM berbasis pada Produk hasil pertanian
- 3) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dengan fokus :
  - a) Akses dan Mutu Pendidikan
  - b) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah antara lain : Penguatan

Germas (promotif dan preventif), Penguatan health security, Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM Kesehatan dan Penanganan Stunting.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2022 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1. Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumber daya Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata dengan Penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan adalah
  - a) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Optimalisasi penerapan teknologi budidaya dan pasca panen tepat guna
    - 2) Peningkatan sarana prasarana budidaya dan pasca panen
    - 3) Pengembangan sumber daya penyuluh dan petani
    - 4) Peningkatan kualitas SDM dalam pengaplikasian Teknologi tepat guna
    - 5) Penyusunan Perda lahan pangan berkelanjutan.

- b) Meningkatkan produksi komoditas, perkebunan dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) peningkatan pemanfaatan bibit unggul komoditas perkebunan
  - 2) Optimalisasi penerapan teknologi budidaya dan pasca panen tepat guna
  - 3) Peningkatan sarana prasarana budidaya dan pasca panen
  - 4) Pengembangan sumber daya penyuluh dan perkebunan
  - 5) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- c) Meningkatkan populasi dan produksi peternakan dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Optimalisasi penerapan teknologi budidaya perikanan tawar
  - 2) Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan kawasan budidaya
  - 3) Upaya perlindungan sumberdaya perikanan.
- d) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Peningkatan nilai tambah dengan memberdayakan petani untuk melakukan pengolahan hasil
  - 2) Pemanfaat inovasi TTG dalam meningkatkan produksi
  - 3) Peningkatan jaringan pemasaran hasil perikanan
- e) Peningkatan industri skala besar dan menengah dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan IKM
  - 2) Mendorong berkembangnya kawasan industri dan pengembangan sentra IKM untuk mendorong kemitraan dan daya saing
  - 3) Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM melalui



pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding

- 4) Fasilitasi legalisasi usaha bagi IKM untuk perlindungan usaha dan persaingan usaha.
- f) Pengembangan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Stabilitasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang, diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representatif
  - 2) Mengembangkan informasi dan jaringan pasar baik tingkat regional, nasional dan internasional
  - 3) Fasilitasi legalisasi usaha dan pengembangan pasar online
  - 4) Promosi penggunaan produk daerah disertai dengan upaya perlindungan.
- g) Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Peningkatan kuantitas, kualitas SDM dan manajemen pegelolaan koperasi
  - 2) Peningkatan iklim usaha UMKM dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru
  - 3) Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif
  - 4) Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha unggulan daerah;
  - 5) Pengembangan kapasitas usaha secara berkelanjutan bagi Koperasi dan UMKM.
- h) Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sarana dan prasarana serta sumberdaya dengan arah kebijakan antara lain :

- 1) Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan
  - 2) Kemudahan pelayanan informasi investasi.
  - i) Meningkatkan pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Pengembangan destinasi Wisata
    - 2) Penerapan strategi pemasaran yang efektif
  - j) Optimalisasi warisan dan nilai budaya lokal dengan arah kebijakan adalah Pelestarian dan pengembangan nilai seni dan budaya lokal, kepurbakalaan dan cagar budaya.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dengan Penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan adalah :
- a) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi yang berkualitas dalam rangka penunjang perekonomian dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya kawasan sentra pengembangan ekonomi
    - 2) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar sektor, antar pemerintah daerah dan pemerintahan atasan
    - 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi khususnya pendukung kawasan lumbung pangan
    - 4) Mengoptimalkan ketersediaan dan perlindungan sumber-sumber air baku.
  - b) Penanganan infrastruktur permukiman yang berkualitas secara terpadu menuju hunian yang layak dan berkelanjutan dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Mengoptimalkan penyediaan jalan lingkungan permukiman
    - 2) Optimalisasi pengelolaan air limbah dan persampahan
    - 3) Penguatan kelembagaan pengelola infrastruktur

permukiman

- 4) Keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman kumuh
  - 5) Mengoptimalkan penyediaan dan distribusi air minum
  - 6) Mendorong penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- c) Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dengan arah kebijakan antara lain :
- 1) Penyediaan dokumen tata ruang
  - 2) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu
  - 3) Melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang
  - 4) Penyediaan data dan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah
  - 5) Pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dengan penjabaran strategi dan arah kebijakan adalah :

- a) Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan arah kebijakan adalah Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- b) Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
  - 2) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat
- c) Meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan dengan arah kebijakan antara lain :

- 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 2) Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan
- 3) Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan
- d) Meningkatkan layanan KB dengan arah kebijakan adalah Peningkatkan kualitas layanan keluarga berencana dan pengguna kontrasepsi.
- e) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan arah kebijakan adalah Peningkatan Kapasitas Kelompok Tribina dan Poktan.
- f) Peningkatan dan Pemerataan kualitas PAUD dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah PAUD.
  - 2) Meningkatkan akreditasi PAUD.
  - 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran PAUD.
- g) Peningkatan dan Pemerataan kualitas pendidikan SD dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SD
  - 2) Meningkatkan akreditasi SD
  - 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran SD
- h) Meningkatkan dan pemerataan kualitas pendidikan SMP dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SMP.
  - 2) Meningkatkan akreditasi SMP.
  - 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran SMP
- i) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan arah kebijakan adalah Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.

- j) Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal dengan arah kebijakan adalah Penjaringan siswa kejar paket.
- k) Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Peningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS
  - 2) Peningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial
- l) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dengan arah kebijakan adalah Penguatan peran perempuan dan kesetaraan gender serta mengoptimalkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan
- m) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan dengan arah kebijakan adalah Pembinaan organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri aktif
- n) Peningkatan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Mengembangkan cadangan pangandan penganekaragaman konsumsi dengan didukung keberadaan lumbung pangan dan pemanfaatan pekarangan
  - 2) Mengembangkan pengawasan keamanan pangan dan sistem distribusi pangan
  - 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang.
- o) meningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Meningkatkan Kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar
  - 2) Memperluas kesempatan kerja formal
  - 3) Menumbuhkan wirausaha baru yang produktif

4. Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani Menuju *World Class Government* dengan penjabaran strategi dan arah kebijakan adalah :
- a) Menyediakan layanan Informasi publik berbasis teknologi informasi dengan arah kebijakan adalah Pengembangan pelayanan publik berbasis TIK, Pengendalian keamanan data dan informasi layanan
  - b) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pada setiap OPD pelayanan dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas data daerah
    - 2) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu
    - 3) Peningkatan Pelayanan Kependudukan
    - 4) Peningkatan penyelenggaraan PATEN
  - c) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
    - 2) Peningkatan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah
    - 3) Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    - 4) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP)
  - d) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan aset daerah dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Peningkatan Penggunaan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah Terintegrasi
    - 2) Peningkatan kinerja Pelayanan Keuangan dan Aset Daerah
    - 3) Optimalisasi Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan dan aset Daerah.
  - e) Peningkatan Kinerja Penyelenggara Tugas Umum Pemerintah dan otonomi daerah dengan arah kebijakan



adalah Peningkatan Sistem laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)

- f. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Balitbang Kabupaten Merangin dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan.
  - 2) peningkatan pelaksanaan inovasi daerah.
- g) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dengan arah kebijakan adalah Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.

#### C. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pada saat penyusunan LPPD Kabupaten Merangin Tahun 2022 laporan tahunan untuk Pemerintah Kabupaten Merangin masih dalam proses dan belum tahap finalisasi.

##### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah Tahun 2020 gubernur dan bupati/walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari *output* kegiatan dan *outcome* program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan
  - 1) SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota.
  - 2) Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a) pendidikan anak usia dini;
    - b) pendidikan dasar; dan
    - c) pendidikan kesetaraan.

- 3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Memperhatikan kebijakan tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memperhatikan kondisi demografi, topografi dan kekhasan Daerah;
- b. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan serta pemenuhan SDM pendidikan;
- c. Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM pendidikan;
- d. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN tahun 2015- 2019; dan
- e. Menganggarkan 20 (dua puluh) persen fungsi pendidikan dari APBD diluar dana transfer daerah.

b. Kesehatan

- 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - d) pelayanan kesehatan balita;
  - e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

- j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotive dan pencegahan/preventif.
- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a) penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
  - b) penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
  - c) ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - d) ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan

- kesehatan ibu bersalin;
- e) bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - f) balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
  - g) usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - h) usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - i) usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - j) penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - k) penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  - l) orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - m) orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  - n) orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

Dalam rangka meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal pada bidang kesehatan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah

daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah Provinsi harus menginternalisasikan SPM Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10 persen (diluar belanja pegawai dan DAK);
- 3) memanfaatkan alokasi anggaran baik APBD dan APBN (DAK) dengan efektif dan efisien;
- 4) membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan baik fisik dan nonfisik; dan
- 5) melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait;
- 2) Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN;
- 3) Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah harus tuntas pada tahun 2019 dalam rangka mencapai *universal health coverage* (UHC) sesuai target nasional; dan

- 4) Bagi Daerah yang memiliki perguruan tinggi kesehatan, agar tetap mengalokasikan anggaran untuk proses belajar mengajar dan kegiatan operasional selama tahun 2019 sampai proses masa transisi selesai.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  - b) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud yaitu setiap Warga Negara.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional, terutama dalam hal ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional (Sumber daya air), yaitu: 1). Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha); 2). Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air



tanah dan rawa (juta ha); 3). Ketahanan air: pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak). Beberapa arah kebijakan yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah antara lain:

- 1) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya;
- 2) terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
- 3) terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi;
- 4) peningkatan ketanguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan
- 5) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Maka dari itu memerhatikan prioritas nasional dan tujuan/sasaran tersebut, hal-hal yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- 1) meningkatnya sumber air baku yang berasal dari waduk dan embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun;
- 2) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
- 3) pembangunan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya;
- 4) rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya;
- 5) rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya;

- 6) revitalisasi danau prioritas;
- 7) operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan bangunan air lainnya;
- 8) pemeliharaan danau prioritas;
- 9) penyediaan sarana prasarana air baku tersebut disinkronkan dengan pengembangan instalasi pengelolaan air dan saluran distribusi hingga ke masyarakat;
- 10) pemenuhan kebutuhan air baku untuk kegiatan irigasi;
- 11) pemenuhan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri dan perkotaan dilakukan sebagai satu kesatuan dengan penyediaan sarana dan prasarana air baku untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat;
- 12) peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir;
- 13) pengelolaan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah sungai;
- 14) pembangunan dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
- 15) pembangunan dan rehabilitasi embung untuk air baku;
- 16) pembangunan dan rehabilitasi unit air baku, meliputi intake dan saluran air baku;
- 17) pembangunan dan rehabilitasi bendungan sebagai sumber air;
- 18) pembangunan dan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak sesuai kewenangan;
- 19) normalisasi sungai dan pembangunan serta rehabilitasi tanggul pengendali banjir;
- 20) pembangunan dan rehabilitasi tebing;
- 21) pembangunan dan rehabilitasi pintu air dan bendung pengendali banjir;

- 22) pembangunan dan rehabilitasi kanal banjir;
- 23) pembangunan dan rehabilitasi stasiun pompa banjir;
- 24) pembangunan dan rehabilitasi polder/kolam retensi;
- 25) pengelolaan drainase, sesuai dengan kewenangan;
- 26) pengembangan *flood forecasting dan warning system* (ffws);
- 27) pembangunan dan rehabilitasi sabo;
- 28) pembangunan dan rehabilitasi dan rehabilitasi check-dam;
- 29) pembangunan dan rehabilitasi *breakwater*;
- 30) pembangunan dan rehabilitasi *seawall*/tanggul laut;
- 31) penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan. Pola dan rencana ini sudah diharmonisasi dengan rtrw provinsi dan rtrw kabupaten/kota pada wilayah sungai tersebut;
- 32) koordinasi antar semua stakeholder pada wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan (misalnya tkpsda);
- 33) pelibatan masyarakat pada wilayah sungai untuk pengelolaan sumber daya air; dan
- 34) pengembangan sistem informasi sumber daya air, termasuk didalamnya mencakup hidrometeorologi dan hidrogeologi.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah

Daerah kabupaten/kota.

- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
  - a) korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
  - b) masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
  - c) korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - d) masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 4) Penerapan Kebijakan dalam Pembangunan Daerah dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat
  - a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni

bagi korban bencana kabupaten/kota;

- b) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan pernyataan kebijakan di atas maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- (1) penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (2) penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- (3) fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- (4) kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
- (5) mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- (6) pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (7) menyusun rencana penyediaan hunian layak atau Dokumen RP3KP;
- (8) mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
- (9) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam

pencapaian prioritas pembangunan nasional tersebut, maka hal-hal yang di perhatikan adalah sebagai berikut:

- (1) penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator: jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (2) penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- (3) fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- (4) kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- (5) kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
- (6) mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- (7) pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- (8) menyusun rencana penyediaan hunian layak atau dokumen RP3KP;
- (9) mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
- (10) Penegakkan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.



## e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan

## Masyarakat

Dalam rangka mendukung prioritas nasional kelima terkait dengan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu, maka sesuai dengan SE Nomor 05.12/7764/SJ, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 84 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat maka perlu dilakukan upaya yaitu dengan pelayanan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Maka beberapa hal yang perlu diselaraskan dan diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) penanganan gangguan tarantibum dan linmas;
- 2) penanganan 1 pintu dan kerjasama dengan dinas sosial;
- 3) pengembangan sistem informasi deteksi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah;
- 4) pengalokasian bimbingan teknis anggota satuan perlindungan masyarakat kabupaten/kota;
- 5) realokasi DAK untuk rehabilitasi dan pembangunan rumah/panti sosial masyarakat PGOT;
- 6) realokasi DAK untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar; dan
- 7) realokasi DAK untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Satpol PP maka perlu dilakukan upaya fasilitasi peningkatan Kapasitas SDM, peningkatan kapasitas PPNS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Pelayanan di bidang rawan bencana juga perlu diperhatikan mengingat bahwa dengan upaya pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bencana dapat menimpa wilayah mereka dan dapat membahayakan keselamatan mereka kemudian pelayanan penyelamatan ini dilakukan untuk mempercepat datangnya bantuan dan pertolongan yang diperlukan. Beberapa upaya diatas dilakukan dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana daerah. Dengan memahami pernyataan di atas dan sebagai tindaklanjut maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- 2) penyusunan kajian risiko bencana;
- 3) penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 4) sosialisasi informasi kemungkinan dampak bencana;
- 5) pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- 6) penyusunan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (RTDK);

- 7) pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipeologi kebakaran (Mitigasi);
- 8) penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran;
- 9) pengendalian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan kebakaran (Pusdalops);
- 10) pembentukan desa tangguh bencana;
- 11) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 12) pembuatan rencana kontijensi;
- 13) pelatihan/simulasi kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat;
- 14) kajian risiko kebakaran dan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
- 15) pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan bencana dan kebakaran;
- 16) inspeksi sistem keselamatan kebakaran;
- 17) penyusunan kebijakan/regulasi tentang bencana dan kebakaran;
- 18) membentuk posko tanggap darurat;
- 19) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 20) evakuasi/pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat penampungan sementara;
- 21) operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran;
- 22) membentuk Poskotis (Pos Komando Teknis);
- 23) kaji cepat/ *Size Up*;
- 24) operasi pemadaman;

- 25) pencarian dan penyelamatan korban kebakaran;
- 26) evakuasi/pemindahan korban kebakaran dari lokasi kebakaran ke tempat aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan;
- 27) pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- 28) penyusunan peta dan kajian risiko bencana;
- 29) pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana;
- 30) pembangunan sistem data informasi kebencanaan daerah;
- 31) sosialisasi kesadaran terhadap bencana;
- 32) gladi dan simulasi kebencanaan;
- 33) diseminasi informasi kebencanaan daerah dan PUSDALOPS;
- 34) integrasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan PUSDALOPS;
- 35) penyediaan layanan komunikasi kedaruratan dan PUSDALOPS;
- 36) penyusunan peta dan kajian risiko bencana;
- 37) penyusunan dan reviu rencana penanggulangan bencana;
- 38) penyusunan rencana kontinjensi;
- 39) penetapan kawasan rawan bencana geologi, wilayah sungai, dan pesisir;
- 40) pembuatan rambu dan papan peringatan bencana;
- 41) pembentukan relawan penanggulangan bencana;
- 42) desa tangguh bencana;
- 43) penyediaan logistik kebencanaan;
- 44) penyediaan peralatan dasar kebencanaan; dan
- 45) pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana.

f. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesejahteraan;
- b) Masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
- c) Kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal; serta
- d) Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.



## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Adapun capaian kinerja makro kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1  
Capaian Kinerja Makro

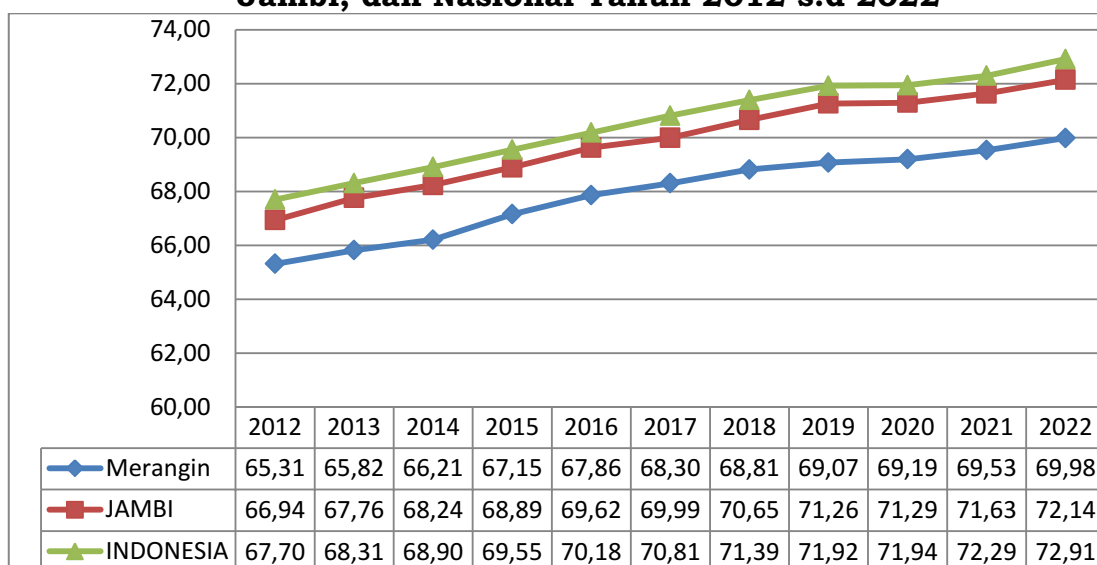
No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,53	69,98	0,06
2.	Angka Kemiskinan	9,11	8,7	-0,45
3.	Angka Pengangguran	4,83	4,69	-0,02
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,09	5,71	0,12
5.	Pendapatan Per kapita	17837,62	20284,06	13,71
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,29	0,35	20,69

Sumber : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2023

### a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan Manusia adalah angka yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. Unsur pembentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Indikator dari bidang kesehatan yaitu usia harapan hidup, indikator dari bidang pendidikan yaitu Usia Harapan Sekolah dan rata-rata lama sekolah, sementara dari bidang perekonomian indikator yang dipergunakan yaitu rata-rata pengeluaran perkapita. Di Provinsi Jambi, dari 11 Kabupaten/Kota yang masuk Kategori Tinggi hanya Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi dan Kabupaten Kerinci, Sedangkan Kabupaten Merangin, Sarolangun, Batang Hari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, dan Bungo masih dalam Kategori Sedang, gambaran IPM Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.

**Gambar 2.1 : Perbandingan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan Nasional Tahun 2012 s.d 2022**



Sumber : Website BPS Provinsi Jambi, 2023



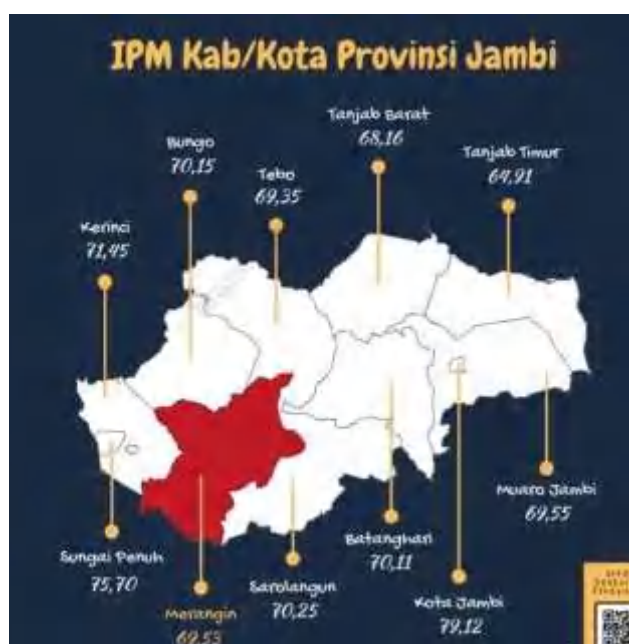
Adapun komponen-komponen untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Usia Harapan Sekolah, Rata-rata lama sekolah, dan Pengeluaran Perkapita Rill disesuaikan. Berikut ini gambaran capaian komponen IPM Kabupaten Merangin dari Tahun 2012 sampai dengan 2022 :

**Tabel 2.2 : Capaian Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kab. Merangin Tahun 2012 s/d 2022**

Uraian	Tahun										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Angka Harapan Hidup	70,90	70,91	70,92	70,92	70,93	70,94	71,04	71,18	71,26	71,29	71,53
Usia Harpan Sekolah	10,91	11,14	11,38	11,83	11,87	11,95	11,97	11,98	11,99	12,04	12,05
Rata-rata Lama Sekolah	6,89	7,00	7,04	7,08	7,44	7,62	7,67	7,68	7,76	7,90	7,91
Pengeluaran Perkapita (Ribuan Rp)	8.954	9.047	9.108	9.456	9.644	9.753	10.133	10.312	10.279	10.380	10.714
<b>IPM</b>	<b>65,31</b>	<b>65,82</b>	<b>66,21</b>	<b>67,15</b>	<b>67,86</b>	<b>68,30</b>	<b>68,81</b>	<b>69,07</b>	<b>69,19</b>	<b>69,53</b>	<b>69,98</b>

Sumber : Website BPS Provinsi Jambi, 2023

**Gambar 2.2 : Perbandingan Capaian IPM se-Provinsi Jambi**



Sumber Data Merangin Dalam Angka 2023

### 1. Rata-rata lama sekolah

Rata rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Untuk menghitung rata-rata lama sekolah dibutuhkan informasi tentang: partisipasi sekolah, jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki, tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki. Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Pada hakekatnya Rata-rata lama sekolah mendorong agar setiap individu untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya melalui belajar pada sekolah formal. Program wajar Dikdas 9 tahun seharusnya ditingkatkan menjadi 12 tahun dengan didukung oleh perluasan sarana dan prasarana sekolah lanjutan untuk memberikan kesempatan pada lulusan SMP melanjutkan sekolahnya dengan biaya yang terjangkau bahkan gratis.

Meningkatkan rata-rata lama sekolah merupakan salah satu langkah strategis dalam mewujudkan anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik pola pikir maupun pola tindaknya. Pada tahun 2022 Indeks rata-rata lama sekolah di Kabupaten Merangin adalah 7,91

### 2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca

dan menulis kalimat sederhana terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Angka Melek Huruf (AMH) dapat digunakan untuk melihat seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya.

Angka melek huruf juga dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

Tingginya persentase angka melek huruf di Kabupaten Merangin dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adanya Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, dengan adanya program tersebut sehingga siswa yang tidak menamatkan pendidikan atau siswa putus sekolah, bisa melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan tersebut.

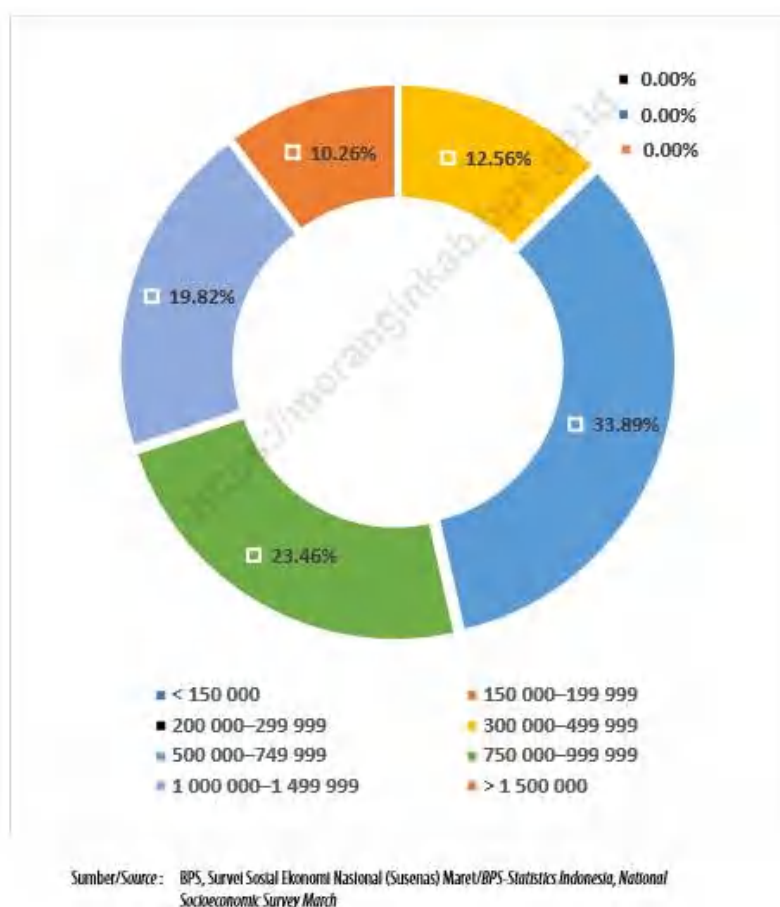
### 3. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak

termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan di Kabupaten Merangin tahun 2021 untuk kelompok makanan adalah Rp665.757 Sedangkan pengeluaran rata-rata perkapita sebulan tahun 2022 untuk kelompok bukan makanan adalah sebanyak Rp662.025

**Gambar 2.3 : Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Merangin, 2022**



**Tabel 2.3 : Analisis Pencapaian Sasaran 6 Meningkatnya Peran Perempuan, Anak Serta Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	87,98	88,14	100	88,25	88,24	99,98	88,37	88,24	99,9	88,59	99,60
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>100,22</b>			<b>100</b>			<b>99,9</b>		

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Sasaran Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan Anak, indikator mencapai target dan. Rata - rata capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sasaran pada tahun 2021 sebesar 99,98% sedangkan realisasi capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 adalah 88,24%.

Indikator ini digunakan Kabupaten Merangin sebagai alat untuk mencapai seberapa majunya pemerintahan yang ditela di capai, World Bank menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Dalam konteks itulah jika Negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender (World Bank, 2001).

IPG mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat sekolah, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila angka IPG sama dengan IPM.

Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan peran serta wanita dalam pembangunan:

1. Kualitas hidup perempuan rendah dan rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan adalah dua tantangan dalam pelaksanaan kesetaraan gender di Indonesia.
2. Belum meratanya pemahaman tentang konsep gender strategi pengarusutamaan dan kesetaraan gender di kalangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta masyarakat karena budaya patriarki, pola pikir tradisional dan interpretasi agama

Solusi hal yang dapat di lakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender.

1. Mengakhiri diskriminasi terhadap semua wanita dan anak perempuan.
2. Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak baik di ranah publik maupun pribadi. Hal ini termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada perempuan dan anak.
3. Melawan pernikahan anak dan tradisi khitan pada perempuan.
4. Meningkatkan pelayanan umum dan kebijakan publik yang lebih pro terhadap perempuan.
5. Memastikan partisipasi penuh dan efektif perempuan dan kesempatan yang sama untuk kepemimpinan di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik.
6. Memastikan akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi.

7. Melakukan reformasi untuk memberi perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk properti, layanan keuangan, warisan dan sumber daya alam lainnya, sesuai dengan undang-undang nasional.
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan peraturan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkat.

**Program dalam mendukung dari Pembangunan gender sebagai berikut:**

1. Program pemusatan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program pengelolaan system data gender dan anak
3. Program pemenuhan hak anak (PHA)

**Table 2.4 : Analisis Pencapaian Sasaran 7 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Pridikat	CC	C	93,66	CC	C	93,66	B	B	100	BB	93,66
	Nilai AKIP	Pridikat	BB	B	94,00	BB	B	94,00	BB	B	94,00	A	94,00
	Opini BPK Terhadap LKD	Pridikat	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	100
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>95,88</b>			<b>95,88</b>			<b>98,00</b>		<b>95,88%</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator Sasaran Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi, hasil capaian indikator untuk indeks Reformasi Birokrasi untuk tahun 2022 dengan prediket B sedangkan Nilai AKIP Kabupaten Merangin pada Prediket B . Sementara itu untuk indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan



daerah dengan prediket Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Indikator sasaran Indeks Reformasi Birokrasi dengan capaian 100 % , indeks AKIP 94,00% dan Opini BPK terhadap LKD sebesar 100% . capaian rata-rata sasaran sebesar 98%.

#### 1. Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Reformasi Birokrasi Kabupaten Merangin Tahun 2022 telah mencapai target yang di tentuka. Kabupaten Merangin telah melakukan perbaikan-perbaikan dari rekomendasi-rekomendasi hasil penilaian RB tahun sebelumnya berupa :

- 1) Melakukan sosialisasi RB kepada Perangkat Daerah (PD), serta membentuk *role model*, agen perubahan, tim, dan rencana aksi RB di setiap PD;
- 2) Melakukan evaluasi kelembagaan secara mandiri mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah dengan hasil peringkat komposit P-4 (Efektif);
- 3) Melakukan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
- 4) Membangun sistem informasi kepegawaian melalui *website* [simpegterpadu.merangin.go.id](http://simpegterpadu.merangin.go.id);
- 5) Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 193/INSP/2022 tentang Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2022;

- 6) Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada sebagian unit layanan utama Pemerintah Kabupaten Merangin secara berkala (semesteran).

## 2. Nilai AKIP

Capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 saat ini belum mencapai target yang di tentukan. Berdasarkan Surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor B/908/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 dimana pada tahun 2022 target yang ditetapkan pada prediket BB dengan hasil capaian Prediket B dengan nilai 69,30. hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik” yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Pemerintah Kabupaten Merangin telah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyempurnaan RPJMD menjadi lebih fokus dan berorientasi hasil;
- 2) Memperbaiki penjenjangan/*cascading* kinerja yang berdasarkan isu strategis, Rencana Strategis (Renstra), serta rencana aksi kinerja sampai ke Perangkat Daerah (PD);
- 3) Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan melakukan pembinaan

dalam rangka menajamkan perencanaan terintegrasi antar perangkat daerah;

- 4) Menyetakati perencanaan terintegrasi lintas sektor dalam rangka menurunkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Merangin
- 5) Penilaian laporan kinerja individu telah digunakan sebagai dasar dalam pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Merangin Nomor 63 Tahun 2022 ttentang Pemberian TPP bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin;
- 6) Melaksanakan evaluasi internal akuntabilitas terhadap seluruh perangkat daerah sejumlah 56 PD oleh Inspektorat.

Kementrian PAN dan RB merekomendasikan beberapa hal dalam implementasi SAKIP tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi orientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan;
- 2) Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan/*cascading* kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, hasil penjenjangan/*cascading* kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;

- 3) Memastikan IKU seluruh PD dilengkapi dengan formulasi perhitungannya dan menjadikan IKU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja;
- 4) Memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja level pimpinan sampai ke individu secara berkala (bulanan/triwulan);
- 5) Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan *reward and punishment*;
- 6) Menyampaikan laporan kinerja pemerintah daerah maupun PD melalui berbagai media sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu, menyampaikan laporan kinerja kepada Menteri PANRB melalui [esr.menpan.go.id](http://esr.menpan.go.id) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014;
- 7) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pemda maupun PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja;
- 8) Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
- 9) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

### 3. Opini BPK Terhadap LKPD

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2021, opini yang diberikan Wajar Tanpa pengecualian.

Pada indikator ini Pemerintah Kabupaten Merangin melakukan perbaikan pada kelemahan – kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan rekomendasi surat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi Tanggal 20 Mei 2022 Nomor 274/S/XVIII.JMB/5/2022 yaitu:

- 1). Memerintahkan kepala SKPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah;
- 3).Melakukan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan Dana Bos;
- 4). Melanjutkan proses penelusuran atas perbedaan pencatatan nilai Aset Tetap Tanah antara DBMD, serta melakukan inventarisasi dan penilaian kembali atas bidang tanah yang tidak diketahui nilainya, melaksanakan persertifikatan tanah, serta mencatat seluruh bidang tanah yang belum dicatat di KIB A dan Neraca Pemerintah kabupaten Merangin; dan
- 5). Melanjutkan proses penelusuran Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan melakukan upaya pengembalian atas kendaraan yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.

#### **b) Persentase Penduduk Miskin**

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin yakni 8,48 % pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin naik menjadi 8,63 % dan

pada tahun 2021 kembali meningkat menjadi 9,11%. Pasca Covid-19 Perekonomian mulai tumbuh dan persentase penduduk miskin tahun 2022 menurun sampai angka 8,70%. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Merangin selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Tabel 2.5 : Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Merangin Tahun 2013 – 2022**

<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH PENDUDUK MISKIN</b>	<b>PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)</b>
1	2	3
2013	33.100	9,35
2014	33.900	9,41
2015	35.777	9,77
2016	36.890	9,91
2017	35.480	9,39
2018	33.945	8,88
2019	32.880	8,48
2020	33.920	8,63
2021	35.440	9,11
2022	34,14	8,70

**Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jambi, 2023**

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

### c) Angka Pengangguran

Pengangguran terbuka terdiri dari mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena mereka tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 2.6 : Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Angkatan Kerja

No	Jenis	2019	2020	2021	2022
1.	Bekerja	186.863	190.739	192.138	193.723
2.	Pengangguran	7140	9747	9752	9.533
3.	Angkatan Kerja	194003	200478	201890	203.256
4.	Bukan Angkatan Kerja	87431	85228	87142	87.142
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka % (TPT)	3,68	4,86	4,83	4,83
6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68,91	70,17	69,85	69,85

Sumber : BPS Provinsi Jambi, 2023

### d) Pertumbuhan Ekonomi

Setelah pandemi Covid-19 pemerintah merasa perlu untuk meningkatkan ekonomi lebih cepat dengan mengeluarkan suatu kebijakan yang efektif, efisien dan tepat guna. Adapun Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan ini direalisasikan bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat karena keduanya berperan strategis menjalankan kebijakan dengan lancar bertujuan memulihkan perekonomian Indonesia.



Pemerintah melakukan kebijakan fiskal dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar menggerakkan kembali usaha para pelaku usaha termasuk UMKM. Kebijakan fiskal mempunyai 3 (tiga) stimulus sebagai pergerakan perubahan, yaitu:

#### 1. Percepatan belanja Pemerintah

Pemerintah melakukan percepatan pencairan belanja modal, mempercepat penunjukan pejabat perbendaharaan negara, melaksanakan tender, mempercepat pencairan belanja bantuan sosial dan tranfer ke dana daerah dan desa. Tujuan percepatan ini mengarahkan agar dapat adaptasi dengan kebiasaan yang baru secara bertahap, menyelesaikan permasalahan yang terjadi pasca pandemi, dan penguatan reformasi untuk keluar dari *middle income trap*.

#### 2. Relaksasi pajak penghasilan

Pemerintah meringankan besaran pajak dengan menanggung pajak penghasilan Pasal 21, pembebasan impor pajak penghasilan yang terdapat pada Pasal 22, pengurangan pajak penghasilan Pasal 25, dan pengembalian PPN dipercepat. Selain relaksasi pajak penghasilan, pemerintah melakukan simplifikasi dan percepatan proses ekspor impor. Percepatan ekspor impor diutamakan untuk pedagang terkemuka, penyederhanaan dana pengurangan pembatasan ekspor dan impor (manufaktur, makanan dan dukungan medis), dan layanan ekspor-impor melalui ekosistem logistik nasional.

3. Pemulihan ekonomi nasional dengan melaksanakan kebijakan Keuangan Negara melalui relaksasi APBN.

Relaksasi APBN mempersiapkan defisit yang dapat melampaui 3 persen dengan tujuan tahun 2023 akan kembali seperti semua ke level maksimal 3 persen. Relaksasi akan berkaitan dengan alokasi belanja antar organisasi, antar fungsi, dan antar program serta mandatory spending. Relaksasi alokasi atau realokasi Belanja Pemerintah Daerah, Pemberian Pinjaman kepada LPS, Penerbitan SUN dan SBSN untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia , BUMN, investor korporasi dan/atau investor ritel. Penggunaan sumber anggaran alternatif antara lain SAL, dana abadi pendidikan, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum.

Berdasarkan Angka Sangat Sementara BPS Kabupaten Merangin, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,09 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 yang mencapai 0,83 persen. Sedangkan pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Merangin mengalami peningkatan kembali yaitu mencapai 5,71 persen. Berikut ini digambarkan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2013 – 2022 pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.7 : Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Merangin Tahun 2013 – 2022**

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Merangin (Persen)									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021**	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,07	6,45	4,53	5,89	4,77	5	3,14	1,74	4,87	6,63
Pertambangan dan Penggalian	1,47	9,51	6,37	4,45	4,68	2,93	3,31	2,43	3,88	10,14
Industri Pengolahan	8,45	5,42	5,6	6,02	5,28	3,6	6,23	-0,8	5,95	4,39
Pengadaan Listrik dan Gas	9,55	9,23	5,39	5,2	7,5	5,5	5,41	5,16	5,19	6,34
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,5	2,79	5,69	5,36	4,16	4,04	1,8	4,67	5,95	3,60
Konstruksi	13,19	7,56	6,76	5,65	5,41	4,78	4,77	0,65	7,11	-0,79
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,12	9,09	7,71	8,32	8,53	7,39	6,32	-3,16	5,63	7,53
Transportasi dan Pergudangan	11,91	13,46	8,79	4,92	6,22	5,24	4,6	-2,45	8,43	11,89
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,69	18,42	8,77	8,92	8,79	5,95	5,68	-5,47	5,6	5,92
Informasi dan Komunikasi	4,42	7,32	8,03	8,6	8,7	5,97	6,1	7,73	2,68	7,07
Jasa Keuangan dan Asuransi	11,81	3,73	3,21	5,27	4,84	1,78	2,41	4,84	5,77	-0,50
Real Estate	6,55	2,57	1,9	2,59	3,25	3,85	6,91	-0,57	4,84	6,56
Jasa Perusahaan	1,36	4,84	3,14	5,61	5,93	5,33	3,96	-4,72	3,6	10,81
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,76	12,69	5,76	5,85	3,26	3,19	2,64	-2,35	0,96	-0,22
Jasa Pendidikan	6,2	2,12	2,53	5,95	1,95	2,09	4,04	2,92	2,98	4,93
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,7	13,65	4,81	7,53	4,85	5,83	7,47	6,37	14,78	-0,28
Jasa lainnya	4,3	5,83	8,87	7,46	7,95	5,34	5,54	-3,28	3,68	7,27
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>6,45</b>	<b>7,13</b>	<b>5,4</b>	<b>6,22</b>	<b>5,39</b>	<b>4,93</b>	<b>4,25</b>	<b>0,83</b>	<b>5,09</b>	<b>5,72</b>

Sumber Data : Kabupaten Merangin Dalam Angka Tahun 2023

\*Angka Sementara

\*\*Angka Sangat Sementara

**e) Pendapatan Per Kapita**

PDRB atas dasar harga berlaku (miliar rupiah) Kabupaten Merangin pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu 20.284,06 dibanding tahun 2021 yang hanya mencapai 17.837,62.

Adapun gambaran nilai PDRB Perkapita Kabupaten Merangin Tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.8 : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Merangin, 2017-2022**

Uraian	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Nilai PDRB (Miliar Rupiah)</b>						
ADHB	13.519	14.453	15.288	16.98,89	17.887	20.284
ADHK	8.947	9.388	9.787	9.869	10.372	10.973

Sumber Data : BPS Kab. Merangin Tahun 2023

**f) Indeks Gini**

Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah. Ketimpangan tersebut tidak hanya terjadi pada lingkup negara, bahkan sampai pada wilayah provinsi atau unit yang lebih rendah sekalipun. Ketimpangan sering menjadi permasalahan yang serius bagi setiap wilayah karena berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat

pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing-masing wilayah.

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Hal ini dapat memicu peningkatan kesenjangan antar kelompok masyarakat di Kabupaten Merangin khususnya dan Provinsi Jambi umumnya. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut:

- $0 < G \leq 0,35$  menunjukkan ketimpangan rendah
- $0,35 < G < 0,50$  menunjukkan ketimpangan sedang
- $G \geq 0,50$  menunjukkan ketimpangan tinggi

Nilai indeks gini Kabupaten Merangin dari tahun 2012 hingga 2022 fluktuatif setiap tahun. Pada tahun 2021 tercatat indeks gini Kabupaten Merangin sebesar 0,29 yang berarti ketimpangan berada pada level rendah. Angka tersebut naik dibanding tahun 2022 dengan indeks gini sebesar 0,35. Hal ini menunjukkan pemerataan pendapatan di Kabupaten Merangin semakin membaik.

Deskripsi data indeks gini Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional selama tahun 2012-2022 disajikan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.9 : Indeks Gini Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2012-2022**

TINGKAT	TAHUN										
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
MERANGIN	0,31	0,33	0,33	0,35	0,32	0,30	0,35	0,29	0,32	0,29	0,35
PROVINSI JAMBI	0,34	0,35	0,33	0,36	0,35	0,33	0,33	0,32	0,31	0,31	0,33
NASIONAL	0,41	0,41	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

### g) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia sama seperti IPM, namun terpilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Dikatakan tidak ada kesenjangan pembangunan apabila nilai IPG mendekati angka 100%. Tahun 2017-2022 capaian IPG Kabupaten Merangin mengalami kenaikan dari 87,64 menjadi 88,24 pada tahun 2021. Rata - rata capaian kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sasaran pada tahun 2021 sebesar 99,98% sedangkan realisasi capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 adalah 88,24%.

**Tabel 2.10 : Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Indonesia Tahun 2017-2022**

No	Provinsi/ Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (%)					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kabupaten Merangin	87,64	88,01	88	88,14	88,24	88,35
2	Provinsi Jambi	88,13	88,44	88,4	88,41	88,62	88,95
3	Indonesia	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

## **2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Setelah Penyebaran Covid-19 dengan cepat ke seluruh dunia dan Indonesia memberikan dampak sosial dan ekonomi yang besar untuk Kabupaten Merangin. Bukan hanya Pemerintah Pusat, namun Pemerintah Daerah harus memikirkan langkah-langkah untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonomi yang mengalami penurunan.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten melaksanakan Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang. Pelaksanaan program dan Kegiatan Pembangunan pada tahun 2022 capaian pelaksanaan program dan kegiatan, serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan pada masing-masing urusan oleh yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Merangin, serta kebijakan strategis pembangunan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merangin dijabarkan berikut ini:



### **2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

Gambaran capaian pelaksanaan pembangunan pada Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan hasil, sesuai dengan Target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja di tuangkan dalam tabel berikut ini:

### **2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil**

Gambaran capaian pelaksanaan pembangunan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan hasil, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja di tuangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 11 : Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	281	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	411	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	75	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada PAUD	934	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	43	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem	13	Dinas Pendidikan	
		Jumlah SD dan SMP Negeri	416	Dinas Pendidikan	

		Terakreditasi			
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	40095	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	36279	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	2927	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	305	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3399	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	3399	Dinas Pendidikan	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	313	Dinas Pendidikan	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	80	Dinas Pendidikan	

		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	599	Dinas Pendidikan	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	221	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1345	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	57	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	310	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	516	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang	0	Dinas Pendidikan	

		memiliki ijazah SMA/ sederajat			
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	18	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3762	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	47	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	47	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	310	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	0	Dinas Pendidikan	
2.	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4	Dinas Kesehatan	

		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	

		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	4391	Dinas Kesehatan	
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	23455	Dinas PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	0	Dinas PUPR	



		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	10651	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	15627	Dinas PUPR	
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	1025	Dinas PUPR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	ada	Dinas PUPR	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	ada	Dinas PUPR	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan		Dinas PUPR	

		Penyelenggaraan SPAM		
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.		Dinas PUPR
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Dinas PUPR
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Dinas PUPR
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Dinas PUPR
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Dinas PUPR
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Dinas PUPR
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Dinas PUPR
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar		Dinas PUPR

		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman		Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman		Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat		Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja		Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja		Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD		Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja		Dinas PUPR	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi		Dinas PUPR	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting		Dinas PUPR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)		Dinas PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)		Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Dinas PUPR	

		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota		Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat		Dinas PUPR	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota		Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun		Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dibangun		Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi		Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi		Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara		Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara		Dinas PUPR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang		Dinas PUPR	

		terlatih di wilayah kabupaten/kota			
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUPR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota		Dinas PUPR	

		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR	

		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Dinas PUPR	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota		Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota		Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota		Dinas PUPR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Dinas PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR	



		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Dinas PUPR	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Dinas perumahan dan Pemukiman	

		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Dinas perumahan dan Pemukiman	

		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah di kab/kota		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit PK RTLH		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tidak layak huni		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Rasio rumah dan KK		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah pembangunan baru		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Dinas perumahan dan Pemukiman	

		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi		Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Dinas perumahan dan Pemukiman	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	11	Satpol PP	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1414	Satpol PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	Satpol PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan	5	Satpol PP	

		gangguan trantibum			
		Tersedianya sarana prasarana minimal	6	Satpol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	9	BPBD	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB		BPBD	
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana		BPBD	

		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana		BPBD	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana		BPBD	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		DAMKAR	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		DAMKAR	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	197	DAMKAR	
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	6	DAMKAR	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		DAMKAR	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor		DAMKAR	

		16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran			
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	30	DAMKAR	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		DAMKAR	
6.	Urusan Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	32	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	1100	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	2	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	42	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	3	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	21	Dinas Sosial PP	

		gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi		dan PA	
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	20	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	59	Dinas Sosial PP dan PA	



		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Ogepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan	0	Dinas Sosial PP	

		gepeng yang dirujuk		dan PA	
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	17	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	17	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	4	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	59	Dinas Sosial PP dan PA	
7.	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja.		DPMPTSP-TK	
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.		DPMPTSP-TK	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster		DPMPTSP-TK	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		DPMPTSP-TK	

		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		DPMPTSP-TK	
		Persentase LPK yang terakreditasi		DPMPTSP-TK	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan		DPMPTSP-TK	
		Jumlah penganggur yang dilatih		DPMPTSP-TK	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan		DPMPTSP-TK	
		Persentase penyerapan lulusan		DPMPTSP-TK	
		Lulusan bersertifikat kompetensi		DPMPTSP-TK	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan		DPMPTSP-TK	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		DPMPTSP-TK	
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas		DPMPTSP-TK	
		Data tingkat produktivitas total		DPMPTSP-TK	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		DPMPTSP-TK	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)		DPMPTSP-TK	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB		DPMPTSP-TK	

		yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan			
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.		DPMPTSP-TK	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan		DPMPTSP-TK	
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih		DPMPTSP-TK	
		Jumlah mogok kerja		DPMPTSP-TK	
		Jumlah penutupan perusahaan		DPMPTSP-TK	
		Jumlah perselisihan kepentingan		DPMPTSP-TK	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		DPMPTSP-TK	
		Jumlah perselisihan PHK		DPMPTSP-TK	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		DPMPTSP-TK	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		DPMPTSP-TK	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		DPMPTSP-TK	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui		DPMPTSP-TK	

		Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial			
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		DPMPTSP-TK	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		DPMPTSP-TK	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		DPMPTSP-TK	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota		DPMPTSP-TK	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		DPMPTSP-TK	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		DPMPTSP-TK	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.		DPMPTSP-TK	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		DPMPTSP-TK	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		DPMPTSP-TK	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		DPMPTSP-TK	

		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepelangan		DPMPTSP-TK	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja		DPMPTSP-TK	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya		DPMPTSP-TK	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		DPMPTSP-TK	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	29	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	3	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1	Dinsos PP dan PA	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	33	Dinsos PP dan PA	

		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	10	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	2	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1	Dinsos PP dan PA	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1	Dinsos PP dan PA	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	34	Dinsos PP dan PA	
9.	Pangan	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk	0	Dinas Pertanian	

		penyimpanan cadangan makanan			
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	0	Dinas Pertanian	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	0	Dinas Pertanian	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	2	Dinas Pertanian	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1	Dinas Pertanian	
		Tertanganinya kerawanan pangan	1	Dinas Pertanian	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	Dinas Pertanian	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	6	Dinas Pertanian	
10.	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		Badan Pertanahan Nasional	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee.		Badan Pertanahan Nasional	
		Dokumen Izin membuka tanah		Badan Pertanahan Nasional	



		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota		Badan Pertanahan Nasional	
11.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan Provinsi terhadap indeks kualitas air (IKA)	53,33	Dinas Lingkungan Hidup	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,5	Dinas Lingkungan Hidup	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	55,62	Dinas Lingkungan Hidup	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	35828,4	Dinas Lingkungan Hidup	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	4	Dinas Lingkungan Hidup	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	3	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota		Dinas Lingkungan Hidup	

		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat		Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	3	Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	87	Dukcapil	
		Penerbitan akta perceraian	1	Dukcapil	
		Penerbitan akta kematian	1233	Dukcapil	
		Penyajian data kependudukan	262575	Dukcapil	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	102	PMD	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	38	PMD	

		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	215	PMD	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	211	PMD	
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Dinas PPKB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	73.697	Dinas PPKB	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)		Dinas PPKB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)		Dinas PPKB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	24	Dinas PPKB	
		Persentase Fasilitasi Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	100%	Dinas PPKB	

		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	20,32%	Dinas PPKB	
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif		Dinas PPKB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	83,53%	Dinas PPKB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		Dinas PPKB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	2.789	Dinas PPKB	
15.	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C		Dinas Perhubungan	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	6.503	Dinas Perhubungan	
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi		Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota		Dinas Perhubungan	
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas		Dinas Kominfo	

		Kominfo			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo		Dinas Kominfo	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Dinas Kominfo	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015		Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar		Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Dinas Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi		Dinas Kominfo	

		pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik		Dinas Kominfo	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Dinas Kominfo	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah		Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah		Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah		Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)		Dinas Kominfo	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai		Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city		Dinas Kominfo	
		Persentase ASN pengelola TIK yang		Dinas Kominfo	

		tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo			
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Dinas Kominfo	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota		Dinas Kominfo	
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)		Dinas Kominfo	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan		Dinas Kominfo	
17.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah		DKUKMPP	

		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan		DKUKMPP	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk		DKUKMPP	



		koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota		DKUKMPP	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro		DKUKMPP	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)		DKUKMPP	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra		DKUKMPP	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi		DKUKMPP	

		dan sertifikasi produk usaha			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran		DKUKMPP	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan		DKUKMPP	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan		DKUKMPP	
18.	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota		DPMPTSP-TK	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal		DPMPTSP-TK	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		DPMPTSP-TK	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		DPMPTSP-TK	
		Kegiatan pameran penanaman modal		DPMPTSP-TK	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		DPMPTSP-TK	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		DPMPTSP-TK	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		DPMPTSP-TK	
		Laporan realisasi penanaman modal		DPMPTSP-TK	

		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		DPMPTSP-TK	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		DPMPTSP-TK	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota		DPMPTSP-TK	
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Disparpora	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Disparpora	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda		Disparpora	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Disparpora	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Disparpora	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Disparpora	
20.	Statistik	Tersedianya buku profil daerah		Badan Pusat Statistik	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Badan Pusat Statistik	

		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Badan Pusat Statistik	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		Badan Pusat Statistik	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS		Badan Pusat Statistik	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik		Badan Pusat Statistik	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik		Badan Pusat Statistik	
21.	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan		Dinas Kominfo	
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah		Dinas Kominfo	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan		Dinas Kominfo	

		resiko kategori rendah			
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan		Dinas Kominfo	
22.	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23.	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,06	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	25	Dinas Perpustakaan dan	

				Kearsipan	
		Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat	42,45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan
24.	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan

		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Surat Keterangan
25.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	1820	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Surat Keterangan
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	Dinas Kelautan dan Perikanan	Surat Keterangan
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	2320	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	4416000	Dinas Kelautan dan Perikanan	

26.	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi		Disparpora	
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Disparpora	
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota		Disparpora	
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan		Disparpora	
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri		Disparpora	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		Disparpora	
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		Disparpora	
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		Disparpora	
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		Disparpora	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		Disparpora	
27.	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	10	Dinas Pertanian	
		Prasarana pertanian yang digunakan	6	Dinas Pertanian	
		Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian	
		Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Pertanian	

		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	Dinas Pertanian	
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	Dinas Pertanian	
28.	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0	-	
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0	-	
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0	-	
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0	-	
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0	-	
30.	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	1271	DKUKMPP	
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0	DKUKMPP	
		Persentase penerbitan TDG	12	DKUKMPP	
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	36	DKUKMPP	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0	DKUKMPP	
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan	0	DKUKMPP	

		pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota			
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0	DKUKMPP	
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100	DKUKMPP	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	100	DKUKMPP	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	10842	DKUKMPP	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	1236	DKUKMPP	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0	DKUKMPP	
31.	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	0	DKUKMPP	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0	DKUKMPP	

		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0	DKUKMPP	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasanindustri di kab/kota	0	DKUKMPP	
32.	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	-	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	-	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	-	

Tabel 2.12 : Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	100	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	Dinas Pendidikan	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang &nbsp; berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	7.484	Dinas Pendidikan	
2.	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,109	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Dinas Kesehatan	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	87,374	Dinas	







Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | **2022**

		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas PUPR	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	71,896	Dinas PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	Dinas PUPR	Surat Keterangan
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0	Dinas PUPR	Surat Keterangan
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Surat Keterangan
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Surat Keterangan
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Surat Keterangan
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Surat Keterangan
		Jumlah perumahan yang sudah	0	Dinas	Surat

		dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		Perumahan dan Pemukiman	Keterangan
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	78,571	Satpol PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	33,333	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Damkar	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	Damkar	
6.	Sosial	&nbsp;Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	3,818	Dinas Sosial PP dan PA	

		(Indikator SPM)			
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial PP dan PA	
7.	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	68	Dinas PTSP dan Naker	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,394	Dinas PTSP dan Naker	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	9,309	Dinas PTSP dan Naker	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	0	Dinas PTSP dan Naker	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	39,423	Dinas PTSP dan Naker	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	94,746	Dinas Sosial PP dan PA	
		Persentase anak korban kekerasan	428154,545	Dinas Sosial PP	



				Pertanahan Nasional	
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Badan Pertanahan Nasional	
11.	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	66,53	Dinas Lingkungan Hidup	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	67,216	Dinas Lingkungan Hidup	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,773	Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	97,489	Dinas Dukcapil	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	42,478	Dinas Dukcapil	

		Kepemilikan akta kelahiran	99,702	Dinas Dukcapil	
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	1,786	Dinas Dukcapil	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	6360	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	76,303	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga	

				Berencana	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	30,506	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
15.	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	100	Dinas Perhubungan	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	9,25	Dinas Perhubungan	
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Keterangan
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	Surat Keterangan





		dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		Statistik	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	21,429	Badan Pusat Statistik	
21.	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,026	Dinas Komunikasi dan Informatika	
22.	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya &nbsp; &nbsp;	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
23.	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
24.	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	65	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



				Pemuda dan Olahraga	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Surat Keterangan
27.	Pertanian	Produktivitas&nbsp; pertanian per hektar per tahunProduktivitas&nbsp; pertanian per tahun &nbsp;	465,899	Dinas Pertanian	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	23,746	Dinas Pertanian	
28.	Kehutanan		0	-	Kewenangan Provinsi
29.	Energi Sumber Daya Miniral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	-	Kewenangan Provinsi
30.	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100	DKUKMPP	



		dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota  			Keterangan
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0		Surat Keterangan
32.	Transmigrasi		0	-	Kewenangan Provinsi
33.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,837	BPKAD	
		Rasio PAD	10,661	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)  	3	BPKAD	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  	3	BPKAD	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	59,105	BPKAD	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2022

		Opini Laporan Keuangan	6	Inspektorat	
34.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.&nbsp;   yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif &nbsp;   &nbsp;	5,092	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan &nbsp;   &nbsp;	27,638	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	95,571	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
35.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)&nbsp;  &nbsp;   &nbsp;   &nbsp;	372,201	BKPSDMD	

		&nbsp;			
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) &nbsp;	22,153	BKPSDMD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)&nbsp;	44,662	BKPSDMD	
36.	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD &nbsp;	5.7188	BPKAD	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD &nbsp;	17,0311	BPKAD	
		Manajemen Aset &nbsp;	3	BPKAD	



		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya  &nbsp; &nbsp;	5,253	BPKAD	
37.	Transparansi dan Partisipasi publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) &nbsp; &nbsp;	57,143	Dinas Kominfo	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;	13,913	Dinas Kominfo	

Adapun uraian capaian dari pelaksanaan program dan Kegiatan pada kinerja kunci hasil dapat dijabarkan berikut ini:

### **A. Urusan Pendidikan**

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebut bahwa pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Itu artinya kewenangan urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Persoalan pendidikan yang terjadi di daerah dapat diselesaikan melalui pemerintah daerah.

Kewenangan urusan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini ada enam hal yang terbagi kewenangannya di bidang pendidikan. Keenam hal itu adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra. Khusus untuk akreditasi, kewenangan hanya ada di pemerintah pusat

Selanjutnya Urusan Pendidikan termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Lebih detail berdasarkan undang-undang tersebut diatas, urusan pendidikan anak usia dini dan nonformal (PAUDNI) serta pendidikan dasar (SD dan SMP) menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kemudian urusan pendidikan menengah (SMA dan SMK) dan pendidikan khusus menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Kemudian gambaran capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin antara lain:

- 1) Perkembangan Capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) berdasarkan jenjang pendidikan Tahun 2017 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.13 : Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Merangin Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Merangin Tahun 2017 s/d 2022**

Jenjang Pendidikan	APK					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	111,52	115,23	114,49	112,78	110,92	110,58
SMP/Mts	92,55	84,81	87,78	88,68	87,16	91,03
SMA/SMK/MA	67,44	60,84	64,12	65,10	70,13	68,66
Jenjang Pendidikan	APM					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SD/MI	99,64	99,59	99,52	99,60	99,43	98,51
SMP/Mts	78,42	78,02	77,46	76,81	76,04	76,25
SMA/SMK/MA	46,09	48,99	49,6	49,12	49,88	50,72

Sumber : Kabupaten Merangin Dalam Angka, 2023

- 2) Capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.14 : Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Merangin Berdasarkan Tingkatan Usia di Kabupaten Merangin Tahun 2017 s/d 2021**

Kelompok Umur Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
07-12	99,64	99,59	99,52	99,60	99,43	98,32
13-15	94,09	94,15	94,82	94,55	94,15	96,30
16-18	65,84	60,52	61,05	60,22	60,39	Belum ada data

Sumber : BPS Kab. Merangin, 2023

- 3) Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung proses belajar-mengajar. Sampai dengan tahun ajaran 2021/2022 gambaran sarana dan prasarana pendidikan, Guru, dan Murid di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada Tabel Berikut ini:

**Tabel 2.15 : Jumlah Sekolah, Guru, Murid Sarana dan Prasarana Pendidikan yang ada di Kabupaten Merangin Tahun Ajaran 2021/2022 di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Ket
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Taman Kanak-Kanak</b>	<b>198</b>	<b>603</b>	<b>6.234</b>	
	- TK Negeri	4	45	414	
	- TK Swasta	194	569	5.820	
<b>2.</b>	<b>Sekolah Dasar</b>	<b>328</b>	<b>3.924</b>	<b>42.464</b>	
	- SD Negeri	313	3.775	40.545	
	- SD Swasta	14	149	1.919	
	- SDLB	1	....	.....	
<b>3.</b>	<b>SMP</b>	<b>91</b>	<b>1.380</b>	<b>10.227</b>	
	- SMP Negeri	80	1.288	9.124	
	- SMP Swasta	11	92	1.103	
<b>4.</b>	<b>SMA</b>	<b>43</b>	<b>1.074</b>	<b>12.811</b>	
	- SMA Negeri	20	551	7.070	
	- SMA Swasta	3	19	194	
	- SMK Negeri	15	456	5.075	
	- SMK Swasta	5	48	472	

Sumber : Kabupaten Merangin Dalam Angka (BPS Kab. Merangin) Tahun 2023

- 4) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional

Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Sebagai institusi yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Mendiknas, BAN-S/M bertugas merumuskan kebijakan operasional, melakukan sosialisasi kebijakan dan melaksanakan akreditasi sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan akreditasi sekolah/ madrasah, BAN-S/M dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) yang dibentuk oleh Gubernur. Sampai dengan Tahun 2021 Capaian Sekolah Dasar Sederajat dan SMP Sederajat yang telah terakreditasi di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.16 : Capaian SD Sederajat dan SMP Sederajat Terakreditasi di Kabupaten Merangin Sampai dengan Tahun 2022**

NO	Jenjang Sekolah	Jumlah Sekolah	Peringkat Sekolah Terakreditasi (Jumlah)				% Akreditasi
			A	B	C	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (7/3*100)
1	SD/MI	349	7	179	131	317	90,83
2	SMP/MT	130	15	31	42	88	67,69
	<b>JUMLAH</b>	<b>479</b>	<b>22</b>	<b>210</b>	<b>173</b>	<b>405</b>	<b>84,55</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Merangin Tahun 2023

- 5) Sebagai bentuk upaya yang peningkatan mutu dan aksesibilitas pendidikan dasar tidak terlepas dari penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk Penyediaan Sarana dan prasarana Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Merangin Pada Tahun 2018 S/D 2022 yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.17 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD dari Tahun 2018 s/d 2022**

No	Program/Kegiatan	Tahun (unit)					Jlh
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ruang Kelas Baru (RKB)	23	49	25	3	11	100
2	Unit Sekolah Baru (USB)	-	-	-	-	-	-
3	Perpustakaan	-	3	7	3	7	13
4	REHAB	41	129	60	126	11	356
5	LABOR	-	-	-	3	13	3
6	UKS	-	-	11	4	12	15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2023

6) Sedangkan untuk penyediaan Sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Merangin Pada Tahun 2018 S/D 2022 yang telah dilaksanakan. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.18 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP dari Tahun 2018 s/d 2022**

No	Program/Kegiatan	Tahun (unit)					Jumlah
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ruang Kelas Baru (RKB)	9	2	27	-	-	38
2	Satap	-	-	-	-	-	-
3	Unit Sekolah Baru (USB)	-	-	-	-	-	-
4	Perpustakaan	-	2	6	-	-	8
5	Lab IPA	6	1	3	-	6	16
6	Buku Perpustakaan	-	11	-	-	-	11
7	Alat IPA	-	4	8	8	8	28
8	Alat Bahasa	-	-	-	-	-	-
9	Alat Peraga	-	4	12	4	-	30
10	Rehap	25	27	21	32	7	112

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2023

7) Untuk peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sampai dengan tahun 2022 jumlah guru di

Kabupaten Merangin berdasarkan status kepegawaian sampai dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 2.19 : Jumlah Guru di Kabupaten Merangin Menurut Status Kepegawaian Sampai Dengan Tahun 2022**

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	2	3	4	5
1	TK	72	683	755
2	SD	1.953	1.971	3924
3	SMP	553	827	1380
<b>Jumlah</b>		<b>2.578</b>	<b>3.481</b>	<b>6.059</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Merangin Tahun 2023

Masih banyaknya Tenaga Pengajar dengan status Non PNS ini akan berdampak pada kualitas dan mutu tenaga pengajar di Kabupaten Merangin. Sedangkan untuk melihat gambaran jumlah guru di Kabupaten Merangin berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.20 : Jumlah Guru di Kabupaten Merangin Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan tahun 2022**

No	Tingkat Sekolah	Tingkat Pendidikan (Orang)					%	
		Belum S.1/D.IV	S.1/D.IV	S2	S3	Jumlah (orang)	Belum S.1/D.IV	Sudah S.1/D.IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	TK	451	143	0	0	594	75,93%	24,07%
2	SD	359	2.534	7	0	2.900	12,38%	87,38%
3	SMP	48	1.038	22	0	1.108	4,33%	93,68%
Jumlah								

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2023

Sedangkan terkait Sertifikasi guru, yang merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sertifikat ini juga tidak langsung diberikan, melainkan harus melalui beberapa uji kompetensi dan tahapan sebelumnya. Sertifikasi guru menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik (guru) di dalam mekanisme teknis dan diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 jumlah guru dan Pengawas yang telah Sertifikasi dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 2.21 : Jumlah Guru Yang Sertifikasi Sejak Tahun 2016-2022**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	TK	46 Orang
2	SD	1.257 Orang
3	SMP	340 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>1.643 Orang</b>

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2023

## B. Urusan Kesehatan

Penanganan pembangunan urusan Kesehatan selain menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. penanganannya juga dilakukan pelaku pembangunan Kesehatan lainnya. baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonel Abundjani yang merupakan institusi lainnya yang strategis dan berkaitan langsung dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan terhadap urusan kesehatan dapat dilihat pada uraian berikut ini:

- 1) Gambaran tenaga personil kesehatan di Kabupaten Merangin Pada Tahun 2021 dan tahun 2022 tergambar pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.22 : Perkembangan Personil Ketenagaan Kesehatan di Kabupaten Merangin Tahun 2022 dan 2022**

No	Jenis Pendidikan	Jenis Kepegawaian			Perekembangan (%)
		2020	2021	2022	
1	2	3	4		5
1	Dokter Umum	54	60	82	11,11
2	Dokter Gigi	12	18	18	50,00
3	Farmasi/S1/Apt	49	53	69	8,16
4	Perawat	478	474	577	(0,84)
5	Bidan	830	684	729	(17,59)
6	Kesmas/S2 Kesmas	211	98	200	(53,55)
7	Perawat Gigi	29	26	34	(10,34)
8	Gizi	21	31	22	47,62
9	Sanitasi	30	34	34	13,33
10	Teknik Medik	34	36	98	5,88
11	LCPK	7	7	8	-
12	Non Kesehatan/CS Puskesmas	96	56	213	(41,67)
13	Analisis Kesehatan	40	43	19	7,50
	<b>Jumlah</b>	<b>1.891</b>	<b>1.620</b>	<b>2.103</b>	(14,33)

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2022

- 2) Perkembangan jumlah pelayanan kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.23 : Perkembangan Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi di Kabupaten Merangin Tahun 2022**

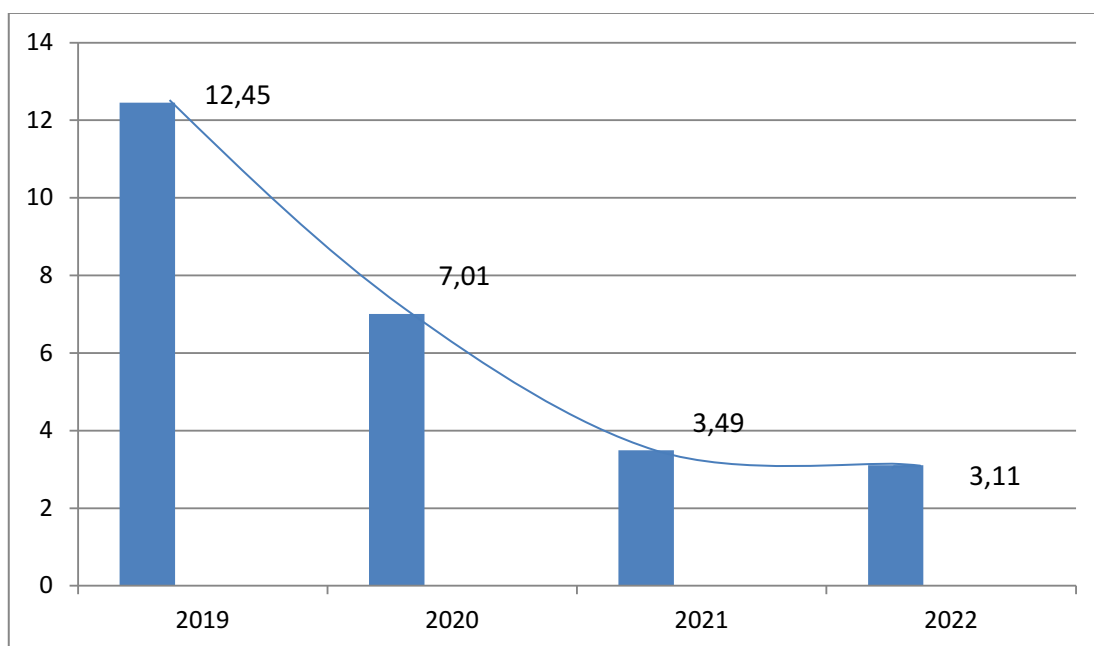
No	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	
1.	Kematian Ibu	5	8	
2.	Kematian Neonatal (bayi umur 0-28 hari)	36	43	
3.	Kematian Bayi (umur 29 hari-12 bulan)	4	45	
	<b>Jumlah</b>	<b>45</b>	<b>96</b>	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2022

- 3) Kemudian terkait pelaksanaan Strategi Nasional Penanggulangan Stunting, yang merupakan prioritas pembangunan nasional. Penanggulangan stunting

diharapkan seluruh daerah menggunakan sumberdaya yang dimiliki dapat dimobilisasi untuk pencegahan stunting. Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting. Pemerintah Kabupaten Merangin secara bertahap melaksanakan program percepatan pencegahan stunting, pada tahun 2021 telah ditetapkan 19 desa menjadi Desa Lokus Stunting. Adapun gambaran capaian penurunan *prevalensi* stunting di Kabupaten merangin dapat dilihat pada table berikut ini

**Gambar 2.24 : Prevalensi stunting Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022**



Sumber : Analisis Publikasi Stunting Kabupaten Merangin Tahun 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase anak stunting di Kabupaten Merangin. Tahun 2020 tercatat sebanyak 7,01% pada Tahun 2021 terjadi

penurunan sebesar 3,49% dan pada Tahun 2022 menjadi 3,11%. Penurunan signifikan terjadi di Kecamatan Muara Siau, Pamenang Barat, Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Pamenang, Renah Pamenang, Pamenang Selatan, Bangko, Bangko Barat, Sungai Manau, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu, Tabir Ulu, Tabir Selatan, dan Tabir Iilir.

- 4) Sampai dengan tahun 2022 jumlah sarana Pelayanan Kesehatan Puskesmas sebanyak 27 Puskesmas yang terdiri dari 15 Puskesmas Rawat Inap dan 12 Non Rawat Inap. Untuk lebih jelasnya Jumlah Puskesmas berdasarkan wilayah pelayanan tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.25 : Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Merangin Tahun 2021 dan 2022**

NO	JENIS SARANA KESEHATAN	JUMLAH 2021	JUMLAH 2022
1	2	3	4
1.	Rs Pemerintah (RSUD)	1	1
2.	Rs Swasta	3	3
3.	Puskesmas Non Rawat Inap	12	12
4.	Puskesmas Rawat Inap	15	15
5.	Puskesmas Mampu PONED	13	13
6.	Rumah Bersalin	0	0
7.	Puskesmas Keliling	25	25
8.	Puskesmas Pembantu	86	102
9.	Laboratorium Kesehatan	1	1
10.	Laboratorium Swasta	1	1
11.	Praktek Dokter	101	77
12.	Praktek Dokter Gigi	40	16
13.	Praktek Bidan Mandiri	44	35
14.	Prektek Pengobatan Tradisional BATRAMemiliki SPTPA atau SITP	1230	1230
15.	Jumlah BATRA memiliki SPTPA atau SITP	76	76
16.	Klinik Pratama	14	14
17.	Klinik Utama	1	2
18.	Apotek	38	48
19.	Toko Obat		30

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2023

- 5) Sedangkan dalam upaya Penguatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di Kabupaten

Merangin, yang merupakan salah satu wujud nyata peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Kondisi ini ternyata mampu memacu munculnya berbagai bentuk UKBM lainnya seperti Polindes, Posbindu, Posbindu Lansia serta Poskestren. Sampai dengan tahun 2021 Jumlah Sarana Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.26 : Jumlah Sarana UKBM Kabupaten Merangin Tahun 2022**

NO	JENIS SARANA KESEHATAN	2021	2022	Ket
1	2	3	4	5
1.	Posyandu	424	431	
2.	Poskesdes/ Polindes	103/ 59	105/60	
3.	Posbindu Lansia	164	163	
4.	Posbindu	201	209	
5.	Poskestren	59	59	

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2022

- 6) Sebagai upaya implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dalam rangka untuk peningkatan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau masyarakat di Kabupaten Merangin. telah disusun Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan yang merupakan tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah. Adapun capaian indikator kinerja berdasarkan SPM Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.27 : Pencapaian Indikator Kinerja Berdasarkan SPM Tahun 2022**

NO	INDIKATOR SPM	ANGKA ABSOLUT				CAPAIAN		TARGET (%)	
		PEMBILANG		PENYEBUT		2021	2022	2021	2022
		2021	2022	2021	2022				
<b>I</b>	<b>1</b> % Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	6634	6215	7781	7440	85.3%	84.8%	100%	100%
	<b>2</b> % Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	5411	5860	7354	7025	73.6%	73.6%	100%	100%
	<b>3</b> % Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	6644	5854	7316	7009	90.8%	90.5%	100%	100%
	<b>4</b> % Cakupan pelayanan kesehatan balita	23626	21364	26055	27944	90.7%	86.6%	100%	100%
	<b>5</b> %Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	10593	10583	11520	11520	92%	92.4%	100%	100%
	<b>6</b> %Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	143527	28309	214457	29002	66.9%	99.5%	100%	100%
	%Cakupan pelayanan kesehatan								

<b>7</b>	usia lanjut	49868	160876	54448	217365	91.6%	74.01%	100%	100%	
<b>8</b>	%Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	46980	51974	72318	51974	65%	74.8%	100%	100%	
<b>9</b>	%Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus (DM)	2883	2766	2994	2812	96.3%	98.4%	100%	100%	
<b>10</b>	%Cakupan pelayanan kesehatan dengan gangguan jiwa berat	457	501	507	511	90.1%	98%	100%	100%	
<b>11</b>	%Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	1928	3595	2922	3595	66%	97%	100%	100%	
<b>12</b>	%Cakupan pelayanan kesehatan yang terinfeksi HIV	5331	4040	7918	7926	67.3%	55.4%	100%	100%	
CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN		303882	301937	415590	374123	73.12%	80.71%	100%	100%	100%

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin Tahun 2022

- 7) Selain Perangkat Daerah Dinas Kesehatan pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan juga oleh Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kolonel Abundjani Bangko. Keberhasilan dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit. yang paling utama adalah dukungan medis.

paramedis dan non medis yang ada di dalamnya. Untuk melihat perkembangan terhadap aparatur pelayan kesehatan di RSUD Kolonel Abundjani Bangko dapat digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.28 Kondisi Pegawai RSUD Kol. Abundjani Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018 s/d 2022**

No	Jenis Ketenagaan	Jenis Pendidikan	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah 2020	Jumlah 2021	Jumlah 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Medis	Dokter Spesialis	17	20	22	24	
2.	Medis	Dokter Umum	24	26	25	27	
3.	Medis	Dokter Gigi	5	5	5	6	
4.	Farmasi	Apoteker	12	15	15	15	
5.	Farmasi	S.I Farmasi	6	6	7	10	
6.	Farmasi	D.III Farmasi	10	11	10	12	
7.	Farmasi	Ass. Apoteker	2	4	6	2	
8.	Farmasi	D 1 Manajemen Farmasi				1	
9.	Keperawatan	Ners	38	50	54	62	
10.	Keperawatan	S 1 Keperawatan	14	17	17	17	
11.	Keperawatan	D.III Keperawatan	140	130	123	120	
12.	Keperawatan	SPK / SPKU	20	15	14	13	
13.	Kebidanan	D.IV Kebidanan	9	15	16	18	
14.	Kebidanan	D III Kebidanan	127	121	115	111	
15.	Kebidanan	D.I Kebidanan	2	2	2	2	
16.	Kesmas	S 1 Kesmas	32	38	38	43	
17.	KESMAS	Pasca Sarjana	6	5	5	5	
18.	Perw. Gigi	D. IV Kesehatan Gigi	2	2	2	2	
19.	PERW. GIGI	D III Kesehatan Gigi	2	3	2	4	
20.	PERW. GIGI	SPRG	3	3	3	2	
21.	Gizi	D Iv / S1 Gizi	2	4	4	4	
22.	Gizi	D. III Gizi	7	6	6	6	
23.	Teknis Medis / Fisik	S.I dan DIII Analisis	16	24	24	24	
24.	Teknis Medis / Fisik	SMAK / SAKMA	4	4	4	3	
25.	Teknis Medis / Fisik	Teknik Elektro	-	2	2	2	
26.	Teknis Medis / Fisik	D. IV Radiologi	2	2	3	1	
27.	Teknis Medis / Fisik	DIII Radiologi	8	11	13	15	
28.	Teknis Medis / Fisik	Penata Anestesi/Perawat Anestesi	7	4	3	3	
29.	Teknis Medis / Fisik	Fisio Terapis	5	7	8	8	
30.	Teknis Medis / Fisik	Reflaksionis Opt	1	1	1	1	
31.	Teknis Medis / Fisik	Medical Record	4	4	4	4	

No	Jenis Ketenagaan	Jenis Pendidikan	Jumlah 2018	Jumlah 2019	Jumlah 2020	Jumlah 2021	Jumlah 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
32.	Teknis Medis / Fisik	D.I Emergency	3	1	1	1	
33.	Teknis Medis / Fisik	D IV Akupuntur				1	
34.	Non Kesehatan	LCPK	1	1	1	1	
35.	Non Kesehatan	S2 (Pasca Sarjana)	-	-	1	1	
36.	Non Kesehatan	S 1	26	28	27	29	
37.	Non Kesehatan	D IV				1	
38.	Non Kesehatan	D III	5	6	6	6	
39.	Non Kesehatan	SLTP / SLTA / SD	71	72	69	76	
40.	Non Kesehatan	S1 Biologi/Niomedik	-	-	-	-	
41.	Teknis Medis / Fisik	DIII Kesling	6	6	7	7	
42.	Non Kesehatan	Psikolog				2	
<b>JUMLAH</b>			<b>639</b>	<b>675</b>	<b>666</b>	<b>693</b>	

Sumber : RSUD Kolonel Abundjani Tahun 2023

- 8) Selain dalam meningkatkan kualitas tenaga medis, Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2020 dalam meningkatkan jasa pelayanan kesehatan rumah sakit, secara internal dilakukan pembenahan dengan meningkatkan kebutuhan dasar pelayanan agar dapat memberikan pelayanan prima. Adapun pembenahan dalam bentuk Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit yang akan menunjang pelayanan yang berkualitas meningkatkan SDM sesuai dengan Target.
- 9) Capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan pada RSUD Kol. Abundjani Bangko. dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara medis pada gambaran kunjungan pasien yakni Kunjungan IGD Rawat Jalan. dan Rawat Inap pada RSUD Kol. Abundjani Bangko dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

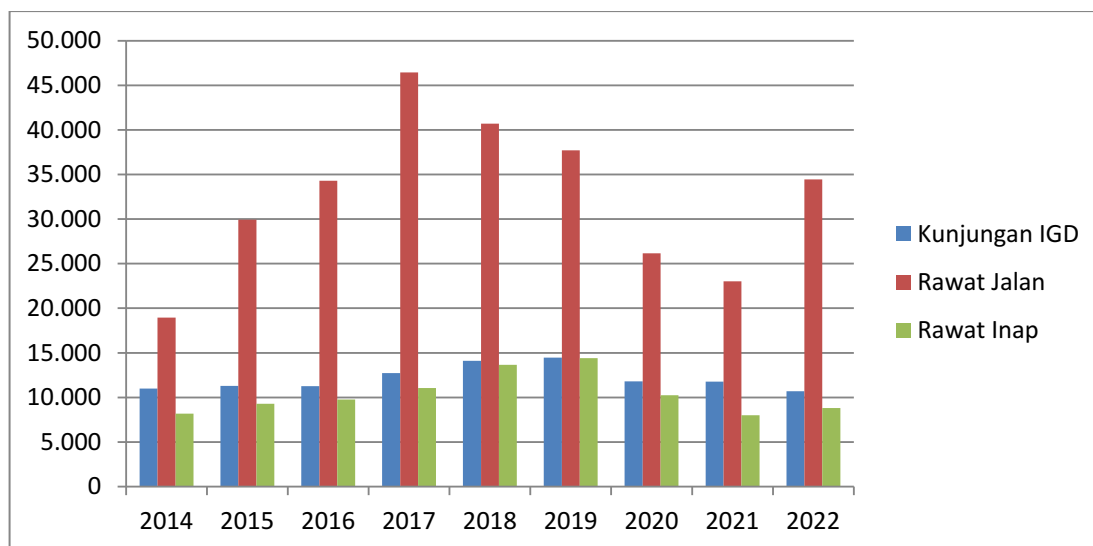


**Tabel 2.29 : Kunjungan Pasien Pada RSUD Kol. Abundjani Bangko dari tahun 2014 s/d 2022**

NO	Uraian	Tahun									Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Kunjungan IGD	10.993	11.286	11.262	12.727	14.104	14.473	11.795	11.784	10.696	
2	Rawat Jalan	18.950	29.928	34.290	46.442	40.685	37.702	26.165	23.006	34.458	
3	Rawat Inap	8.175	9.286	9.763	11.065	13.651	14.404	10.246	8.007	8.817	
	Jumlah	<b>38.118</b>	<b>50.500</b>	<b>55.315</b>	<b>70.234</b>	<b>68.440</b>	<b>66.579</b>	<b>48.206</b>	<b>42.797</b>	53.971	

Sumber : RSUD Kol. Abundjani Bangko Tahun 2022

Untuk lebih jelasnya gambaran kunjungan pasien pada RSUD Kol. Abundjani Bangko dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.4 : Grafik kunjungan pasien pada RSUD Kol. Abundjani Bangko Tahun 2014 s/d Tahun 2022**

Sumber : RSUD Kol. Abundjani Bangko Tahun 2022

10) Kemudian, terkait penerimaan/pendapatan pada RSUD Kol. Abundjani Bangko kurun waktu 2015 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.30 : Target dan Realisasi Penerimaan/Pendapatan RSUD Kol. Abundjani Bangko Tahun 2015 s/d 2022**

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
1	2015	26.645.000.000	22.496.181.081	84,43
2	2016	30.232.879.200	28.392.111.080	93,91
3	2017	39.258.864.798	36.930.694.855	94,07
4	2018	43.550.412.860	41.812.044.508	96,01
5	2019	49.678.031.791	47.727.337.028	96,07
6	2020	49.969.213.572	48.911.589.397	97,80
7	2021	42.555.550.000	55.791.580.796	131
8	2022	88.059.199.523.00	73.975.096.450.00	84

Sumber : Laporan Tahunan RSUD Kol. Abundjani Bangko Tahun 2022

### C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun bentuk kegiatan pembangunan infrastruktur urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin secara bertahap adalah dengan terus melaksanakan sub urusan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Air (SDA), terkait pengamanan sungai dan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha;
2. Air Minum, terkait pengelolaan dan pengembangan SPAM;
3. Air Limbah, terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
4. Drainase, terkait pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai;
5. Permukiman, terkait penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman;
6. Bangunan Gedung, terkait penyelenggaraan bangunan gedung;

7. Penataan Bangunan dan Lingkungannya, terkait penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya;
8. Jalan, terkait penyelenggaraan jalan kabupaten, termasuk jembatan;
9. Jasa Konstruksi, terkait penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi; dan
10. Penataan Ruang, terkait penyelenggaraan penataan ruang daerah.

Sampai dengan tahun 2022, capaian pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.31 : Penanganan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Merangin dari Tahun 2015 s.d. 2022**

NO	Uraian	Volume								Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengaspalan Jalan (Hotmix. burda/Lapen)	37.22 KM	48.748 KM	28.153 KM	20.296 KM	14.889.76 KM	89,022 KM	7,558 KM	5,594 KM	
2	Perkerasan Jalan	43.05 KM	26.010 KM	16.064 KM	30.437 KM	27.511.35 KM	24,776 KM	1,077 KM	1,493 KM	
3	Pembukaan Jalan Baru	-	-	14.750 KM	1.380 KM	-	-	-	-	
4	Pembangunan Jembatan Konvensional dan Pracetak	4 Unit	3 Unit	1 Unit	-	1 Unit	5 Unit	-	-	
5	Pembangunan Jembatan Gantung	1 Unit	2 Unit	6 Unit	4 Unit	6 Unit	4 Unit	-	1 Unit	
6	Rehabilitasi Jembatan Gantung	17 Unit	23 Unit	17 Unit	11 Unit	7 Unit	7 Unit	3 Unit	9 unit	

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Merangin Tahun 2022

2) Sampai dengan tahun 2022 gambaran kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.32 : Kondisi Jalan Kabupaten Merangin s.d akhir Tahun 2022**

Kondisi	Panjang Jalan (Km)	Jenis Permukaan	Panjang Jalan (Km)
1	2	3	4
Baik	377,551 Km	Aspal/Penetrasi/Macadam	535,320 Km
Sedang	473,992 Km	Perkerasan Rigit/Beton	502,167 Km
Rusak Ringan	237,464 Km	Terlford/Kerikil	93,450 Km
Rusak Berat	95,400 Km	Tanah/Belum Tembus	53,470 Km
<b>Jumlah</b>	<b>1.184,407 km</b>	<b>Jumlah</b>	<b>1.184,407 km</b>

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Merangin Tahun 2022

Untuk melihat perkembangan kondisi jalan Kabupaten Merangin dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.33 : Perkembangan Kondisi Jalan di Kabupaten Merangin Tahun 2015 s.d. 2022**

NO	TAHUN	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	2015	598.007	161.553	353.309	71.538	1.184.407
2	2016	656.423	151.290	303.595	73.099	1.184.407
3	2017	714.748	112.560	282.219	74.880	1.184.407
4	2018	703.204	148.931	212.351	119.921	1.184.407
5	2019	562.811	199.771	186.629	236.206	1.184.407
6	2020	286.017	556.253	227.967	114.170	1.184.407
7	2021	383,351	489,412	214,994	96,650	1.184.407
8	2022	377,551	473,992	237,464	95,400	1.184.407

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Merangin Tahun 2022

3) Perkembangan jembatan di Kabupaten Merangin menurut jenisnya sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 369 unit dengan rincian yaitu Jembatan Gantung sebanyak 109 unit jembatan beton/kayu sebanyak 197 unit dan box culvert sebanyak 62 unit. Adapun Gambaran jumlah

Jembatan di Kabupaten Merangin berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.34 : Perkembangan Jumlah Jembatan di Kabupaten Merangin dalam Kecamatan tahun 2019 dan 2022**

No	Kecamatan	Jumlah (Unit)			
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	
1	Jangkat	22	22	22	22
2	Bangka	21	22	22	22
3	Muara Siau	32	33	33	33
4	Sungai Manau	15	16	16	16
5	Tabir	20	21	21	21
6	Pamenang	9	10	10	10
7	Tabir Ulu	14	15	16	15
8	Tabir Selatan	11	12	12	12
9	Lembah Masurai	22	25	26	25
10	Bangka Barat	13	14	14	14
11	Nalo Tantan	21	27	27	27
12	Batang Masumai	15	15	15	15
13	Pamenang Barat	6	6	7	7
14	Tabir Ilir	5	6	6	6
15	Tabir Timur	5	5	5	5
16	Renah Pembarap	17	18	18	18
17	Panngkalan Jambu	8	9	10	9
18	Jangkat Timur	13	15	15	15
19	Renah Pamenang	8	9	9	9
20	Pamenang Selatan	12	14	14	14
21	Margo Tabir	10	10	10	10
22	Tabir Lintas	4	4	4	4
23	Tabri Barat	33	35	36	35
24	Tiang Pumpung	4	5	6	7
	<b>JUMLAH</b>	<b>340</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>369</b>

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Merangin Tahun 2022

- 4) Selain itu, untuk penanganan infrastruktur lainnya pada tahun 2022 seperti pembangunan jalan lingkungan permukiman, pembangunan drainase, pembangunan

Sistem Penyediaan Air Minum, pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah, pembangunan pengaman sungai (turap/talud/bronjong), pembangunan jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.35 : Profil Infrastruktur ke-PU-an Lainnya di Kabupaten Merangin Tahun 2015-2022**

No	Uraian	VOLUME					Ket
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	4	5	6	7	8	
1	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman	18.608 M	7.099 M	15.897,4 M	350 M	10.711,6 3 M	
2	Pembangunan Drainase	6.044,5 M	2.867,5 M	1.860,5 M	1.995 M	1.573 M	
3	Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM)	13 Unit	15 Unit	32 Unit	12 Unit	16 Unit	
4	Pembangunan Sistim Penyediaan Air Linbah (SPAL)	10 Unit	25 Unit	43 Unit	10 Unit	-	
5	Pembangunan Pengaman Sungai (Turap/Talud/Bronjong)	15 Unit	54 Unit	27 Unit	34 Unit	12 Paket	
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	19 DI	18 DI	26 DI	4 Paket	12 Paket	
7	Pembangunan Jaringan Itigasi	9 DI	3 DI /11 ID	25 DI	41 Paket	-	

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Merangin Tahun 2022

- 5) Untuk menjamin terlaksananya pemanfaatan ruang yang sesuai rencana maka perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatan ruang tersebut. Pada tahun 2022, melalui Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang telah dibentuk untuk optimalisasi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penataan ruang di Kabupaten Merangin. Tim dimaksud merupakan implikasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. TKPRD memiliki tugas terhadap :

- 1) perencanaan tata ruang,
- 2) pemanfaatan tata ruang, dan
- 3) pengendalian pemanfaatan ruang.

Adapun Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2022 khususnya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.36 : Capaian Target Indikator Program RPJMD Kabupaten Merangin Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% REALISASI
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Pemenuhan Penunjang urusan Pemerintahan	%	94,00	94,00	100%
2	Persentase Luas Cakupan Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam kondisi baik	%	70,11	65,51	93,44%
3	Persentase Rumah Tangga yang mendapat pelayanan Infrastruktur Permukiman yang aman dan layak	%	67,00	57,23	85,42%
4	Persentase Rumah Tangga yang mendapat pelayanan Air Minum yang Aman	%	67,00	57,23	85,42%
5	Persentase ketersediaan prasarana persampahan regional	%	67,00	57,23	85,42%
6	Persentase Rumah Tangga yang mendapat pelayanan Air Limbah yang layak	%	67,00	57,23	85,42%
7	Persentase Sitem Drainase dalam kondisi baik	%	67,00	57,23	85,42%
8	Persentase pengembangan permukiman dalam kondisi baik	%	67,00	57,23	85,42%
9	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	67,00	57,23	85,42%
10	Persentase Bangunan dan Lingkungan dalam kondisi baik	%	67,00	57,23	85,42%
11	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	71,06	71,11	100,07%

12	Persentase Tenaga Terampil Konstruksi bersertifikat	%	52,00	52,00	100%
13	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap pola ruang	%	87,47	87,47	100%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Merangin Tahun 2022

#### **D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Upaya dalam membentuk perumahan atau pemukiman yang layak, sehat, dan aman bagi masyarakat Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2022 telah melaksanakan program dan kegiatan berupa penanganan kawasan kumuh, Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni:

- 1) Terkait pelaksanaan ketersediaan rumah layak huni yang merupakan program bantuan stimulant perumahan swadaya dari pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pada tahun 2021 telah dilaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pengertian masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni secara swadaya. Adapun realisasi pemberian Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Merangin Tahun 2022 adalah 271 Unit
- 2) Kabupaten Merangin yang memiliki topografi dataran tinggi yang tersebar dan bertekstur terjal dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Kondisi ini menghambat pembangunan infrastruktur oleh pemerintah atau swasta. karena biaya dan perawatan tidak berimbang dengan hasil



yang didapat. Oleh karena itu, listrik masih menjadi sesuatu yang mahal bagi sebagian masyarakat Kabupaten Merangin. Untuk itu pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pengembangan Penerangan Jalan Umum berupa pemasangan penerangan jalan umum (PJU) sebanyak ??? Lokasi, serta pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) sebanyak ??????? Unit

#### **E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

Capaian terhadap pelaksanaan pembangunan pada Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat pada uraian berikut ini:

- 1) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Kebakaran dengan memfokuskan pada penanganan bahaya kebakaran dengan armada damkar siap dan layak pakai. Hal ini diperlukan mengingat akan tingginya kecenderungan bahaya kebakaran yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas manusia di suatu kawasan tertentu. Sedangkan kondisi penanganan kebakaran di Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2022, hanya memiliki armada DAMKAR sebanyak 6 unit dengan kondisi 4 unit baik, 1 unit rusak, 1 unit untuk kendaraan di Pos Damkar. Jumlah petugas Damkar sebanyak 120 orang petugas. Jika melihat luas wilayah, kondisi geografis, dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Merangin jumlah armada kendaraan pemadam kebakaran yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Merangin terasa masih kurang. Sampai dengan tahun 2022 wilayah manajemen

kebakaran (WMK) terdiri dari 2 (Dua) WMK dengan cakupan pelayanan kebakaran 4 %. Pada tahun-tahun mendatang akan diusahakan peningkatan armada dan keterampilan personil Pemadam Kebakaran. guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun-tahun mendatang akan diusahakan peningkatan armada dan keterampilan personil Pemadam Kebakaran, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Program Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing (NGO) dan Lembaga Asing di Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin berupa pelaksanaan pertemuan dalam upaya memantau kegiatan orang asing dan NGO yang telah masuk di wilayah Kabupaten Merangin dengan melibatkan dengan membentuk Tim Pengawasan Orang Asing. Dari hasil pemantauan dilapangan. telah diketahui adanya aktifitas orang asing di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 sebanyak 5 orang. Kepada orang asing yang bekerja di Kabupaten Merangin diwajibkan untuk melaporkan keberadaannya dengan criteria prosedur sebagai berikut : kelengkapan Paspor, Visa Tinggal, Izin Mempekerja tenaga Asing (Depnaker), Kartu Izin terbatas (Dephumkan), dan Surat Tanda Melapor Diri (Polres).
- 3) Terkait dalam upaya mengantisipasi hambatan dan tantangan kedepan menuju kondisi yang diharapkan Badan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Merangin yang diberi tugas dibidang Kesatuan Bangsa, dan Politik perlu

melakukan secara terus menerus (kontinue) mengembangkan dan pemberdayaan program kegiatan dan motivasi untuk mengantisipasi segala bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Daerah, sehingga dapat tercipta situasi yang kondusif dan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- 4) Berikutnya untuk membangun kondisi politik yang kondusif dan demokratis dengan melaksanakan upaya peningkatan persentase partisipasi pemilih dan partai politik, dimplementasikan dengan kegiatan Koordinasi dan fasilitasi bantuan keuangan partai politik; Kegiatan pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik daerah; Kegiatan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Politik Daerah Kabupaten Merangin
- 5) Untuk pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas telah berhasil dihimpun data perkembangan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. sampai dengan tahun 2022 jumlah partai politik sebanyak 16 partai, Yayasan sebanyak 29 yayasan, Organisasi Kemasyarakatan sebanyak 139 ormas dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 59 LSM.
- 6) Kemudian untuk pelaksanaan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Merangin telah melaksanakan identifikasi daerah rawan bencana di Kabupaten Merangin yang terdiri dari rawan banjir dan rawan longsor dan rawan

angin puting beliung serta kebakaran lahan dapat dilihat berikut ini:

**Tabel 2.37 : Rekapitulasi Laporan Bencana di Kabupaten Merangin Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jenis Bencana				Total Kejadian/ Kecamatan	Ket
		Hotspot	Banjir	Longsor	Angin Puting Beliung		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangko	5 Kali	1 Kali	3 Kali	1 Kali	10 Kali	
2	Tabir	7 Kali	3 Kali			10 Kali	
3	Sungai Manau	4 Kali				4 Kali	
4	Pamenang	5 Kali				5 Kali	
5	Muara Siau	35 Kali				35 Kali	
6	Jangkat	7 Kali			1 Kali	8 Kali	
7	Tabir Ulu	2 Kali				2 Kali	
8	Tabir Selatan					0 Kali	
9	Lembah Masurai	25 Kali		1 Kali		26 Kali	
10	Bangko Barat	14 Kali				14 Kali	
11	Batang Masumai	7 Kali		1 Kali		8 Kali	
12	Nalo Tantan	4 Kali	2 Kali			6 Kali	
13	Tabir Ilir	4 Kali				4 Kali	
14	Tabir Timur	1 Kali				1 Kali	
15	Renah Pembarap	9 Kali		1 Kali		10 Kali	
16	Pangkalan Jambu	4 Kali		1 Kali		5 Kali	
17	Jangkat Timur	35 Kali	3 Kali	3 Kali		41 Kali	
18	Pamenang Barat	2 Kali		1 Kali		3 Kali	
19	Renah Pamenang			2 Kali		2 Kali	
20	Tabir Lintas	4 Kali				4 Kali	
21	Tabir Barat	2 Kali				2 Kali	
22	Pamenang Selatan	1 Kali				1 Kali	
23	Margo Tabir	3 Kali	1 Kali			4 Kali	
24	Tiang Pumpung	6 Kali				6 Kali	
	<b>Jumlah/Kejadian</b>	<b>186 Kali</b>	<b>10 Kali</b>	<b>13 Kali</b>	<b>2 Kali</b>	<b>211 Kali</b>	

Sumber : BPBD Kabupaten Merangin Tahun 2023

- 7) Selanjutnya pelaksanaan Program Penegakan Perda dan Perkada juga dilaksanakan oleh Kantor Sat Pol PP dengan kegiatan berupa Sosialisasi Produk hukum bidang trantibum; penyelidikan dan penyelesaian pelanggaran

Perda; dan Patroli dan penertiban gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- 8) Untuk pelaksanaan Program Pemeliharaan Kantrantibms dan pencegahan tindak kriminal dengan kegiatan berupa Rapat Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; dan kegiatan peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
- 9) Mengenai peningkatan pemahaman terhadap wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat telah dilaksanakan Pembinaan Kesatuan Bangsa. Politik dan Perlindungan Masyarakat Sesuai dengan Kondisi objective pembangunan Dewasa Ini. dimana nilai-nilai Kebhineka Tuggal Ikaan dan Kedaulatan Rakyat Menjadi Sumber Inspirasi dalam setiap kegiatan untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

## **F. Urusan Sosial**

Untuk penanganan Urusan Sosial Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2022 uraian capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah berikut ini:

- Melalui pelaksanaan program kegiatan pada bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial telah dilaksanakan :
  - a) Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan dana bantuan PKH selama tahun 2022 sebanyak 10.855 KPM dengan dana sebesar Rp. 27.234.831.451,-
  - b) Melakukan Fasilitasi Untuk Mendapatkan dan Menyalurkan Bantuan Sembako Kepada masyarakat miskin yang telah diberikan bantuan Sembako selama

- Tahun 2022 yakni sebanyak 15.714 KPM yang tersebar di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin.
- c) Melakukan updating data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi SIKS – NG yang dilaksanakan di 215 Desa/Kelurahan melalui link nya langsung dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia
  - d) Selain itu juga dilaksanakan pelayanan terhadap Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar serta Gelandangan dan Pengemis terlantar di luar panti sosial
- Dalam upaya Pemberdayaan Usaha Kesejahteraan Sosial pada tahun 2022 telah dilaksanakan :
- a) Pelatihan peningkatan Kapasitas SDM bagi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan ( TKSK ) Sebanyak 24 Orang dalam Melaksanakan Kesejahteraan Sosial.
  - b) Melakukan Pemberdayaan TKSK untuk melakukan updating data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - c) Mendayagunakan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk mampu meningkatkan kesejahteraan sosial
  - d) Mendayagunakan Organisasi Sosial ( Karang Taruna) untuk melaksanakan fungsi sosialnya dalam menyelenggarakan kesejahteraan Sosial
  - e) Melakukan Pemeliharaan secara Rutin bagi Taman Makam Pahlawan (TMP) Patriot bhakti bangko sehingga keasriannya dapat terjaga dengan baik
- Terkait Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil salah satu kegiatan yang dilaksanakan pendataan Suku Anak Dalam sampai dengan tahun 2021 Jumlah Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin

sebanyak sebanyak 340 KK / 1.155 Jiwa,. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.38 : Data Sebaran Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin Tahun 2022**

NO	DESA/ KECAMATAN	JUMLAH		JUMLAH		DATA PENDUDUK		JUMLAH PEMUKIMAN
		KK	JIWA	LK	PR	NIK	KTP	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>KECAMATAN BANGKO BARAT</b>	<b>16</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>9</b>
a	Desa Bukit Beringin	16	55	29	26	16	21	9
<b>2</b>	<b>KECAMATAN PAMENANG</b>	<b>72</b>	<b>256</b>	<b>136</b>	<b>120</b>	<b>66</b>	<b>141</b>	<b>77</b>
a	Desa Pauh Menang	17	67	35	32	14	30	18
b	Desa Pelakar Jaya	21	71	40	31	19	50	24
c	Desa Rejo sari	10	38	20	18	10	13	0
d	Desa Sialang	15	37	18	19	14	26	25
e	Desa Pelakar Jaya 1	9	43	23	20	9	22	10
<b>3</b>	<b>KECAMATAN RENAH PAMENANG</b>	<b>36</b>	<b>114</b>	<b>61</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>59</b>	<b>30</b>
a	Desa Bukit Bungkul	10	30	17	13	10	7	7
b	Desa Lantak Seribu	26	84	44	40	24	52	23
<b>4</b>	<b>KECAMATAN TABIR SELATAN</b>	<b>72</b>	<b>267</b>	<b>149</b>	<b>118</b>	<b>72</b>	<b>47</b>	<b>9</b>
a	Desa Gding Jaya	11	38	20	18	11	20	9
b	Desa Mekar Jaya	61	229	129	100	61	27	0
<b>5</b>	<b>KECAMATAN NALO TANTAN</b>	<b>118</b>	<b>346</b>	<b>188</b>	<b>158</b>	<b>113</b>	<b>92</b>	<b>50</b>
a	Mengkilam	33	91	50	41	33	15	0
b	Mentawak 1	31	73	34	39	29	19	11
c	Mentawak 2	27	74	46	28	27	27	8
d	Sungai Ulak 1	16	69	35	34	16	23	23
e	Sungai Ulak 2	11	39	23	16	8	8	8
<b>6</b>	<b>KECAMATAN TABIR</b>	<b>25</b>	<b>55</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>15</b>
a	Desa Koto Rayo	25	55	33	22	24	44	15
	<b>JUMLAH</b>	<b>340</b>	<b>1155</b>	<b>589</b>	<b>566</b>	<b>325</b>	<b>402</b>	<b>190</b>

Sumber: Laporan Tahunan Dinas Sos PP dan PA Tahun 2023

Dari pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.

diharapkan dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial dan juga dapat kesejahteraan masyarakat sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat pada setiap lapisan yang ada.

Adapun uraian capaian dari pelaksanaan program dan Kegiatan pada Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dapat dijabarkan berikut ini:

### G. Urusan Tenaga Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Merangin. secara umum dihadapkan dengan beberapa persoalan mendasar antara lain masih tingginya jumlah pengangguran dan peluang kesempatan kerja pada sektor formal, belum tercapainya elastisitas permintaan dan penawaran tenaga kerja terampil dan siap kerja, rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perselisihan hubungan industrial.

Dari pelaksanaan program kegiatan pada urusan tenaga kerja capaiannya antara lain berikut ini:

- 1) Data pelaksanaan kegiatan di bidang ketenaga kerjaan. dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.39 : Data Pelaksanaan Indikator Kinerja Pada Bidang Ketenaga Kerjaan Sampai dengan Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja	Capaian	Ket
1	2	3	4
1	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	160 Orang	
2	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	-	
3	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	-	
4	Jumlah pekerja buruh yang	7132 Orang	



	menjadi peserta aktif jamsostek		
--	---------------------------------	--	--

Sumber: Dinas PMPTSP& Naker Tahun 2023

- 2) Tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Merangin dimasa yang akan datang dibidang ketenagakerjaan adalah masih tingginya jumlah pencari kerja. Sampai dengan tahun 2022, jumlah Pencari Kerja yang sebanyak 290 orang.
- 3) Berdasarkan data statistik Kabupaten Merangin tahun 2022, Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Merangin mengalami angka yang konstan pada tahun 2021 dan tahun 2022. Untuk lebih jelasnya data statistik ketenaga kerjaan Kabupaten Merangin dari Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.40 : Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Merangin dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2022**

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	
1	Bekerja	187.523	190.731	192.138	193.723
2	Pengangguran	7.413	9.747	9.752	9.533
3	Angkatan Kerja	194.936	200.478	201.890	203.256
4	bukan angkatan kerja	87.002	85.228	87.142	87.142
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) TPT	3,8	4,86	4,83	4,83
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	69,14	70,17	69,85	69,85

Sumber : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2023

**H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak;**

Pada Tahun 2022 penanganan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin dengan capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan tergambar pada uraian berikut ini:

- 1) Melakukan pendampingan, perlindungan bagi korban kekerasan baik anak maupun perempuan sebanyak 30 Kasus/Orang.
- 2) Melaksanakan Advokasi dan Fasilitasi Kelembagaan PUG Untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan Pembangunan Hingga akhir Desember 2022, jumlah Perangkat Daerah yang sudah melaksanakan PPRG yakni 29,62 % atau setara dengan sebanyak 16 OPD dari Total 54 OPD yang ada di Kabupaten Merangin.
- 3) Terkait Penilaian dan Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Merangin memperoleh Nilai PRATAMA terhadap pada tahun 2022.
- 4) Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran dan pemanfaatan data terpilah gender
- 5) Melakukan pembentukan dan pembinaan Forum Anak Daerah dan Pembentukan Pendidikan dan Kesehatan yang Ramah Anak.
- 6) Melakukan Pembentukan PATBM, Pada tahun 2022 sudah Ada 4 PATBM yang dibentuk diantaranya :
  - a. PATBM Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko
  - b. PATBM Desa Sido Harjo Kecamatan Tabir Lintas
  - c. PATBM Desa Guguk Kecamatan Renah Pembarap

- d. PATBM Desa Tambang Baru Kecamatan Tabir Lintas
- 7) Melalui kegiatan Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P2TP2A). telah dilaksanakan penanganan kasus perempuan dan anak pada tahun 2022 dari target Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang tertangani yakni sebanyak 100% dari Kasus yang ada, sementara itu hasil yang dicapai terhadap penanganan kasus kekerasan yakni 100% Atau sebanyak 38 Kasus yang tertangani dari Total 38 Kasus yang ada dalam tahun 2022. Secara rinci kasus terhadap perempuan dan anak pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.41 : Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Tahun 2021**

NO	KASUS	ANAK PEREMPUAN	PEREMPUAN DEWASA	ANAK LAKI - LAKI	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	PERSETUBUHAN	14			14
2	PENCABULAN	10			10
3	KDRT		1		1
4	PELECEHAN	2	1	1	4
5	KEKERASAN	3	1	1	5
6	PENELANTARAN			1	1
7.	PEMERKOSAAN	2			2
8	PEMBUNUHAN			1	1
		<b>JUMLAH</b>			<b>38</b>

Sumber : Laporan Tahunan Dinas SOSPP &PA Kabupaten Merangin 2023

### I. Urusan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi penduduk merupakan salah satu urusan wajib pemerintah. Hal ini memberikan landasan dan peluang kepada daerah untuk mengembangkan sistem

ketahanan pangan semaksimal mungkin. antara lain melalui jaminan penyediaan pangan.

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup. baik jumlah maupun mutunya. aman. merata dan terjangkau. Ketahanan pangan terwujud bila dua kondisi terpenuhi yaitu : (1) setiap saat tersedia pangan yang cukup (baik jumlah maupun mutu). aman. merata dan terjangkau dan (2) setiap rumah tangga. setiap saat. mampu mengkonsumsi pangan yang cukup. aman. bergizi dan sesuai pilihannya. untuk menjalani hidup sehat dan produktif. Implikasi kebijakan dari konsep pangan ini adalah. bahwa pemerintah mempunyai 2 (dua) kewajiban yaitu menjamin akses pangan secara fisik dan ekonomi.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan untuk penanganan masalah pangan di Kabupaten Merangin Dari pelaksanaan program kegiatan pada urusan Pangan capaiannya antara lain berikut ini:

- 1) Dari pelaksanaan kegiatan pada urusan pangan oleh Pemerintahan Kabupaten Merangin, dapat dilihat perkembangan tanaman padi selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 2022, berdasarkan data yang dikeluarkan badan pusat statistik (BPS) untuk angka sementara (ASEM) terjadi peningkatan produksi padi, perkembangan luas panen dan produksi padi dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 2.42 : Perkembangan Luas Panen, Produksi Padi Tahun 2018 S/D 2022**

No.	Komoditas/Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Padi Sawah</b>					
	Luas Tanaman (Ha)	17.723	16.143	14.165	12.762	9.058
	Luas Panen (Ha)	16.594	14.774	13.907	11.627	6.290
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	53,28	51,29	52,78	56,78	57,88
	Produksi (Ton GKG)	88.406	75.783	73.39	66.016	36.403
	Luas Tanaman Akhir Tahun (Ha)	558	1.248	258	1.014	2.648
<b>2</b>	<b>Padi Ladang</b>					
	Luas Tanaman (Ha)	19.012	19.551	16.258	15.792	9.966
	Luas Panen (Ha)	14.332	17.468	13.209	11.614	7.991
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	38,10	35,87	34,21	36,56	37,71
	Produksi (Ton GKG)	54.609	62.661	45.185	42.455	30.132
	Luas Tanaman Akhir Tahun (Ha)	4.526	3.107	3.049	4.024	1.821
<b>3</b>	<b>Total Padi</b>					
	Luas Tanaman (Ha)	36.285	35.694	30.423	28.554	19.024
	Luas Panen (Ha)	30.926	32.242	27.116	23.241	14.281
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	46,24	42,94	44,24	46,67	47,79
	Produksi (Ton GKG)	143.015	138.443	119.974	108.471	66,535
	Luas Tanaman Akhir Tahun (Ha)	5.084	3.177	3.307	5.038	4.469

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin Tahun 2022

2) Kemudian untuk melihat Realisasi perkembangan luas panen Jagung, Kacang-kacangan dan Umbi-umbian pada tahun 2018 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.43 : Perkembangan luas panen dan produksi Tanaman Jagung, Kacang-Kacang dan Umbi-Umbian di Kabupaten Merangin tahun 2018 dan Tahun 2021**

No.	Komoditas/Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021**	2022**
1	2	3	4	5	6	
<b>1</b>	<b>Jagung</b>					
	Luas Tanaman (Ha)	4.362	2.534	3.706	2.494	500
	Luas Panen (Ha)	3.712	2.124	3.148	1.980	648
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	62,69	61,59	62,87	63,48	64,21
	Produksi (Ton)	23.720	13.081	19.791	12.570	4.161

	GKG)					
<b>2</b>	<b><u>Kedelai</u></b>					
	Luas Tanaman (Ha)	1.894	698	254	92	182
	Luas Panen (Ha)	1.541	612	212	87	162
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	12,51	12,54	11,98	12,01	12,89
	Produksi (Ton GKG)	1.928	767	254	104	209
<b>3</b>	<b><u>Kacang Tanah</u></b>					
	Luas Tanaman (Ha)	286	265	283	257	379
	Luas Panen (Ha)	279	260	284	257	373
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	13,17	13,19	15,18	13,29	14,53
	Produksi (Ton GKG)	367	343	431	342	542
<b>4</b>	<b><u>Kacang Hijau</u></b>					
	Luas Tanaman (Ha)	58	51	25	13	24
	Luas Panen (Ha)	53	46	25	14	19
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	10,50	10,47	8,47	10,74	10,89
	Produksi (Ton GKG)	56	48	21	15	21
<b>5</b>	<b><u>Ubi Kayu</u></b>					
	Luas Tanaman (Ha)	540	371	439	312	388
	Luas Panen (Ha)	586	409	430	327	400
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	224,77	224,53	224,47	331,32	332,38
	Produksi (Ton GKG)	13.171	9.183	9.652	10.834	13.295
<b>6</b>	<b><u>Ubi Jalar</u></b>					
	Luas Tanaman (Ha)	306	481	443	262	271
	Luas Panen (Ha)	282	381	472	310	265
	Rata-Rata Hasil (Kw/Ha)	213,63	349,04	325,71	320,88	322,89
	Produksi (Ton GKG)	6.024	13.299	15.374	9.947	8.557

Ket : \*\*) Angka sementara Kabupaten

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin Tahun 2023

- 3) Dimulai Pada tahun 2020 sampai dengan 2022 terdapat beberapa kendala terkait teknis pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pangan di Kabupaten Merangin yang diuraikan sebagai berikut: Permasalahn tersebut antara lain adalah secara umum pada tahun 2020 adanya

wabah yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yaitu Pandemi COVID-19, salah satu dampak dari wabah tersebut terhadap alokasi anggaran program dan kegiatan yakni Recofusing Anggaran APBN maupun APBD dalam upaya menanggulangi Pandemi COVID-19 Recofusing Anggaran ini mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun, sehingga program kegiatan tidak terlaksana secara optimal bahkan ada program kegiatan yang tidak dilaksanakan.

- 4) Sedangkan Pada tahun 2022 telah dilaksanakan program Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian. Program ini dilaksanakan dalam upaya penyediaan Data teknis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pembangunan dan renovasi Prasaran Irigasi Pertanian, Jalan Usaha Tani, Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP Kecamatan dan penyediaan Sarana Keinformasian BPP. Pekerjaan tersebut diharapkan akan dapat mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan meningkatkan kualitas dan mutu serta nilai tambah produk hasil pertanian serta mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid-19.
- 5) Tindak lanjut dalam rangka peningkatan kinerja yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut:
  - Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan bidang Peternakan dan Perkebunan.
  - Selain itu perlu dilakukan penekanan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
  - Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi pada 7 Kecamatan Kawasan Lumbang Beras.

- Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran.
  - Perlunya dilakukan penetapan Kawasan Pengembangan.
  - Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan Peraturan Daerah.
- 6) Kemudian Guna percepatan Peningkatan Produksi Pertanian dan mendukung 7 Kecamatan Kawasan Lumbung Beras telah dilaksanakan Percontohan Padi Sawah seluas 70 Ha, untuk melihat capaian dapat dilihat pada table berikut ini

**Tabel 2.43 : Percontohan Padi Sawah 70 Ha, mendukung 7 Kecamatan Lumbung Beras**

No	Kecamatan	Jumlah		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/H)	Produksi (Ton)
		Desa	Poktan				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jangkat Timur	1	1	10	10	59,61	596
2	Jangkat	1	1	10	10	59,78	597
3	Pangkalan Jambu	1	1	10	10	61,75	617
4	Sungai Manau	1	1	10	10	60,56	605
5	Tabir	1	1	10	10	62,17	621
6	Tabir Ulu	1	1	10	10	59,73	597
7	Pamenang	1	1	10	10	60,42	604
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>60,53</b>	<b>4.237</b>

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin Tahun 2023



**J. Urusan Pertanahan**

Pemerintah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan Penanganan urusan Pertanahan pada tahun 2022 dengan Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan berupa penyelesaian konflik-konflik pertanahan dalam bentuk fasilitasi.

Luas tanah sesuai peruntukan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) = 99.000 M<sup>2</sup>, seluruh luas tanah yang diberikan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (PKKPR) = 99.000 M<sup>2</sup> , jumlah penerima tanah obyek landform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha = 595 orang, jumlah penerima tanah obyek landform = 750 Orang. Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah = 2.951.583 M<sup>2</sup> dan luas izin membuka tanah yang diterbitkan = 2.951.583 M<sup>2</sup>

**K. Urusan Lingkungan Hidup**

Berdasarkan data pemantauan kualitas air, udara dan tutupan lahan di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi untuk 3 parameter yaitu : Indeks kualitas air, Indeks kualitas udara dan Indeks tutupan lahan sehingga hasil perhitungan tersebut dengan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Indeks kualitas air sebesar 53,33
- b. Indeks kualitas udara sebesar 93,50
- c. Indeks kualitas tutupan lahan sebesar 55,62

Dari data tersebut diatas dapat dihitung indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Merangin pada tahun 2022 sehingga angka capaian target indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Merangin sudah 66,53 dengan rating BAIK. Dan hasil perhitungan IKLH secara

nasional Kabupaten Merangin 70.10 sudah mencapai dan memenuhi target yang ditetapkan dengan rating baik.

Salah satu upaya untuk mendorong mengatasi berbagai permasalahan dibidang Kelestarian fungsi lingkungan hidup dilakukan pelaksanaan pengawasan yang diarahkan kepada kinerja pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan peraturan dibidang konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan.

Selain itu juga dilaksanakan kegiatan Koordinasi penyusunan AMDAL. Kegiatan ini merupakan upaya pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peranan AMDAL bagi pengambil keputusan (Pemerintah) salah satunya adalah mengarahkan dan mengawasi pembangunan untuk menghindari akibat-akibat sampingan yang merugikan dan tidak diinginkan. yaitu terjadinya dampak negatif dari proyek pembangunan pada lingkungan hidup dan sumberdaya alam di samping menghindarkan terjadinya perselisihan yang dapat timbul antara proyek dengan proyek pembangunan yang lainnya. Sejalan dengan perkembangan otonomi daerah dan keterbukaan informasi. AMDAL telah menjadi bagian penting dari suatu proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan. khususnya yang kemungkinan berdampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan hidup di daerah.

Selanjutnya sebagai upaya memperoleh dukungan dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat diperlukan peningkatan kebersihan secara berkesinambungan melalui berbagai kegiatan. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Perumahan dan Perkotaan. pada tahun 2022 telah

dilaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan yang salah satu kegiatannya adalah Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) yaitu yang merupakan kegiatan operasional pengelolaan persampahan di TPA Lanling. Adapun perkembangan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan kebersihan di Kabupaten Merangin dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.44 : Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Merangin Tahun 2014 s/d 2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	TPA	15 HA	15 HA	15 Ha	15 Ha	15 Ha
2	TPS	52 Bh	56 BH	67 Bh	65 BH	65 BH
3	Gerobak Dorong	13 Bh	13 BH	13 Bh	13 BH	13 BH
4	Kontainer Sampah	10 Unit	10 BH	12 Bh	18 BH	20 BH
5	Tong Sampah	620 Unit	700 Unit	705 BH	715 BH	726 BH
6	Pemotong Rumput (Mesin Rumput)	3 Unit	3 Unit	3 Unit	5 UNIT	5 UNIT
7	Dump Truk Sampah	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 UNIT	14 UNIT
8	Truk Tinja	1 unit	2 Unit	2 Unit	2 UNIT	2 UNIT
9	Kendaraan Roda 3 (tiga)	5 Unit	7 Unit	5 Unit	5 UNIT	5 UNIT
10	Tempat Pengolahan Sampah (3R)	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 UNIT	2 UNIT
11	Eksavator TPA	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 UNIT	1 UNIT
12	Buldozer TPA	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 UNIT	1 UNIT
13	Sarana IPLT	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 UNIT	1 UNIT
14	Bak Sanitary Landfile	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 UNIT	1 UNIT
15	Bank Sampah	-	1 Unit	1 Unit	1 UNIT	1 UNIT
16	Rumah Kompos	2 Unit	2 Unit	5 Unit	5 UNIT	5 UNIT

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Merangin Tahun 2022

**L. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;**

Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil secara rutin setiap tahunnya melaksanakan penertiban administrasi kependudukan seperti kegiatan administrasi Kependudukan dan pengoperasikan SIAK secara terpadu sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Merangin. Melalui kegiatan dilaksanakan 1) Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK); 2) Pelayanan penerbitan KTP; 3) Pelayanan penebitan SKPD (Surat Keterangan Pindah Datang) 4) Pelayanan Penerbitan (Umum) Akta Catatan Sipil; 5)Penerbitan (Tambahan) Akta Catatan Sipil; 6) Penerbitan (Umum dan Tambahan) Akta Catatan Sipil; 7) Pelayanan penerbitan Akta Catatan Sipil.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2022 pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat telah dilaksanakan pelayanan Online Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil terintegrasi; serta pelayanan keliling dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- 2) Terkait dengan Pengurusan KTP tahun 2022 adalah telah dilakukan pelayanan sebanyak 262.575 jiwa dari wajib KTP 269.339 Jiwa untuk lebih jelasnya gambaran Penduduk Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2022 yang telah memiliki KTP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.45 : Data Penduduk Kabupaten Merangin Wajib KTP. Sudah/Belum Memiliki E-KTP Sampai dengan Tahun 2022**

No	Tahun	Wajib KTP	Memiliki E-KTP	BelumMemiliki KTP	% Memiliki KTP
1	2	3	4	5	6
1.	2022	269.339	262.575	6.764	97,49
1.	2021	252.024	262.117	2.704	104,00
2.	2020	243.785	250.249	-	102,73
3.	2019	240.291	232.133	7.794	96,60
4.	2018	236.124	212.043	24.081	89,80
5.	2017	227.920	195.660	32.260	85,85
6.	2016	231.713	178.296	53.417	76,95
7.	2015	214.681	72.686	141.995	33,86
8.	2014	212.211	72.595	139.616	34,21

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Merangin Tahun 2022

Dari Tabel diatas, Kepemilikan KTP penduduk Kabupaten Merangin dari sampai dengan Tahun 2022 jumlah penduduk yang memiliki KTP mencapai 262.575 jiwa dari wajib KTP 269.339 Jiwa.

- 3) Sedangkan perkembangan penduduk Kabupaten Merangin dengan jumlah penduduk Kabupaten Merangin Tahun 2022 adalah 380.323 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga 117.944 KK. Dari jumlah Kepala keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga 108.086 KK dan yang belum memiliki kartu keluarga 9.858 KK atau persentase kepemilikan kartu keluarga sebesar 91,64%. Data penduduk tersebut, merupakan data Kependudukan Bersih (DKB) yang dikeluarkan Dirjen Dukcapil Kemendagri. Data DKB yang hasil Evaluasi Dirjen Dukcapil Kemendagri di karenakan Data Hasil Administrasi Pelayanan Kependudukan (Data Anomali) tidak dapat di pergunakan untuk data dasar perencanaan

pembangunan. ini dikarenakan data anomali tersebut masih terdapat 1 orang memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK) lebih dari 1 NIK. Ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan.

- 4) Untuk pelaksanaan kegiatan penerapan E-KTP, Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan evaluasi percepatan penuntasan perekaman E-KTP. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut Sampai dengan tahun 2022 realisasi perekaman E-KTP di Kabupaten Merangin 262.575 orang dari target 252.024 orang atau terealisasi 105.07%. Adapun permasalahan yang dihadapi masih belum maksimalnya perekaman E-KTP di Kabupaten Merangin adalah. Adapun permasalahan yang dihadapi masih belum maksimalnya perekaman E-KTP di Kabupaten Merangin adalah:

- Sering kerusakan alat perekaman yang diakibatkan Human Error dikarenakan alat perekaman sudah lama, batuan dari pusat tahun 2012.
- Jaringan internet/nirkabel sering mengalami gangguan.
- Sarana dan Prasarana Perangkat SIAK yang masih belum Memadai.

Dari permasalahan diatas pemerintah Kabupaten Merangin mengambil langkah-langkah dan solusi yang perlu dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- Diupayakan Pelatihan untuk operator
- Diupayakan Penambahan alat-alat baru

- Terkait dengan seringnya gangguan jaringan internet. akan dilaksanakan koordinasi dengan Telkomsel sebagai penyedia jaringan internet.
- Peralatan yang rusak akan di kirim ke Pemerintah pusat untuk diperbaiki.

#### **M. Urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;**

Salah satu tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. memajukan perekonomian masyarakat Desa. mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan serta meningkatkan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat desa.

Untuk mencapai hal tersebut. beberapa hak dan kewenangan diberikan kepada desa. Desa berhak mendapatkan sumber pendapatan untuk melaksanakan kewenangannya dalam menjalankan amanah undang-undang dimaksud. Sumber pendapatan tersebut diantaranya melalui : (1) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa/DD); (2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Alokasi Dana Desa/ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan (3) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015. menyatakan bahwa pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk. angka kemiskinan. luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian. Penyaluran. Penggunaan. Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. menyatakan bahwa rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan : a) Alokasi Dasar. dan b) Alokasi Formula. Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan rumus :  $DD = AD + AF$ .

Adapun capaian pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2022 tergambar pada uraian berikut ini:

- 1) Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk. angka kemiskinan. luas wilayah. dan tingkat kesulitan geografis. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30%. luas wilayah 20% dan angka kemiskinan sebesar 50% dan dikalikan dengan Indeks Kemahalan Kontruksi Kabupaten. Data-data yang digunakan adalah sumber data dari perhitungan Alokasi Dana Umum (DAU). Kemudian Peraturan Pemerintah tersebut direvisi dengan rincian untuk jumlah penduduk bobotnya sebesar 10%. luas wilayah 15%. angka



kemiskinan 50% dan Indeks Kesulitan Geografis sebesar 25%. Adapun Alokasi Dana Desa (ADD) Sumber Dana APBN. APBD. Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah dan Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Merangin Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.46 : Rekapitulasi Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Merangin Tahun 2022**

NO.	KECAMATAN	PAGU ADD	PAGU ADD	PAGU PAJAK	PAGU RETRIBUSI	TOTAL PAGU
1	2	4	5	6	7	8
1	JANGKAT	8.772.402.000	3.756.852.895	221.995.383	32.359.984	12.783.610.262
2	BANGKO	4.138.633.000	1.525.285.908	82.068.570	11.963.135	5.757.950.613
3	MUARA SIAU	13.729.610.000	5.107.762.189	344.767.048	50.256.385	19.232.395.622
4	SUNGAI MANAU	8.579.511.000	3.438.402.348	199.874.303	29.135.276	12.246.922.927
5	TABIR	5.424.491.000	1.944.387.904	124.651.319	18.170.539	7.511.700.762
6	PAMENANG	11.273.138.000	4.468.071.596	261.023.595	38.048.973	16.040.282.164
7	TABIR ULU	6.065.474.000	2.068.168.060	126.812.237	18.485.700	8.278.939.997
8	TABIR SELATAN	6.610.011.000	2.990.529.250	157.648.586	22.979.943	9.781.168.779
9	LEMBAH MASURAI	12.234.846.000	4.704.424.782	302.640.197	44.115.472	17.286.026.451
10	BANGKO BARAT	5.056.096.000	2.028.230.392	117.567.391	17.137.378	7.219.031.161
11	NALO TANTAN	5.842.564.000	2.400.740.903	139.854.563	20.386.312	8.403.545.778
12	BATANG MASUMAI	7.711.090.000	3.381.155.244	197.527.951	28.793.068	11.318.566.263
13	PAMENANG BARAT	6.505.242.000	2.829.098.820	158.949.224	23.169.635	9.516.459.679
14	TABIR ILIR	5.769.794.000	2.321.243.800	140.693.539	20.508.675	8.252.240.014
15	TABIR TIMUR	3.485.268.000	1.422.218.340	81.327.447	11.855.044	5.000.668.831
16	RENAH PEMBARAP	10.131.198.000	4.351.716.245	241.936.044	35.266.692	14.760.116.981
17	PANGKALAN JAMBU	5.950.789.000	2.660.761.963	154.692.359	22.548.789	8.788.792.111
18	JANGKAT TIMUR	11.795.846.000	4.776.198.556	284.464.267	41.466.143	16.897.974.966
19	RENAH PAMENANG	3.619.855.000	1.488.485.114	79.850.490	11.639.637	5.199.830.241
20	PAMENANG SELATAN	3.445.135.000	1.433.756.763	81.710.859	11.910.964	4.972.513.586
21	MARGO TABIR	5.208.514.000	2.123.037.969	122.574.109	17.867.587	7.471.993.665
22	TABIR LINTAS	3.962.996.000	1.595.734.045	98.643.275	14.378.930	5.671.752.250
23	TABIR BARAT	13.416.320.000	5.009.550.066	289.315.686	42.173.700	18.757.359.452
24	TIANG PUMPUNG	4.415.820.000	1.890.118.848	117.258.458	17.092.324	6.440.289.630

NO.	KECAMATAN	PAGU ADD	PAGU ADD	PAGU PAJAK	PAGU RETRIBUSI	TOTAL PAGU
1	2	4	5	6	7	8
<b>J u m l a h</b>		<b>173.144.643.000</b>	<b>69.715.932.000</b>	<b>4.127.846.900</b>	<b>601.710.285</b>	<b>247.590.132.185</b>

Sumber : DPMPD Kab. Merangin Tahun 2023

- 2) Terkait dengan kegiatan Pendayagunaan Profil Desa dan Pelatihan Aplikasi Profil Desa oleh Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD). Sampai dengan tahun 2022 capaian pelaksanaan kegiatan ini telah menyelesaikan data profil desa dan kelurahan melalui aplikasi Prodeskel yang berbasis web sebanyak 215 Desa /Kelurahan dari 205 Desa dan 10 Kelurahan. atau telah tercapai penyelesaiannya sebesar 100%. Secara rinci realisasi pengentrian data Prodeskel ke dalam aplikasi yang berbasis WEB di setiap Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2. 47 : Realisasi Pengentrian Data Profil Desa ke Dalam Aplikasi Prodeskel yang Berbasis WEB di Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Terealisasi (Desa/Kel)	Belum Terealisasi (Desa/Kel)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	BANGKO	8	8	0	100
2	BANGKO BARAT	6	6	0	100
3	BATANG MASUMAI	10	10	0	100
4	NALO TANTAN	7	7	0	100
5	TABIR	11	11	0	100
6	TABIR ULU	6	6	0	100
7	TABIR ILIR	7	7	0	100
8	TABIR BARAT	14	14	0	100
9	TABIR TIMUR	4	4	0	100
10	TABIR SELATAN	8	8	0	100
11	MARGO TABIR	6	6	0	100
12	TABIR LINTAS	5	5	0	100

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Terealisasi (Desa/Kel)	Belum Terealisasi (Desa/Kel)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
13	PAMENANG	14	14	0	100
14	PAMENANG BARAT	8	8	0	100
15	RENAH PAMENANG	4	4	0	100
16	PAMENANG SELATAN	4	4	0	100
17	SEI. MANAU	10			
18	PKL. JAMBU	8	8	0	100
19	RENAH PEMBARAP	12	12	0	100
20	JANGKAT TIMUR	14	14	0	100
21	JANGKAT	11	11	0	100
22	LEMBAH MASURAI	15	15	0	100
23	MUARA SIAU	17	17	0	100
24	TIANG PUMPUNG	6	6	0	100
Jumlah		<b>215</b>			

Sumber : DPMD Kabupaten Merangin Tahun 2023

- 3) Usaha pemberdayaan masyarakat pedesaan di Kabupaten Merangin masih jauh dari kata berhasil. sehingga perlu di koreksi kelemahan selama ini secara mendasar. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) antara lain adalah Rendahnya motivasi warga penerima bantuan untuk mengembangkan bantuan yang diperoleh karena sebagian mereka beranggapan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan habis. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan mayoritas masyarakat pedesaan. Kurangnya koordinasi antar Dinas/ instansi terkait sehingga belum dapat terjalin sepenuhnya keterpaduan program lintas sektoral. Kurangnya data bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa. Kurangnya sarana dan prasarana pembinaan karena

desa-desa yang berada di Kabupaten Merangin masih terpencar- pencar. jarak dari ibukota Kecamatan atau dari desa ke desa masih relative jauh dan untuk menjangkaunya masih mengalami kesulitan. dan Masih kurangnya tenaga Pembina yang professional dalam pengelolaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan maka sangat diperlukan adanya pendidikan profesi bagi pegawai/ pengelola program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

- 4) Terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul. secara bertahap dan berkesinambungan terus dilakukan solusinya, dengan harapan pencapaian hasil dapat diwujudkan secara optimal. Selain melaksanakan berbagai kegiatan secara rutinitas selalu dilakukan peningkatan SDM bagi masyarakat pedesaan terutama masyarakat yang tinggal di daerah daerah terisolir juga dilaksanakan kordinasi dengan Dinas/Instansi dalam meningkatkan kegiatan pemberdayaan di Masyarakat.
- 5) Sedangkan Fasilitas dan pembinaan pembentukan BUMDes merupakan upaya pembinaan dan fasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. pembinaan dan fasilitasi terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dengan cara memberikan sosialisasi dan tata cara pendirian dan pengembangan BUMDES bagi Desa yang mempunyai potensi ekonomi untuk mendirikan unit usaha Desa. Adapun perkembangan jumlah BUMDesa hingga tahun 2022 mencapai 144 BUMDESA dan BUMDESMA atau 68,78% dari 205 jumlah desa di

kabupaten merangin, harapan kedepannya Dinas PMD berupaya untuk meningkatkan pembinaan dan fasilitasi terhadap BUMDesa agar dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk melihat perkembangan BUMDesa dan BUMDESMA di Kabupaten Merangin dari tahun 2014-2022 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.48 : Data Perkembangan BUMDesa dan BUMDesa Bersama ???**

Tahun Pendirian	Jumlah BUMDesa yang terbentuk	Jumlah BUMDesa Bersama	Status	
			Aktif	Tidak Aktif
1	2	3	4	5
2011	2	-	1	1
2014	1	-	1	-
2015	2	1	2	1
2016	20	-	12	10
2017	47	1	30	37
2018	29	-	50	51
2019	35	-	55	84
2020	36	1	58	82
2021	141	3	43	101
2022	150	4	47	103
<b>JUMLAH</b>	<b>141</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>101</b>

Sumber : Laporan Tahunan Dinas PMD Kab. Merangin Tahun 2023

#### **N. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;**

Pelaksanaan Urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang merupakan hasil amandemen dari Undang-undang nomor 10 tahun 1992.

serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan urusan ini sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Merangin terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terutama perempuan untuk mengikuti Keluarga Berencana (KB) bekerjasama dengan petugas. motivator dan kader di Desa Binaan KB. Guna untuk memudahkan kerjasama dengan Desa Binaan KB. Pemerintah Kabupaten Merangin telah membentuk Klinik KB setiap kecamatan baik paskes KB, Jaringan dan jejaring. Terkait Pembinaan Kelompok Tibina (BKB, BKR dan BKL ) dan Poktan (UPPKS, IMP dan PIK-R) berbasis Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ) sebanyak 514 Kelompok Kegiatan di Kabupaten Merangin, adapun yang terbina sebanyak 405 Kelompok Kegiatan (POKTAN).
- 2) Untuk melihat pencapaian Peserta KB Baru di Kabupaten Merangin pada tahun 2021 pilihan masyarakat terhadap jenis kontrasepsi masi cenderung memilih Suntikan dan PIL. Adapun gambaran peserta KB baru per Kecamatan di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.49 : Pencapaian Peserta KB Baru Perkecamatan di Kabupaten Merangin Tahun 2022**

KECAMATAN	PPM	MIX KONTRASEPSI							JUMLAH	PB PER PPM
		IUD	MOW	MOP	IMPLANT	SUNTIK	P I L	KONDOM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Jangkat	223	1	0	0	0	7	0	0	8	3,59%
Bangko	1059	6	0	0	1	18	26	2	53	5,00%
Muara Siau	476	0	0	0	0	7	4	0	11	2,31%

KECAMATAN	PPM	MIX KONTRASEPSI							JUMLAH	PB PER PPM
		IUD	MOW	MOP	IMPLANT	SUNTIK	P I L	KONDOM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sungai Manau	392	0	0	0	0	12	25	0	37	9,44%
Tabir	754	8	0	0	0	6	14	0	28	3,71%
Pamenang	739	4	0	0	1	14	80	8	107	14,48%
Tabir Ulu	498	0	0	0	0	2	0	0	2	0,40%
Tabir Selatan	597	0	0	0	0	19	20	0	39	6,53%
Lembah Masurai	458	0	1	0	0	0	15	5	21	4,59%
Bangko Barat	301	0	0	0	0	10	40	2	52	17,28%
Nalo Tantan	389	1	0	0	0	7	20	0	28	7,20%
Batang Masumai	489	0	0	0	0	9	22	0	31	6,34%
Pamenang Barat	599	0	0	0	0	39	51	1	91	15,19%
Tabir Ilir	407	0	2	0	0	0	17	2	21	5,16%
Tabir Timur	436	0	0	0	0	7	51	0	58	13,30%
Renah Pembarap	461	0	0	0	0	0	26	4	30	6,51%
Pangkalan Jambu	248	1	0	0	0	15	22	3	41	16,53%
Sungai Tenang	460	1	0	0	0	5	23	0	29	6,30%
Renah Pamenang	404	5	0	0	0	10	18	0	33	8,17%
Pamenang Selatan	302	0	0	0	0	3	2	1	6	1,99%
Margo Tabir	516	0	0	0	2	10	74	5	91	17,64%
Tabir Lintas	520	0	0	0	0	0	3	0	3	0,58%
Tabir Barat	446	0	0	0	0	4	41	0	45	10,09%
Tiang Pumpung	329	0	0	0	0	1	3	1	5	1,52%
<b>TOTAL</b>	<b>11503</b>	<b>27</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>205</b>	<b>597</b>	<b>34</b>	<b>870</b>	<b>7,56%</b>

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023

- 3) Jumlah peserta KB aktif modern pada tahun 2022 adalah 56.233 orang, jumlah pasangan usia subur 73.697 orang,

persentase peserta KB aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah 20,32%

## O. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan pembangunan urusan perhubungan diarahkan untuk mampu menciptakan tertib berlalu lintas sehingga nantinya akan mampu meningkatkan dan mengakselerasi tumbuhnya rasa kenyamanan dan keamanan berlalu lintas serta tersedianya prasarana dan sarana yang mendukung mobilitas angkutan. Dengan demikian upaya mencapai mobilitas yang aman nyaman dan cepat dapat dilakukan khususnya di kawasan perkotaan. Capaian pelaksanaan program kegiatan pada urusan Perhubungan antara lain berikut ini:

- 1) Target dan realisasi Pajak dan Realisasi PAD dari Retribusi sektor perhubungan tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.51 Target dan Realisasi PAD dari Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin Tahun 2022**

No	Jenis Retribusi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.	Parkir di Tepi Jalan Umum	45.000.000	25.446.000	56,55%
2.	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	225.000.000	147.899.000	65,73 %
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir			
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	200.000.000	84.950.000	42,48 %
<b>Jumlah</b>		<b>225.000.000</b>	<b>147.899.000</b>	<b>65,73 %</b>

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin Tahun 2022

- 2) Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis sampai dengan tahun 2022 dinas perhubungan telah



melaksanakan pengujian kendaraan bermotor wajib uji adalah sebanyak 6.503 kendaraan.

- 3) Terkait pelayanan perizinan usaha angkutan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin. Pada tahun 2022 izin usaha angkutan yang terdaftar adalah sebanyak ????. Izin.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam peningkatan pengendalian dan keselamatan lalu lintas.
- b. Masih kurangnya peralatan pengujian kendaraan bermotor (PKB) yang sesuai dengan rekomendasi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
- c. Bangunan terminal truk yang belum memadai pelayanan angkutan barang.
- d. Belum mantapnya pelaksanaan beberapa pelaksanaan beberapa Peraturan Daerah tentang retribusi Daerah sektor perhubungan. karena masih ada misintepretasi potensi yang ada antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- e. Lamanya proses pembuatan revisi Peraturan Daerah. karena masih memerlukan berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi dan selalu berubah-ubah.

Berdasarkan uraian Permasalahan diatas. upaya dan solusi yang dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal dengan terus melaksanakan pemeliharaan agar dapat berfungsi dengan baik. Selain itu juga diusulkan

alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

- b. Mensosialisasikan dan melaksanakan peraturan yang ada dan selanjutnya akan mengkaji ulang Peraturan Daerah yang ada untuk dilakukan revisi.
- c. Memberikan arahan pada pemilik kendaraan dan perusahaan angkutan barang untuk memanfaatkan fasilitas terminal truk yang tersedia.

#### **P. Urusan komunikasi dan informatika**

Beberapa permasalahan yang masih ditemui dalam penanganan urusan komunikasi dan informatika diantaranya adalah Data/informasi masih tersebar pada masing-masing unit kerja, system informasi yang dikelola oleh unit-unit kerja belum berjalan sebagaimana mestinya banyaknya tawaran aplikasi system informasi dari pihak ketiga kemasing-masing unit kerja, kurangnya pemahaman pimpinan unit kerja tentang TI data/informasi tidak tepat waktu penyampaiannya belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM TI dan kesenjangan digital di daerah dan terbatasnya kemampuan kinerja daerah akibat pemanfaatan. pengoperasian system informasi dan pemeliharaan yang relatif mahal.

Untuk pengembangan dan penyampaian informasi pembangunan daerah kepada masyarakat telah dilaksanakan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional yang dilakukan melalui Media Massa, Media online, Media tradisional, media interpersonal dan media luar ruang.

Selanjutnya dalam rangka Pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan yang merupakan salah satu cara untuk

menyampaikan informasi kepada masyarakat secara langsung. Melalui KIM ini banyak sekali kegiatan-kegiatan penyebarluasan informasi yang dapat disampaikan dan melalui KIM ini juga kita dapat mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat.

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan adalah jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang akan dibentuk dan diberdayakan pada setiap kecamatan. KIM di kecamatan akan dibina dan diawasi oleh KIM kabupaten meningkatkan keterjangkauan Komunikasi informasi publik. Pelaksanaan pembentukan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan, sampai dengan tahun 2021 jumlah KIM Kecamatan yang telah terbentuk adalah sebanyak 5 KIM atau sebesar 25 Persen. Kemudian terkait jangkauan menara telekomunikasi dari 10 Kelurahan dan 205 Desa pada Tahun 2021 yang mendapatkan jaringan telekomunikasi sebanyak 131 BTS dengan Cakupan 150 Desa/Kelurahan atau 69% dan pada Tahun 2022 mencapai 134 BTS dengan cakupan 164 desa/Kelurahan atau 76% atau meningkat 7% di kabupaten Merangin.

Menara Telekomunikasi bantuan tersebut sudah bisa digunakan oleh masyarakat sekitar. Pemerintah Kabupaten Merangin akan tetap melakukan peningkatan jangkauan sinyal Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Merangin dengan mengusulkan pembangunan menara telekomunikasi. baik usulan ke perusahaan swasta maupun ke Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

## Q. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Uraian Capaian dan Pelaksanaan kegiatan pada urusan Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan koperasi di Kabupaten Merangin, Dinas KUKMPP Kabupaten Merangin sebagai koordinator dan leading sektor pembinaan koperasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2022 dengan meningkatkan frekwensi pembinaan koperasi, berdampak positif pula terhadap kelembagaan koperasi itu sendiri. Untuk melihat perkembangan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.52 : Perkembangan Koperasi di Kabupaten Merangin Tahun 2020 – 2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun			Perkembangan (%)
			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5		6
1.	Jumlah Koperasi	Unit	287	290	298	1,05
2.	Jumlah Anggota	Org	21.486	8.594	9.093	0,37
3.	Jumlah Tenaga Kerja	Org	440	646		46,82
4.	Volume Usaha	Rp.	23.547.361.367	25.322.967.118		7,54
5.	Modal Sendiri	Rp.	24.031.743.835	26.229.089.882		9,14
6.	Asset	Rp.	42.202.035.043	42.339.442.350		0,33
7.	Modal Luar	Rp.	8.333.648.040	9.967.044.376		19,60
8.	SHU	Rp.	2.634.085.899	2.346.885.463		(10,90)
9.	Pengesaan Badan Hukum	Unit	5	3		(40,00)

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan PerindustrianKab. Merangin Tahun 2023

- 2) Terkait dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang merupakan salah satu jenis Koperasi yang bergerak dibidang Jasa Keuangan dan satu-satunya jenis usaha yang dikelola adalah Simpan Pinjam. Untuk lebih jelasnya perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2.53 Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Merangin pada Tahun 2021 – 2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun		Perkembangan (%)
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah KSP	Unit	12	14	16,67
2.	Jumlah Anggota	Orang	1.194	1.247	4,44
3.	Modal Tetap	Rp.	3.596.257.274	3.838.009.399	6,72
4.	Modal Luar	Rp.	4.103.837.454	4.898.993.364	19,38
5.	Asset	Rp.	12.167.203.818	11.830.522.262	(2,77)
6.	SHU	Rp.	402.143.390	523.821.592	30,26

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan PerindustrianKab. Merangin Tahun 2022

3) Sedangkan untuk gambaran Unit Simpan Pinjam (USP-Koperasi) di Kabupaten Merangin dari tahun 2020 sampai dengan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.54 Perkembangan Unit Simpan Pinjam (USP-Koperasi) di Kabupaten Merangin pada Tahun 2021 s/d 2022**

No	Uraian	Satuan	Tahun		Perkembangan (%)
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah USP-Koperasi	Buah	141	142	0,71
2.	Jumlah Anggota	Orang	17.425	17.347	(0,45)
3.	Modal Tetap	Rp.	21.246.518.504	25799349588	21,43
4.	Tabungan	Rp.	3.623.533.383	-	-
5.	Piutang	Rp.	11.043.678.753	31658389692	186,67
6.	Asset	Rp.	30.133.121.349	96236080637	219,37
7.	SHU	Rp.	2.548.338.119	2481005852	(2,64)

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan PerindustrianKab. Merangin Tahun 2023

4) Kemudian untuk Penyaluran Dana Bergulir dari Pusat/Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia melalui Dinass Koperasi Perindustriandan Perdagangan Kabupaten Merangin untuk Koperassi dan UMKM dari Tahun ke Tahun Mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Khususnya untuk Tahun 2022 Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) memberikan bantuan pinjaman kepada Koperasi yang

berada di Kabupaten Merangin dalam perkuatan modal untuk sektor riil serta kementerian Koperasi dan UMKM RI memberikan bantuan Dana Hibah Kepada Koperasi Pemuda dan Koperasi Wanita. Untuk Jumlah Dana yang diterima KSP/USP-Koperasi/LKM atau Dana PKPS-BBM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.55 : Perkembangan Dana PKPS – BBM**

NO	Uraian	Sat	2020	2021	2022	Perkembangan (%)
1	2	3	4	5		6
1.	Jumlah Penerima	Buah	61	55		(9,84)
2.	Jumlah Nasabah	Orang	12.165	12262		0,80
3.	Jumlah Dana	Rp.	10.282.847.000	12.390.000.000		20,49
4.	Jumlah Piutang	Rp.	2.050.500.000	2.105.653.000	???	2,69

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan PerindustrianKab. Merangin Tahun 2023

- 5) Untuk pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Pemerintah Kabupaten telah mengupayakan agar koperasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan pendapatan anggota atau masyarakat. Untuk lebih jelasnya gambaran UMKM di Kabupaten Merangin dari Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.56 : Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Merangin Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Tahun		(%)
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1.	Jumlah UMKM	11.628	11.992	2,45
2.	Jumlah Omset/ Tahun (Rp)	910.541.611.793		4,62
3.	Jumlah Omset/ Tahun (Rp)	289.133.938.868	297.301.374	4,63

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan PerindustrianKab. Merangin Tahun 2021

Perkembangan Koperasi dan UMKM yang telah dicapai Kabupaten Merangin cukup mengembirakan. namun demikian perkembangan tersebut masih perlu ditingkatkan. karena masih banyak lagi potensi yang dapat dikembangkan guna peningkatan ekonomi dimasa yang akan datang.

#### **R. Urusan Penanaman Modal**

Tujuan dari pelaksanaan urusan ini adalah agar dapat memonitor dan mengevaluasi perkembangan investasi yang ada di Kabupaten Merangin. Dari pelaksanaan kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Peluang Investasi Daerah sebagai bentuk upaya terlaksananya promosi dan tersedianya data tentang perkembangan investasi di Kabupaten Merangin. Dengan kegiatan tersebut dilaksanakan pengawasan dan mengkaji setiap investor yang merencanakan penanaman modal di Kabupaten Merangin dan mengevaluasi setiap perizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan agar pembangunan perkebunan melalui pola kemitraan berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan tidak merugikan masyarakat maupun pihak lainnya.

Selain memonitor dan mengevaluasi perkembangan investasi yang ada di Kabupaten Merangin. melalui kegiatan tersebut juga dilaksanakan promosi dalam rangka

meningkatkan investasi di kabupaten Merangin. Hasil akhir produk ini adalah terlaksananya promosi dan tersedianya data tentang perkembangan investasi di Kabupaten Merangin.

Melalui pelaksanaan Program Pengendalian dan Penyelenggaraan Perizinan dan Penanaman Modal telah dilaksanakan pelayanan perizinan sebanyak 2455 izin. Untuk melihat lebih jelas kegiatan pelayanan perizinan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.57 : Rekapitulasi Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2022**

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	2	3
1	OSS BADAN USAHA	87
2	OSS PERORANGAN	18
3	OSS IUMK	177
4	OSS IUJK	14
5	IMB PERUMAHAN	230
6	IMB RTT	109
7	IMB KONSTRUKSI	176
8	IMB TOWER	9
9	IMBR	5
10	IMB PEMERINTAH	13
11	IMB LEMBAGA PENDIDIKAN	239
12	REKLAME	3
13	ANGKUTAN JALAN	662
14	SIP DOKTER	108
15	SIP BIDAN	185
16	SIP PERAWAT	45
17	SIP ANALIS	17
18	SIP RADIOGRAFER	14
19	SIP GIGI DAN MULUT	6
20	SIPA	15
21	SIPTTK	22
22	REFLAKSI OPTISAN	2
23	OPTIKAL	2
24	TOKO OBAT	3
25	APOTIK	7
26	FISIOTERAPI	3
27	SANITARIAN	2
28	SIPRT	17
29	IZIN MENDIRIKAN KLINIK	4



NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	2	3
30	OPERASIONAL KLINIK	4
31	IZIN OPERASIONAL SEKOLAH	256
32	AKUPUNTUR	1
<b>TOTAL</b>		<b>2.455</b>

Sumber : Dinas PMPTSP-TK TAHUN 2023

### S. Urusan kepemudaan dan olahraga;

Dalam rangka Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing merupakan misi Pemerintah Kabupaten Merangin periode 2018-2023 dengan strategi pembangunan salah satunya adalah meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan. Upaya peningkatan prestasi generasi muda ini tentunya dipengaruhi oleh kualitas sumberdaya pemuda sebagai penggerak pembangunan.

Capaian Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kepemudaan dan olah raga. pada tahun 2022 antara lain berikut ini:

- 1) Melalui peningkatan peran serta kepemudaan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin adalah pembinaan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
- 2) Dalam upaya mendukung peran kepemudaan. secara berkesinambungan Pemerintah Kabupaten Merangin secara konsisten terus melakukan rangsangan dan memberikan dorongan kepada organisasi kepemudaan untuk dapat memberdayakan diri dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini pemerintah tidak terjun secara langsung dalam pengelolaan organisasi kepemudaan, akan tetapi memberikan arahan dan

bimbingan dalam mendukung kegiatan organisasi kepemudaan tersebut. Selain itu Pemerintah kabupaten merangin juga intens membina generasi muda melalui kegiatan keolahragaan dengan mendukung even atau kegiatan yaitu Sepak Bola, Bola Volly, Road Race dan Adventure Touring mobil dan motor dan kegiatan lainnya.

Untuk kedepan diharapkan setiap organisasi kepemudaan bisa lebih mandiri dalam mengelola organisasinya dan mempunyai kreatifitas yang mampu memberikan cerminan generasi bangsa yang produktif dan imajinatif. Dengan tekad dan kemauan yang kuat dari seluruh elemen yang ada terutama pemudanya. maka tidak mustahil apabila beberapa tahun ke depan menjadi Kabupaten Merangin yang kuat dan sejahtera.

#### **T. Urusan Statistik**

Data statistik merupakan data yang dikumpulkan secara periodik. dengan metode ilmiah yang teruji. dan direkam untuk jangka waktu yang cukup lama. Makin lama dan makin banyak data yang tersedia makin baik menghasilkan analisa dan prediksi yang akurat. Sedangkan manfaat data statistik adalah untuk membuat hipotesa dan penilaian empiris ketika seseorang harus membuat keputusan akan sesuatu hal yang tidak bisa dianalisa secara eksak. Statistika bersifat ilmiah. bukan metafisis.

Pada tahun 2022 yang melaksanakan program dan kegiatan urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutan. Dinas Peternakan Perikanan dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan dan penyusunan statistik bidang peternakan. kegiatan ini berupa

penyediaan data statistik bidang Pertanian. Namun dalam hal publikasi data statistik daerah Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Merangin pada tahun 2022 masih tetap bekerja sama dengan BPS Kabupaten Merangin, sebagai upaya publikasi Merangin Dalam Angka (MDA) Tahun 2023 dan Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin Tahun 2022.

#### **U. Urusan Kebudayaan**

Pembangunan dalam bidang kebudayaan sampai saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan sebagai akibat dari berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Secara umum permasalahan yang dihadapi dewasa ini, antara lain rendahnya apresiasi dan kecintaan terhadap budaya dan produk dalam negeri; semakin pudarnya nilai-nilai solidaritas sosial, keramahtamahan sosial dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, serta semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan belum memadainya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya.

Permasalahan mengenai kebudayaan masyarakat tersebut perlu dilakukannya peningkatan publikasi, serta untuk menjadi pertimbangan pemerintah daerah dengan dukungan unsur pemerintahan dan masyarakat agar dilakukan berbagai upaya seperti mengadakan berbagai kegiatan seni dan budaya yang mampu menjadi daya tarik masyarakat luas maupun wisatawan untuk lebih ingin mengetahui tentang Kabupaten Merangin, mengikuti event-

event kesenian dan kebudayaan serta mampu membuat publikasi dalam bentuk dokumentasi visual yang akan diberikan sebagai cendera mata terhadap tamu-tamu pemerintahan sebagai bentuk publikasi kebudayaan daerah. Melalui kegiatan Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Sanggar seni secara berkesinambungan. Sampai dengan tahun 2021 jumlah sanggar seni tari dan musik yang telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Merangin adalah sebanyak 42 Sanggar yang terdiri dari sanggar tari sebanyak 18 sanggar dan sanggar musik sebanyak 24 sanggar paguyuban.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Merangin dalam upaya Pelestarian Budaya dan Pembinaan kesenian daerah telah mengikuti atau melaksanakan berbagai even diantaranya:

- ✚ Festival Melayu Day, Yala di Thailand
- ✚ Festival Music Tradisional Taman Budaya Jambi
- ✚ Temu Theater Sesumatera
- ✚ Festival Theater Taman Budaya

## **V. Urusan Perpustakaan**

Sejalan dengan kebijakan Perpustakaan Nasional diarahkan pada peningkatan minat baca dan budaya gemar membaca. Pemerintah Kabupaten Merangin melalui urusan perpustakaan pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Perpustakaan Keliling disediakan untuk memberikan layanan ekstensi. yaitu masyarakat yang lokasinya jauh dari perpustakaan. Perpustakaan keliling

memberikan layanan bergerak mendatangi penggunanya di beberapa tempat pemukiman penduduk. dan tempat terkonsentrasinya jumlah penduduk seperti sekolah. kantor kelurahan. dan Kantor Desa. Perpustakaan keliling di Kabupaten Merangin menggunakan mobil yang dirancang khusus untuk keperluan perpustakaan. Adapun tujuan dari pelaksanaan perpustakaan keliling ini adalah untuk: Memeratakan layanan informasi dan bacaan kepada masyarakat sampai daerah terpencil dan belum/tidak mungkin didirikan perpustakaan menetap; Membantu perpustakaan umum dalam mengembangkan pendidikan informal kepada masyarakat; Memperkenalkan buku-buku dan bahan pustaka lainnya kepada masyarakat; Memperkenalkan jasa perpustakaan kepada masyarakat. sehingga tumbuh budaya untuk memanfaatkan jasa perpustakaan kepada masyarakat; Meningkatkan minat baca dengan mengembangkan cinta buku pada masyarakat; dan Mengadakan kerjasama dengan lembaga masyarakat sosial. pendidikandalam meningkatkan kemampuan intelektual dan kultural masyarakat.

Capaian pada urusan Perpustakaan pada tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Untuk perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.58 : Perkembangan Perpustakaan di Kabupaten Merangin Tahun 2014 s/d 2022**

No	Uraian	Tahun								Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan									
	-Judul	18.799	18.799	18.799	19.799	20.523	21.147	14.994	16.364	

No	Uraian	Tahun								Ket
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-Exlampar	37.803	37.803	37.803	38.791	40.738	46.548	22.126	24.084	
2	Jumlah Pengunjung	1294	2642	2711	4.090	5.120	6.742	3.893	4.956	
3	Jumlah Perpustakaan									
	-Perpustakaan Desa	77	77	77	77	84	40	30	40	
	-Perpustakaan Kelurahan	10	10	10	10	10	10	10	10	
	-Perpustakaan Sekolah	427	428	428	428	428	428	428	428	
	-Perpustakaan Khusus	310	310	312	312	312	312	-	-	
	-Perpustakaan PT	3	3	3	3	3	3	3	3	
	-Perpustakaan PAUD	164	164	164	164	264	264	-	-	

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Merangin Tahun 2023

## W. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan Urusan Kearsipan selain dilaksanakan oleh perangkat daerah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin, juga dilaksanakan oleh internal OPD masing-masing. Gambaran capaian pelaksanaan Urusan Kearsipan dapat dilihat pada uraian berikut ini :

Sebagai upaya untuk mewujudkan dan menindaklanjuti kegiatan akuisisi Arsip Pemerintah Kabupaten Merangin telah melaksanakan penyusutan dan penataan pemberkasan Arsip In Aktif dan Arsip penting lainnya. Untuk tahun 2021 telah dilaksanakan pemberkasan arsip sebanyak 420 berkas sehingga jumlah pemberkasan arsip yang dilaksanakan oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 12.030 berkas. Dalam upaya pemeliharaan rutin dan berkala arsip daerah dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah dalam bentuk penyusutan dan penataan pemberkasan arsip in aktif

dan arsip penting lainnya. secara khusus dengan hasil telah dilakukan pemberkasan arsip dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.59 : Pemberkasan Arsip In Aktif dan Arsip Penting Lainnya dari Tahun 1999 Sampai Dengan 2022**

NO	Tahun	Volume	Keterangan
1	2	3	4
1	1999	150 berkas	Arsip yang dibungkus/diberkas adalah diperoleh dari karung-karung arsip kacau pada gudang arsip Kantor Bupati Merangin kemudian dipilah di Kantor arsip daerah Kabupaten Merangin
2	2000	420 berkas	
3	2001	215 berkas	
4	2002	350 berkas	
5	2003	500 berkas	
6	2004	766 berkas	
7	2005	1.576 berkas	
8	2006	1.000 berkas	
9	2007	800 berkas	
10	2008	750 berkas	
11	2009	615 berkas	
12	2010	550 berkas	
13	2011	623 berkas	
14	2012	348 Berkas	
15	2013	348 Berkas	
16	2014	706 Berkas	
17	2015	286 Berkas	
18	2016	200 Berkas	
19	2017	206 Berkas	
20	2018	240 Berkas	
21	2019	730 Berkas	
22	2020	231 Berkas	
23	2021	420 Berkas	
24	2022	???	
Jumlah		<b>12.030 berkas</b>	

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin Tahun 2023

Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022 oleh Pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Provinsi terhadap Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) telah menetapkan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Kabupaten/Kota dalam Keputusan Kepala ANRI Nomor 389 Tahun 2020 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Instansi Pemerintah Tingkat Pusat Tahap II dan Peringkat Nilai Hasil Pengawasan Tingkat Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022. Pada tahun 2022 dari hasil Pengawasan Kearsipan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022 berdasarkan Lampiran Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-AK.01.01/ 225/2022 Tanggal 01 Februari 2021 dimana Pengawasan Kearsipan Kabupaten Merangin mendapatkan Peringkat Ke 3 (tiga) se Provinsi Jambi.

#### **X. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Adapun capaian pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan budidaya keramba dan pengembangan budidaya kolam. Sampai dengan tahun 2022 luas areal budidaya Kolam perikanan di Kabupaten Merangin mencapai 358,20 Ha. Perkembangan areal budidaya perikanan di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.60 Perkembangan Luas Areal Budidaya Perikanan Kabupaten Merangin Tahun 2020 dan Tahun 2021**

No	Jenis Kegiatan	Realisasi		Peningkatan (%)
		2020	2021	
1	2	3	4	5
1	Budidaya Kolam (Ha)	332,07	358,20	7,87
2	Budidaya KJA (Unit)	383	401	4,70
3	Budidaya Mina Padi (Ha)	4,1	2,8	(31,71)

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Merangin Tahun 2022

- 2) Sedangkan perkembangan produksi Perikanan Kabupaten Merangin secara keseluruhan baik produksi perikanan perairan umum maupun budidaya tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



**Tabel 2.61 : Perkembangan Produksi Perikanan Kabupaten Merangin Tahun 2021 dan Tahun 2022.**

No	Jenis Kegiatan	Realisasi (Ton)		Peningkatan (%)
		2021	2022	
1	2	3	4	5
1.	Perairan Umum	882,03	785,41	(10,95)
2.	Budidaya Kolam	1.362,85	1.455,89	6,83
3.	Budidaya KJA	186,66	206,48	10,62
4.	Budidaya Mina padi	20	39,11	95,55
	<b>Jumlah Total</b>	<b>2.451,54</b>	<b>2.486,9</b>	<b>1,44</b>

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Merangin Tahun 2022

### Y. Urusan Pariwisata

Penanganan Urusan Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2020 lebih diarahkan pada upaya pengembangan potensi objek wisata dan seni melalui pekan seni budaya. Pendayagunaan potensi wisata. Peningkatan Sumberdaya Manusia di bidang Kepariwisata dan pengembangan informasi pariwisata. Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata antara lain:

- 1) Perkembangan sarana pendukung pariwisata di Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.62 : Banyaknya Sarana Wisata di Kabupaten Merangin dari Tahun 2014 s/d 2022**

No	Sarana Wisata	Tahun								
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Hotel	18	14	14	17	19	55	55	67	
2.	Rumah Makan	54	73	73	99	99	112	129	129	
3.	Biro Perjalanan	15	4	4	5	8	4	6	7	

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Merangin

- 2) Hingga saat ini, keaneka ragaman potensi kepariwisataan di Kabupten Merangin sangat beragam seperti wisata alam, wisata buatan dan budaya. Pembnguan bidang pariwisata merupakan upaya pengelolaan sumber daya untuk memastikan kapasitas sektor pariwisata jangka panjang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bidang pariwisata menjadi isu penting sebagai bagian dari promosi pembangunan yang bisa mendatangkan kesempatan bagi daerah maupun masyarakat dalam menaikkan taraf hidup atau derajat kesejahteraan. Pembangunan bidang pariwisata merupakan upaya-upaya yang diarahkan untuk Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pariwisata; Menciptakan struktur kelembagaan di tingkat dasar/tapak dan tingkat Kabupaten; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik Pedesaan didaerah destinasi pariwisata maupun masyarakat di Kabupaten Merangin umumnya.
- 3) Dalam rangka penyebaran informasi, pemasaran dan promosi kepariwisataan baik keluar maupun di dalam daerah yang berada di Kabupaten Merangin guna memberikan pelayanan dan informasi secara luas.
- 4) Terkait dengan pontensi wisata Kabupaten Merangin yaitu “Geopark” (taman bumi), pada tahun 2021 telah dilaksanakan pembangunan sarana-prasarana pariwisata penunjang kawasan Geopark berupa pembangunan fisik dan non fisik. Untuk pembangunan fisik telah dibangun di 6 (enam) lokasi yakni Objek Danau Wisata Danau Pauh, Danau Depati IV, Air Terjun Segirincing, Sungai Mengkarang, Zona Inti Geopark (Teluk Gedang, Muara Karing dan Teluk Wang), Goa Tiangko dan Goa

Sengerincing. Sedangkan pembangunan non Fisik dalam bentuk pemberdayaan/pembinaan SDM para pelaku wisata seperti tata kelola pariwisata, pelatihan Homestay dan pemandu wisata melalui anggaran APBD Kabupaten Merangin dan APBN.

## **Z. Urusan Pertanian**

Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin melalui OPD yaitu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan dan Perkebunan; serta Dinas Ketahanan Pangan. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sejak tahun 2020 dan 2021 lebih diarahkan menekan dampak dan pemulihan dari Pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Kabupaten Merangin dalam bentuk peningkatan system kewaspadaan pangan dan tetap menyediakan dan menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat melalui:

- a) Mendorong dan memotivasi petani untuk tetap berproduksi.
- b) Meningkatkan produksi pangan dengan memaksimalkan pembinaan dan bantuan terhadap 7 (tujuh) kecamatan kawasan lumbung beras.
- c) Melakukan terobosan dan inovasi - inovasi baru dalam peningkatan produksi dan kualitas produk pertanian, dalam upaya mewujudkan unggul bidang pertanian dapat tercapai guna peningkatan kesejahteraan petani di kab. merangin.
- d) Mewujudkan inovasi dan terobosan baru dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah

- e) Menjaga rantai pasok dengan meningkatkan kapasitas produksi beras dan pangan utama lainnya.
- f) Memastikan kelancaran distribusi pangan dari produsen ke konsumen.
- g) Adanya upaya melindungi petani dan nelayan melalui penyediaan program bantuan sosial berupa uang/barang untuk meringankan beban biaya petani miskin.

Adapun Capaian dari pelaksanaan Urusan Pertanian kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2022 untuk mendukung Pengembangan dan Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura, Penyediaan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida, Penyediaan Alsintan Pra Panen dan Pasca Panen telah dilaksanakan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dalam bentuk kegiatan Pengadaan Hand Sprayer 4 unit, Perbanyak Benih Kentang di BBU Kentang Jangkat 2,5 Ha, Perbanyak Benih Padi Sawah di BBU Margoyoso 6 Ha, Renovasi Gedung Kantor BBU Kentang Jangkat, Percontohan Padi Sawah 70 Ha mendukung 7 Kecamatan Lumbang Beras, Pengadaan Power Treser 3 Unit, Pengembangan Bawang Merah 1 Ha, Pengembangan Tanaman Cabai Merah 3,5 Ha.
- 2) Selanjutnya dalam rangka Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pembangunan dan renovasi Prasaran Irigasi Pertanian, Jalan Usaha Tani, Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP Kecamatan dan penyediaan Sarana Keinformasian BPP.

Adapun program tersebut telah dilaksanakan Pembangunan Embung 3 Unit, Pembangunan Jalan Usaha Tani 6 unit, Pembangunan DAM Parit 6 unit, pembangunan *Long Storage* 2 unit, dan Pembangunan Pintu Air 4 unit. Adapun Realisasi Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.63 : Realisasi Kegiatan DAK Fisik Penugasan Kabupaten Merangin Tahun 2022**

SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	LOKASI	Volume	Realisasi Fisik	
				Volume	%
1	2	3	4	5	6
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam)	Kec. Margo Tabir Desa Lubuk Bumbun	1	1	100
	Pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam)	Kec. Renah Pamenang Desa Rasau	1	1	100
	Pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam)	Kec. Renah Pamenang Desa Rasau	1	1	100
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan Embung	Kec. Pamenang Desa	1	1	100
	Pembangunan Embung	Kec. Tabir Desa Lubuk Napal	1	1	100
	Pembangunan Embung	Kec. Tabir Lintas Desa Koto Baru	1	1	100
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam Parit	Pembangunan Dam Parit	Kec. Jangkat Timur Desa Talang	1	1	100
	Pembangunan Dam Parit	Kec. Pamenang Desa Pamenang	1	1	100
	Pembangunan Dam Parit	Kec. Pangkalan Jambu Desa Sungai	1	1	100
	Pembangunan Dam Parit	Kec. Tabir Barat Desa Muara Kibul	1	1	100
	Pembangunan Dam Parit	Kec. Tabir Barat Desa Air Liki	1	1	100
	Pembangunan Dam Parit	Kec. Tabir Barat Desa Air Liki Baru	1	1	100

SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	LOKASI	Volume	Realisasi Fisik	
				Volume	%
1	2	3	4	5	6
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Pembangunan long storage	Kec. Pangkalan Jambu Desa Tanjung	1	1	100
	Pembangunan long storage	Kec. Tabir Ulu Desa Muara Seketuk	1	1	100
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pembangunan pintu air	Kec. Pamenang Desa Kerova	1	1	100
	Pembangunan pintu air	Kec. Tabir Desa Seling	1	1	100
	Pembangunan pintu air	Kec. Tabir Desa Beluran Panjang	1	1	100
	Pembangunan pintu air	Kec. Tabir Ulu Desa Muara Jernih	1	1	100
Pembangunan Jalan Pertanian	Pembangunan jalan usaha tani	Kec. Sungai Manau Desa Seringat	0,4 Km	0,4 Km	100
	Pembangunan jalan usaha	Kec. Renah Pembarap Desa Muara Deras	0,4 Km	0,4 Km	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta saran pendukungnya	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Renah Pembarap	Kec. Renah Pembarap	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Pamenang	Kec. Pamenang	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Bangko	Kec. Bangko	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Bangko	Kec. Bangko Barat	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Jangkat	Kec. Jangkat	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Muara	Kec. Muara Siau	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Nalo	Kec. Nalo Tantan	1	1	100
Pembangunan, Rehabilitasi dan	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-	Kec. Pamenang Selatan	1	1	100

SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	LOKASI	Volume	Realisasi Fisik	
				Volume	%
1	2	3	4	5	6
Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta saran pendukungnya	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Sungai	Kec. Sungai Manau	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Tabir Barat	Kec. Tabir Barat	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Tabir Lintas	Kec. Tabir Lintas	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Tabir Selatan	Kec. Tabir Selatan	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Tiang Pumpung	Kec. Tiang Pumpung	1	1	100
	Renovasi Ruang Data dan Informasi BPP-Pamenang Barat	Kec. Tiang Pamenang Barat	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP - Bangko	BPP.Bangko	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP - Bangko	BPP.Bangko Barat	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP - Jangkat	BPP. Jangkat	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP - Muara Siau	Kec. Bangko Barat	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP - Nalo Tantan	Kec. Jangkat	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP - Pamenang	Kec. Muara Siau	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP - Pamenang Barat	Kec. Nalo Tantan	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP - Pamenang Selatan	Kec. Pamenang Selatan	1	1	100

SUB KEGIATAN	PEKERJAAN	LOKASI	Volume	Realisasi Fisik	
				Volume	%
1	2	3	4	5	6
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP – Renah Pembarap	Kec. Renah pembarap	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP – Sungai Manau	Kec. Sungai Manau	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP – Tabir Barat	Kec. Tabir Barat	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP – Tabir Lintas	Kec. Tabir Lintas	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP - Tabir	Kec. Tabir Selatan	1	1	100
	Penyediaan Sarana Keinformasian BPP – Tiang Pumpung	Kec. Tiang Pumpung	1	1	100

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Merangin Tahun 2023

3) Dalam upaya mendukung percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan mendukung Program Pemerintah Pusat Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), melalui pemerintah Provinsi Jambi , pada tahun 2021 Kabupaten merangin memperoleh Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian untuk mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Merangin. Adapun output dari kegiatan ini antara lain adalah :

- Hand Traktor Roda 2 Zena Rotary 2 unit.
- Cultivator 2 unit
- Mesin Pencacah Pelepah Sawit 2 unit
- Mesin Penggiling Pekepah/Rumput/Choper 2 unit

4) Untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Daerah (PED), dampak dari Pandemi Covid-19 melalui APBD Provinsi Jambi telah dilaksanakan kegiatan Demontrasi Plot



(Demplot) Sekolah Lapangan Pemupukan Berimbang pada Padi Sawah 3 Ha, serta Pelatihan Petani Dan Petugas Pertanian terkait Tematik Jagung (Pengolahan), Peningkatan Kapasitas Penyuluhan THL-TB, Bimbingan teknis pemasaran online dan lain sebagainya

5) Kabupaten Merangin memiliki potensi lahan sawah untuk tanaman pangan terutama padi sawah yang cukup luas untuk dapat dimanfaatkan. Sebagai gambaran, potensi lahan sawah kondisi tahun 2022 sebagai berikut:

- ✚ Penggunaan lahan sawah irigasi seluas 4.425 Ha
- ✚ Tadah Hujan seluas 2.374 Ha. Rawa Lebak seluas 236 Ha
- ✚ Lahan sawah yang dapat ditanami 3 kali setahun seluas 520,72Ha
- ✚ Lahan sawah yang dapat ditanami 2 kali setahun seluas 3.869,18 Ha
- ✚ Lahan sawah yang dapat ditanami 1 kali setahun seluas 2.555,20 Ha
- ✚ Lahan Sementara tidak diusahakan setahun seluas 89,56 Ha

6) Berdasarkan data-data tersebut maka peluang dan potensi untuk peningkatan intensitas pertanaman (IP) pada lahan sawah masih cukup tersedia dengan mengupayakan :

- ✚ Lahan sementara yang tidak diusahakan menjadi IP 100% melalui perluasan optimalisasi lahan.
- ✚ Lahan sawah yang dapat ditanami 1 kali setahun atau IP 100% menjadi IP 200% melalui peningkatan luas tanam pada satuan lahan sawah.
- ✚ Lahan sawah yang dapat ditanami 2 kali setahun

atau IP 200% menjadi 300% melalui peningkatan peningkatan luas tanam pada satuan lahan sawah dengan pengaturan pola tanam padi-padi palawija.

- 7) Selanjutnya di untuk pengelolaan bidang peternakan Pemerintah Kabupaten Merangin telah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Ternak Menular dalam bentuk perlindungan hewan terhadap penyakit melalui tindakan vaksinasi. pembinaan kesehatan hewan dan kewaspadaan dini serta pengendalian penyakit hewan baik yang menular maupun tidak menular.
- 8) Perkembangan populasi ternak ruminasia di Kabupaten Merangin dari dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.64 : Populasi Ternak Ruminansia pada Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jenis Ternak			
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	2	3	4	5	6
1	Bangko	111	95	351	112
2	Bangko Barat	416	56	161	286
3	Batang Masumai	256	123	100	265
4	Nalo Tantan	183	155	193	473
5	Pamenang	2.836	481	7.60	233
6	Pamenang Barat	828	62	245	162
7	Pamenang Selatan	442	105	260	-
8	Renah Pamenang	1.996	65	178	-
9	Tabir	89	514	6.804	241
10	Tabir Ulu	83	429	4.799	247
11	Tabir Selatan	3.900	95	6.216	106
12	Tabir Ilir	183	115	352	148
13	Tabir Timur	946	183	6.401	208
14	Tabir Lintas	154	67	469	236
15	Margo Tabir	1.233	50	892	204
16	Tabir Barat	5558	515	372	202
17	Renah Pembarap	136	172	511	106
18	Sungai Manau	339	474	283	194
19	Pangkalan Jambu	278	123	478	466
20	Muara Siau	66	64	3.402	1
21	Tiang Pumpung	73	67	198	425
22	Lembah Masurai	51	65	420	156
23	Jangkat	656	141	193	105

24	Sungai Tenang	462	114	156	73
	<b>Jumlah 2021</b>	<b>15.774</b>	<b>4.405</b>	<b>40.496</b>	<b>7.649</b>
	<b>Jumlah 2020</b>	<b>17.078</b>	<b>4.601</b>	<b>40.033</b>	<b>5.749</b>

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin Tahun 2023

9) Secara umum populasi ternak non ruminansia seperti perkembangan populasi ternak ayam buras sampai dengan tahun 2017 dan 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.65 : Populasi Ternak Non Ruminansia di Kabupaten Merangin Tahun 2017 S/D 2022**

No	Jenis Ternak	Populasi (Ekor)					2022
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	5	6	7	8	9	
1	Ayam Buras	995.472	1.179.412	1.124.352	1.357.700	1.191.723	
2	Ayam Ras	637.161	527953	526.101	2.188.504	2.555.812	
3	Ayam Petelur	27.374	28.630	18 935	53 138	66 554	
4	Itik	2.000	5.382	25 982	26 426	25 955	????
	<b>Jumlah</b>	<b>1.662.007</b>	<b>1.741.377</b>	<b>1.650.453</b>	<b>3.546.204</b>	<b>3.747.535</b>	

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2023

10) Adapun gambaran Luas Tanaman, Produksi, Produktivitas Perkebunan Rakyat di Kabupaten Merangin tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.66 : Luas Tanaman Produksi Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat di Kabupaten Merangintahun 2020 dan 2021**

No	Jenis Tanaman	Luas Area (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kg/Ha)		Jumlah Petani (KK)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Karert	138.458	138.110	77.666	77.847	940	945	52104	52209
2	Kelapa Sawit	59.997	60.395	203.980	205.805	4.267	4.270	36.734	36.785
3	Kelapa Hybrida	119	112	38	35	339	333	479	475
4	Kelapa Dalam	1.356	1.339	756	750	707	703	9357	9299

No	Jenis Tanaman	Luas Area (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Kg/Ha)		Jumlah Petani (KK)	
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Casiavera	4.122	4.143	3.546	3.516	1.671	1.668	2.315	2.331
6	Kopi robusta	11.357	11.492	10.598	10.697	1.327	1.331	9.354	9.368
7	Kopi arabika	70	64	4	20	1.000	800	21	21
8	Kemiri	11	11	7	7	636	636	111	111
9	Pinang	291	289	50	47	299	290	1990	1498
11	Kakao	271	288	58	66	667	667	2197	2201
12	Aren	23	18	12	8	706	667	206	67
13	Nilam	1.253	1.232	174	159	195	188	2839	2711
14	Kapuk	3	3	3	3	1.000	1.000	76	76
15	Tembakau	11	9	5	4	833	800	8	5
Jumlah		<b>217.342</b>	<b>217.505</b>	<b>296.897</b>	<b>298.964</b>	<b>14.587</b>	<b>14.298</b>	<b>117.791</b>	<b>117.157</b>

Sumber : Dinas Peternakan dan Perkebunan Tahun 2023

## AA. Urusan Perdagangan

Sebagai salah satu urusan yang memiliki dampak cukup besar terhadap perekonomian masyarakat, sektor perdagangan menjadi bagian dari prioritas pembangunan Kabupaten Merangin. Pelaksanaan urusan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan. dan memberikan sumbangan yang sangat cukup berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Capaian pelaksanaan Urusan Perdagangan pada tahun 2022, diantaranya:

- 1) Gambaran jumlah pasar di Kabupaten Merangin berdasarkan kecamatan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.67 Perkembangan Jumlah Pasar Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin Sampai dengan Tahun 2022**

NO	Kecamatan	Jumlah	Jenis Pasar
1	2	3	4
1	Jangkat	6	Pasar Tradisional
2	Jangkat Timur	3	Pasar Tradisoinal
3	Muara Siau	1	Pasar Tradisional
4	Lembah Masurai	5	Pasar Tradisional
5	Tiang Pumpung	1	Pasar Tradisional
6	Pamenang	7	Pasar Tradisional
7	Pamenang Barat	4	Pasar Tradisional
8	Renah Pamenang	4	Pasar Tradisional
9	Pamenang Selatan	3	Pasar Tradisional
10	Bangko	4	Pasar Rakyat dan Pasar Modren
11	Bangko Barat	3	Pasar Tradisional
12	Batang Masumai	2	Pasar Tradisoinal
13	Nalo Tantan	2	Pasar Tradisional
14	Sungai Manau	1	Pasar Tradisional
15	Renah Pembarap	1	Pasar Tradisional
16	Pangkalan Jambu	1	Pasar Tradisional
17	Tabir	1	Pasar Tradisional
18	Tabir Ulu	3	Pasar Tradisional
19	Tabir Selatan	6	Pasar Tradisoinal
20	Tabir Ilir	4	Pasar Tradisional
21	TabirTimur	3	Pasar Tradisional
22	Tabir Lintas	1	Pasar Tradisional
23	Margo Tabir	3	Pasar Tradisional
24	Tabir Barat	1	Pasar Tradisional
Jumlah 2021		<b>70</b>	
Jumlah 2020		<b>70</b>	
Jumlah 2019		<b>78</b>	
Jumlah 2018		<b>78</b>	
Jumlah 2017		<b>78</b>	
Jumlah 2016		<b>78</b>	
Jumlah 2015		<b>39</b>	
Jumlah 2014		<b>39</b>	

Sumber: Dinas Koperasi. UKM. Perindag Tahun 2023

- 2) Terkait dengan kegiatan Monitoring Pengawasan Alat Ukur Takar. Timbangan dan Perlengkapannya yang merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran alat ukur, takar dan timbangan yang digunakan masyarakat dalam transaksi jual beli. Pada tahun 2020 dengan telah dibentuknya UPTD Metrologi melaksanakan kegiatan berupa melakukan verifikasi standar kerja alat UTTP dibidang serta monitoring pengawasan dan tera ulang UTTP.

- 3) Selanjutnya sebagai upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian di wilayah Kabupaten Merangin khususnya di Ibukota, Kabupaten maupun Kecamatan. Melalui kegiatan pembinaan, penertiban dan pengawasan pasar. Telah dilakukan kegiatan penertiban dan pengawasan pasar terhadap asset Pemetintah Daerah yang telah dibangun antara lain, ruko, kios, dan los pasar dan telah di manfaatkan dalam upaya menumbuhkan perekonomian daerah.

### BB. Urusan Perindustrian

Pada urusan Perindustrian, gambaran capaian pelaksanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkembangan industri gambaran Data Perkembangan Industri Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.68 : Data Perkembangan Industri di Kabupaten Merangin Tahun 2021 s/d Tahun 2022**

No	Uraian	Satuan	2021	2022	%
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Industri	Unit Usaha	1.862	1.927	3,49
2.	Penyerapan Tenaga Kerja	Orang	5.932	5.932	-
3.	Nilai Investasi	Rupiah	245.504.949.000	246.031.199.000	0,21
4.	Nilai Produksi	Rupiah	104.548.776.000	108.993.756.000	4,25
5.	Sentra Industri Kecil	Kelompok	6	6	-
6.	Wira Usaha Baru	Unit Usaha	50	65	30,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Merangin Tahun 2023

- 2) Pembinaan bidang industri. Dalam upaya peningkatan perekonomian di Kabupaten Merangin dilaksanakan melalui APBD Kabupate Merangin telah dilaksanakan

melalui kegiatan diantaranya : Temu Usaha Industri. Penyediaan Sarana Promosi Industri Kecil Menengah. Pelatihan Teknis Produksi, Gelar produk UKM Kabupaten Merangin, dan Monitoring Usaha Industri.

### **2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

Gambaran capaian pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pilihan berdasarkan hasil, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja di tuangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.70 : Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1.	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	14,84%	BPKAD Kabupaten Merangin	
		&nbsp;			
		Rasio PAD	10,66%	BPKAD Kabupaten Merangin	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	ADA	BPKAD Kabupaten Merangin	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	ADA	BPKAD Kabupaten Merangin	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer)	59,11%	BPKAD Kabupaten Merangin	
		Opini Laporan Keuangan	ADA	BPKAD Kabupaten Merangin	
2.	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya.&nbsp; yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Merangin	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	5,09%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Merangin	



		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan &nbsp; &nbsp;	27,64%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Merangin	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	95,57%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Merangin	
3.	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	14,84%	BPKSDMD	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		BPKSDMD	
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		BPKSDMD	
4.	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		BPKAD	

		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		BPKAD	
		Manajemen Aset		BPKAD	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya		BPKAD	
5.	Transparansi dan Partisipasi publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) &nbsp; &nbsp;		Dinas Kominfo	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;		Dinas Kominfo	

Adapun uraian capaian dari pelaksanaan program dan Kegiatan pada Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang dapat dijabarkan berikut ini:

#### **A. Urusan Perencanaan**

Pelaksanaan Urusan Perencanaan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Capaian pelaksanaan pembangunan pada urusan ini adalah sebagai berikut

- 1) Sistem Informasi Pembangunan Daerah dikembangkan berdasarkan landasan hukum Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 274 yaitu “Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah” dan di implementasikan sebagai Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Mengacu dari landasan hukum tersebut maka di keluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) setiap tahunnya untuk mencapai ketersediaan data. Pada tahun 2018 telah dikeluarkan Permendagri nomor 98 kemudian dicabut dan dikeluarkan Permendagri nomor 70 yang mengatur tentang tatakelola SIPD. Berdasarkan Permendagri nomor 70 tahun 2019 Terdapat 3 Informasi Pemerintahan daerah, salah satu di antaranya adalah menu Informasi Pembangunan Daerah yang mencakup Data Perencanaan Pembangunan Daerah, Analisis dan Profil Pembangunan Daerah dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- 2) Selanjutnya untuk pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran tahun 2022, telah melaksanakan koordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin, yaitu penerapan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2022 melalui link website <https://sipd.kemendagri.go.id/> yang mengacu dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- 3) Sebagai rangkaian kegiatan rutin tahunan terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Merangin diawali pelaksanaan Forum OPD Kabupaten Merangin. Forum OPD merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil munsrenbang tingkat kecamatan dengan OPD. menyusun dan menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) OPD, serta sinkronisasi program dengan dokumen perencanaan seperti RPJMD.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan pada tahun 2022 merupakan langkah dan upaya memformulasikan misi pembangunan dengan program dan kegiatan dengan mensinkronisasikan masukan dan usulan program kegiatan berdasarkan tingkat urgensi atau prioritasnya, baik yang berasal dari masyarakat (bottom-up) maupun yang merupakan kewajiban setiap OPD untuk melaksanakannya (top down).

Pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sampai saat ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. namun oleh karena beberapa kendala dan keterbatasan. perencanaan daerah ini belum mampu memberikan hasil yang optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas aparatur perencana yang benar-benar memiliki pengetahuan dan keterampilan perencanaan spesifik. Disamping itu. terbatasnya anggaran menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya penyusunan rencana atau kajian-kajian sektoral yang dibutuhkan sebagai sumber data penyusunan rencana pembangunan daerah. Kendala lain yang cukup mengganggu adalah masih relatif lemahnya kordinasi dan integrasi antar OPD yang terkadang menyebabkan tidak maksimalnya rencana yang disusun. Atas berbagai permasalahan dan kendala diatas. Pemerintah Kabupaten Merangin terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Untuk peningkatan kualitas aparatur perencana dilaksanakan pengiriman aparatur perencana mengikuti berbagai diklat atau kursus. sementara untuk memperkuat koordinasi dan integrasi. dilaksanakan rapat-rapat koordinasi. baik yang bersifat formal maupun non-formal.

## **B. Urusan Keuangan**

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sebagai sebuah sistem.

pengelolaan keuangan negara telah mengalami banyak perkembangan. Dengan keluarnya empat paket perundang-undangan di bidang keuangan negara tersebut, sistem manajemen keuangan negara di Indonesia terus berubah dan berkembang sesuai dengan dinamika manajemen sektor publik. dengan berdasarkan kepada empat prinsip dasar yaitu:

1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
3. Pemberdayaan manajer profesional; dan
4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri sertadihindari duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Tata kelola keuangan yang baik, pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan keuangan yang memenuhi standar keuangan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Namun demikian, aturan sebagaimana ketentuan yang ada, perlu diterjemahkan kembali dalam regulasi yang sesuai dengan daerah dan OPD yang ada. Oleh karena itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Merangin adalah :

- a. Mendukung dan mendorong pencapaian target pendapatan daerah di Kabupaten Merangin berdasar perhitungan dan perencanaan yang rasional.
- b. Mendukung upaya-upaya peningkatkan kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Merangin
- c. Mengoptimalkan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, khususnya dengan terbitnya

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. dengan jalan melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- d. Melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan baik dari tatanan perencanaan. Pelaksanaan penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi. penjajaran/ instrumen operasional. pelatihan. monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
- e. Menjabarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah secara lebih membumi dan mudah di pakai serta diterapkan oleh seluruh OPD.
- f. Penyusun anggaran. pelaksanaan dan penatausahaan. dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara cermat. akurat. tepat waktu dan tepat aturan melalui dukungan pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen pengelolaan keuangan daerah.
- g. Meningkatkan monitoring. bimbingan dan evaluasi dalam penggunaan anggaran. penambahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.
- h. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan pengajian laporan yang sesuai denga SAP.

Pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi PAD merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menciptakan peluang dan menggali sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah guna meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam rangka membantu Pemerintah Pusat dalam penagihan Pajak Pusat terhadap Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Merangin seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah dilaksanakan kegiatan Rapat Evaluasi PBB dan BPHT. dan Monitoring Penerimaan PBB dan BPHTB. Adapun pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan per Kecamatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.72 Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan PBB Per Kecamatan Kab. Merangin Tahun 2022. ???**

NO	KECAMATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	BANGKO	1.267.753.909	408.220.542	32,20
2	BANGKO BARAT	125.500.763	36.708.012	29,25
3	BATANG MASUMAI	24.739.073	13.670.129	55,26
4	NALO TANTAN	258.792.592	78.756.719	30,43
5	TABIR LINTAS	145.534.158	116.714.265	80,20
6	MARGO TABIR	121.604.173	73.963.645	60,82
7	TABIR LINTAS	245.525.452	123.749.814	50,40
8	TABIR ILIR	75.044.192	57.576.628	76,72
9	TABIR TIMUR	187.338.823	167.539.778	89,43
10	TABIR SELATAN	760.044.213	466.679.674	61,40
11	TABIR BARAT	24.291.244	18.373.024	75,64
12	TABIR ULU	47.887.149	19.320.887	40,35
13	JANGKAT	17.909.686	20.945.502	116,95
14	JANGKAT TIMUR	13.961.192	12.941.238	92,69
15	SUNGAI MANAU	41.938.711	20.943.089	49,94



16	PANGKALAN JAMBU	14.222.796	10.349.693	72,77
17	RENAH PEMBARAP	40.559.052	12.966.788	31,97
18	PAMENANG	479.757.363	242.648.642	50,58
19	PAMENANG BARAT	352.418.423	118.679.669	33,68
20	PAMENANG SELATAN	282.640.732	140.803.412	49,82
21	RENAH PAMENANG	556.968.824	331.926.721	59,60
22	TIANG PUMPUNG	20.997.890	13.488.072	64,24
23	MUARA SIAU	27.647.188	27.191.483	98,35
24	LEMBAH MASURAI	28.857.543	26.195.068	90,77
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.161.935.141</b>	<b>2.560.352.494</b>	<b>49,60</b>

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kab. Merangin Tahun 2023

Sedangkan untuk melihat capaian realisasi Penerimaan PBB dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Terkait dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. telah dilaksanakan kegiatan pembinaan SPJ OPD dan juga kegiatan Asistensi RKA/DPA/DPPA OPD dengan harapan terjadinya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan alokasi anggaran pada setiap OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan keuangan daerah. pada perinsipnya untuk mengarahkan dan menjadikan acuan dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. kebijakan-kebijakan ini diharapkan mampu menjadi pondasi dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat lebih accountable. inpectable dan predictable untuk waktu yang akan datang. Karena itu kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah ini bersifat mengikat bagi satuan OPD.

### C. Urusan Pengadaan

Jumlah Pengaddan kompetitif di Kabupaten Merangin pada tahun 2022 adalah Rp48.294.627.467,25 sebanyak 50 paket, jumlah pengadaan non kompetitif Rp90.600.110.979,00 sebanyak 982 paket. Jumlah nilai belanja operasional dan modal melalui pengadaan Rp112.181.000.000.

### D. Urusan Kepegawaian

Prioritas Pelaksanaan Urusan Kepegawaian pada peningkatan kualitas sumberdaya aparatur Pemerintah Kabupaten Merangin. secara bertahap dan berkesinambungan juga terus dilakukan sehingga nantinya dapat terwujud aparatur yang handal. trampil dan berwawasan luas, capaian pelaksanaan pembangunan Tahun 2022, pada urusan kepegawaian yaitu sebagai berikut:

- 1) Telah dilaksanakan kegiatan Diklat, Sosialisasi, Kursus Keterampilan dan Bimbingan teknis. Selain itu juga dilakukan kegiatan pengiriman PNS untuk meningkatkan jenjang pendidikan formal yaitu dengan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan tugas belajar.
- 2) Adapun perkembangan berdasarkan jenjang pendidikan gambaran, Jumlah PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.73 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Merangin berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021 dan 2022**

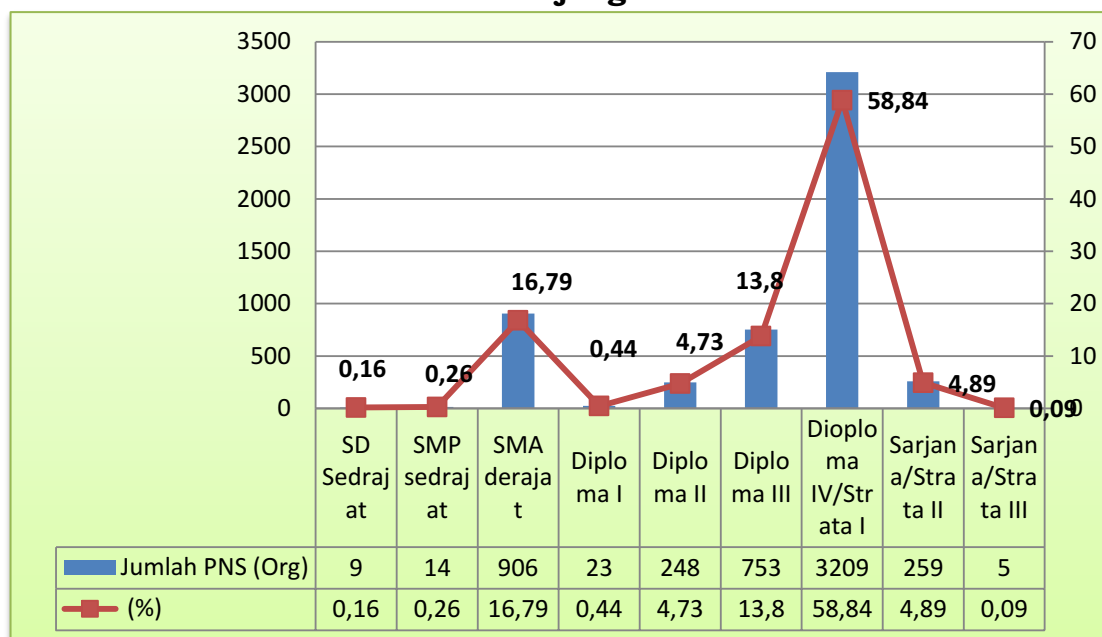
No	Jenjang Pendidikan	2021		2022	
		Jumlah PNS (Org)	(%)	Jumlah PNS (Org)	(%)
1	2	3	4	5	6
1.	SD Sedrajat	13	0,23	9	0,16
2.	SMP sedrajat	20	0,35	14	0,26

3.	SMA derajat	1051	18,41	906	16,79
4.	Diploma I	29	0,51	23	0,44
5.	Diploma II	315	5,51	248	4,73
6.	Diploma III	780	13,64	753	13,80
7.	Dioplo ma IV/Strata I	3.256	56,9	3.209	58,84
8.	Sarjana/Strata II	253	4,42	259	4,89
9.	Sarjana/Strata III	3	0,05	5	0,09
	<b>Jumlah</b>	<b>5.720</b>	<b>100</b>	<b>5.426</b>	<b>100</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Merangin Tahun 2023

Untuk lebih jelasnya gambaran jumlah PNS Kabupaten Merangin tahun 2022 berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.5 : Jumlah dan Persentase PNS Kabupaten Merangin Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2022**



3) Sedangkan gambaran jumlah pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2022 tergambar pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.74 : Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan di Kabupaten Merangin Tahun 2022**

NO	Pangkat/Golongan	Laki	Perempuan	Jumlah
----	------------------	------	-----------	--------

1	2	3	4	5
1	I/A (Juru Muda)	2	-	2
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	3	-	3
3	I/C (Juru)	7	1	8
4	I/D (Juru Tingkat I)	4	-	4
	<b>Golongan I</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
5	II/A (Pengatur Muda)	49	18	67
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	61	33	94
7	II/C (Pengatur)	174	110	284
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	122	257	379
	<b>Golongan II</b>	<b>406</b>	<b>418</b>	<b>824</b>
10	III/A (Penata Muda)	302	528	830
11	III/B (Penata Muda Tingkat I)	290	418	708
12	III/C (Penata)	369	498	867
13	III/D (Penata Tingkat I)	414	554	968
	<b>Golongan III</b>	<b>1.375</b>	<b>1.998</b>	<b>3.373</b>
14	IV/A (Pembina)	351	367	718
15	IV/B (Pembina Tingkat I)	194	273	467
16	IV/C (Pembina Utama Muda)	26	1	27
17	IV/D (Pembina Utama Madya)	-	-	-
18	IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
	<b>Golongan IV</b>	<b>571</b>	<b>641</b>	<b>1.212</b>
	<b>Total</b>	<b>2.368</b>	<b>3.058</b>	<b>5.426</b>

Sumber : BK&PSDM Kab. Merangin Tahun 2023

- 4) Melalui kegiatan Pelaksanaan pelantikan pejabat struktural dan fungsional, serta kegiatan penataan dan pemetaan PNS Kabupaten Merangin telah dilaksanakan Baperjakat dan Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional. Adapun gambaran Jumlah PNS menurut Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin menurut eselon di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.75 : Data Jabatan Struktural dan Jenis Kelamin menurut eselon di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin sampai dengan 31 Desember 2022**

Eselon	Pria	%	wanita	%	jumlah
--------	------	---	--------	---	--------

1	2	4	5	6	7
Eselon I	0	0,00	0	0,00	0
Eselon II	36	8,37	1	0,66	37
Eselon III	155	36,05	21	13,91	176
Eselon IV	239	55,58	129	85,43	368
Eselon V	0	0,00	0	0,00	0
<b>Total Jumlah</b>	<b>430</b>	<b>74,01</b>	<b>151</b>	<b>25,99</b>	<b>581</b>

Sumber : BK&PSDM Kab. Merangin Tahun 2023

### E. Urusan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka mewujudkannya peningkatan kinerja birokrasi agar birokrasi mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahan. Terkait dengan upaya menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahan antara lain dilakukan dengan mengoptimalkan pengawasan internal. eksternal dan pengawasan masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Inspektorat Kabupaten Merangin sebagai lembaga pengawas diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di Kabupaten Merangin. adapun target dan realisasi kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan kurun waktu Tahun 2014 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada table berikut ini:

**Tabel 2.76 : Rekap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tahun 2014 s/d 2022**

NO	Pemeriksaan Keuangan				Rekomendasi Pemeriksaan				
	Tahun	Temuan Keuangan	Penyelesaian	Sisa	% Realisasi	Jumlah Rekom	Tindakan	Sisa	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2014	166.888.100	166.888.100	-	100	316	316	-	100
2	2015	331.555.103	331.555.103	-	100	163	163	-	100
3	2016	911.991.023	500.992.023	410.999.000	54,93	1.065	963	102	90,42
4	2017	864.674.315	474.302.957	390.371.358	54,85	1.192	929	263	77,94
5	2018	894.183.044	553.965.493	340.217.551	61,95	996	729	267	73,19
6	2019	2.776.707.801	1.448.687.382	1.328.020.419	52,17	1.366	1.055	311	77,23
7	2020	1.559.193.191	1.163.049.105	436.144.085	72,73	249	199	50	79,92
8	2021	1.070.076.966	800.674.090	269.402.876	74,82	291	231	60	79,38

Sumber : Inspektorat Kabupaten Merangin Tahun 2022

Untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan TP TGR. sampai dengan tahun 2022 Majelis Pertimbangan TP TGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) pada Pemerintah Kabupaten Merangin dari 19 kasus yang ada telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 16 Kasus atau 84,2 %.

Dari hasil audit yang telah dilaksanakan BPK RI berkaitan dengan APBD Kabupaten Merangin yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya, secara bertahap Pemerintah Kabupaten Merangin terus melakukan berbagai perubahan dan penataan terhadap mekanisme pengelolaan keuangan daerah, sehingga Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Opini WTP diberikan jika dalam segala hal yang material. laporan keuangan sudah sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Sedang WDP jika ada ketidaksesuaian material satu atau beberapa pos laporan

keuangan namun tidak mempengaruhi kewajarannya secara keseluruhan.

### **2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi Capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja
- b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja ;
- c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah
- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai ; dan
- f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan pengeban amanah masyarakat untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin

yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut member gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2018 – 2023 dan PK Tahun 2022

pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2022 ini merupakan tahun ke tiga dari RPJMD Kabupaten Merangin 2018-2023 dengan misi “Merangin MANTAP Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”. Pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Merangin mengalami perubahan pada RPJMD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 – 2023.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokan dalam sekala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:



Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/Sesuai Target
>100%	Melebihi Target

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Pemendagri Nomor 54 Tahun 2010. Sebagai berikut:

No	Kategori	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	> 90
2	Baik	75.00 – 89.99
3	Cukup	65.00 – 74.99
4	Kurang	50.00 – 64.99
5	Sangat Kurang	0 – 49.99

#### a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja

**Tabel 2.74 : Perjanjian Kinerja Kabupaten Merangin Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>MISI I: MENGEMBANGKAN SUMBERDAYA BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA.</b>			
1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	2,75%
2	Berkembangnya pariwisata berkelanjutan berbasis geopark Nasional Merangin Jambi (Geo wisata)	Jumlah Kunjungan Wisatawan	62.010 orang
3	Realisasi Investasi	Nilai Investasi	1.065 milyar
<b>MISI II: MENINGKATKAN KUALITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN</b>			
4	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	1. Indeks jalan mantap 2. Indeks irigasi 3. Indeks infrastruktur permukiman	76,30% 70,11% 67%
<b>MISI III: MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING</b>			

5	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,68 %
6	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,3
<b>MISI IV: MEMANTAPKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH DAN MELAYANI MENUJU WORLD CLASS GOVERNMENT</b>			
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi	1. Indek Reformasi Birokrasi 2. Nilai AKIP 3. Opini BPK terhadap LKD	B B WTP

**b. Pengukuran capain kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja**

**Capaian Perjanjian Kinerja dan Capaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2022**

**Tabel 2.75 : Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Petanian	2,75%	4,87%	92,76
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan	62.010	246,938	398,00
3	Nilai Investasi	1.065 Milyar	358,4 Milyar	43,76
4	Indeks jalan mantap	76,30%	71,11%	100,07
5	Indeks irigasi	70,11%	65,61%	93,44
6	Indeks infrastruktur permukiman	67%	57,23%	84,16
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,68 %	69,53	100,33
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,3	88,24%	99,8
9	Indek Reformasi Birokrasi	B	C	93,66
10	Nilai AKIP	B	B	94,00
11	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP	100
	<b>Rata-rata capaian Indikator</b>			<b>118,18</b>

**Tabel 2.76 : Capaian Sasaran Kabupaten Merangin tahun 2022**

NO	SASARAN	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	92,76

2	Berkembangnya pariwisata berkelanjutan berbasis geopark Nasional Merangin Jambi (Geo wisata)	398,00
3	Realisasi Investasi	43,76
4	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	92,55
5	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia	100,33
6	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan Anak	99,8
7	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi	95,88
	<b>Rata-rata Capaian Sasaran</b>	<b>131,86</b>

### c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.77 : Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	%	5,30	4,24	80,00	5,46	1,75	32,05	5,25	4,87	92,76	5,97	81,23
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>							<b>32,05</b>			<b>92,76</b>		

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian Dan Perikanan tidak mencapai target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 92,76 %, dikategorikan sangat baik. Untuk capaian akhir RPJMD sebesar 81,23% .

### d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Pada RPJMD tahun 2018-2023 Kabupaten Merangin memiliki Visi dan misi dalam pembangunan bidang pertanian, pada bidang ini Kabupaten Merangin memiliki potensi kawasan yang baik untuk dikembangkan. Pada tahun 2022 produksi padi sebesar 127.281 ton, produksesi jagung 20.997 ton, produksi kedelai 134 ton, produksi cabai besar 3.201 ton, produksi kentang 5.835.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2022

Tabel 2.80 : Capaian Akhir RPJMD

MISI	TUJUAN		SASARAN	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3	4	5
<b>Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata</b>	<b>Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian, Perikanan dan pariwisata</b>	<b>Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian dan pariwisata</b>	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian
			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM
			Meningkatnya realisasi investasi	Meningkatnya realisasi investasi
			Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya local	Berkembangnya pariwisata berkelanjutan berbasis geopark Nasional Merangin Jambi (Geo wisata)
<b>Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan</b>	<b>Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan</b>	<b>Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan</b>	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat
			Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan
<b>Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing</b>	<b>Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia</b>	<b>Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia</b>	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu kesehatan
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS	
			Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan Anak	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan Anak
			Menurunkan tingkat pengangguran	Menurunkan tingkat pengangguran
<b>Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government</b>	<b>Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif, bersih dan melayani</b>	<b>Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif, bersih dan melayani</b>	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi

## Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2022

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target dan Realisasi Capaian				Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Tahun 2019		Tahun 2020		2021	2022	2023	
										Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	21
1	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian, Perikanan dan pariwisata	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian dan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi					5,55%	5,71%	4,82%	5,87%	0,78%	5,09%	5,25%	6,02%	6,02%
					Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian	5,15%	5,30%	4,24%	5,46%	1,75%	4,50%	4,95%	5,22%	5,22%
							Nilai Tukar Petani (NTP)		100,78%	101,80%	98,58%	102,30%	107,60%	-	-	-	-
					Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri dan perdagangan	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri	5,43%	5,58%	5,37%	5,73%	-1,05%	5,88%	6,03%	6,18%	6,18%
							Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	8,68%	8,84%	7,39%	9,00%	-2,92%	6%	6,50%	7%	7%
					Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Persentase koperasi sehat	Persentase koperasi berkualitas	25,26%	25,50%	25,68%	25,70%	15,35%	12%	15%	20%	20%
							Persentase UMKM yang sehat	Persentase UMKM naik kelas	6,00%	6,30%	6,40%	7,20%	6,89%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
					Meningkatnya realisasi Investasi	Meningkatnya realisasi Investasi	Persentase peningkatan realisasi investasi		10,16%	10,21%	11,30%	11,96%	-68,83%	-	-	-	-
								Meningkatnya Realisasi Investasi (Milyar)	-	-	-	-	-	819 M	1065 M	1384 M	1384 M
					Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal.	Berkembangnya pariwisata berkelanjutan berbasis geopark Nasional	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	48.661 Org	51.094 Org	208.041 Org	53.649 Org	90.949 org	62.010 Orang	81.513 Orang	106.000 Orang	106.000 Orang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2022

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target dan Realisasi Capaian				Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Tahun 2019		Tahun 2020		2021	2022	2023		
										Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	21	
						Merangin Jambi (Geo wisata)												
2	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Indeks daya saing Infrastruktur daerah						73,19%	74,39%	74,39%	75,52%	75,52%	70,13%	71,66%	73,34%	73,34%
					Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat	Indeks jalan mantap	Indeks jalan mantap	71,95%	73,56%	64,39%	75,17%	71,11%	71,06%	71,01%	70,96%	70,96%	
							Indeks irigasi	Indeks irigasi	45,45%	46,45%	65,33%	47,45%	67,74%	70,11%	72,38%	74,48%	74,48%	
								Indeks infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur permukiman	61,77%	65,51%	55,53%	68,91%	56,66%	67%	68%	70%	70%
				Indeks Kualitas Lingkungan						60	61	61	62	62	63	64	64,5	64,5
					Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan.	Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan.	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	49,26	50,26	50,26	50,28	50,28	50,30	50,32	50,34	50,34	
							Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	81	82	82	83	83	84	85	86	86	
		Indeks Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan		52,30	53,30	53,30	55,05	55,05	56,78	58,50	59,00	59,00					
3	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.	Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					68,3	68,69	69,07	69,88	69,19	69,30	69,50	69,67	69,67	
					Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,94 Tahun	70,96 Tahun	71,18 Tahun	70,98 Tahun	71,26 Tahun	71,21 Tahun	71,32 Tahun	71,52 Tahun	71,52 Tahun	
					Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat		Rata-Rata lama sekolah,		7,62 Tahun	7,81 Tahun	8 Tahun	7,75 Tahun	7,76 Tahun	-	-	-	-	
							Rata-rata Harapan lama Sekolah		11,95 Tahun	12,09 Tahun	12,10 Tahun	12,23 Tahun	11,99 Tahun	-	-	-	-	
							Nilai Rata-Rata Ujian Nasional		30,67	30,81	48,15	30,93	54,25	-	-	-	-	
	Meningkatnya akses dan																	
														0,595	0,598	0,601	0,601	

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2022

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target dan Realisasi Capaian				Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Tahun 2019		Tahun 2020		2021	2022	2023		
										Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	21	
						mutu pendidikan												
					Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS		Persentase penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		4,31%	5,12%	5,67%	5,30%	7,60%					
					Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	87,64%	87,81%	88%	87,98%	88,14%	88,25%	88,37%	88,59%	88,59%	
					Menurunkan tingkat pengangguran	Menurunkan tingkat pengangguran	Kabupaten Layak Anak (KLA)		Pencanaan KLA	Pratama	Persiapan	Madya	-	-	-	-	-	
							Tingkat pengangguran terbuka	Tingkat pengangguran terbuka	4,05%	4,05%	3,80%	4,02%	4,86%	4,40%	3,84%	3,38%	3,38%	
4	Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif, bersih dan melayani	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi					N/A	CC	CC	CC	CC	CC	B	B	B	
					Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	CC	N/A	CC	CC	CC	CC	B	B	B
							Indeks Sistem Merit		N/A	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	-	-	-	-	
							Indeks SPBE		N/A	Kurang	Kurang	Cukup	Cukup	-	-	-	-	
							Nilai AKIP	Nilai AKIP	B	BB	B	BB	B	BB	BB	BB	BB	
							Jumlah OPD yang membangun zona integritas untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani		0	10	10	10	10	-	-	-	-	
							Nilai penataan		P1	P1	P1	P2	P2	-	-	-	-	



## Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2022

No	Misi	Tujuan		Indikator Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Kondisi Awal	Target dan Realisasi Capaian				Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Tahun 2019		Tahun 2020		2021	2022	2023	
										Target	Realisasi	Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	17	18	19	20	21
							kelembagaan										
							Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang melaksanakan Pelayanan Publik dengan IKM Minimal kategori baik		0 PD	10 PD	10 PD	15 PD	15 PD	-	-	-	-
							Opini BPK terhadap LKD	Opini BPK terhadap LKD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
							Predikat Nilai LPPD	Predikat Nilai LPPD	Sangat Tinggi Bintang 2	Sangat Tinggi Bintang 2	Sangat Tinggi Bintang 2	Sangat Tinggi Bintang 2	Sangat Tinggi Bintang 2	Sangat Tinggi Bintang 2	Sangat Tinggi Bintang 2	Sangat Tinggi Bintang 2	Sangat Tinggi Bintang 3

**e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai**

Untuk perbandingan capaian realisasi kinerja tahun 2022 beberapa dengan tahun terakhir namun demikian ada beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan target dan indikator kinerja tahun 2021 – 2023, dapat dilihat ada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.79 : Indikator Kinerja Tahun 2021 – 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target (Ton)			Realisasi (Ton)			Capaian Kinerja (%)				
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani	1	Peningkatan Produksi Padi	140.776	142.888	123.573	138.691	119.974	108.471	98,52	83,96	87,78	46,59
		2	Peningkatan Produksi Jagung	16.668	16.752	20.385	13.081	19.791	12.570	78,48	118,14	61,66	64,21
		3	Peningkatan Produksi Kedelai	928	932	130	767	254	104	82,65	27,25	80,00	12,89
		4	Peningkatan Produksi Cabai Besar	-	-	3.108	2.991	3.018	3.198	0,00	0,00	102,90	102,90
		5	Peningkatan Produksi Kentang	-	-	5.665	4.513	5.500	7.038	0,00	0,00	124,24	124,24

Melihat tabel di atas jelas bahwa capaian sampai tahun 2022 berfluktuasi yaitu ada menunjuk kenaikan dan pula yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya. Untuk i produksi padi, jagung, kedelai, Cabai Besar dan Kentang. Capaian indikator kinerja utama yaitu produksi Produksi Padi tahun 2022 bila dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir juga terjadi cenderung menurun capaian dan produksinya jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaian sebesar 98,52%, capaian kinerja tahun 2020 menurun menjadi sebesar 83,96%, dan tahun 2021 naik kembali menjadi sebesar 87,78% tahun 2022 menurun ke 46,59%. Beberapa hal yang mempengaruhi penurunan produksi padi tahun 2022 antara lain adalah, akibat menurunnya luas tanam padi khususnya padi ladang, sebagaimana kita ketahui bahwa padi

ladang paling banyak ditanam sebagai tanaman sela di tanaman perkebunan, sementara pembukaan lahan perkebunan tidak boleh dengan cara membakar hal ini berkontribusi besar dalam penurunan luas tanam padi tahun 2021, cuaca ekstrim juga mempengaruhi pertanaman padi tahun 2021.

Untuk produksi jagung tahun 2021 bila dibandingkan beberapa tahun terakhir, bila dibandingkan tahun 2019 cenderung meningkat dengan tingkat capaian kinerja terjadi juga cenderung naik, produksi jagung tahun 2020 sebesar 19.791 ton meningkat atau 118,14% dibandingkan dengan produksi Jagung tahun 2019 sebesar 13.081 ton, sedangkan produksi Jagung tahun 2021 sebesar 12.570 ton atau capaian produksi Jagung tahun 2019 sebesar 61,66%. Sumbangan Produksi Jagung Tahun 2021 diakibatkan peningkatan luas tanam, panen dan produktivitas jagung, peningkatan produksi tersebut karena pemasaran dan harga jual petani semakin baik sehingga mendorong petani lebih semangat untuk bertanam jagung.

Produksi kedelai tahun 2021 bila dibandingkan beberapa tahun terakhir, bila dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2020 cenderung menurun dengan tingkat capaian kinerja terjadi juga cenderung naik, produksi kedelai tahun 2021 sebesar 104 ton capaian kinerja 80,00%, tahun 2020 sebesar 254 ton capaian 27,25%, produksi kedelai tahun 2020 sebesar 254 ton, tahun 2022 sebesar 767 ton dengan capaian tahun 2022 sebesar 27,25% dan capaian tahun 2021 sebesar 82,65%.

Beberapa hal yang menyebabkan menurunnya produksi kedelai antara lain adalah menurunnya luas tanam kedelai, diakibatkan menurunnya bantuan Pemerintah untuk

pengembangan kedelai tahun 2021, harga kedelai kurang baik sehingga mengurangi minat petani untuk bertanam kedelai.

Produksi Cabe Besar tahun 2022 merupakan target indikator perubahan pada Revisi Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018-2019. Produksi Cabe Besar Tahun 2022 sebesar 3.138 ton atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 3.108 atau Capain Kinerja sebesar 100,97.%.

Peningkatan Produksi Cabe besar tahun 2021 disebabkan beberapa faktor antara lain, semakin membaiknya harga Cabe, minat petani untuk tanam cabe bantuan saprodi dari pemerintah daerah maupun pusat, dimasa pemulihan pasca pandemi COVID - 19 memberikan peluang usaha baru bagi petani hortikultura.

Sama halnya dengan Indikator Produksi Cabe Merah Indikator Produksi Kentang juga merupakan target indikator perubahan pada Revisi Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018-2019. Produksi Kentang tahun 2021 sebesar 7.038 ton atau capaian sebesar 124,24 %.

Peningkatan produksi kentang ini disebabkan beberapa faktor antara lain; meningkatnya harga kentang dibanding dengan tahun – tahun sebelumnya, tingginya permintaan pasar akan kentang, menurunnya harga ubi jalar sehingga petani sebagian beralih bercocok tanam kentang.

Sector usaha peternakan pada tahun 2022 mengalami peningkatan populasi dibandingkan pada tahun 2021 kendala yang dihadapi adalah usaha peternakan merupakan usaha sambilan atau usaha rumah tangga banik untuk ternak besar, kecil maupun unggas, tetapi pada peternak unggas khususnya ayam ras merupakan mitra kerja pada perusahaan. Untuk

pertumbuhan ternak di kabupaten merangin dapat dilihat pada table di sebagai berikut:

**Tabel 2.80 : Populasi ternak dan unggas Kabupaten Merangin Tahun 2016-2022**

No	Jenis Ternak	Populasi					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sapi	16794	16703	17136	18570	18248	15774
2	Kebau	4832	4559	4449	4412	4380	4328
3	Kambing	30697	31181	34148	43729	40456	40496
4	Domba	9058	7654	7983	7460	6142	4644
5	Ayam Buras	978151	995472	1179412	1732624	1771606	1191723
6	Ayam Ras	651582	637515	527953	399831	312022	2555812
7	Ayam Petelur	-	2000	28630	14944	16966	66554
8	Itik	26007	26514	5382	34177	33667	25955
	Total	<b>1717121</b>	<b>1721598</b>	<b>1805093</b>	<b>2255747</b>	<b>2203487</b>	<b>3905286</b>
<i>Sumber: Merangin dalam Angka 201</i>							

Sektor perikanan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam meningkatkan pertumbuhan PDRB memiliki luas area budidaya perikanan perairan umum, kolam seluas 5 520 ha, kolam seluas 332,07 Ha, keramba jaring Apung 383 unit serta mina padi 4,1 Ha.

Produksi perikanan terdiri dari perikanan Budidaya dengan jumlah produksi tahun 2022 sebesar 1.701,48 ton/th dan produksi perikanan tangkap sebesar 785.42 ton/th.

Dalam meningkatkan produksi perikan budidaya perlunya pembinaan berjalan pada kelompok-kelompok budidaya perikanan, serta memanfaatkan penggunaan pakan alternatif karena masih pembudi daya menggunakan pakan ikan komersial sehingga tingginya biaya produksi, sedangkan untuk pproduksi perikanan tangkap memanfaatkan Kembali lubuk larangan yang saat ini kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.

**Tabel 2.81 : Produksi Pembenuhan Ikan Kabupaten**

**Merangin Tahun 2019-2022**

No	Jenis Ikan	Jumlah Produksi					
		Th 2019	Harga	Tahun 2020	Harga	Tahun 2021	Harga
1	Ikan Nila	1.750.000	Rp. 210	1.634.000	Rp.220	1.637.000	Rp.220
2	Ikan Lele	1.595.000	Rp.250	2.176.000	Rp.250	2.561.000	Rp.250
3	Ikan Gurame	-		-		91.000	Rp.2.500
Total Produksi (ekor)		3.345.000		3.810.000		4.289.000	

Suber: Dinas Perikanan Kabupaten Merangin 2023

**Tabel 2.82 : Produksi Pembesaran Ikan Kabupaten Merangin Th 2022**

No	Jenis Ikan	Jenis Pembesaran					
		Jaring Apung Tawar (Keramba)		Kolam Air Tenang		Mina Padi	
		Produksi (Kg)	Harga	Produksi (Kg)	Harga	Produksi (Kg)	Harga
1	Ikan Gurame	27.317	Rp.40.000	86.375	-	-	-
2	Ikan Lele	-	-	456.008	Rp.17.000	-	-
3	Ikan Mas	60.078	Rp.32.000	200.008	Rp.32.000	12.845	Rp.32.000
4	Ikan Nila	95.562	Rp.23.000	420.627	Rp.23.000	26.267	Rp.23.000
5	Ikan Patin	-		292.674	Rp.18.000	-	
Total Produksi (Kg)		182.957		1.455.892		39.112	

Suber: Dinas Perikanan Kabupaten Merangin 2023

**Tabel 2.83 : Analisis Pencapaian Sasaran 2 Berkembangnya Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Geopark Nasional Merangin Jambi (Geo wisata)**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Org/ Jiwa	51.094	149.072	291,76	53.649	90.949	169,52	62.010	246.938	398,00	63,288	143,70
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>291,76</b>			<b>169,52</b>			<b>398,00</b>		

Dari table di atas dapat diketahui bahwa 1 indikator Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata dan Budaya Lokal, 1 indikator sasaran melebihi target. Rata – rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 398,00 %, mengalami peningkatan capaian di dibandingkan rata-rata capaian tahun 2020 sebesar 169,52%, dikategorikan capaian sangat baik.

**Tabel 2.84 : Data Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Dan Wisatawan Nusantara (Wisnus) Kabupaten Merangin Tahun 2022**

NO	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN		KETERANGAN		
		WISMAN	WISNUS			
1	2	3		4	5	
1	Januari	-	Orang	21.383	Orang	-
2	Februari	-	Orang	20.396	Orang	-
3	Maret	-	Orang	20.221	Orang	-
4	April	-	Orang	18.167	Orang	-
5	Mei	-	Orang	27.076	Orang	-
6	Juni	-	Orang	18.328	Orang	-
7	Juli	-	Orang	15.082	Orang	-
8	Agustus	-	Orang	11.347	Orang	-
9	September	-	Orang	15.697	Orang	-
10	Oktober		Orang	18.547	Orang	-
11	November		orang	22.142	Orang	-
12	Desember	-	Orang	38.553	Orang	-
<b>Jumlah .....</b>		-	<b>Orang</b>	<b>246.939</b>	<b>Orang</b>	-

Sumber: Dinas Pariwisata Kab. Merangin 2023

Sektor Pariwisata merupakan salah satu sektor yang tengah dikembangkan oleh pemerintah daerah Merangin. Kabupaten Merangin memiliki objek wisata yang relatif terbatas, masih alami dan belum dikomersilkan. Pada tahun 2022, tercatat terdapat 63 lokasi obyek wisata alam, 23 obyek wisata buatan, 20 obyek wisata sejarah budaya di kabupaten Merangin.

**Tabel 2.85 : Daftar Obyek Wisata Kabupaten Merangin**

NO	A. OBJEK WISATA ALAM	LOKASI	STATUS	TITIK KOORDINAT
1	Gunung Masurai	Di Bagian Selatan Kabupaten Merangin Kec.	Pemkab	-2,057795LS/ 102,321251 BT

		Jangkat		
2	Danau Pauh	Desa Pulau Tengah	Desa/Pemkab	-2,555278 LS/ 101,82222 BT
3	Danau Kumbang	Di atas Gunung Masurai	Desa	
4	Danau Mabuk	Di atas Gunung Masurai	Desa	
5	Danau Depati Empat	Desa Tantau Keremas	Desa/Pemkab	-2,629156 LS/ 101,786346 BT
6	Air Panas Graow	Desa Renah Kemumu	Desa	-2,429663 LS/ 101,593025 BT
7	Air Terjun Sungai Hitam	Desa Renah Pelaah	Desa	
8	Hutan Adat Desa Rantau Kermas	Desa Rantau Kermas	Desa	
9	Gunung Masurai	Di Bagian Selatan Kabupaten Merangin Kec. Jangkat	Pemkab	-2,057795LS/ 102,321251 BT
10	Air Terjun Sigerincing	Desa Tuo	Masyarakat	-2,378222 LS/101,907959 BT
11	Air Terjun Parang Jatuh	Desa Tuo	Masyarakat	
12	Air Terjun Lang Pisang	DesaTuo	Masyarakat	
13	Air Terjun Penghabisan Ikan	Desa Tanjung Berugo	Masyarakat	
14	Air Terjun Telun Goa Kambing	Desa Tanjung Berugo	Masyarakat	
15	Air Terjun Serintik Hujan Paneh	Desa Talang paruh	Masyarakat	-2,343892 LS/101.997589 BT
16	Air Terjun Pengimbangan	Desa Tuo	Masyarakat	
17	Air Terjun Sungai Tiling	Desa Tuo	Masyarakat	
18	Air Terjun Muaro Sungai Meling	Desa Tuo	Masyarakat	
19	Air Terjun Muaro Sungai Alai	Desa Tuo	Masyarakat	
20	Napal Layao	Desa Tuo	Masyarakat	
21	Air Terjun Telun Mukus	Desa Koto Rami	Masyarakat	
22	Air terjun Penyuwang gagah Pangi Rabut	Desa Tanjung Dalam	Masyarakat	
23	Goa Kambing Hutan	Desa Tanjung Dalam	Masyarakat	
24	Bukit Sedingin	Desa Tanjung Dalam	Masyarakat	
25	Bukit Tongkat Bapuncak Tigo	Desa Tanjung Dalam	Masyarakat	
26	Air Terjun Acuan Batu	Desa Tanjung Dalam	Masyarakat	
27	Air Terjun Labuhan Paku	Desa Tanjung Dalam	Masyarakat	



28	Air Terjun Nilo Sungsang	Desa Tuo	Masyarakat	
29	Telaga Biru	Desa Tanjung Alam	Masyarakat	-2,508196 LS/101,899178 BT
30	Air Terjun Tepian Mandi Dukun Betuah	Desa Rantau Suli	Masyarakat	-2,556325 LS/101,974236 BT
31	Air Terjun Dan Goa Lubuk Angit	Desa Jangkat	Masyarakat	
32	Air Terjun Lematang	Desa Tanjung Alam	Masyarakat	
33	Air Terjun Empenau	Desa Talang Tembago	Masyarakat	
34	Bukit Batu	Desa Talang Tembago	Masyarakat	
35	Hutan Adat Desa Tanjung Alam	Desa Tanjung Alam	Masyarakat	
36	Hutan Adat Guguk	Desa Guguk	Masyarakat Adat	-2,184071 LS/102,083252 BT
37	Air Terjun Jodoh Teluk Wang Sakti	Desa Biuku Tanjung	Masyarakat	-2,151784 LS/102,176041 BT
38	Air Terjun Mengkaring/Muara Karing	Desa Biuku Tanjung	Masyarakat	-2,13942 LS/102,154678 BT
39	Air Terjun Talang ngah	Desa Talang Sengegah	Desa	
40	Zona Inti Geopark Merangin	Desa Biuku Tanjung, Markeh, guguk dan Air Batu	Masyarakat	
41	Air Terjun Nengnong	Desa Air Batu		
42	Arboretum Rio Alip	Desa Langling	Pemkab	-2,057795LS/ 102,321251 BT
43	Zona Inti Geopark Merangin	Desa Bedeng Rejo	Masyarakat danPemkab	-2,174204 LS/102,133324 BT
44	Air Terjun Simpang Manggis	Desa P. Rengas Ulu	Desa	-2,163713 LS/102,220467 BT
45	Air Terjun Sejinjing	Desa P. Rengas Ulu	Pemkab/Desa	-2, 163713 LS/102,220467 BT
46	Air Terjun Sikuang Kuning	Desa Biuku Tanjung	Desa	
47	Air Terjun Telun Perentak	Desa Bukit Perentak	Masyarakat danPemkab	-2,141271 LS/101,896492 BT
48	Air Terjun Sungai Pasir	Desa Kandang	Masyarakat dan Pemkab	
49	Air Terjun Cecai Siwai	Desa Kandang	Desa	
50	Danau Temalam	Desa Karang Berahi	Desa/Pemkab	
51	Air Terjun Talalang Jaya 7 Bidadari	Desa Telentam	Masyarakat	-1,954869 LS/101,923393 BT
52	Air Terjun Bukit Selebu	Desa Kibul Ilir		
53	Hutan Adat Bukit Selebu	Desa Kibul		
54	Puncak Ngarau	Desa Rantau Ngarau	Desa	-1,934238 LS/102,128975 BT
55	Air Terjun Puti Daber	Desa Peradun Temeras	Desa	-2, 324179 LS/102,043266 BT
56	Bukit Benteng	Desa Siau		

57	Bukit Gajah	Desa Sekancing	Desa	-2,318012 LS/102,197586 BT
58	Air Terjun Telun 14	Desa Rantau Limau Kapas	Desa	
59	Goa Bujang	Desa Singering		
60	Goa Tiangko	Desa Tiangko	Desa/Pemkab	-2,103383 LS/101,986855 BT
61	Goa Singering	Desa Singering	Desa/Pemkab	-2,055259 LS/101,963341 BT
62	Goa Sengayau	Desa Sungai Pinang	Desa/Pemkab	
63	Goa Petekun	Desa Petekun	Desa	
<b>NO</b>	<b>B. OBJEK WISTA BUDAYA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>STATUS</b>	<b>TITIK KOORDINAT</b>
1	Rumah Tuo Jangkat	Desa Muara Madras	Desa	
2	Batu Larung Talang Jambu Abang	Desa Tanjung Kasri	Desa	
3	Batu Larung Talang Alo	Desa Lubuk Mentilin	Desa	
4	Bukit Batu Larung	Desa Renah Kemumu	Desa	
5	Batu Larung Pratin Tuo	Desa Tuo	Desa	
6	Religi Batu Ampar	Desa Rantau Jering	Desa	
7	Batu Larung Tanjung Putih	Desa Nilo Dingin	Masyarakat	
8	Batu Larung Rimbo Tembang	Desa Tuo	Masyarakat	
9	Batu Larung Renah Luas	Desa Tuo	Masyarakat	
10	Batu Larung Sungai Nilo	Desa Tuo	Masyarakat	
11	Batu Bersusun/Kekar Kolom	Desa Koto Tapus	Desa	
12	Batu Larung Talang Alo	Desa Lubuk Mentilin	Desa	
13	Batu Larung Gedang I	Desa Gedang	Desa	
14	Batu Larung Gedang II	Desa Gedang	Desa	
15	Batu Larung Pematang Pauh	Desa Pematang Pauh	Masyarakat	
16	Batu Larung Pematang Puntii	Desa Rantau Suli	Masyarakat	
17	Batu Bertulis	Desa Karang Berahi	Desa	
18	Rumah Tuo Tabir (jantan)	Kel. Kampung Baruh,	Desa	-1,794534 LS/102,306305 BT
19	Rumah Tuo Tabir (betino)	Desa Dusun Baru	Desa	
20	Perkampungan Suku Anak Dalam	Desa Makekal Ulu	Desa	
<b>NO</b>	<b>C. OBJEK WISATA BUATAN</b>	<b>LOKASI</b>	<b>STATUS</b>	<b>TITIK KOORDINAT</b>
1	Water Boom Tanjung Lamin	Desa Tanjung Lamin	Swasta Perorangan	
2	Water Boom Family Abadi	Desa Karang Anyar	Swasta Perorangan	
3	Embung Pinang Merah	Desa Pinang Merah	Desa	

4	Dam Betuk	Desa Mensango	Pemkab	-1,931609 LS/102,283439 BT
5	Jam Gento	Kel. Pasar Bawah Bangko	Pemkab	-2,076419 LS/ 102,274384 BT
6	Taman Bunga Trans Garden C2	Kel. DusunBangko	Swasta	
7	Taman Indah Lestari	Kel. Dusun Bangko	Swasta Perorangan	
8	Taman Bukit Tiung	Kel Pematang Kandis	Pemkab	-2,073209 LS/102,275932 BT
9	Grand Kandis	Kelurahan Pematang Kandis	Swasta	-2,051174 LS/102,291718 BT
10	Merangin Garden	Kelurahan Pematang Kandis	Swasta	-2,049468 LS/102,29966 BT
11	Taman Batu Sungkai	Desa Mudo	Pemkab	-2,023689 LS/102,329208 BT
12	Tanjung Menanti	Waskita Karya	Swasta	
13	Water Boom Sumber Agung	Desa Sumber Agung	Desa	
14	Water Boom Muara Delang	Desa Muara Delang	Swasta Perorangan	
15	Embung Desa Sungai Sahut	Desa Sungai Sahut		
16	Hesty's Gardens	Desa Muara Madras	Swasta	-2,636027 LS/101,886169 BT
17	Taman Talang Tirta Asri	Desa TalangSegegah	Swasta	-2,050243 LS/101,991875 BT
18	Taman Agro Wisata Buah	Desa Mampun Baru	Desa	
19	Raja A4	Desa Rasau	Masyarakat	
20	Bukit Pelayang	Desa Salam Buku	Swasta	
21	Waterpark Si Kumbang	Desa Salam Buku	Swasta	
22	Taman Impian	Desa Sungai Ulak	Swasta	
23	Taman Edukasi Tanjung Benuang	Desa Tanjung Benuang	Swasta	

#### f. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Faktor pendukung pariwisata adalah ketersediaan beberapa fasilitas, diantaranya hotel/penginapan, rumah makan/restoran serta biro dan agen perjalanan. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin untuk seluruh jenis sarana setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2022 terdapat 55 buah

hotel dan penginapan di Kabupaten Merangin, 129 rumah makan dan 6 buah biro perjalanan.

Diketahui, jumlah usaha aktivitas Penyediaan Akomodasi (Hotel, Penginapan dan Kost) dan Penyediaan Makan Minum/kategori I mencapai 4.442 usaha atau sekitar 14 persen dari total usaha non pertanian di Kabupaten Merangin. Dari sisi tenaga kerja, lebih dari 6 ribu orang bekerja di lapangan usaha Penyediaan Akomodasi (Hotel, Penginapan dan Kost) dan Penyediaan Makan Minum.

Dalam rangka membangun dan mengembangkan serta mempromosikan Pariwisata Kabupaten Merangin sebagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi “Merangin Mantap Unggul dalam Bidang Pertanian dan Pariwisata 2023”. Kabupaten Merangin terus berupaya dalam melakukan kegiatan promosi pariwisata agar wisata Kabupaten Merangin lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Merangin.

Sebagai aksi nyata, Kabupaten Merangin terus berbenah dan gencar melaksanakan promosi baik secara daring maupun luring diantaranya : Pembuatan website Disparpora, Instagram Disparpora, Facebook Disparpora, kerjasama promosi dengan radio swasta, pemasangan billboard dan pembuatan banner pariwisata, cetak leaflet, serta media promosi lainnya.

**Tabel 2.86 : Analisis Pencapaian Sasaran 3 Meningkatnya Realisasi Investasi**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Realisasi Investasi	Milyar	-	-	-	-	-	-	819	358,4	43,76	1384	25,89
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>										<b>43,76</b>		

Target Realisasi Investasi pada tahun 2022 sebesar Rp.819.000.000.000,00??? dengan nilai Realisasi Investasi tahun

2021 sebesar 358.401.982.000,00???, sehingga capaian kinerja tahun 2021 ialah sebesar 43,76% dari target yang ditetapkan, capaian kinerja atas indikator kinerja dikategorikan capaian sangat kurang baik, sedangkan untuk capaian sasaran dengan capaian tidak tercapai dan target akhir RPJMD sebesar 25,89% yang saat ini tercapai.

Perbandingan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dan tahun 2021. Realisasi indikator kinerja Realisasi Investasi pada tahun 2021 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu pada tahun 2021 Realisasi Investasi di Kabupaten Merangin sebesar Rp. 630.245.973.529,00, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi Rp.

358.401.982.000,00.

No	Indikator Kinerja	2021		2022	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	630	-	358,4	43,76%

Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja Realisasi Investasi (Milyar Rupiah) adalah sebagai berikut:

- Adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) perusahaan yang tidak tepat (Contoh: Lokasi usaha berada di wilayah Kabupaten Merangin, Tetapi KBLI tercatat di wilayah Kabupaten Sarolangun.
- Kegiatan Promosi Investasi tidak dapat dilaksanakan, karena alokasi anggaran tidak tersedia.
- Pelaku usaha baru yang telah memiliki NIB belum melapor di LKPM Online, sehingga tidak ada realisasi investasi.
- Masih ada pelaku usaha yang tidak membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di Sistem LKPM Online.

- Banyak pelaku usaha enggan menghadiri dan mengikuti bimtek LKPM yang di selenggarakan oleh DPMPTSP-TK Kabupaten Merangin.

Beberapa solusi yang diharapkan mampu meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Merangin:

- Terus berupaya meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Merangin, dengan mempedomani Peraturan Daerah Kabupaten Merangin No 3 Tahun 2015 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
- Menyusun strategi dan meningkatkan promosi investasi yang lebih baik
- Meningkatkan pemantauan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- Terus melaksanakan sosialisasi dan bimtek terkait LKPM.

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja.

**1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota *Sub kegiatan:*

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

**2. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

*Sub Kegiatan:*

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

**Tabel 2.87 : Analisis Pencapaian Sasaran 4 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Sehat**

No	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Target Akhir RPJMD	%
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Jalan Mantap	%	73,56	73,56	100	75,17	71,11	94,60	71,06	71,11	100,07	80	125,8
2	Indeks Irigasi	%	45,45	45,45	100	47,45	67,74	142,76	70,11	65,61	93,44	50,45	185,2
3	Indeks Infrastruktur Permukiman	%	65,51	65,51	100	68,91	56,66	81,04	68	57,23	84,16	79,44	105,9
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>100</b>			<b>106,13</b>			<b>92,55</b>		<b>138,9</b>

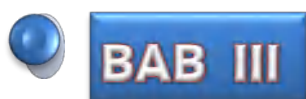
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 indikator sasaran Terwujudnya Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Daerah Serta Akses Masyarakat Terhadap Permukiman Sehat, 2 indikator sasaran tidak mencapai target, 1 indikator sasaran melebihi target. Rata - rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2020 sebesar 92,55%, dengan kategori capaian sangat baik, mengalami penurunan di dibandingkan rata-rata capaian tahun 2019 sebesar 13,58%, capaian rata sasaran dari target yang ditetapkan RPJMD Kab. Merangin mencapai 138,9%.

- Indeks Jalan Mantap, target kinerja Jalan Mantap tahun 2022 yang semula ditetapkan sebesar 75,17% setelah perubahan RPJMD dan Renstra Dinas ditetapkan sebesar 71,06% dapat direalisasikan sebesar 71,11%, dengan capaian kinerja 100,07%. Tercapainya terget kinerja Jalan Mantap pada tahun 2021 tersebut disebabkan meningkatnya alokasi anggaran penanganan Jalan Kabupaten yang pembiayaannya bersumber dari dana Pinjaman Daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang dilaksanakan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Adapun panjang jalan Kabupaten

Merangin dalam Kondisi Mantap sampai akhir tahun 2022 adalah sepanjang 872,763 Km dari total panjang jalan Kabupaten sepanjang 1.184,407 Km. Capaian kinerja Indeks Jalan Mantap dengan capaian 100,07% dengan kategori “Memuaskan”

- b. Indeks Irigasi, target kinerja Indeks Irigasi tahun 2022 ditetapkan sebesar 70,11% % setelah perubahan RPJMD dan Renstra Dinas tidak mengalami perubahan dan tetap sebesar 70,11% dapat direalisasikan sebesar 65,61 % atau dengan capaian Kinerja 93,44%, dengan kategori “Sangat Baik”.
- c. Indeks Infrastruktur Permukiman, dengan indikator kinerja meningkatnya persentase capaian rumah tangga dengan sumber air minum bersih dan rumah tangga dengan tempat pembuangan akhir tinja tangki septik (sanitasi layak) dengan target yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD dan Renstra Dinas pada tahun 2022 sebesar 67,00% dapat direalisasikan sebesar 57,23% atau dengan capaian kinerja 85,42% dengan kategori “Sangat Baik”.
- d. Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang, dengan indikator kinerja Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap Rencana Tata Ruang dengan target yang ditetapkan dalam perubahan RPJMD dan Renstra Dinas pada tahun 2022 dengan target kinerja sebesar 87,47% dapat di realisasikan sebesar 87,47% atau dengan capaian 100% dengan kategori “Memuaskan”.





# CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

## A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dasar hukum tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010;

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun 2011.

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui Tugas Pembantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen Teknis ke Daerah telah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi**

### **1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan**

Terkait penyelenggaraan tugas pembantuan, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Merangin menerima dari Instansi Pemerintah Pusat yang memberikan Tugas Pembantuan yang kemudian pelaksanaannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2022 meliputi:

- ✚ Kementerian Perdagangan RI
- ✚ Kementerian Pertanian (Ditjen Tanaman Pangan)
- ✚ Kementerian Pertanian (Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian)

Sebagai pelaksana pembangunan yang melalui alokasi dana Tugas Pembantuan ini, yang menjadi leading sector adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah kabupaten Merangin meliputi: 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan 2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Adapun alokasi dana Tugas Pembantuan yang telah didistribusikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat dalam tael berikut ini:

**Tabel 3.1 Rekapitulasi Penggunaan Dana Tugas Pembantuan Satker Provinsi Pemerintah Merangin Tahun Anggaran 2022.**

No	Dinas Instansi	Alokasi Dana (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Asal Dana
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura				Kab. Merangin hanya menerima Barang/Jasa, pengelolaan Keuangan di Provinsi.
2	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.247.270.000	1.247.270.000	100	APBN (Kementerian Pertanian RI Ditjen PSP)PSP Satker Provinsi
<b>Jumlah</b>		1.247.270.000	1.247.270.000	100	

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Merangin Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas jumlah alokasi dana Tugas Pembantuan Satker Pemerintah Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kabupaten Merangin tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.247.270.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 1.247.270.000,- atau 100 %.

Adapun penjabaran dana Tugas Pembantuan yang dimanifestasikan melalui program kedalam kegiatan, tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Direktorat Tanaman Pangan (TP Provinsi)

Satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin dana Tugas Pembantuan melalui Kementerian Pertanian RI yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan 4 (Empat) kegiatan yaitu: (1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (2) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (3) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan (4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan output yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
  - ✓ Kawasan Kedelai 100 Ha
- b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia
  - ✓ Pengembangan Budidaya Padi Kaya Gizi 300 Ha
  - ✓ Bantuan Benih Padi Sawah 1.000 Ha
  - ✓ Bantuan Benih Jagung. 100 Ha
- c. Pengelolaan Alat Pasca Panen
  - ✓ Power Thresher Multi Guna 2 Unit
  - ✓ Corn Sheller 2 Unit
  - ✓ UPH Kedelai 1 unit
  - ✓ UPH Lainnya 1 Unit

2) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (TP Provinsi)

Satuan kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin dana Tugas Pembantuan melalui Kementerian Pertanian RI yaitu Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian adalah Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Dan Sarana Pertanian 4 (Empat) kegiatan yaitu: (1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian (2)

Pengembangan Embung Mendukung Tanaman Pangan (3) Irigasi Perpipaan/Perpompaan (4) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (6) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (7) Fasilitasi Pembiayaan KUR. Program dan kegiatan dilaksanakan berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA-018.08.4.109125/2020 tanggal 23 November 2021. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Lokasi Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2021 dengan Jumlah PAGU Anggaran sebesar Rp.1.247.270.000,00,- dengan Realisasi Keuangan Rp.1.247.270.000,00,- atau 100%. Adapun output yang ingin dicapai dalam kegiatan pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
    - ✓ Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 6 unit
    - ✓ Irigasi Perpipaan 2 Unit.
    - ✓ Embung Pertanian 1 Unit
  - 2) Irigasi Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 12 Bulan /Layanan
  - 3) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida 11 Layanan
  - 4) Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PSP Layanan.
2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

(Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak target/sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan pemerintah pusat ke daerah semakin meningkat dari tahun ketahunnya.

### **C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Merangin tahun 2022 merupakan implementasi dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) masing-masing program/kegiatan yang dialokasikan untuk Provinsi Jambi. Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah (PD). Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran. DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi Jambi Tahun 2022 yang kemudian salah satunya dialokasikan ke Kabupaten Merangin, telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitatif

pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran. Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja oleh LAN, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), secara umum tergambar kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target. Apabila dibandingkan antara capaian pada tolak ukur input yang menggunakan indikator mengenai besarnya dana, secara rata-rata akan tergambar bahwa nilai capaian input sebanding dengan nilai capaian pada tolok ukur output dan outcome-nya. Ditinjau secara simultan hasil penilaian terhadap kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan bersama di Kabupaten Merangin tahun 2022 menunjukkan bahwa nilai capaian kinerja pelaksanaan kegiatannya berdasarkan tolok ukur dan target kinerja mencapai kisaran 70%-100%, sehingga dengan kondisi ini dapat diinterpretasikan, bahwa pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dapat digolongkan sebagai kriteria berhasil. Meskipun demikian, secara parsial patut diakui bahwa masih terdapat beberapa kegiatan yang nilai kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat efisiensi input dalam pencapaian output. Sehingga tingkat efisiensi mencapai 70%-100%, yang artinya bahwa terdapat efisiensi input dalam pencapaian output sebagai dasar penentuan kerangka perencanaan anggaran. Secara lebih rinci mengenai capaian kinerja kegiatan yang disandingkan dengan target kinerjanya.

### **3.1 Tugas Pembantu Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten**

#### **3.1.1 Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan Sembako Pada Tahun 2022, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah menyalurkan bantuan Sembako kepada 16.058 KPM

masyarakat miskin yang tersebar di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin.

- 2) Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang bersumber dari APBN. Adapun kriteria dari PKH berupa keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat sebagai berikut :
  - a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
  - b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk penyandang disabilitas ringan/sedang.
  - c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat didalam keluarga peserta PKH
  - d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun keatas didalam keluarga peserta PKH.

Secara rinci alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah direalisasikan pada tahun 2022 dijelaskan sebagai berikut:

- Bantuan Sosial PKH pada tahap 1 Tahun 2022 sudah kami realisasikan kepada 9.658 KPM, dengan total dana bantuan sebesar Rp. 6.538.375.000,-
- Bantuan Sosial PKH pada tahap II Tahun 2022 sudah kami realisasikan kepada 9.510 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp. 6.704.050.000,-
- Bantuan Sosial PKH pada tahap III Tahun 2022 sudah kami realisasikan kepada 8.812 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp. 6.174.525.000,-
- Bantuan Sosial PKH pada tahap IV Tahun 2022 sudah kami realisasikan kepada 8.661 KPM, dengan total dana bantuan sebesar Rp. 5.956.150.000,-



Dari keseluruhan bantuan diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa total masyarakat miskin yang sudah mendapatkan dana bantuan PKH selama tahun 2022 sebanyak 8.661 KPM dengan dana sebesar Rp. 25.373.100.000,-.

### 3.1.2 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Dalam rangka untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan diprioritaskan pada Komoditi utama dan unggulan nasional yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar, bawang merah Cabe, Kentang, bawang putih, Komoditi ini merupakan komoditi utama dan unggulan bagi kebutuhan pangan pokok nasional. komplemen dari komoditas utama dan unggulan nasional. Pengembangan prioritas utama tanaman pangan pada tahun 2022 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan program ini Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin ditunjuk sebagai pelaksana baik secara teknis maupun non teknis antara lain sebagai berikut:

#### 1. Ditjen Tanaman Pangan

**Tabel 3.2 Realisasi Kegiatan Bantuan Benih Padi Sawah Inbrida APBN/TP di Kabupaten Merangin Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	TARGET (Ha)	REALISASI TANAM (Ha)	CAPAIAN (%)
1	Jangkat	25	25	100
2	Jangkat Timur	165	165	100
3	Muara Siau	45	45	100
4	Lembah Masurai	20	20	100
5	Tiang Pumpung	10	10	100
6	Pamenang	91	91	100
7	Pamenang Barat	10	10	100

8	Pamenang Selatan	25	25	100
9	Renah Pamenang	20	20	100
10	Batang Masumai	75	75	100
11	Sungai Manau	140	140	100
12	Pangkalan Jambu	50	50	100
13	Renah Pembarap	35	35	100
14	Tabir	90	90	100
15	Tabir Ilir	10	10	100
16	Tabir Ulu	100	100	100
17	Tabir Selatan	14	14	100
18	Tabir Lintas	10	10	100
19	Margo Tabir	15	15	100
20	Tabir Barat	50	50	100
Jumlah		1000	1000	100

**Tabel 3.3 Realisasi Kegiatan Padi Nutrizing atau Kaya Gizi Dana APBN Tahun 2022 Kabupaten Merangin**

NO	KECAMATAN	TARGET (Ha)	REALISASI TANAM (Ha)	CAPAIAN (%)	KET
1	Jangkat	30	-	-	Benih di droping Bulan Desember 2022
2	Batang Masumai	15	-	-	
3	Pangkalan Jambu	60	-	-	
4	Sungai Manau	15	-	-	
5	Pamenang Selatan	25	-	-	
6	Tabir	50	-	-	
7	Tabir Lintas	30	-	-	
8	Tabir Selatan	15	-	-	
9	Tabir Ulu	30	-	-	
10	Tabir Barat	30	-	-	
Jumlah		300	-	-	

**Tabel 3.4 Realisasi Kegiatan Bantuan Benih Jagung Dana APBN Tahun 2022 Kabupaten Merangin**

NO	KECAMATAN	TARGET (Ha)	REALISASI TANAM (Ha)	CAPAIAN (%)
1	PAMENANG	20	20	100
2	PAMENANG BARAT	15	15	100
3	PAMENANG SELATAN	10	10	100
4	RENAH PAMENANG	10	10	100
5	TABIR ILIR	5	5	100
6	TABIR SELATAN	15	15	100
7	MUARA SIAU	25	25	100
Jumlah		100	100	100

**Tabel 3.5 Realisasi Kegiatan Bantuan Benih Kedelai Dana APBN Tahun 2022 Kabupaten Merangin**

NO	KECAMATAN	TARGET (Ha)	REALISASI TANAM (Ha)	CAPAIAN (%)
1	RENAH PAMENANG	40	170	100
2	PAMENANG SELATAN	20	10	100
3	TABIR ILIR	20	55	100
4	LEMBAH MASURAI	20	25	100
Jumlah		100	100	100

**Tabel 3.6 Daftar Realisasi Bantuan Alat Pasca Panen APBN-TP Provinsi di Kabupaten Merangin Tahun 2022**

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Jenis Alat Pasca Panen	Vol
1	Jangkat	Muara Madras	Serai Serumpun	Power Thereser	1
2	Muara Siau	Air Lago	Karya Tani	Corn Seller	1
3	Pangkalan jambu	Bungo Tanjung	Pancuran Nibung II	Power Thereser	1

4	Tabir Ilir	Air Batu	Sumber Mukti	Corn Seller	1
5	Pamenang Barat	Pinang Merah	Harapan Mulya	UPH Kedelai	1
6	Margo Tabir	Sido Lego	KWT Mawar	UPH Lainnya	1
7	Jangkat	Muara Madras	Serai Serumpun	Power Thereser	1
<b>Jumlah</b>					<b>6</b>

## 2. Ditjen Prasarana dan sarana Pertanian

**Tabel 3.7 Realisasi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) Dana APBN/TPTahun 2022 Kab. Merangin**

NO	LOKASI KEGIATAN			Target		REALISASI		
	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	LUASAN SAWAH YANG TERAIRI (Ha)	VOLUME FISIK (Unit)	LUASAN SAWAH YANG TERAIRI (Ha)	VOLUME FISIK (Unit)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1.</b>	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)</b>			<b>300</b>	<b>6</b>	<b>300</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>
	Tabir	Tanjung Ilir	Maju Bersama	50	1	50	1	100,00
	Tabir Ulu	Kapuk	Gapoktan Sumurjo	100	2	100	2	100,00
		Pulau Aro	Tanjung Harapan II	50	1	50	1	100,00
	Sungai Manau	Bukit Batu	Karya Tani	50	1	50	1	100,00
	Jangkat Timur	Rantau Suli	Usaha Baru	50	1	50	1	100,00
<b>JUMLAH</b>				<b>300</b>	<b>6</b>	<b>300</b>	<b>6</b>	<b>100,00</b>

**Tabel 3.8 Realisasi Pembangunan Irigasi Perpipaan Dana APBN/TP Tahun 2022 Kab. Merangin**

NO	LOKASI KEGIATAN			TARGET		REALISASI		FISIK (%)
	KECAMATAN	DESA	KELOMPOK TANI	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2.</b>	<b>Pembangunan Irigasi Perpipaan</b>			<b>2</b>	<b>Unit</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>	<b>100,00</b>
	Jangkat	Lubuk Pungguk	Mentenang 1	1	Unit	1	Unit	100,00
	Tabir Lintas	Koto Baru	Suka Maju	1	Unit	1	Unit	100,00
<b>JUMLAH</b>				<b>2</b>	<b>Unit</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>	<b>100,00</b>

## 3. Ditjen Hortikultura

**Tabel 3.7 Realisasi Kegiatan Kawasan Jahe Dana. APBN/TP Tahun 2022 Kabupaten Merangin**

No.	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Capaian (%)	Varietas	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Muara Siau	Rantau Macang	Aur Gading	5	5	100	Gajah	Belum Panen
2	Pamenang Selatan	Tanjung Benuan	Amor	5	5	100	Gajah	
<b>Jumlah</b>				10	10			

**Tabel 3.8 Realisasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Bawang Merah Dana APBN/TP Tahun 2022 Kabupaten Merangin**

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Capaian (%)	Varietas	Ket
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1	Lembah Masu	Sungai Lalang	Sinar Masurai	10	10	100	Bima Brebes	Sudah Panen
<b>Jumlah</b>				10	10	100		

**Tabel 3.9 Realisasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Cabe Merah Dana APBN/TP Tahun 2022 Kabupaten Merangin**

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Capaian (%)	Varietas	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Batang Masumai	Pelangki	Mekar Jaya	2	2	100	Sigantung	Panen Desember 2022
		Pulau Layang	Anggrek	2	2	100	Sigantung	
		Lubuk Gaung	Harapan Jaya	2	2	100	Sigantung	
		Tambang Besi	Wanita Melati	2	2	100	Sigantung	
		Titian Teras	Kamboja	2	2	100	Sigantung	
2	Renah Pamenang	Rasau	Adil	3	3	100	Lidia F1	Perkiraan Panen Pebruari 2022
		Meranti	Rancang Gumilang	2	2	100	Lidia F1	
		Meranti	Rukun Tani	2	2	100	Sigantung	
		Rasau	Tani Makmur	2	2	100	Sigantung	
3	Pamenang	Pematang Kancil	Mekar Jaya	3	3	100	Ferosa	Perkiraan Panen Pebruari 2022
		Rejo Sari	Sari Makmur	3	3	100	Ferosa	
		Rejo Sari	Ngudi Makmur	3	3	100	Ferosa	
4	Pamenang Selatan	Tambang Emas	Sekar Mulyo	2	2	100	Ferosa	Perkiraan Panen Pebruari 2022
		Tanjung Benuang	Tani Rukun	3	3	100	Ferosa	
		Simpang Limbur Mera	Tunas Mekar	2	2	100	Sigantung	
		Mampun Baru	Sri Rejeki	2	2	100	Ferosa	
5	Tabir Lintas	Sido Lego	Bukit Subur	2	2	100	Ferosa	Perkiraan Panen Pebruari 2022
6	Bangko	Pulau Bayur	Sumber Rezeki	3	3	100	Sigantung	
		Kelurahan Dusun Bang	Ciuang Wanara	3	3	100	Ferosa	
		Pulau Bayur	Tani Pasundan	1	1	100	Sigantung	
7	Nalo Tantan	Baru Nalo	Nalo Maju	2	2	100	Sigantung	Perkiraan Panen Pebruari 2022
		Sungai Ulak	Bukit Baru	2	2	100	Sigantung	
<b>Jumlah</b>				50	50	100		

**Tabel 3.10 Realisasi Kegiatan Prasarana Dan Sarana Pengolahan Hasil Dana APBN/TP Tahun 202 Kabupaten Merangin**

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Prasarana dan Dansarana	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pamenang	Tanah Abang	Karya Maju	Dryer Solla Dome	1	1	100	
<b>Jumlah</b>					1	1	100	

### 3.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam pelaksanaannya adapun permasalahan yang dihadapi antara lain, sebagai berikut :

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a) Belum optimalnya kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.
  - b) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - c) Belum Akuratnya data fakir miskin di Kabupaten Merangin.
  - d) Masih tingginya korban bencana alam, baik yang diakibatkan oleh peristiwa alam maupun ulah manusia. Belum optimalnya pemenuhan hak anak di Kab/Kota

#### 2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pada tahun 2022 terdapat beberapa kendala terkait teknis pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pangan di Kabupaten Merangin yang diuraikan sebagai berikut: Permasalahan tersebut antara lain adalah secara umum pada tahun 2022 adanya wabah yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yaitu Pandemi COVID-19, salah satu dampak dari wabah tersebut adalah menurunnya daya beli masyarakat, oleh karena itu alokasi anggaran program dan kegiatan yakni di fokuskan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pemulihan Ekonomi Daerah ( PED) baik Anggaran APBN maupun APBD dalam upaya menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 pada tahun ini, menurunnya Penerimaan Asli

Daerah (PAD). Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun sesuai program Nasional dan Daerah, sehingga program kegiatan terlaksana secara optimal bahkan dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat. Namun pada tahun Anggaran 2022, sebagian besar pekerjaan fisik maupun pengadaan barang/Jasa dihentikan sementara pelaksanaan pekerjaannya dan dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sebesar 30% dari Nilai Kontrak dan Sisanya akan dibayarkan tahun Anggaran 2023, berupa hutang daerah dan pekerjaan lanjutan pada tahun 2023.

### 3.3 Saran dan Tindak Lanjut

Dalam pelaksanaannya adapun upaya yang dilakukan antara lain, sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - ✓ Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti Bimbingan Teknis, Pelatihan dan peningkatan wawasan tentang tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas SOSPPPA Kabupaten Merangin.
  - ✓ Penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditempatkan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.
  - ✓ Pengiriman Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengikuti Bimtek, pelatihan dalam pengelolaan barang milik daerah/aset dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin serta Penempatan pejabat struktural disesuaikan dengan latar belakang pendidikan / pengalaman kerja.
2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
  - ✓ Melakukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas utama program dan kebutuhan pembangunan bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

- ✓ Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran 2023.
- ✓ Selain itu perlu dilakukan penekanan tugas dan fungsi aparatur dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- ✓ Peningkatan Produksi dan Produktivitas Padi pada 7 Kecamatan Kawasan Lumbung Beras.
- ✓ Pembinaan, pelatihan dan sosialisasi tentang teknis dan peningkatan usaha Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- ✓ Perlunya dilakukan penetapan Kawasan Pengembangan.
- ✓ Percepatan Penetapan Peraturan Bupati tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan Peraturan Daerah.



 **BAB IV**

# **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

## **4.1 PENERAPAN SPM**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, dan kemudian di perbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, karena tidak sesuai lagi dengan dinamika kebutuhan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Penerapan SPM dilaksanakan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Pengisian SPM dilakukan sebagaimana format pengisian data dalam setiap tahapan penerapan SPM yang terdiri dari Form A, Form B, Form C, Form D dan Form E yang terdapat pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Beberapa form tersebut harus diisi oleh Dinas yang berwenang sesuai dengan tugas wajib dan kinerja yang dilaksanakan.

Setelah pengumpulan dan pengisian data lalu dilaksanakan penghitungan kebutuhan pelayanan yang berupa penghitungan kebutuhan mutu minimal suatu urusan. Yang selanjutnya diikuti dengan Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dan capaian target Standar Pelayanan Minimal.

Rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Merangin sebagai berikut:



4.1.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

A. Pengumpulan Data Pendidikan

Form 1.A.2 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Angka Partisipasi Murni (Apm) Pendidikan Anak Usia Dini/Ra/Sederajat		Angka Partisipasi Kasar (Apk) Sd/Mi/Paket A		Angka Partisipasi Kasar (Apk)Smp/Mts/Paket B.		Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7 Sampai Dengan 15 Tahun		Perbandingan Aps Anak Usia 5- 6 Tahun Kuintil Terendah Dengan Aps Anak Usia 5-6 Tahun Kuintil Tertinggi	
		Jumlah Peserta Didik Usia 5-6 Tahun Yang Mengikuti I Paud Formal Dan Non Formal	Jumlah Populasi Anak Usia 5-6 Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Yang Bersekolah Di Jenjang SD/MI/Paket A 6 Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Sampai Dengan 12 (Dua Belas) Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Yang Bersekolah Di Jenjang Smp/Mts/Paket B	Jumlah Anak Usia 13 (Tiga Belas) Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Yang Bersekolah	Jumlah Anak Usia 7 (Tujuh) Sampai Dengan 15 (Lima Belas) Tahun Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan	Proporsi Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Pada Paud Formal Dan Nonformal Dari Kuintil Terendah	Proporsi Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Pada Paud Formal Dan Nonformal Dari Kuintil Tertinggi Pada Kab/Kota Yang Bersangkutan
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/KB/SPS/TPA)	12,234	12.234	39,182	40,059		36.279				
2	Pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/M										



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

TS/Kesetaraan)									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Form 1.A.4 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kecukupan Formasi Guru Asn Untuk Sekolah Yang Diselenggarakan Oleh Pemda Sesuai Dengan Kebutuhan Peningkatan Indeks Distribusi Guru (Paud/Sd/Smp/Kesetaraan)		Proporsi Lulusan Program Guru Penggerak Yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah Dan Pengawas/ Penilik (Paud/Sd/Smp/Kesetaraan).		Indeks Distribusi Guru (Sd/Smp/Kesetaraan)	
		Jumlah Formasi Guru Asn Yang Diajukan	Jumlah Formasi Guru Asn Yang Dibutuhkan Berdasarkan Data Dari Kemendikbudristek	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak Di Kab/Kota Yang Diangkat Menjadi Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah	Jumlah Lulusan Program Guru Penggerak Di Kab/Kota Tersebut	Indeks Distribusi Guru Tahun N	Indeks Distribusi Guru Tahun N-1
	2	3	4	5	6	7	8
	Pendidikan Anak Usia Dini	40	35	0	0		
	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Mts)	180	170	2	23		

**Form 1.A.7 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kemampuan Literasi Peserta Didik (SD/ MI/ SMP/ Mts/ Kesetaraan)		Kemampuan Numerasi Peserta Didik (SD/ MI/ SMP/ MTs/ Kesetaraan)	
		Rata-Rata Nilai Literasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-Rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-Rata Nilai Literasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun N Semua Peserta Asesmen Nasional Dikurangi Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional	Rata-Rata Nilai Numerasi Tahun N-1 Semua Peserta Asesmen Nasional
1	2	3	4	5	6



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)	3.29	4.66	3.13	6.00
---	--	------	------	------	------

**Form 1.A.9 Rekapitulasi Kebutuhan Data Pemerataan Kualitas hasil Belajar: Literasi Dan Numerasi**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Perbedaan Skor Literasi Antara Peserta Didik Laki-Laki Dan Perempuan (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)		Perbedaan Skor Literasi Antara Kelompok Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Dan Tinggi (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)		Perbedaan Skor Numerasi Antara Peserta Didik Laki-Laki Dan Perempuan (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)		Perbedaan Skor Numerasi Antara Kelompok Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Dan Tinggi (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)	
		Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Laki Laki Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Literasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Laki Laki Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Perempuan Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Rendah Berdasarkan Asesmen Nasional	Rata-Rata Skor Numerasi Peserta Didik Dari Keluarga Dengan Status Sosial Ekonomi Tinggi Berdasarkan Asesmen Nasional
1	Pendidikan Dasar (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)	5.00					6.00		

**Form 1.A.11 Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan Paud Yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B		Pertumbuhan Pendidik Paud Dengan S1/Div		Rasio Pengawas Sekolah Untuk Paud	
		Jumlah Satuan Paud Yang Mendapatkan Akreditasi Minimal B	Jumlah Keseluruhan Satuan Paud Yang Telah Diakreditasi Di Kab/Kota Tersebut	Persentase Pendidik Paud Dengan S1/Div Pada Tahun N	Persentase Pendidik Paud Dengan S1/Div Pada Tahun N-1	Jumlah Pengawas Sekolah Untuk Tk Ditambah Jumlah Penilik Paud Nonformal	Jumlah Satuan PAUD



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan Anak Usia Dini	17	39	15%		13	407

**Form 1.A.12 Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks Iklim Keamanan Di Satuan Pendidikan (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/Kesetaraan)		Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Di Satuan Pendidikan (Sd/ Mi/ Smp/ Mts/ Kesetaraan)	
		Indeks Iklim Keamanan Rata-Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N	Indeks Iklim Keamanan Rata-Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N-1 Berdasarkan Asesmen Nasional	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Rata Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N	Indeks Iklim Kebinekaan Dan Inklusivitas Rata-Rata Satuan Pendidikan Pada Tahun N-1 Berdasarkan Asesmen Nasional
1	2	3	4	5	6
	Pendidikan Dasar (SD/ MI/SMP MTS/Kesetaraan)	5.33	5.33	4.43	4.43

**B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

**Form 1.B.2 Perhitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Pendidikan**

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Ketersewaan	Selish (+/)	Harga Satuan	Kebutuhan Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan Pemenuhan Layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluanidentifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai	1 Tersedianya data	Peserta didik					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Keterse Diaan	Selisi h (+/)	Harga Satuan	Kebu tuhan Biaya
				dengan 6 (enam) tahun							
				2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per Tahun	2 Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan					
				3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3 Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik					
				4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	4 Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5 Peserta didik terlayani	Peserta didik					
				6 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	6 Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1 Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Keterse- Diaan	Selisi- h (+/)	Harga Satuan	Kebu- tuhan Biaya
			satuan	2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2 Terselenggaranya pelatihan/seminar/Kegiatan/lokakarya	Kegiatan				
				3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	3 Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan				
				4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4 Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan				
				5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5 Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan				
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1 Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan				



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Keterse- Diaan	Selisi h (+/)	Harga Satua n	Kebu- tuhan Biaya
				2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2	Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3	Ajuan formasi guru	Guru	410		
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan			
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan	41		
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan			
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	7	Tersedianya data	Pengawas atau penilik	24		





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Keterse- Diaan	Selisi h (+/)	Harga Satua n	Kebu- tuhan Biaya
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan			
				2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
				3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3	Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan			
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1	Tersedianya data	Peserta didik			
				2	Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2	Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik			
				3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3	Peserta didik terlayani	Peserta didik			



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Keterse Diaan	Selisi h (+/)	Harga Satuan	Kebu tuhan Biaya
				4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4 Peserta didik terlayani	Peserta didik					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI /MTs/Paket A/Paket B)	1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1 Terselenggara komunitas belajar	Unit komunitas					
				2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2 Terselenggara pelatihan/seminar	Kegiatan					
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1 Terselenggara pendampingan	Kegiatan					
				2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2 Terselenggara pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Keterse- Diaan	Selisi h (+/)	Harga Satua n	Kebu- tuhan Biaya
				3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3 Terselenggaranya pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan				
				4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4 Terselenggaranya sosialisasi	Kegiatan				
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1 Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan				
		2		Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2 Distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan					
		3		Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Ajuan formasi guru	Guru					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Keterse- Diaan	Selisi h (+/)	Harga Satua n	Kebu- tuhan Biaya
				4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4	Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan			
				5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5	Penempatan kepala sekolah	Kegiatan			
				6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6	Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan			
				7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7	Tersedianya data	Pengawas			
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Kegiatan			
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan	2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan				



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

No	Program	Outcome	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran (Output)	Satuan	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih (+/)	Harga Satuan	Kebutuhan Biaya
				tenaga kependidikan							
				3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3 Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan					

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

Form 1.C.2 Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan Dan Kerangka Pendanaan

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2024				
										2020			2021			2022			2023				2024			
										TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	1 Tersedianya Data	Peserta didik	4531	2,718,600,000	APEN	3.224	600.000	1,934,400,000	5.734	600.000	3,442,200	5.915	600.000	3,549,000								



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2024				
										2020			2021			2022			2023				2024			
										TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	
				2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2	Terselenggaranya Sosialisasi																			
				3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3	Biaya bantuan pendidikan																			
				4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	4	Peserta didik terlayani																			
				5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5	Peserta didik terlayani																			





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)
				3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	3	Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan																	
				4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4	Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan																	
				5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5	Terselenggaranya Pemeliharaan dan perb	Kegiatan																	





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	JUMLAH SASARAN PEMENUHAN (2019)	ALOKASI ANGGARAN (2019)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN DAN KERANGKA PENDANAAN												KONDISI AKHIR 2024			
										2020			2021			2022			2023				2024		
										TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)	TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)		TARGE T	HARGA SATUAN (JUTA)	Rp (JUTA)
					aikan																				
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1	Tersedia nya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan																	

**D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

**Form 1.D.2 Realisasi Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan**

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi	Peserta didik									



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
	kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun										
2	Jumlah sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat	Kegiatan									
3	Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan (PAUD)	Peserta didik									
4	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD)	Peserta didik									
5	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (PAUD)	Peserta didik									
6	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (PAUD)	Peserta didik									
7	Jumlah pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini	Kegiatan									
8	Jumlah kegiatan pelatihan/seminar/lokakarya guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan (PAUD)	Kegiatan									
9	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Kegiatan									



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
10	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (PAUD)	Kegiatan									
11	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (PAUD)	Kegiatan									
12	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
13	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
14	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PAUD)	Guru									
15	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (PAUD)	Kegiatan									
16	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (PAUD)	Kegiatan									
17	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (PAUD)	Kegiatan									



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
18	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD)	Pengawas atau penilik									
19	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (PAUD)	Kegiatan									
20	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
21	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD)	Kegiatan									
22	Jumlah data warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik									
23	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)	Peserta didik									
24	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	Peserta didik									
25	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik									



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
	(SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)										
26	Jumlah komunitas belajar pada jenjang Pendidikan Dasar (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Unit komunitas									
27	Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
28	Jumah pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
29	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
30	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
31	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
32	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/	Pendidik dan tenaga									



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
	Kesetaraan)	kependidikan									
33	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
34	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Guru									
35	Jumlah penempatan guru pembimbing khusus (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
36	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
37	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
38	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pengawas atau penilik									



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

No	Keluaran (Output)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			Volume	Rp	Volume	Rp	Fisik	Keuangan			
39	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									
40	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan									
41	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan									



#### 4.1.2 Bidang Urusan Kesehatan

##### A. Pengumpulan data Kesehatan

#### Form 2.A.2 Rekapitulasi Penduduk Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN/PUSKESMAS	TARGET PENERIMA PELAYANAN												
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDI KAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	BANGKO	BANGKO	348	295	287	1072	901	3220	849	3281	141	18	84	365	
		PEMATANG KANDIS	649	639	639	1681	1294	1185	1326	4835	207	50	22	859	
2	NALO TANTAN	AUR BERDURI	271	255	250	1275	445	2134	1533	2324	100	21	7	376	
3	TABIR LINTAS	TABIR LINTAS	138	135	141	568	0	1026	456	1611	69	17	0	171	
4	MARGO TABIR	SUMBER AGUNG	326	299	294	879	559	1391	555	2835	122	3	16	306	
5	TABIR	RANTAU PANJANG	443	454	404	1580	603	1443	670	4253	182	11	13	492	
		PASAR BARU	200	193	198	2034	296	1050	843	2189	94	10	7	220	
6	TABIR ILIR	RANTAU LIMA MANIS	109	105	106	442	132	1838	507	882	38	11	0	115	
		KOTO RAJA	85	74	77	323	108	976	583	881	38	10	0	89	
7	TABIR SELATAN	MUARA DELANG	518	460	460	1994	917	1892	1570	4966	213	15	6	627	





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN/PUSKESMAS	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDI KAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBER KULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
8	TABIR TIMUR	SUNGAI BULIAN	187	160	157	584	187	1056	423	1543	66	14	1	171
9	TABIR ULU	MUARA JERNIH	148	142	135	832	308	2048	943	1176	50	26	1	177
10	TABIR BARAT	MUARA KIBUL	173	159	161	795	0	2218	2305	1536	66	22	2	221
11	BATANG MASURAI	KEDERASAN PANJANG	207	185	202	816	369	2023	385	2328	100	1	8	224
12	BANGKO BARAT	BANGKO BARAT	193	189	196	694	193	2245	899	2187	94	26	1	218
13	RENAH PEMBARAP	SIMPANG PARIT	364	348	289	1050	294	1134	1161	2457	105	33	48	283
14	SUNGAI MANAU	SUNGAI MANAU	311	301	301	852	474	1055	537	2014	86	17	14	207
15	PANGKALAN JAMBU	SUNGAI JERING	126	139	165	572	111	1119	741	1375	59	21	1	144
16	PAMENANG	PAMENANG	692	663	654	2553	1019	935	2621	5671	243	43	22	715
17	PAMENANG BARAT	SIMPANG LIMBUR	303	283	282	1291	448	1679	1320	3236	139	23	93	324
18	RENAH PAMENANG	MERANTI	265	247	250	1061	351	2254	1828	3123	134	6	3	306
19	PAMENANG SELATAN	TAMBANG EMAS	209	201	228	796	333	2355	1449	2010	86	24	0	201
20	TIANG PUMPUNG	SEKANCING	74	71	66	329	90	1000	1159	1082	46	7	5	105
21	MUARA SIAU	MUARA SIAU	210	200	200	782	229	2367	598	1925	83	19	4	224



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN/PUSKESMAS	TARGET PENERIMA PELAYANAN											
			PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDI KAN DASAR	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT HIPERTENSI	PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT DIABETES MELITUS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV
22	LEMBAH MASURAI	PASAR MASURAI	372	362	379	1366	488	2132	766	2299	99	22	24	362
23	JANGKAT	MUARA MADRAS	218	202	218	817	323	1155	1283	1504	65	32	3	202
24	JANGKAT TIMUR	RANTAU SULI	302	264	270	906	383	1044	1511	2015	86	9	0	222

**Form 2.A.3 Rekapitulasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah**

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
1	2	3	4	5	6
1	BANGKO	PUSKESMAS	2	DOKTER UMUM	11
		PUSTU	35	DOKTER GIGI	4
		POSKEDES	2	PERAWAT	47
		POLINDES	2	BIDAN	31
				KESEHATAN MASYARAKAT	17
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	5
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	4
				KETERAPIAN FISIK	2



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
				KETEKNISIAN MEDIS	9
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	5
				APOTEKER	2
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	16
2	NALO TANTAN	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	1
		PUSTU	14	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	0	PERAWAT	9
		POLINDES	0	BIDAN	25
				KESEHATAN MASYARAKAT	5
				KESEHATAN LINGKUNGAN	0
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	2
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	0
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	3
3	TABIR LINTAS	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	3
		PUSTU	6	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	0	PERAWAT	7
		POLINDES	0	BIDAN	34
				KESEHATAN MASYARAKAT	7
				KESEHATAN LINGKUNGAN	0
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	2



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
				KETERAPIAN FISIK	1
				KETEKNISIAN MEDIS	1
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	0
4	MARGO TABIR	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	1
		PUSTU	11	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	2	PERAWAT	29
		POLINDES	3	BIDAN	39
				KESEHATAN MASYARAKAT	6
				KESEHATAN LINGKUNGAN	3
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	2
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	0
5	TABIR	PUSKESMAS	2	DOKTER UMUM	7
		PUSTU	26	DOKTER GIGI	2
		POSKEDES	5	PERAWAT	42
		POLINDES	3	BIDAN	67
				KESEHATAN MASYARAKAT	5
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	4



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	3
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	3
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	4
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	6
6	TABIR ILIR	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	4
		PUSTU	6	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	2	PERAWAT	19
		POLINDES	0	BIDAN	33
				KESEHATAN MASYARAKAT	4
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	3
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	2
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	0
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2
				APOTEKER	1
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	2
7	TABIR SELATAN	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	35	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	1	PERAWAT	27
		POLINDES	6	BIDAN	36
				KESEHATAN MASYARAKAT	3
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

N O	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
				GIZI	2
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	3
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	2
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	4
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	4
8	TABIR TIMUR	PUSKESMAS	19	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	2	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	0	PERAWAT	17
		POLINDES	0	BIDAN	23
				KESEHATAN MASYARAKAT	2
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	1
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	3
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	3
9	TABIR ULU	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	12	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	0	PERAWAT	20
		POLINDES	0	BIDAN	29
				KESEHATAN MASYARAKAT	2



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

N O	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
				KESEHATAN LINGKUNGAN	2
				GIZI	0
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	2
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	2
10	TABIR BARAT	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	1
		PUSTU	16	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	10	PERAWAT	25
		POLINDES	0	BIDAN	33
				KESEHATAN MASYARAKAT	4
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	2
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	2
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	1
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	1
11	BATANG MASURAI	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	11	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	0	PERAWAT	9
		POLINDES	7	BIDAN	34



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
				KESEHATAN MASYARAKAT	4
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	0
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	1
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	1
12	BANGKO BARAT	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	11	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	1	PERAWAT	8
		POLINDES	2	BIDAN	31
				KESEHATAN MASYARAKAT	8
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	0
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	1
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	3
13	RENAH PEMBARAP	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	1
		PUSTU	20	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	4	PERAWAT	13





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

N O	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
		POLINDES	1	BIDAN	20
				KESEHATAN MASYARAKAT	2
				KESEHATAN LINGKUNGAN	0
				GIZI	2
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	2
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	1
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	1
14	SUNGAI MANAU	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	1
		PUSTU	24	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	0	PERAWAT	26
		POLINDES	0	BIDAN	39
				KESEHATAN MASYARAKAT	2
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	11
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	2
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	1
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	4
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	1
15	PANGKALAN JAMBU	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	1
		PUSTU	12	DOKTER GIGI	0



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

N O	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
		POSKEDES	5	PERAWAT	8
		POLINDES	0	BIDAN	28
				KESEHATAN MASYARAKAT	1
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	1
				KETEKNISIAN MEDIS	4
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	0
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	1
16	PAMENANG	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	31	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	5	PERAWAT	39
		POLINDES	4	BIDAN	49
				KESEHATAN MASYARAKAT	2
				KESEHATAN LINGKUNGAN	2
				GIZI	3
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	3
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	1
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2
				APOTEKER	1
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	5
17	PAMENANG BARAT	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	3



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

N O	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
		PUSTU	22	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	0	PERAWAT	22
		POLINDES	0	BIDAN	51
				KESEHATAN MASYARAKAT	2
				KESEHATAN LINGKUNGAN	2
				GIZI	3
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	2
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	5
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	1
18	RENAH PAMENANG	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	16	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	0	PERAWAT	9
		POLINDES	0	BIDAN	26
				KESEHATAN MASYARAKAT	1
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	1
				KETEKNISIAN MEDIS	2
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	4



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

N O	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
19	PAMENANG SELATAN	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	3
		PUSTU	14	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	0	PERAWAT	10
		POLINDES	0	BIDAN	40
				KESEHATAN MASYARAKAT	4
				KESEHATAN LINGKUNGAN	2
				GIZI	2
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	1
				KETEKNISIAN MEDIS	2
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	3
		20	TIANG PUMPUNG	PUSKESMAS	1
PUSTU	6			DOKTER GIGI	0
POSKEDES	4			PERAWAT	13
POLINDES	1			BIDAN	15
				KESEHATAN MASYARAKAT	4
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	0
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

N O	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	4
21	MUARA SIAU	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	23	DOKTER GIGI	0
		POSKEDES	10	PERAWAT	13
		POLINDES	5	BIDAN	38
				KESEHATAN MASYARAKAT	2
				KESEHATAN LINGKUNGAN	3
				GIZI	1
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	1
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	1
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	7
22	LEMBAH MASURAI	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	1
		PUSTU	17	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	0	PERAWAT	22
		POLINDES	10	BIDAN	43
				KESEHATAN MASYARAKAT	2
				KESEHATAN LINGKUNGAN	1
				GIZI	2
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	3
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	1
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

N O	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	5
23	JANGKAT	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	13	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	4	PERAWAT	19
		POLINDES	3	BIDAN	35
				KESEHATAN MASYARAKAT	3
				KESEHATAN LINGKUNGAN	3
				GIZI	3
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	2
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	1
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	1
24	JANGKAT TIMUR	PUSKESMAS	1	DOKTER UMUM	2
		PUSTU	17	DOKTER GIGI	1
		POSKEDES	3	PERAWAT	17
		POLINDES	5	BIDAN	37
				KESEHATAN MASYARAKAT	2
				KESEHATAN LINGKUNGAN	2
				GIZI	2
				TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	1
				KETERAPIAN FISIK	0
				KETEKNISIAN MEDIS	1



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	PELAYANAN KESEHATAN		SDM KESEHATAN	
		FASILITAS	KETERSEDIAAN	JENIS	KETERSEDIAAN
				TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	2
				APOTEKER	0
				TENAGA DUKUNGAN MANAJEMEN	2

**B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan**

**Form 2.B.4 Penghitungan Kebutuhan Alat Kesehatan, Bahan Medis Habis Pakai, Obat, Vaksin Dan Perlengkapan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	USG, STIK, HB	27	14	13	-	-	KEMENKES
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Oxtetracilin HCL salep mata	1669	1669				
		Gentamicin injectie 40 mg/ml	312	312				
		Fenobarbital injectie 50 mg/ml	176	176				
		Levotyrosin 50 mg	40	40				
		Metil ergometrin injectie 0,20 mg/ml	90	90				
		Magnesium sulfat injectie 40 %	38	38				
		Magnesium sulfat injectie 20 %	24	24				



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
		Kalsium Glukonas injectie 10 %	23	23				
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	CPAP	15	0	0	40,000,000		KEMENKES
4	Pelayanan Kesehatan Balita							
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut							
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi							
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Stik	77000	1056	75,944.00			PROPINSI : 2000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Diazepan	22200	100	22100			PROPINSI
		Clozapin	18800	3700	15100			
		Amitripilin	21400	180	21220			
		Halloperidol 5 mg	20000	80	19900			
		Risperidone	19950	10000	9950			
		Chorpromazine HCL (CPZ)	21950	0	21950			
		Trihexyphenidyl HCL 2 MG	22350	8000	14350			
Diazepan Injeksi	341	185	156					
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga	Obat Anti Tuberkulosis (OAT) KAT 1	678	82	596	389,344	232,049,024	PROPINSI





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)	KETERANGAN
	Tuberkulosis	Obat Anti Tuberkulosis (OAT) kat Anak	100	5	95	232,518	22,089,210	
		Terapi pencegahan Tuberkulosis (TPT)	500	48	452	134,232	60,672,864	
		Ketrik TCM	4500	200	4300	250	1,075,000,000	
		Pot Dahak	7945	6600	1345	5,890.	7,922,050	
		Kaca Sediaan	3096	400	2696	373	1,005,608	
		Masker N95	7900	400	7500	18	135,000,000	
		Tuberkulin	80	40	40	600,28	24,011,200	
		Reagen ZN	119	40	79	172,527	13,629,633	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Rapid I	7926	8000	74			PROPINSI
		Rapid II	500	500				
		Rapid III	500	610	110			
		Syifilis	7926	2220	5706			

**Form 2.B.5 Penghitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Untuk Pelayanan Dasar Daerah**



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

<b>N O</b>	<b>JENIS LAYANAN DASAR</b>	<b>JENIS SDM KESEHATAN</b>	<b>JUMLA H KEBUT UHAN</b>	<b>JUMLAH TERSEDIA</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dokter	27	27	0	
		Dokter Gigi	27	18	9	
		Bidan	27	27	0	
		Perawat	27	27	0	
		Kesling	27	16	11	
		Gizi	27	23	4	
		Laboratorium	27	27	0	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dokter	27	27	0	
		Dokter Gigi	27	18	9	
		Bidan	27	27	0	
		Perawat	27	27	0	
		Kesling	27	16	11	
		Gizi	27	23	4	
		Laboratorium	27	27	0	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dokter	27	27	0	
		Dokter Gigi	27	18	9	
		Bidan	27	27	0	
		Perawat	27	27	0	
		Kesling	27	16	11	
		Gizi	27	23	4	
		Laboratorium	27	27	0	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Dokter	27	27	0	
		Dokter Gigi	27	18	9	
		Bidan	27	27	0	
		Perawat	27	27	0	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

<b>N O</b>	<b>JENIS LAYANAN DASAR</b>	<b>JENIS SDM KESEHATAN</b>	<b>JUMLA H KEBUT UHAN</b>	<b>JUMLAH TERSEDIA</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
		Kesling	27	16	11	
		Gizi	27	23	4	
		Laboratorium	27	27	0	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan	Dokter	27	27	0	
		Dokter Gigi	27	18	9	
		Bidan	27	27	0	
		Perawat	27	27	0	
		Kesling	27	16	11	
		Gizi	27	23	4	
		Laboratorium	27	27	0	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dokter	28	28	0	
		Bidan	28	28	0	
		Perawat	28	28	0	
		Analisis	27	25	2	
		Apoteker	28	28	0	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Dokter	27	27	0	
		Dokter Gigi	27	18	9	
		Bidan	27	27	0	
		Perawat	27	27	0	
		Kesling	27	16	11	
		Gizi	27	23	4	
		Laboratorium	27	27	0	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dokter	28	28	0	
		Perawat	28	28	0	
		Analisis	27	25	2	
		Apoteker	28	28	0	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes	Dokter	28	28	0	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

<b>N O</b>	<b>JENIS LAYANAN DASAR</b>	<b>JENIS SDM KESEHATAN</b>	<b>JUMLAH KEBUTUHAN</b>	<b>JUMLAH TERSEDIA</b>	<b>SELISIH</b>	<b>KETERANGAN</b>
	Melitus	Perawat	28	28	0	
		Analisis	27	25	2	
		Apoteker	28	28	0	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dokter	28	28	0	
		Perawat	28	28	0	
		Analisis	27	25	2	
		Apoteker	28	28	0	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pengelola Program Kabupaten/WASOR	3	3	0	
		Dokter	32	27	5	
		Perawat	32	32	0	
		Analisis/ATLM	32	30	2	
		Apoteker	32	30	2	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter	28	28	0	
		Perawat	28	28	0	
		Farmasi	28	28	0	
		Analisis	28	26	2	
		RR ( Rekam Radiologi)	28	28	0	

**C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan**



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

**Form 2.C.3 Penyusunan Rencaanaa Pemenuhan UntukPelayanan dasar kesehatan Dalam dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah daerah**

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERAN GKAT DAERAH PENAN GGUNG JAWAB	
	*)							TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
					Pemantauan wilayah setempat (PWS) KIA	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	7016 orang	7386 orang	5,049,000												
					Orientasi keselamatan Ibu dan Anak	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	4200 orang	4421 orang	1,000,000												
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	6923 orang	7288 orang	64,000,000												
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya Kesehatan Anak	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	28688 orang	30198 orang	25,014,284												
					Pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	11050 orang	11632 orang	26,968,000												



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
	*)							TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Pengendalian Penyakit tidak menular di Faskes Dasar	Jumlah Penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1 kali	5 jenis	50,000,000											
					Peningkatan pelayanan kesehatan jiwa masyarakat dan ketergantuan obat	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	12 bulan	396	24,250,000											
					Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak (KIA) dan Lansia	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	7087 orang			7460 orang	451,841,670									
						Jumlah Anak Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	28688 orang			30801 orang										
						Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	6923 orang			7361 orang										



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
	*)								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5			K	Rp
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
							Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	4326 orang			4554 orang										
							Jumlah Lansia yang mendapatkan Skiring Kesehatan	20531 orang			21073 orang										
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Hamil	Ibu Hamil yang dilayani sesuai standar kesehatan	7087 orang				8017 orang	16,500,000	8818 orang	55,000,000						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Operasional Jampersal yang disediakan	12 bulan				12 bulan	1,900,000	12 bulan	2,090,000						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Bayi Baru Lahir yang dilayani sesuai standar Kesehatan	6923 orang				7426 orang	45,000,000	8168 orang	52,000,000						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Balita yang dilayani sesuai standar Kesehatan	28688 orang				37052 orang	30,000,000	40757 orang	50,000,000						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Anak Usia Pendidikan Dasar yang dilayani sesuai standar Kesehatan	11050 orang				16077 orang	50,000,000	17684 orang	50,000,000						



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERAN KAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
	*)							TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5			K	Rp
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Frekuensi pembinaan pelayanan kesehatan usia produktif	4 Kali					4 kali	10,000,000	4 kali	9,000,000					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Usia Lanjut yang dilayani sesuai standar Kesehatan	20531 orang					5175 orang	30,000,000	5692 orang	40,000,000					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Frekuensi pembinaan pelayanan kesehatan Hepertensi	4 Kali					4 kali	15,000,000	4 kali	11,000,000					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	Frekuensi pembinaan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus	4 Kali					4 kali	15,000,000	4 kali	10,000,000					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gangguan jiwa berat	67%					74%	8,000,000	78%	8,542,355					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolusis	Orang denganTuberkulosis yang di layanani sesuai standar	782 Orang					799 orang	8,000,000	804 orang	10,000,000					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Orang dengan resiko terinfeksi HIV yang dilayani sesuai standar	9179 Orang					9662 orang	8,000,000	9710 orang	10,000,000					





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB
	*)							TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					Pengelolaan Pelayan Kesehatan ibu Hamil	Jumlah ibu Hamil yang mendapatkan Pelayan Kesehatan sesuai standar	7097 Orang									6547 Orang	2,100,000	6547 Orang	2,100,000	
					Pengelolaan Pelayan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayan Kesehatan sesuai standar	12 Bulan									8984 Orang	55,000,000	8984 Orang	55,000,000	
					Pengelolaan Pelayan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayan Kesehatan sesuai standar	6923 Orang									4482 Orang	53,000,000	4482 Orang	53,000,000	
					Pengelolaan Pelayan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayan Kesehatan sesuai standar	28688 Orang									19452 Orang	52,000,000	19452 Orang	52,000,000	
					Pengelolaan Pelayan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan Pelayan Kesehatan sesuai standar	11050 Orang									14357 Orang	29,500,000	14357 Orang	29,500,000	
					Pengelolaan Pelayan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk usia Produktif yang mendapatkan Pelayan	4 Kali									6261 Orang	4,200,000	6261 Orang	4,200,000	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERAN GKAT DAERAH PENAN GGUNG JAWAB
	*)							TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
						Kesehatan sesuai standar														
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	20531 Orang									43384 orang	21,500,000	43384 orang	21,500,000
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	4 kali									2883 orang	30,500,000	2883 orang	30,500,000
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	4 kali									457 orang	38,000,000	457 orang	38,000,000
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar	67%									841 Orang	30,500,000	841 Orang	30,500,000



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL TAHUN RPJMD (TAHUN N)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD		UNIT KERJA PERAN GKAT DAERA H PENAN GGUNG JAWAB		
	*)							TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		K	Rp			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolusis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	782 Orang										9758 Orang	20,500,000	9758 Orang	20,500,000		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang terduga menderita HIV yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	9179 Orang											1 Dokumen	77,300,000	1 Dok	77,300,000	

**Form 2.C.4 Penyusunan Rencana Pemenuhan Untuk pelayanan Dasar Kesehatan Dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah**

NO	KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
	*)							TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		RENSTRA PD			
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2				3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	
1	1				Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar																



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	*)								TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		RENSTRA PD		
	K	Rp	K	Rp	K				Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2					Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan															
1	2	2				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota															
1	2	2	02.0 2			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan,UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi															
1	2	2	02.0 2	1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	84.08.00	7069		7069		742 1		7569		7720				
1	2	2	02.0 2	2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	87.04.00	7025		7025		716 5		7308		7454				
1	2	2	02.0 2	3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	98.05.00	7009		7149		724 1		7426		7426				
1	2	2	02.0 2	4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	86.06.00	2643 9		2776 0		288 20		2919 2		2919 2				
1	2	2	02.0 2	5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	92.04.00	1175 3		1175 3		123 41		1292 8		1351 6				



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	*)					*)			TAHUN- N+1		TAHUN- N+2		TAHUN- N+3		TAHUN- N+4		TAHUN- N+5		RENSTRA PD		
	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	2	02.0	2	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	95.06.00	2195 34		2195 34		221 421		2239 51		2261 93				
1	2	2	02.0	2	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	99.05.00	2900 2		2900 8		304 52		3197 4		3357 2				
1	2	2	02.0	2	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	8.042/10 0.000	72.02 1/100 .000		79.40 4/10 0.000		83.3 74/ 100. 000		87.54 2/100 .000		87.54 2/100 .000				
1	2	2	02.0	2	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	6367/10 0.000	7.003 /100. 000		7.353 /100. 000		7.42 7/1 00.0 00		8.170 /100. 000		8.578 /100. 000		8.578 /100. 000		
1	2	2	02.0	2	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%														
1	2	2	02.0	2	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100%	392/100. 000	370/1 00.00 0		343/ 100.0 00		335 /10 0.00 0		332/1 00.00 0		330/1 00.00 0		330/ 100.0 00		
1	2	2	02.0	2	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	100%	16 orang	16 orang		25 orang		35 orang		45 orang		55 orang		55 orang		

**D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan**



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

**Form 2.D.2 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Daerah**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7440	6308	84.80%	155,769,100.00	144,698,300.00	92.09.00	BOK	Perpres yang mengatur Jampersal keluar di bulan juli dan Juknis baru terbit di bulan Oktober sehingga penyerapan tidak maksimal	Juknis segera di terbitkan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7025	6138	87.40%	500,964,700.00	199,843,500.00	23.09	BOK, DIY		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7009	6345	90.50%	55,755,300.00	14,848,000.00	26.06.00	BOK, DIY		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	27944	24209	86.60%	23,087,000	19,352,000	83.09.00	BOK		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	11753	11753	100	23,025,000.00	20,315,000.00	88.02.00	BOK		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	217365	161621	74.40%	-	-	0		Masih rendahnya capaian skrining pada usia 15 sampai 59 tahun	Perlu peningkatan skrining pada usia 15 sampai 59 tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	29002	28871	99.50%	36,378,500.00	36,238,000.00	99.06.00	BOK	Stick tidak ada	Diadakan Stick untu pemeriksaan
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	65536	49025	74.80%	29,147,500.00	25,035,000.00	85.09.00	DID/DAK	Masih rendahnya skiring hipertensi dan	Perlu peningkatan skrining faktor penyakit tidak



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
									pada penderita hipertensi yang masih banyak minum obat tidak teratur	menular
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2812	2766	98.40%	26,062,000.00	18,600,000.00	71.04.00	DID/DAK	Masih rendahnya skiring Diabetes dan pada penderita Diabetes yang masih banyak minum obat tidak teratur	Perlu peningkatan skrining faktor penyakit tidak menular
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	511	501	98	8,500,000.00	8,400,000.00	98.08.00	DID/DAK	Ketersediaan obat jiwa di Dinas masih kurang, kurangnya dukungan dari keluarga pasien, Kurangnya pemantauan minum obat jiwa dari keluarga.	Perlu peningkatan penjangkaran dan skrining kesehatan Jiwa, mengajukan permintaan obat jiwa dan edukasi kepada pihak keluarga pasien terkait minum obat jiwa.



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	3443	2199	64%	50,094,750.00	43,533,000.00	87	DAK	Capaian Pengobatan semua kasus masih rengah.	Perlu peningkatan penemuan dengan cara penjarangan dan kontak semua rumah TBC
									Angka kesembuhan masih Rendah	Perlu ada PMO baik dari Keluarga Pasien atau dari Nakes setempat
									Penemuan terduga TBC masih rendah	Peningkatan kegiatan Infestigasi kontak TBC serumah
									Keterlibatan FASKES Swasta seperti DPM dan Klinik masih Rendah	Perlu MOU antara Puskesmas dan DPM serta Klinik





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	7926	4391	55.30%	27,121,500.00	27,060,500.00	99.07.00	BOK, DID	Dukungan dana masih kurang baik, Pengelola program di layanan sering berganti, Masyarakat masih belum mengetahui atau paham tentang HIV AIDS sehingga masih ada yang belum mau memeriksakan dirinya.	Beri dana sesuai dengan kebutuhan, petugas jangan seing di ganti, meningkatkan penyuluhan program HIV AIDS ke masyarakat melalui layanan menghimbau masyarakat terutama ibu hamil dan pasien TBC untuk skrining



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSEN TASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7440	6308	84.80	155,769,100	144,698,300	92.09	BOK	Perpres yang mengatur Jampersal keluar di bulan juli dan Juknis baru terbit di bulan Oktober sehingga penyerapan tidak maksimal	Juknis segera di terbitkan
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7025	6138	87.40	500,964,700	199,843,500	23.09	BOK, DIY		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7009	6345	90.50	55,755,300	14,848,000	26.06	BOK, DIY		
4	Pelayanan Kesehatan Balita	27944	24209	86.60	23,087,000	19,352,000	83.09	BOK		
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	11753	11753	100	23,025,000	20,315,000	88.02	BOK		
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	217365	161621	74.40	-	-	0		Masih rendahnya capaian skrining pada usia 15 sampai 59 tahun	Perlu peningkatan skrining pada usia 15 sampai 59 tahun
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	29002	28871	99.50	36,378,500	36,238,000	99.06	BOK	Stick tidak ada	Diadakan Stick untu pemeriksaan



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSEN TASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	65536	49025	74.80	29,147,500	25,035,000	85.09	DID/D AK	Masih rendahnya skiring hipertensi dan pada penderita hipertensi yang masih banyak minum obat tidak teratur	Perlu peningkatan skrining faktor penyakit tidak menular
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2812	2766	98.40 %	26,062,000	18,600,000	71.04	DID/D AK	Masih rendahnya skiring Diabetes dan pada penderita Diabetes yang masih banyak minum obat tidak teratur	Perlu peningkatan skrining faktor penyakit tidak menular
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	511	501	98	8,500,000.00	8,400,000	98.08.00	DID/D AK	Ketersediaan obat jiwa di Dinas masih kurang, kurangnya dukungan dari keluarga pasien, Kurangnya pemantauan minum obat jiwa dari keluarga.	Perlu peningkatan penjangkaran dan skrining kesehatan Jiwa, mengajukan permintaan obat jiwa dan edukasi kepada pihak keluarga pasien terkait minum obat



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSEN TASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
										jiwa.
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3443	2199	64%	50,094,750.00	43,533,000	87	DAK	Capaian Pengobatan semua kasus masih rengah.	Perlu peningkatan penemuan dengan cara penjarangan dan kontak semua rumah TBC
									Angka kesembuhan masih Rendah	Perlu ada PMO baik dari Keluarga Pasien atau dari Nakes setempat
									Penemuan terduga TBC masih rendah	Peningkatan kegiatan Infestigasi kontak TBC serumah
									Keterlibatan FASKES Swasta seperti DPM dan Klinik masih Rendah	Perlu MOU antara Puskesmas dan DPM serta Klinik



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN N)			PENDANAAN (TAHUN N)				PERMASALAHAN	SOLUSI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSEN TASE REALISASI ANGGARAN	SUMBER DANA		
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	7926	4391	55.30 %	27,121,500.00	27,060,500.00	99.07.00	BOK, DID	Dukungan dana masih kurang baik, Pengelola program di layanan sering berganti, Masyarakat masih belum mengetahui atau paham tentang HIV AIDS sehingga masih ada yang belum mau memeriksakan dirinya.	Beri dana sesuai dengan kebutuhan, petugas jangan seing di ganti, meningkatkan penyuluhan program HIV AIDS ke masyarakat melalui layanan menghimbau masyarakat terutama ibu hamil dan pasien TBC untuk skrining



**E. Capaian Target SPM Kesehatan (Rekapan )**

**Form 2.E.2 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan Daerah**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR (SPM KAB/KOTA)	PENERIMA LAYANAN DASAR			PENYEDIAAN MUTU LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7440	6215	83.50%	7440	6215	83.50%	83.50%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7025	5860	83.40%	7025	5860	83.40%	83.40%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7009	5854	70.09%	7009	5854	70.09%	70.09%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	27944	21364	76.50%	27944	21364	76.50%	76.50%	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11520	10593	92%	11520	10593	92%	92%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	21736 5	16087 6	74%	217365	160876	74%	74%	100%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	29002	28309	97.60%	29002	28309	97.60%	97.60%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	65536	51974	79.30%	65536	51974	79.30%	79.30%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2812	2766	98.40%	2812	2766	98.40%	98.40%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat.	511	501	98%	511	501	98%	98%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3595	3595	100	3595	3595	100	100	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	7926	4040	51%	7926	4040	51%	51%	100%



#### 4.1.3 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

##### A. Pengumpulan Data

##### a) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang layak Huni Bagi Korban Bencana

##### Form 4.A.4 Identifikasi Perumahan Dilokasi Rawan Bencana

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK		STATUS KEPEMILIKAN	
		(rendah/sedang/tinggi)					(ha)	(unit)			RUMAH (unit)		RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Banjir	Tinggi	Tabir	Deluran Panjang	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
2	Banjir	Tinggi	Tabir	Dusun Baru	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
3	Banjir	Tinggi	Tabir	Kampung Baruh	-	-	-	65	-	-	-	-	-	-
4	Banjir	Tinggi	Tabir	Kandang	-	-	-	321	-	-	-	-	-	-
5	Banjir	Tinggi	Tabir	Koto Rayo	-	-	-	262	-	-	-	-	-	-
6	Banjir	Tinggi	Tabir	Lubuk Napal	-	-	-	126	-	-	-	-	-	-
7	Banjir	Tinggi	Tabir	Mampun	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
8	Banjir	Tinggi	Tabir	Pasar Baru Rantau	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
9	Banjir	Tinggi	Tabir	Pasar Rantau Panjang	-	-	-	126	-	-	-	-	-	-
10	Banjir	Tinggi	Tabir	Seling	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
11	Banjir	Tinggi	Tabir	Tanjung Ilir	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
12	Banjir	Sedang	Tabir	Dusun Baru	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
13	Banjir	Sedang	Tabir	Kampung Baruh	-	-	-	458	-	-	-	-	-	-
14	Banjir	Sedang	Tabir	Kandang	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
15	Banjir	Sedang	Tabir	Koto Rayo	-	-	-	64	-	-	-	-	-	-



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK		STATUS KEPEMILIKAN	
		(rendah/sedang/tinggi)					(ha)	(unit)			RUMAH (unit)		RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
16	Banjir	Sedang	Tabir	Lubuk Napal	-	-	-	1000	-	-	-	-	-	-
17	Banjir	Sedang	Tabir	Mampun	-	-	-	378	-	-	-	-	-	-
18	Banjir	Sedang	Tabir	Pasar Baru Rantau	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-
19	Banjir	Sedang	Tabir	Pasar Rantau Panjang	-	-	-	312	-	-	-	-	-	-
20	Banjir	Sedang	Tabir	Seling	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-
21	Banjir	Sedang	Tabir	Tanjung Ilir	-	-	-	72	-	-	-	-	-	-
22	Banjir	Rendah	Tabir	Dusun Baru	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
23	Banjir	Rendah	Tabir	Kampung Baruh	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
24	Banjir	Rendah	Tabir	Kandang	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
25	Banjir	Rendah	Tabir	Koto Rayo	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
26	Banjir	Rendah	Tabir	Lubuk Napal	-	-	-	123	-	-	-	-	-	-
27	Banjir	Rendah	Tabir	Mampun	-	-	-	209	-	-	-	-	-	-
28	Banjir	Rendah	Tabir	Pasar Baru Rantau	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
29	Banjir	Rendah	Tabir	Pasar Rantau Panjang	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-
30	Banjir	Rendah	Tabir	Seling	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
31	Banjir	Rendah	Tabir	Tanjung Ilir	-	-	-	247	-	-	-	-	-	-
32	Banjir Bandang	Tinggi	Tabir	Dusun Baru	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
33	Banjir Bandang	Tinggi	Tabir	Kampung Baruh	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-
34	Banjir Bandang	Tinggi	Tabir	Lubuk Napal	-	-	-	261	-	-	-	-	-	-
35	Banjir	Tinggi	Tabir	Mampun	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK		STATUS KEPEMILIKAN	
		(rendah/sedang/tinggi)					(ha)	(unit)			RUMAH (unit)		RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
	Bandang													
36	Banjir Bandang	Tinggi	Tabir	Seling	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
37	Banjir Bandang	Tinggi	Tabir	Tanjung Ilir	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
38	Banjir Bandang	Sedang	Tabir	Dusun Baru	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
39	Banjir Bandang	Sedang	Tabir	Kampung Baruh	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-
40	Banjir Bandang	Sedang	Tabir	Lubuk Napal	-	-	-	385	-	-	-	-	-	-
41	Banjir Bandang	Sedang	Tabir	Mampun	-	-	-	254	-	-	-	-	-	-
42	Banjir Bandang	Sedang	Tabir	Seling	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
43	Banjir Bandang	Sedang	Tabir	Tanjung Ilir	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
44	Banjir Bandang	Rendah	Tabir	Dusun Baru	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
45	Banjir Bandang	Rendah	Tabir	Kampung Baruh	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-
46	Banjir Bandang	Rendah	Tabir	Lubuk Napal	-	-	-	188	-	-	-	-	-	-
47	Banjir Bandang	Rendah	Tabir	Mampun	-	-	-	53	-	-	-	-	-	-
48	Banjir Bandang	Rendah	Tabir	Seling	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
49	Banjir Bandang	Rendah	Tabir	Tanjung Ilir	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
50	Banjir	Tinggi	Pamenang	Empang	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK		STATUS KEPEMILIKAN	
		(rendah/sedang/tinggi)					(ha)	(unit)			RUMAH (unit)		RUMAH (unit)	
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa
				Benao										
51	Banjir	Tinggi	Pamenang	Jelatang	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
52	Banjir	Tinggi	Pamenang	Karang Berahi	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
53	Banjir	Tinggi	Pamenang	Keroya	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-
54	Banjir	Tinggi	Pamenang	Muara Belengo	-	-	-	67	-	-	-	-	-	-
55	Banjir	Tinggi	Pamenang	Pamenang	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-
56	Banjir	Tinggi	Pamenang	Pauh Menang	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
57	Banjir	Tinggi	Pamenang	Pelakar Jaya	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
58	Banjir	Tinggi	Pamenang	Pematang Kancil	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
59	Banjir	Tinggi	Pamenang	Rejo Sari	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-
60	Banjir	Tinggi	Pamenang	Sialang	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
61	Banjir	Tinggi	Pamenang	Sungai Udang	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
62	Banjir	Tinggi	Pamenang	Tanah Abang	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-
63	Banjir	Tinggi	Pamenang	Tanjung Gedang	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
64	Banjir	Sedang	Pamenang	Empang Benao	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-
65	Banjir	Sedang	Pamenang	Jelatang	-	-	-	273	-	-	-	-	-	-
66	Banjir	Sedang	Pamenang	Karang Berahi	-	-	-	197	-	-	-	-	-	-
67	Banjir	Sedang	Pamenang	Keroya	-	-	-	622	-	-	-	-	-	-
68	Banjir	Sedang	Pamenang	Muara Belengo	-	-	-	213	-	-	-	-	-	-
69	Banjir	Sedang	Pamenang	Pamenang	-	-	-	323	-	-	-	-	-	-
70	Banjir	Sedang	Pamenang	Pauh Menang	-	-	-	290	-	-	-	-	-	-
71	Banjir	Sedang	Pamenang	Pelakar Jaya	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
72	Banjir	Sedang	Pamenang	Pematang	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	LUAS PERUMAHAN	JUMLAH RUMAH	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI FISIK		STATUS KEPEMILIKAN			
		(rendah/sedang/tinggi)					(ha)	(unit)			RUMAH (unit)		RUMAH (unit)			
											RLH	RTLH	Hak Milik	Sewa		
				Kancil												
73	Banjir	Sedang	Pamenang	Rejo Sari	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	
74	Banjir	Sedang	Pamenang	Sialang	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	
75	Banjir	Sedang	Pamenang	Sungai Udang	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	
76	Banjir	Sedang	Pamenang	Tanah Abang	-	-	-	152	-	-	-	-	-	-	-	
77	Banjir	Sedang	Pamenang	Tanjung Gedang	-	-	-	129	-	-	-	-	-	-	-	
78	Banjir	Rendah	Pamenang	Empang Benao	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	
79	Banjir	Rendah	Pamenang	Jelatang	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	
80	Banjir	Rendah	Pamenang	Karang Berahi	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
81	Banjir	Rendah	Pamenang	Keroya	-	-	-	139	-	-	-	-	-	-	-	
82	Banjir	Rendah	Pamenang	Muara Belengo	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
83	Banjir	Rendah	Pamenang	Pamenang	-	-	-	195	-	-	-	-	-	-	-	
84	Banjir	Rendah	Pamenang	Pauh Menang	-	-	-	544	-	-	-	-	-	-	-	
85	Banjir	Rendah	Pamenang	Pelakar Jaya	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	
86	Banjir	Rendah	Pamenang	Pematang Kancil	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
87	Banjir	Rendah	Pamenang	Rejo Sari	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
88	Banjir	Rendah	Pamenang	Sialang	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
89	Banjir	Rendah	Pamenang	Sungai Udang	-	-	-	287	-	-	-	-	-	-	-	
90	Banjir	Rendah	Pamenang	Tanah Abang	-	-	-	93	-	-	-	-	-	-	-	
91	Banjir	Rendah	Pamenang	Tanjung Gedang	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	
Total *)								10143								



**Form 4.A.5 Identifikasi Lahan Potensial Sebagai Relokasi Perumahan**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	LUAS LAHAN (ha)	PEMILIK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			<b>tidak ada</b>		

**Form 4.A.6 Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana**

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN			STATUS KEPEMILIKAN		
						RUMAH			RUMAH		
						RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA
						7	8	9	10	11	12
					<b>tidak ada</b>						

**b) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**

**Form 4.A.10 Identifikasi Perumahan Dilokasi Yang menimbulkan Bahaya**

NO	JENIS LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA	LOKASI		LUAS PERUMAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
		KECAMATAN	KELURAHAN/DES				Legal	Ilegal



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

			A					
1	2	3	4	5	6	7	10	11
1	Sempadan Rel KA							
2	Daerah Sempadan Sungai		<b>tidak ada</b>					
3	Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)							
4	Kolong Jembatan							
5	Permukiman Kumuh/Ilegal							
6	Daerah Rawan Bencana							
Total *)								

**Form 4.A.11 Identifikasi Perumahan Di Atas Lahan Bukan Fungsi Pemukiman**

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	KONDISI EKONOMI (unit rumah)		STATUS KEPEMILIKAN TANAH (unit rumah)	
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA				MBR	Non MBR	Legal	Ilegal
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2				<b>tidak ada</b>					
Total *)									

**Form 4.A.12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh**

NO.	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	JUMLAH KK	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/sedang/berat)	KETERANGAN
	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA					
1	2	3	4	5	6	7	8

**tidak ada**



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022


**Form 4.A.13 Pengumpulan data Rumah Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**

NO	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	JUMLAH RUMAH TERDAMPAK	JUMLAH KK	JUMLAH JIWA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		STATUS KEPEMILIKAN TANAH		SUDAH TERLAYANI			BELUM TERLAYANI
									MBR	NON MBR	LEGAL	ILEGAL	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH	
1	Daerah Rawan Bencana															
<b>tidak ada</b>																
Total *)																

**B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat**

**a) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana**

**Form 4.B.3 Perhitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana**

NO	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	JALAN DAN NO. RUMAH	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN					BELUM TERLAYANI	RENCANA TAHUN PEMENUHAN SPM			
											MBR	NON MBR	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBAN GUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI / PEMBAN GUNAN	20			21	22	23
1																												
<b>tidak ada</b>																												



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

Total *)																				

**Form 4.B.4 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni bagi Terkena Bencana**

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
A.	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data Wilayah Administrasi Penanganan	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan <b>tidak ada</b>	Orang*Hari
	2. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	Survei Sekunder	Rp (Sub Total)
		1. Data aset lahan pemda	Orang*Hari
		2. Identifikasi melalui citra satelit dan RTRW	Orang*Hari
		Survei Primer	Rp (Sub Total)
		1. Pemetaan	Orang*Hari
	3. Data Rumah Korban Bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Pendataan rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Rp (Sub Total)
	4. Pendataan rumah sewa	Survei Primer	Rp (Sub Total)
B.	Sosialisasi		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah	Transportasi <b>tidak ada</b>	Orang*kali
		Konsumsi Rapat <b>tidak ada</b>	Orang*kali



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
	kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana	Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Narasumber	Orang*kali
C.	Pembentukan Tim Satgas		Rp (Biaya C1)
	1. Pelatihan Tim Satgas	Diklat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Penggandaan Materi Pelatihan	Eks
		ATK	LS
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
D.	Pendataan Cepat		Rp (Sub Total)
	1. Pengisian Form A dan B	Surveyor	Orang*Hari
		Penggandaan Form	Eks
		Pengolahan Data	Orang*Hari
E.	Verifikasi penerima layanan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
F.	Penyusunan Rencana Aksi		Rp (Biaya F1)
	1. Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati	Konsumsi Rapat	Orang*kali
	Penerima dan jenis pelayanan	Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
		ATK	LS

tidak ada





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
G.	Rehabilitasi Rumah		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Pelaksanaan rehabilitasi rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
H.	Pembangunan Kembali		Rp (Sub Total)
	1. Pembentukan tim pendamping/fasilitator	Tenaga Ahli Sipil/Arsitektur	Orang*bulan
	2. Pelatihan fasilitator	Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Pelatih/Praktisi	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Penggandaan Materi	Eks
	3. Penyusunan DED Pembangunan Kembali Rumah Layak Huni Dengan Spesifikasi Ramah Bencana	Rembug Desa	Rp (Sub Total)
		1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
	4. Pembangunan Rumah	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
I.	Pembangunan Baru/ Relokasi Korban Bencana		Rp (Sub Total)
	1. Pengadaan Lahan	Pembebasan Lahan	Rp
	2. Penyusunan site plan dan DED	Rembug Warga	Rp (Sub Total)

**tidak ada**



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
	Rumah Bersama Penerima Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	1. Media diskusi	Rp
		2. Transportasi	Orang*Hari
		3. Konsumsi Rapat	Orang*kali
		Tenaga Ahli	
		1. Tenaga Ahli Perencana	Orang*bulan
		2. Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*bulan
		3. Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*bulan
		4. Tenaga Ahli ME	Orang*bulan
	5. Tenaga Ahli Plumbing	Orang*bulan	
	3. Pembangunan Rumah Khusus + PSU	Pembangunan Fisik Rumah sesuai DED dan RAB	Rp
J.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan SPM	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
K.	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	1. Pembinaan SPM kepada pelaksana SPM kabupaten/kota.	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
L.	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan	Operator Pelaksana Update Data Kinerja	Orang*kali

tidak ada



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
	SPM	Survei lapangan	Orang*kali
M.	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
1.	Rapat evaluasi penerapan	Pembahasan (paket meeting)	Orang*kali
		Transportasi	Orang*kali
		Praktisi/Narasumber	Orang*kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks

**b) Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak huni Bagi Masyarakat Yang Terkena relokasi Program Pemerintah**

**Form 4.B.7 Perhitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	RW	RT	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KONDISI EKONOMI KELUARGA		LUAS BANGUNAN (M <sup>2</sup> )	LUAS TANAH (M <sup>2</sup> )	LEGALITAS TANAH		STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN							
									MBR	NON MBR			LEGAL	ILEGAL	MILIK	SEWA	LAINNYA	GANTI ASET	SUBSIDI SEWA	PENYEDIAAN RLH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
	Daerah Rawan Bencana								<b>tidak ada</b>																



Total *)																				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Form 4.B.8 Perhitungan Kebutuhan Biaya Layanan Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1	Pengumpulan Data		Rp (Sub Total)
	1. Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	2. Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	Survey sekunder	
		Pengadaan Peta	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	3. Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	Survey sekunder	
		Koordinasi dengan Instansi Terkait (PTSP)	Rp
		Survey primer	
		Pengambilan Data Lapangan	Orang*Hari
	4. Pengolahan Data	Tenaga Pengolah Data	
		Tenaga Ahli Geografi/Geodesi	Orang*Bln
Tenaga Ahli Statistik		Orang*Bln	
2	Sinkronisasi program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam dokumen RKP Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
	1. Rapat Koordinasi bersama Bappeda dan OPD lain terkait program pemerintah yang berdampak pada relokasi permukiman masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
		Paket meeting	Orang*Kali
	2. Rapat Sinkronisasi dokumen	Paket meeting	Orang*Kali
3	Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Sosialisasi tentang program Pemerintah Daerah dan rencana relokasi	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi tentang layanan SPM	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
4	Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp (Sub Total)
	1. Identifikasi calon penerima pelayanan dan pilihan layanan SPM Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Identifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan dokumen perencanaan	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
		Konsumsi	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen	
		Penggandaan dokumen	Eks
5	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan Fasilitasi Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	Pelaksanaan pendampingan teknis perhitungan appraisal aset properti	
		Tenaga Ahli Jasa Appraisal	Orang*Bln
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Sosialisasi pengembangan perumahan baru dan mekanisme akses perumahan KPR FLPP	Penyelenggaraan Sosialisasi	
		Penggandaan media publikasi (leaflet atau booklet)	Eks
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
6	Subsidi Uang Sewa		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan subsidi	Penyelenggaraan Verifikasi	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
	uang sewa	Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak huni	Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan rumah sewa yang layak huni	
		Konsumsi	Orang*Kali
	3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa	Penyaluran Subsidi Uang Sewa	
		Total Subsidi Uang Sewa	Rp
		Penggandaan dokumen	Eks
7	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni		Rp (Sub Total)
	1. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah layak huni	Penyelenggaraan Verifikasi	
		Penggandaan Formulir	Eks
		ATK	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus beserta PSU	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
		Tenaga Ahli	
		Tenaga Ahli Perencana	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Arsitektur	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Teknik Sipil	Orang*Bln



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
		Tenaga Ahli ME	Orang*Bln
		Tenaga Ahli Plumbing	Orang*Bln
	3. Perjanjian pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rembug Warga	
		Media diskusi	Rp
		Transportasi	Orang*Hari
		Konsumsi	Orang*Kali
	4. Pembangunan Rumah Susun Umum dan atau/Rumah Khusus beserta PSU	Pembangunan fisik Rumah Susun	
		Biaya konstruksi	Rp
		Biaya MK	Rp
	5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Khusus	Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah	
		Pemeliharaan bangunan dan lingkungan	BOP*Bln
		Penggandaan dokumen	Eks
8	Pelaporan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Penyusunan Laporan Penerapan SPM	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
9	Pembinaan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Pembinaan kepada SPM kepada Kabupaten/Kota, sektor Swasta, dan masyarakat.	Penyelenggaraan Pembinaan	
		Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan dokumen laporan	Eks
		Praktisi/ Narasumber	Orang*Kali
10	Pemantauan Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Perangkat Pemantauan SPM	Pengadaan sistem informasi	Rp
	2. Pemantauan kinerja penerapan SPM	Operator pelaksana update data kinerja	Orang*Kali
		Survei lapangan	Orang*Kali





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BIAYA (Rp)
11	Evaluasi Penerapan SPM		Rp (Sub Total)
	1. Evaluasi Penerapan	Pembahasan (Paket meeting)	Orang*Kali
		Penggandaan Materi	Eks
		Narasumber	Orang*Kali

**C. Penyusunan Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat**

**a) Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana**

**Form 4.C.2 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana**

NO	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN									
				TAHUN KE-1			TAHUN KE 2			TAHUN KE 3			
				APBD	DAK	LAIN NYA	APBD	DAK	LAIN NYA	APBD	DAK	LAIN NYA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Rehabilitasi												
2	Pembangunan kembali												
3	Penyediaan rumah relokasi												
	a. Pengadaan lahan												
	b. Pembangunan baru												
4	Bantuan akses rumah sewa												
	layak huni bagi korban bencana												
Jumlah *)													



**b) Fasilitas Penyediaan Rumah Yang layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**

**Form 4.C.4 Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program**

NO	KEGIATAN LAYANAN	JUMLAH RUMAH TANGGA	KEBUTUHAN BIAYA	SUMBER PEMBIAYAAN TAHUN N+1		
				APBD	DAK	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan					
2	Subsidi uang sewa					
3	Penyediaan rumah layak huni					
Jumlah *)						

**D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan**

**a) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana**

**Form 4.D.2 Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat Yang Terkena Yang Terkena Bencana**

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH				TARGET				REALISASI				
					TOTAL (UNIT RUMAH)	RUSAK RINGAN (UNIT RUMAH)	RUSAK SEDANG(UNIT RUMAH)	RUSAK BERAT(UNIT RUMAH)	REHABILITASI(UNIT RUMAH)	PEMBANGUNAN KEMBALI (UNIT RUMAH)	RELOKASI (UNIT RUMAH)	SUBSIDI UANG SEWA (UNIT RUMAH)	REHABILITASI (UNIT RUMAH)	PEMBANGUNAN KEMBALI (UNIT RUMAH)	RELOKASI (UNIT RUMAH)	SUBSIDI UANG SEWA (UNIT RUMAH)	BELUM TERLAYANI (UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Total *)																	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

Persentase layanan **)					
Capaian SPM Total ***)					

**b) Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**

**Form 4.D.4 Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah**

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECA MATA N	DE SA	TARGET				REALISASI			
				TOTAL (UNIT RUMAH)	GANTI ASET (UNIT RUMAH)	SUBSIDI SEWA (UNIT RUMAH)	PENYEDIA AN RLH (UNIT RUMAH)	GANTI ASET (UNIT RUMAH)	SUBSIDI SEWA (UNIT RUMAH)	PENYEDIA AN RLH (UNIT RUMAH)	BELUM TERLAYAN I (UNIT RUMAH)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Sempadan Rel KA										
2	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Sempadan Sungai										
3	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)										
4	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Kolong Jembatan										
5	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Permukiman Kumuh/Ilegal										
6	Relokasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya - Daerah Rawan Bencana										
7	Relokasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman										



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	JENIS RELOKASI PROGRAM	KECA MATA N	DE SA	TARGET				REALISASI			
				TOTAL (UNIT RUMAH)	GANTI ASET (UNIT RUMAH)	SUBSIDI SEWA (UNIT RUMAH)	PENYEDIA AN RLH (UNIT RUMAH)	GANTI ASET (UNIT RUMAH)	SUBSIDI SEWA (UNIT RUMAH)	PENYEDIA AN RLH (UNIT RUMAH)	BELUM TERLAYAN I (UNIT RUMAH)
Total *)											
Persentase Layanan **)											
Capaian SPM Total ***)											

#### 4.1.4 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

##### A. Pengumpulan Data

##### Form 3.A.3 Kondisi SPAM Jaringan Perpipaan

NO	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPER ASI/ TIDAK BEROPER ASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES				AKSI
				KECAMATA N	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFA ATKAN		
						(m3/ha ri)	KK	(m3/ hari)	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Parit Ujung Tanjung	Ya	Renah Pembarap	Desa Parit Ujung Tanjung		50		50	
2	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Bukit Beringin	Ya	Bangko Barat	Desa Bukit Beringin		50		50	
3	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Rantau Alai	Ya	Batang Masumai	Desa Rantau Alai		50		50	
4	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Sekancing	Ya	Tiang Pumpung	Desa Sekancing		50		50	
5	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Gading Jaya	Ya	Tabir Selatan	Desa Gading Jaya		50		50	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES				AKSI
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN		
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Talang Paruh	Ya	Lembah Masurai	Desa Talang Paruh		50		50	
7	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Tambang Emas	Ya	Pamenang Selatan	Desa Tambang Emas		50		50	
8	MCK++	Pesantren Azzakariyah	Ya	Renah Pembarap	Desa Muara Panco Timur		21		21	
9	MCK++	Yayasan Dhuafa	Ya	Bangko	Kel. Dusun Bangko		11		11	
10	MCK++	Pesantren KH. Abdul Satar Saleh	Ya	Renah Pembarap	Desa Renah Medan		9		9	
11	MCK++	Pesantren M. Amin Rajo Tiangso	Ya	Jangkat Timur	Desa Simpang Talang Tembago		12		12	
12	MCK++	Pesantren Bismillah	Ya	Tabir Ilir	Desa Mekar Limau Manis		25		25	
13	MCK++	Pesantren Darul Qur'an Al-Irsyadiyah	Ya	Tabir Lintas	Desa Mensango		17		17	
14	MCK++	Pesantren Darul Ikhlas Al-Islami	Ya	Tabir Lintas	Desa Tambang Baru		17		17	
15	MCK++	Pesantren Madinatul Ulum	Ya	Pamenang	Kel. Pamenang		18		18	
16	IPAL Skala Permukiman	Desa Lubuk Pungguk	Ya	Jangkat	Desa Lubuk Pungguk		50		50	
17	IPAL Skala Permukiman	Desa Mekar Jaya	Ya	Tabir Selatan	Desa Mekar Jaya		50		50	
18	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Tuo	Ya	Lembah Masurai	Desa Tuo		63		63	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES				AKSI
				KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN		
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Koto Rami	Ya	Lembah Masurai	Desa Koto Rami		54		54	
20	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Baru Bukit Punjung	Ya	Tiang Pumpung	Desa Baru Bukit Punjung		54		54	
21	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Meranti	Ya	Renah Pamenang	Desa Meranti		63		63	
22	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Biuku Tanjung	Ya	Bangko Barat	Desa Biuku Tanjung		63		63	
23	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Kampung Limo	Ya	Pangkalan Jambu	Desa Kampung Limo		63		63	
24	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Tunggul Bulin	Ya	Tabir Ilir	Desa Tunggul Bulin		54		54	
25	MCK++	Pesantren Darussalam	Ya	Pamenang	Kel. Pamenang		300		300	
26	MCK++	Pesantren Balqice	Ya	Pamenang	Desa Jelatang		310		310	
27	MCK++	Pesantren Al Mujahadah	Ya	Bangko	Kel. Pematang Kandis		315		315	
28	MCK++	Pesantren Syarif Hidayatullah	Ya	Bangko	Kel. Dusun Bangko		305		305	
29	MCK++	Pesantren Syekh Maulana Qori	Ya	Batang Masumai	Desa Titian Teras		300		300	
30	MCK++	Pesantren Nurul Yaqin	Ya	Sungai Manau	Desa Durian Lecah		312		312	
31	MCK++	Pesantren Haqqul Yaqin	Ya	Renah Pembarap	Desa Muara Panco Barat		308		308	
32	MCK++	Pesantren Diyaussholihin	Ya	Tabir	Kel. Dusun Baru		300		300	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES				AKSI
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN		
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	MCK++	Pesantren Al-Munawwaroh Tabir Raya	Ya	Tabir Ulu	Desa Rantau Ngarau		312		312	
34	MCK++	Pesantren Al Istiqomah	Ya	Tabir Selatan	Desa Sungai Sahut		320		320	
35	MCK++	Pesantren Al Hafizh	Ya	Tabir Selatan	Desa Bunga Antoi		310		310	
36	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK	Desa Lubuk Birah	Ya	Muara Siau	Desa Lubuk Birah		25		25	
37	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK	Desa Kungkai	Ya	Bangko	Desa Kungkai		25		25	
38	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Bukit Bungkul	Ya	Renah Pamenang	Desa Bukit Bungkul		35		35	
39	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Ngaol Ilir	Ya	Tabir Barat	Desa Ngaol Ilir		45		45	
40	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Durian Rambun	Ya	Muara Siau	Desa Durian Rambun		30		30	
41	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Muara Pangi	Ya	Lembah Masurai	Desa Muara Pangi		35		35	
42	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Sekancing	Ya	Tiang Pumpung	Desa Sekancing		35		35	
43	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Pauh Menang	Ya	Pamenang	Desa Pauh Menang		35		35	
44	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Pinang Merah	Ya	Pamenang Barat	Desa Pinang Merah		40		40	
45	Tangki septik skala	Desa Nalo Gedang	Ya	Nalo Tantan	Desa Nalo		35		35	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES				AKSI
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN		
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	komunal (5-10 KK)				Gedang					
46	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK	Desa Sekancing Ilir	Ya	Tiang Pumpung	Desa Sekancing Ilir		50		50	
47	IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK	Desa Tanjung Mudo	Ya	Pangkalan Jambu	Desa Tanjung Mudo		50		50	
48	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Air Batu	Ya	Renah Pembarap	Desa Air Batu		45		45	
49	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Batang Kibul	Ya	Tabir Barat	Desa Batang Kibul		40		40	
50	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Bedeng Rejo	Ya	Bangko Barat	Desa Bedeng Rejo		30		30	
51	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Beringin Sanggul	Ya	Tiang Pumpung	Desa Beringin Sanggul		30		30	
52	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Muara Langeh	Ya	Tabir Barat	Desa Muara Langeh		35		35	
53	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Muara Siau	Ya	Muara Siau	Desa Muara Siau		25		25	
54	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Rantau Suli	Ya	Jangkat Timur	Desa Rantau Suli		25		25	
55	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Rasau	Ya	Renah Pamenang	Desa Rasau		25		25	
56	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Desa Renah Pellaan	Ya	Jangkat	Desa Renah Pellaan		25		25	
57	Tangki septik skala komunal (5-10 KK)	Tanjung Mudo	Ya	Jangkat Timur	Tanjung Mudo		35		35	





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/ TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES				AKSI
				KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN		
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	IPALD Sungai Rumbai	Desa Tuo	Tidak	Lembah Masurai	Desa Tuo		18		18	
59	IPALD Tambak Retno	Desa Sungai Kapas	Tidak	Bangko	Desa Sungai Kapas		19		19	
60	IPALD Tepian Ratu	Desa Pulau Rengas	Tidak	Bangko Barat	Desa Pulau Rengas		22		22	
61	IPALD Pulau Rengas	Desa Pulau Rengas	Ya	Bangko Barat	Desa Pulau Rengas		50		50	
62	IPALD Lubuk Pungguk	Desa Lubuk Pungguk	Ya	Jangkat	Desa Lubuk Pungguk		50		50	
63	IPALD Pasar Atas	Kelurahan Pasar Atas	Ya	Bangko	Kelurahan Pasar Atas		50		50	
64	IPALD Pematang Kandis	Kelurahan Pematang Kandis	Ya	Bangko	Kelurahan Pematang Kandis		50		50	
65	IPALD Pasar Muara Siau	Desa Pasar Muara Siau	Ya	Muara Siau	Desa Pasar Muara Siau		50		50	
66	IPALD Tambang Emas	Desa Tambang Emas	Ya	Pamenang Selatan	Desa Tambang Emas		50		50	
67	IPALD Bukit Punjung	Desa Baru Bukit Punjung	Ya	Tiang Pumpung	Desa Baru Bukit Punjung		50		50	
68	IPALD Kederasan Panjang	Desa Kederasan Panjang	Ya	Batang Masumai	Desa Kederasan Panjang		50		50	
69	IPALD Sungai Ulak	Desa Sungai Ulak	Ya	Nalo Tantan	Desa Sungai Ulak		50		50	
70	IPALD Bukit Bungkul	Desa Bukit Bungkul	Ya	Renah Pamenang	Desa Bukit Bungkul		50		50	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA SPALD	LOKASI SPALD	KONDISI SPALD REGIONAL (BEROPERASI/TIDAK BEROPERASI)	WILAYAH PELAYANAN		AKSES				AKSI
				KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TERSEDIA		TERMANFAATKAN		
						(m3/hari)	KK	(m3/hari)	KK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	IPALD Air Batu	Desa Air Batu	Ya	Renah Pembarap	Desa Air Batu		50		50	
72	IPALD Pasar Muara Siau	Desa Pasar Muara Siau	Ya	Muara Siau	Desa Pasar Muara Siau		50		50	
73	IPALD Bukit Bungkul	Desa Bukit Bungkul	Ya	Renah Pamenang	Desa Bukit Bungkul		50		50	

Form 3.A.4 Kondisi SPALD

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Bangko	Kelurahan Pasar Atas Bangko	Air Permukaan	Sungai Merangin	Pasar Atas	20		43	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Kelurahan Pasar Bangko	Air Permukaan	Sungai Merangin	Pasar Atas	20			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Kelurahan Pematang Kandis	Air Permukaan	Sungai Merangin	Bangko Tinggi	60			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Kelurahan Dusun Bangko	Air Permukaan	Sungai Merangin	Bangko Tinggi	60			PDAM	Beroperasi		Baik		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Desa Kungkai	Air Tanah						KP SPAM				
		Desa Langling	Air Tanah						KP SPAM				
		Desa Dusun Mudo	Air Tanah						KP SPAM				
		Desa Sungai Kapas	Air Permukaan	Sungai Belengo	Sungai Kapas	5		-1	PDAM	Beroperasi		Baik	
2	Bangko Barat	Desa Bedeng Rejo	Air Tanah						KP SPAM				
		Desa Bukit Beringin	Air Tanah						KP SPAM				
		Desa Sungai Putih	Air Tanah						KP SPAM				
		Desa Pulau Rengas	Air Permukaan	Sungai Merangin	Pulau Rengas	10		4	PDAM	Beroperasi		Baik	
		Desa Pulau Rengas Ulu	Air Permukaan	Sungai Merangin	Pulau Rengas	10			PDAM	Beroperasi		Baik	
		Desa Biuku Tanjung	Air Permukaan	Sungai Merangin	Pulau Rengas	10			PDAM	Beroperasi		Baik	
3	Batang Masumai	Desa Pulau Baru	Air Tanah						KP SPAM				
		Desa Rantau Alai	Air Tanah						KP SPAM				
		Desa Lubuk Gaung	Air Permukaan	Sungai Belengo	Sungai Kapas	5		-1	PDAM	Beroperasi		Baik	
		Desa Titian Teras	Air Permukaan	Sungai Belengo	Sungai Kapas	5			PDAM	Beroperasi		Baik	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Desa Salam Buku	Air Permukaan	Sungai Belengo	Sungai Kapas	5			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Tambang Besi	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Kederasan Panjang	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Pulau Layang	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Pelangki	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Nibung	Air Tanah						KP SPAM					
4	Nalo Tantan	Desa Mentawak	Air Permukaan	Sungai Belengo	Sungai Kapas	5		-1	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Sungai Ulak	Air Permukaan	Sungai Belengo	Sungai Kapas	5			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Aur Berduri	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Danau	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Telun	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Nalo Gedang	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Baru Nalo	Mata Air						KP SPAM					
5	Tabir	Kelurahan Mampun	Air Permukaan	Sungai Tabir	Mampun	10		9	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Kelurahan Kampung Baruh	Air Permukaan	Sungai Tabir	Pasar Rantau Panjang	10			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Kelurahan Pasar Rantau Panjang	Air Permukaan	Sungai Tabir	Pasar Rantau Panjang	10			PDAM	Beroperasi		Baik		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Kelurahan Pasar Baru	Air Permukaan	Sungai Tabir	Pasar Rantau Panjang	10			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Seling	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Kandang	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Koto Rayo	Air Tanah						KP SPAM					
		Kelurahan Dusun Baru	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Beluran Panjang	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Tanjung Ilir	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Lubuk Napal	Air Tanah						KP SPAM					
6	Tabir Lintas	Desa Koto Baru	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Sido Lego	Air Permukaan	Sungai Tabir	Mampun	10		9	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Tambang Baru	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Mensango	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Sidoharjo	Air Tanah						KP SPAM					
									KP SPAM					
7	Margo Tabir	Desa Sido Rukun	Air Permukaan	Sungai Tabir	Mampun	10		9	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Tanjung Rejo	Air Permukaan	Sungai Tabir	Mampun	10			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Sumber	Air	Sungai Tabir	Mampun	10			PDAM	Beroperasi		Baik		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Agung	Permukaan							rasi				
		Desa Suko Rejo	Air Permukaan	Sungai Tabir	Mampun	10			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Lubuk Bumbun	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Tegal Rejo	Air Tanah						KP SPAM					
8	Tabir Ilir	Desa Air Batu	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Rejo Sari	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Kota Raja	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Ulak Makam	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Rantau Limau Manis	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Tunggul Bulin	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Mekar Limau Manis	Air Tanah						KP SPAM					
9	Tabir Timur	Desa Bukit Subur	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Sungai Bulian	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Sungai Limau	Air Permukaan	Sungai Tabir	Sungai Limau	20		7	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Seri Sembilan	Air Permukaan	Sungai Tabir	Sungai Limau	20			PDAM	Beroperasi		Baik		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI	
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	Tabir Selatan	Desa Sinar Gading	Air Permukaan	Sungai Madelang	Muara Delang	20		12	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Muara Delang	Air Permukaan	Sungai Madelang	Muara Delang	20			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Sungai Sahut	Air Permukaan	Sungai Madelang	Muara Delang	20			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Rawa Jaya	Air Permukaan	Sungai Madelang	Muara Delang	20			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Gading Jaya	Air Permukaan	Sungai Madelang	Muara Delang	20			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Bunga Antoi	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Bungo Tanjung	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Mekar Jaya	Air Tanah						KP SPAM					
11	Pamenang	Desa Rejo Sari	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Pematang Kancil	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Tanah Abang	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Empang Benao	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Tanjung Gedang	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Keroya	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Pauh Menang	Air Tanah						KP SPAM					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Kelurahan Pasar Pamenang	Air Permukaan	Sungai Merangin	Pasar Pamenang				PDAM	Tidak Beroperasi		Kurang Baik		
		Desa Muara Belengo	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Jelatang	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Karang Berahi	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Sungai Udang	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Pelakar Jaya	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Sialang	Air Tanah						KP SPAM					
12	Pamenang Barat	Desa Karang Anyar	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Simpang Limbur Merangin	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Limbur Merangin	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Tanjung Lamin	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Papit	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Mampun Baru	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Pinang Merah	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Pulau Tujuh	Air Tanah						KP SPAM					





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13	Renah Pamenang	Desa Rasau	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Meranti	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Bukit Bungkul	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Tanjung Benuang	50		29	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Lantak Seribu	Air Tanah						KP SPAM					
14	Pamenang Selatan	Desa Tanjung Benoang	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Tanjung Benuang	50		12	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Tambang Emas	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Tanjung Benuang	50			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Selango	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Tanjung Benuang	50			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Pulau Bayur	Air Tanah						KP SPAM					
15	Tabir Ulu	Desa Kapuk	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Medan Baru	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Pulau Aro	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Muara Seketuk	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Muara Jernih	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Rantau	Mata Air						KP SPAM					



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Ngarau												
16	Tabir Barat	Desa Muara Langeh	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Tanjung Putus	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Tanjung Beringin	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Pulau Tebakar	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Baru Kibul	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Muaro Kibul	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Pulau Lebar	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Batang Kibul	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Sungai Tabir	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Telentam	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Ngaol Ilir	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Ngaol	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Air Liki	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Air Liki Baru	Mata Air						KP SPAM					
17	Sungai Manau	Desa Bukit Batu	Mata Air						KP SPAM					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Desa Sungai Nilau	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Sungai Pinang	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Palipan	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Tiangko	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Durian Lecah	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Seringat	Air Permukaan	Sungai Masumai	Sungai Manau	20		12	PDAM	Beroperasi		Kurang Baik		
		Desa Sungai Manau	Air Permukaan	Sungai Masumai	Sungai Manau	20			PDAM	Beroperasi		Kurang Baik		
		Desa Benteng	Air Permukaan	Sungai Masumai	Sungai Manau	20			PDAM	Beroperasi		Kurang Baik		
		Desa Gelanggang	Air Permukaan	Sungai Masumai	Sungai Manau	20			PDAM	Beroperasi		Kurang Baik		
18	Pangkalan Jambu	Desa Bukit Perentak	Air Permukaan	Sungai Air Batu	Bukit Perentak	10		2	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Tiga Alur	Air Permukaan	Sungai Air Batu	Bukit Perentak	10			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Bungo Tanjung	Air Permukaan	Sungai Air Batu	Bukit Perentak	10			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Sungai Jering	Air Permukaan	Sungai Air Batu	Bukit Perentak	10			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Tanjung Mudo	Air Permukaan	Sungai Air Batu	Bukit Perentak	10			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Baru Pangkalan Jambu	Mata Air						KP SPAM					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANA N	KONDISI			AKS I
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASI TAS INTAK E (liter/d etik)	KAPASIT AS UNIT PRODUK SI (liter/det ik)	IDLE CAPACIT Y (liter/det ik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/K P SPAM	BEROP ERASI	KU ANT ITA S	KUALI TAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Desa Birun	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Kampung Limo	Mata Air						KP SPAM					
19	Renah Pembarap	Desa Talang Segegah	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Durian Betakuk	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Muara Panco Barat	Air Permukaan	Sungai Masumai	Sungai Manau	10		12	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Muara Panco Timur	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Parit Ujung Tanjung	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Guguk	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Muara Bantan	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Merkeh	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Air Batu	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Simpang Parit	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Marus Jaya	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Renah Medan	Mata Air						KP SPAM					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
20	Muara Siau	Desa Pulau Raman	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Rantau Panjang	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Air Lago				PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Badak Tekurung	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Air Lago				PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Rantau Bidaro	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Air Lago				PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Air Lago	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Air Lago				PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Pasar Muara Siau	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Air Lago				PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Muara Siau	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Air Lago				KP SPAM					
		Desa Teluk Sikumbang	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Rantau Bayur	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Sungai Ulas	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Peraduan Temeras	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Rantau Macang	Air Permukaan	Sungai Tembesi	Air Lago				PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Tiaro	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Sepantai Renah	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Lubuk Beringin	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Lubuk Birah	Mata Air						KP SPAM					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Desa Durian Rambun	Mata Air						KP SPAM					
21	Tiang Pumpung	Desa Rantau Limau Kapas	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Baru Bukit Punjung	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Baru Sungai Sakai	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Beringin Sanggul	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Sekancing Ilir	Air Tanah						KP SPAM					
		Desa Sekancing	Air Tanah						KP SPAM					
22	Lembah Masurai	Desa Tanjung Dalam	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Muara Pangi	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Rantau Jering	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Nilo Dingin	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Tanjung Berugo	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Desa Tuo	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Koto Rami	Mata Air						KP SPAM					



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Desa Pasar Masurai	Air Permukaan	Sungai Kelukup	Pasar Masurai	5		2	PDAM	Beroperasi		Kurang Baik		
		Desa Rancan	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Muara Langgayo	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Muara Kelukup	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Durian Mukut	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Talang Paruh	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Talang Asal	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Sei Lalang	Mata Air						KP SPAM					
23	Jangkat Timur	Desa Rantau Suli	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Desa Baru	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Talang Tembago	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Beringin Tinggi	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Koto Teguh	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Tanjung Mudo	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Pematang Pauh	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Gedang	Mata Air						KP SPAM					



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Desa Tanjung Benuang	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Jangkat	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Koto Baru	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Tanjung Alam	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Simpang Kabu	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Simpang Talang Tembago	Mata Air						KP SPAM					
24	Jangkat	Desa Muara Madras	Mata Air	Sungai Pabung	Pulau Tengah	12,5		1	PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Lubuk Pungguk	Mata Air	Sungai Pabung	Pulau Tengah	12,5			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Pulau Tengah	Mata Air	Sungai Pabung	Pulau Tengah	12,5			PDAM	Beroperasi		Baik		
		Desa Koto Renah	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Renah Alai	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Rantau Kermas	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Lubuk Mantilin	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Tanjung Kasri	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Renah Kemumu	Mata Air						KP SPAM					
		Desa Renah	Mata Air						KP SPAM					





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI			UNIT PELAYANAN	KONDISI			AKSI
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UP TD/BA DAN USAHA/KP SPAM	BEROPERASI	KUANTITAS	KUALITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Pelaan												
		Desa Koto Rawang	Mata Air						KP SPAM					

**B. Perhitungan Data**

**Form 3.B.3 Rumah Terlayani SPAM**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Muara Siau	Muara Siau			BUYUNG SAIFUL		4	1		1			1		
					SUSILA WATI		6	1		1			1		
					MUSHOLLA		4	1		1			1		
					M. SUKEIN		4	1		1			1		
					HASAN		6	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					MAWAR		4	1		1			1		
					HASAN. S		3	1		1			1		
					ISKANDAR		4	1		1			1		
					AGUSMAN		6	1		1			1		
					SIMAN		5	1		1			1		
					HERI		4	1		1			1		
					BIADATI		5	1		1			1		
					TK		4	1		1			1		
					RABAWIK		5	1		1			1		
					HAMDAN		4	1		1			1		
					JAHRI		3	1		1			1		
					WAHIDIN		5	1		1			1		
					HARMAINI		4	1		1			1		
					MASJID NURUL		5	1		1			1		
					ARBI		5	1		1			1		
					WAGINO		7	1		1			1		
					AGUSLIM		4	1		1			1		
					MASHUD		6	1		1			1		
					LIZA		2	1		1			1		
					ISNAK NYAH		4	1		1			1		
					MARWAN, S.Pd		6	1		1			1		
					MAI		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ALZUMAR		6	1		1			1		
					ASOMAD		5	1		1			1		
					SUKMI ALDI		4	1		1			1		
					SAFRIZAL		4	1		1			1		
					M. AMIN		3	1		1			1		
					EDI WANA		4	1		1			1		
					HUDRI		6	1		1			1		
					GULTOM		3	1		1			1		
					DAS		4	1		1			1		
					EDI PURNA		4	1		1			1		
					FAHMI		6	1		1			1		
					KORNIAH		6	1		1			1		
					KARDI		3	1		1			1		
					M. RAPANI		3	1		1			1		
					ANDI MAS		5	1		1			1		
					HAMIDI		5	1		1			1		
					ASNAN		4	1		1			1		
					JUNAIIDI		4	1		1			1		
					JABUR		5	1		1			1		
					FAZRI		4	1		1			1		
					JALALUDIN		7	1		1			1		
					MAHMUD		4	1		1			1		
					KARTINI		2	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					SD		4	1		1			1		
					MAK GALEH		5	1		1			1		
					PAK RIL		4	1		1			1		
					ARPAN		7	1		1			1		
					NUR		4	1		1			1		
					ASWADI		5	1		1			1		
					NURIMAH		2	1		1			1		
					MAHDI		7	1		1			1		
					MUSTAUFIK		5	1		1			1		
					HASIPAH		2	1		1			1		
					MADANI		4	1		1			1		
					M. JON		5	1		1			1		
					MUAWAR		7	1		1			1		
					SAPARUDIN		5	1		1			1		
					SALAM		4	1		1			1		
					TUYU		6	1		1			1		
					ANAS		3	1		1			1		
					SUKRI		4	1		1			1		
					PANDI AMRI		3	1		1			1		
					WANDI		3	1		1			1		
					ARYA		4	1		1			1		
					PARDI		3	1		1			1		
					TIBRONI		3	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					SELIGAR		4	1		1			1		
					WAHIDIN		5	1		1			1		
					WARNI		5	1		1			1		
					INKAS TUNIK		4	1		1			1		
					HARMAN		4	1		1			1		
					NURIMAH		6	1		1			1		
					M. JULI		5	1		1			1		
					H AidIR		6	1		1			1		
					JAI		5	1		1			1		
					WANDI		4	1		1			1		
					RUDI		4	1		1			1		
					ALI		4	1		1			1		
					SARWIDI		5	1		1			1		
					AAN		3	1		1			1		
					MAKMUN		4	1		1			1		
					TAS MAS		4	1		1			1		
					ZUBIR		3	1		1			1		
					KUM AIDI		5	1		1			1		
					KASPUL		4	1		1			1		
					M. RASID		5	1		1			1		
					SARIDI		5	1		1			1		
					MADMI		7	1		1			1		
					HARDI		3	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					KASPUL ANWAR		2	1		1			1		
					MURZAM		3	1		1			1		
					ZABUR		4	1		1			1		
					DARMADI		4	1		1			1		
					MASJID AL MUBAROK		5	1		1			1		
					KAMAI		4	1		1			1		
					MIZI		3	1		1			1		
					DEDI		4	1		1			1		
					IRI		4	1		1			1		
					SOLIKIN		5	1		1			1		
					HENGKI		5	1		1			1		
					TARMIZI		6	1		1			1		
					MAIRI		4	1		1			1		
					NASRUN		4	1		1			1		
					AMRI		5	1		1			1		
					SAIDI		5	1		1			1		
					RAHMAN		4	1		1			1		
					KARDI. M		8	1		1			1		
					SALEH MAR		7	1		1			1		
					MAS PRI		4	1		1			1		
					MUSLIM		6	1		1			1		
					BUSTAMI		5	1		1			1		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					SIHUS		3	1		1			1		
					SUARDI		2	1		1			1		
					PAI		4	1		1			1		
					SAMAMI		6	1		1			1		
					LAI		4	1		1			1		
					SIDUL		3	1		1			1		
					YADIM		7	1		1			1		
					BAHARUDIN		4	1		1			1		
					ADDINURI		5	1		1			1		
					KARMAN		3	1		1			1		
					A. KARIM		6	1		1			1		
					SUKRIYANTO		5	1		1			1		
					ANTOL YADI		6	1		1			1		
					ZAWAL ABIDIN		4	1		1			1		
					INDRA EFENDI		6	1		1			1		
					SUGIANTO		3	1		1			1		
					FITRIANI		4	1		1			1		
					ROIYAN		5	1		1			1		
					ABU BAKAR		6	1		1			1		
					AGUSNI		7	1		1			1		
					EDISON		4	1		1			1		
					MUHAMMAD RAMDI		3	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					HENDRA		6	1		1			1		
					HENDRIYANS YAH		5	1		1			1		
					BUSTAMI		7	1		1			1		
					HAMIDI		6	1		1			1		
					ZAIKAL FAHMI		5	1		1			1		
					AZHAR		8	1		1			1		
					SUHERMAN		6	1		1			1		
					KUSNAL HADI		7	1		1			1		
					M. SAYUTI		5	1		1			1		
					ZAMHUR		3	1		1			1		
					MADYAZI		4	1		1			1		
					M. SAIB		6	1		1			1		
					M. ZAMIN		3	1		1			1		
					NORIAH		2	1		1			1		
					NURBAITI		6	1		1			1		
					M. SALEH		7	1		1			1		
					DARWIS		3	1		1			1		
					NURZALINA		4	1		1			1		
					PUSKESDES		4	1		1			1		
					MADRASAH		3	1		1			1		
					NAZIMI		4	1		1			1		
					DADANG KURNIAN		5	1		1			1		





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					MASJID NURUL IKSAN		4	1		1			1		
					LIS		5	1		1			1		
					PERTAMINI		2	1		1			1		
					TOKO JIMI		4	1		1			1		
					IS		3	1		1			1		
					PETRA		5	1		1			1		
					YANTO		4	1		1			1		
					UJANG		4	1		1			1		
					YUNITA		4	1		1			1		
					ONO		4	1		1			1		
					SILA		3	1		1			1		
					M. AIDI		5	1		1			1		
					NIRA		4	1		1			1		
					JULIZAL		5	1		1			1		
					BU JUZ		4	1		1			1		
					PAHRIZAL		5	1		1			1		
					SILINAH		3	1		1			1		
					SMP		5	1		1			1		
					KANTOR DESA		4	1		1			1		
					NURKAMILI		5	1		1			1		
					TPA		4	1		1			1		
					ZULKIFLI		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					AWALUDIN		4	1		1			1		
					CANDRA		3	1		1			1		
					IRWANTO		5	1		1			1		
					HERMANTO		5	1		1			1		
					SUKRI		5	1		1			1		
					SARGAWI		2	1		1			1		
					KIKI		3	1		1			1		
					SITI AISYAH		4	1		1			1		
					VIVI		5	1		1			1		
					KANTOR PERTANIAN		5	1		1			1		
					ASTUTI		3	1		1			1		
					KASASI		6	1		1			1		
					M. ZUBIR		4	1		1			1		
					SUPARMAN		5	1		1			1		
					M. ALI		6	1		1			1		
					SUARDI		3	1		1			1		
					KEPALA DESA		6	1		1			1		
					PUSKESDES		5	1		1			1		
					SD LADANG PANJANG		4	1		1			1		
					RM. SABDA ALAM		7	1		1			1		
					M. PAZRI		6	1		1			1		
					RINYANDAYAN		4	1		1			1		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					PARIDAH		3	1		1			1		
					SAHRIL		3	1		1			1		
					ALWIZAR		2	1		1			1		
					NYAMAT		5	1		1			1		
					HERMAWAN		4	1		1			1		
					SAHRUL		4	1		1			1		
					RAMADON		5	1		1			1		
					SITI AISAH		3	1		1			1		
					M. PAJRI		6	1		1			1		
					M. MUSTAKIM		3	1		1			1		
					YUDA		4	1		1			1		
					SUPARNO		3	1		1			1		
					HUSNI MUBARAK		5	1		1			1		
					KHAIDIR		5	1		1			1		
					M. JAIS		6	1		1			1		
					HAMIDI		5	1		1			1		
					ABDUL MALIK		6	1		1			1		
					SARWIDI		5	1		1			1		
					TARMIZI		4	1		1			1		
					RUDI HARTONO		4	1		1			1		
					ALI AKBR		4	1		1			1		
					M. SOLEH		6	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ZAINI		4	1		1			1		
					MUHAMMAD		5	1		1			1		
					KASWIN		3	1		1			1		
					SYAMSUDIN		5	1		1			1		
					MUSLIM		5	1		1			1		
					HASAN		4	1		1			1		
					MUSLIMIN		4	1		1			1		
					M. SYUKUR		4	1		1			1		
					ABDUL HARIS		4	1		1			1		
					PIKRI		3	1		1			1		
					JAKPAR		5	1		1			1		
					M. HADIS		4	1		1			1		
					MARWAN		4	1		1			1		
					MUHAMMAD KACE		6	1		1			1		
					MUHAMMAD YANI		5	1		1			1		
					SAIFULLAH		4	1		1			1		
					DAHRIL		4	1		1			1		
					ABDULLAH		5	1		1			1		
					SURIADI		5	1		1			1		
					SAKIRIN		5	1		1			1		
					AHMAD JAHRI		4	1		1			1		
					MUZADDAD HALIL		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					SUPIAN		6	1		1			1		
					ZAMZAMI		6	1		1			1		
					PAHMI		4	1		1			1		
					MUHAMMAD NAZARUDIN		5	1		1			1		
					BASARIAH		5	1		1			1		
					GITOK		4	1		1			1		
					KURNIADI		4	1		1			1		
					PAIMUSAH		5	1		1			1		
					JAHSIN		5	1		1			1		
					ADI PURNA		4	1		1			1		
					JABURNI		4	1		1			1		
					MAKMIN		4	1		1			1		
					SYAFRIZAL		4	1		1			1		
					SUKMI ALMI		5	1		1			1		
					ASMUNI		4	1		1			1		
					SELAMET RIADI		4	1		1			1		
					HERWANTO		4	1		1			1		
					ABDUL RAUF		5	1		1			1		
					FUADDI		5	1		1			1		
					MASHUD		4	1		1			1		
					AGUSLIM		6	1		1			1		
					WAGINO		5	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					RAUH		4	1		1			1		
					HARBI		4	1		1			1		
					ABDUL SALAM		6	1		1			1		
					SAPARUDIN		6	1		1			1		
					ASDI		5	1		1			1		
					MARWAN		5	1		1			1		
					JUPEN		4	1		1			1		
					SOPIAN		5	1		1			1		
					JAHRI		5	1		1			1		
					DIHI		5	1		1			1		
					HERRI		4	1		1			1		
					SIMAN		5	1		1			1		
					NADUN		4	1		1			1		
					YAHUNA		4	1		1			1		
					HASAN BASRI		6	1		1			1		
					MAWAR		4	1		1			1		
					ASDI		4	1		1			1		
					M. SUKRIN		5	1		1			1		
					KARNI		5	1		1			1		
					M. YATAAL		6	1		1			1		
					ZAINAB		4	1		1			1		
					M. HATTA		4	1		1			1		
					ZUHDI		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					EHLAS		4	1		1			1		
					ANWAR		5	1		1			1		
					ROMLAH		6	1		1			1		
					DEDI NUGRAHA		4	1		1			1		
					ZAINI		4	1		1			1		
					PIRDAUS		4	1		1			1		
					MAINUT		4	1		1			1		
					NASRIN		5	1		1			1		
					SUPRIADI		3	1		1			1		
					ROJAAL		4	1		1			1		
					PARLAN		3	1		1			1		
					NORMI		3	1		1			1		
					AHMADI		4	1		1			1		
					ISHAK		5	1		1			1		
					SAIFUDIN		5	1		1			1		
					WAHIDIN		6	1		1			1		
					HARMAINI		6	1		1			1		
					SUKRI		4	1		1			1		
					AKMAL		4	1		1			1		
					AMRI		5	1		1			1		
					SRI WAHYUNI		4	1		1			1		
					SIDUL		5	1		1			1		
					TRINOTO		4	1		1			1		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					TOHO		4	1		1			1		
					BUYUNG SIFUL		5	1		1			1		
					MAS'UD		5	1		1			1		
					SAPRUDIN		5	1		1			1		
					KUSAIMI		4	1		1			1		
					WAHAB		6	1		1			1		
					BAIYANI		4	1		1			1		
					SARADI		5	1		1			1		
					MUSA		4	1		1			1		
					HERU NOTO		4	1		1			1		
					SAHRIN		5	1		1			1		
					ARBAIN		4	1		1			1		
					SAHRIN		4	1		1			1		
					HAYAMAH		5	1		1			1		
					TAYEB		5	1		1			1		
					M. YAMIN		5	1		1			1		
					RUSDI		4	1		1			1		
					ASWANTO		4	1		1			1		
					MUPTI ALI		6	1		1			1		
					ABDUL MUIS		6	1		1			1		
					ROSI AH		4	1		1			1		
					PESRIADI		5	1		1			1		
					MUHAMMAD		5	1		1			1		





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					BAYAN										
					PUADDI		4	1		1			1		
					MIPTAHUDIN		5	1		1			1		
					MUHAMMAD DARWIS		5	1		1			1		
					SYAFRIZAL		4	1		1			1		
					SARMAN		4	1		1			1		
					TARA		4	1		1			1		
					IDUL FITRI		5	1		1			1		
					SARGANI		4	1		1			1		
					RUKARTI		4	1		1			1		
					ZAMHARI		5	1		1			1		
					MUSLIM		5	1		1			1		
					PAROKI		4	1		1			1		
					SAMSUL KAMAR		6	1		1			1		
					ZUKRI		5	1		1			1		
					ANDI KURNIAWAN		4	1		1			1		
					DULHADI		4	1		1			1		
					SA'AIDI		3	1		1			1		
					TALIP		5	1		1			1		
					AMIN		5	1		1			1		
					KARIM		4	1		1			1		
					SOLIHIN		5	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					BATIAH		5	1		1			1		
					MASHUN		4	1		1			1		
					AMIRUDIN		4	1		1			1		
					PADIL		6	1		1			1		
					YULISMAN		5	1		1			1		
					MUHAMMAD MANDARIKA		5	1		1			1		
					ALKONI		4	1		1			1		
					PEBRIANTO		4	1		1			1		
					SAIDATUL ANWAR		5	1		1			1		
					HASAN BASRI		5	1		1			1		
					MARJANI		4	1		1			1		
					DAMANHURI		4	1		1			1		
					MANAN		4	1		1			1		
					HERMANTO		3	1		1			1		
					SAI		5	1		1			1		
					RIDWAN		4	1		1			1		
					SAIFUL ANWAR		4	1		1			1		
					KASTURI		4	1		1			1		
					PUSKESDES		3	1		1			1		
					MADRASAH		4	1		1			1		
					POLINDES		4	1		1			1		
					BUMDES		3	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					TK PAUD		4	1		1			1		
					KANTOR DESA		2	1		1			1		
					IRWAN ASWANSYAH		4	1		1			1		
					JUNAIDI		4	1		1			1		
					HABIBI		5	1		1			1		
					ALPI YERI		3	1		1			1		
2	Bangko	Kel. Dusun Bangko			SUSIANTI		4	1		1			1		
					SAMINEM		5	1		1			1		
					ALI IMRAN		5	1		1			1		
					KUSTINAH		5	1		1			1		
					GUSMAN DARWIYANTO		4	1		1			1		
					LENI MARLINA		3	1		1			1		
					SOPIAN		4	1		1			1		
					SUPRIYADI/S UKIMAN		4	1		1			1		
					PIRNO		5	1		1			1		
					SUPRIYATI/AS NADI		5	1		1			1		
					A. ROFIQ UDDIN		4	1		1			1		
					KASMIJAN		5	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					SUJONO		5	1		1			1		
					PARSI/SUPRIYANTO		5	1		1			1		
					SUPRIYANTO		4	1		1			1		
					SUPRI		4	1		1			1		
					ELI		4	1		1			1		
					PARYONO		4	1		1			1		
					DARMIN		4	1		1			1		
					YASMANTO		3	1		1			1		
					RABAN		3	1		1			1		
					AHMAD		5	1		1			1		
					HARI		5	1		1			1		
					WARTINI		4	1		1			1		
					RONIATI		5	1		1			1		
					WARTONO		5	1		1			1		
					BAK INDRO		6	1		1			1		
					BARI		5	1		1			1		
					SUYIKNO		5	1		1			1		
					PEP TRIADI		4	1		1			1		
					JUMARI		4	1		1			1		
					HERI ANDRIADI		4	1		1			1		
					CATUR		4	1		1			1		
					RIKARDO		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					MUHAMMAD AZAHRI		5	1		1			1		
					LEGINA		5	1		1			1		
					JUNAIIDI		4	1		1			1		
					LEGINA		4	1		1			1		
					EKO SAFRUDIN		3	1		1			1		
					PAIMIN		5	1		1			1		
					SUPRIANTO		5	1		1			1		
					SUGINI / ERIK		6	1		1			1		
					MAHINDRA		4	1		1			1		
					MARINEM		3	1		1			1		
					ZAKARIA		5	1		1			1		
					YATNO		4	1		1			1		
					SIDES		4	1		1			1		
					MASJID		5	1		1			1		
					SAIDI		5	1		1			1		
					SLAMET		5	1		1			1		
					EKO		4	1		1			1		
					MULYADI		5	1		1			1		
					RUBA'I		4	1		1			1		
					BADAWI		6	1		1			1		
					ROMI		4	1		1			1		
					DELEI		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					EKO SUYANTO		6	1		1			1		
					ANTON BEDENG		6	1		1			1		
					IMAM		5	1		1			1		
					LASMITO LEGIO		4	1		1			1		
					ARIES ADERIMA		5	1		1			1		
					SETU		4	1		1			1		
					BUDI		5	1		1			1		
					KARTI		5	1		1			1		
					MULDANI		5	1		1			1		
					MAT SAFII		7	1		1			1		
					ALFA EDISON		5	1		1			1		
					HENDRIANSY AH		4	1		1			1		
					BURMAWI		5	1		1			1		
					MUSTAKYADI		5	1		1			1		
					MERIS AFRIDA		4	1		1			1		
					INDRA		3	1		1			1		
					IRMAN DAMANIK		4	1		1			1		
					HENDRI DUNAN		6	1		1			1		
					SAPRIANTO /		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					YUL										
					ANGGA WIDODO		5	1		1			1		
					SUTAR		5	1		1			1		
					SUGENG		3	1		1			1		
					WAWAN		5	1		1			1		
					SIMAN / ANDIKA		5	1		1			1		
					MUHAMMAD SOLEH		5	1		1			1		
					SURYANTO		4	1		1			1		
					LARASATI		3	1		1			1		
					JUMALIS TIANTORO		4	1		1			1		
					PUSPITA CAROLINA		4	1		1			1		
					EDI YANDRI		3	1		1			1		
					SOLIHIN		4	1		1			1		
					SAKIMIN		5	1		1			1		
					SUJONO / WIDIA EKA WATI		6	1		1			1		
					RANDA		4	1		1			1		
					KASMIRAL		4	1		1			1		
					IDI AMIN		4	1		1			1		
					DANANG		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ARFINSYAH		4	1		1			1		
					KANG IDRUS		5	1		1			1		
					HERI SAPUTRA		4	1		1			1		
					H. HARAFIQ		5	1		1			1		
					WIDODO		4	1		1			1		
3	Bangko Barat	Desa Biuku Tanjung			DOMA EFRIANTO		4	1		1			1		
					ANDI DASWAN		4	1		1			1		
					DADANG HIDAYAT		4	1		1			1		
					SANTI MAHDALENA 1		5	1		1			1		
					UPIK HARIYANTI		4	1		1			1		
					LASPON 1		4	1		1			1		
					SUTOPO		4	1		1			1		
					DANI ISKANDI		5	1		1			1		
					SURaida		5	1		1			1		
					LASPON 2		4	1		1			1		
					LASPON 3		4	1		1			1		
					WAGINI		4	1		1			1		
					NILAWATI		4	1		1			1		





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					RONIAH		4	1		1			1		
					ADI SETIAWAN		4	1		1			1		
					RUSILO WATI		4	1		1			1		
					TORI MANZA		4	1		1			1		
					DONI APRIZON		4	1		1			1		
					SUSILAWATI		5	1		1			1		
					NASRIADI		4	1		1			1		
					KAMILATUN SAADAH		4	1		1			1		
					NURIYAH		5	1		1			1		
					RINA GUSTINA		5	1		1			1		
					SUSENO		4	1		1			1		
					HARUDIN		5	1		1			1		
					DEWITA MAUDIN		4	1		1			1		
					ROSMANI		4	1		1			1		
					RETNAWATI		4	1		1			1		
					UUT WULANDARI		4	1		1			1		
					TABI'I		4	1		1			1		
					DIANA		3	1		1			1		
					ROSTATI		3	1		1			1		
					SARINAM		3	1		1			1		
					TRIANA		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					AZMI EDWARD		4	1		1			1		
					DAHALIM		4	1		1			1		
					ROLI MIZA		4	1		1			1		
					SRI HARTATI		4	1		1			1		
					YULIPAWATI		4	1		1			1		
					VARYATI. NS		4	1		1			1		
					ERIA		3	1		1			1		
					UCHA LIANTI		4	1		1			1		
					RAFLES		4	1		1			1		
					ADE KURNIAWAN		4	1		1			1		
					EDI KURNIAWAN		3	1		1			1		
					MAHYUDIN		5	1		1			1		
					RUSMINA		4	1		1			1		
					IRWANDI		4	1		1			1		
					JEPRI MAULANA		4	1		1			1		
					INDIRO		4	1		1			1		
					SUHERMAN		5	1		1			1		
					SURATNI		3	1		1			1		
					AS'ARI		3	1		1			1		
					SUKAWI		3	1		1			1		
					REKA PURWANTO		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ARMAWATI		4	1		1			1		
					SAIPUL HENRA		5	1		1			1		
					DARYANTO		3	1		1			1		
					KARMIANTO		4	1		1			1		
					IMAM SANYOTO		4	1		1			1		
					LINDA YANTI		4	1		1			1		
					SENAWI		4	1		1			1		
					SUKARNO		5	1		1			1		
					HELTONAH		4	1		1			1		
					SURYATI		4	1		1			1		
					ALI YASAK. HD		5	1		1			1		
					ERIS GANDAL		4	1		1			1		
					DEDEP SUBARJA		5	1		1			1		
					SUPIANTO		4	1		1			1		
					TOHA		5	1		1			1		
					SANTI MAHDALENA		5	1		1			1		
					EDI HENDRI		4	1		1			1		
					ELPI		3	1		1			1		
					NENI SRI WAHYUNI		4	1		1			1		
					MAJID		5	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					YULISDI		5	1		1			1		
					ABDUL LATIF		5	1		1			1		
					ADNAN		4	1		1			1		
					MISDIYONO		5	1		1			1		
					SUWONDO		5	1		1			1		
					ABDUR RAHMAN		4	1		1			1		
					MUHAMMAD ANSORI		4	1		1			1		
					RINA GUSTINA		5	1		1			1		
					SESI SUSANTI		5	1		1			1		
					NORIN ELMIDAYANI		4	1		1			1		
					OLI YUSMA		6	1		1			1		
					MUSA		5	1		1			1		
					ARMAWATI		4	1		1			1		
					ANIS SOFYANTI		4	1		1			1		
					IDRUS		4	1		1			1		
					ZUHDI		4	1		1			1		
					PURNOMO		5	1		1			1		
					BAMBANG IRWANTO		4	1		1			1		
					MARIDA / WELLA FHERWANDA		5	1		1			1		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					RENO ADRAMA		4	1		1			1		
					MUSNIDAR 2		4	1		1			1		
					TOHA		5	1		1			1		
					ZUL KARDIANTO		4	1		1			1		
					RANI WISARA		4	1		1			1		
					MASJID DARUL MUTTAQIN		4	1		1			1		
					SURATNI 2		5	1		1			1		
					SANTI MAHDALENA 1		4	1		1			1		
					MASJID BAITUL ZIKRO		4	1		1			1		
					MUS MULYADI		4	1		1			1		
					RINI KARTINI		4	1		1			1		
					RIBUT		5	1		1			1		
					DERSI MARIYANTI		5	1		1			1		
					ASEP		2	1		1			1		
					DEN		3	1		1			1		
					JOKI		3	1		1			1		
					NOPER		3	1		1			1		
					JAMHUR		5	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					HERI SAPUTRA		5	1		1			1		
					AMIYAZAR		4	1		1			1		
					MERI HARLINA		4	1		1			1		
					HERMOZI		3	1		1			1		
					DARWALIS		4	1		1			1		
					RIKO		4	1		1			1		
					YUSRIL		4	1		1			1		
					SAHARUDIN		6	1		1			1		
					ENTI KARMILA WANI		5	1		1			1		
					ULAN/NURUL HIDAYAT		4	1		1			1		
					JEK		4	1		1			1		
					SANTI NURLELA		5	1		1			1		
					ADE SEPMUJA		5	1		1			1		
					INTAN BUSTANUDIN		5	1		1			1		
					IDAL WENDRI		4	1		1			1		
					IDRUS		5	1		1			1		
					HOLIDI		5	1		1			1		
4	Renah Pambarap	Desa Air Batu			WADI		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ULVA		4	1		1			1		
					SAP		5	1		1			1		
					TAUPIK		3	1		1			1		
					AGUS		4	1		1			1		
					TON PIT		5	1		1			1		
					IDI MIS		5	1		1			1		
					JIDRI		4	1		1			1		
					AZIZ		3	1		1			1		
					MUSHOLLA		5	1		1			1		
					MARWAN		4	1		1			1		
					BAKI		4	1		1			1		
					RINI TON		4	1		1			1		
					RINI ADAM		3	1		1			1		
					NAJMI		5	1		1			1		
					SISWANDI		4	1		1			1		
					ANDI		4	1		1			1		
					RONI		4	1		1			1		
					RINA		3	1		1			1		
					LUT		3	1		1			1		
					IT DIKA		3	1		1			1		
					FAWI		4	1		1			1		
					WITA		4	1		1			1		
					BUDI		3	1		1			1		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ARIF		3	1		1			1		
					KOSIM		4	1		1			1		
					ERMI		4	1		1			1		
					BARAHAN		5	1		1			1		
					ILI		3	1		1			1		
					DAREN		4	1		1			1		
					SARIKIN		4	1		1			1		
					NASIMI		5	1		1			1		
					KOS		3	1		1			1		
					SAIFUL		6	1		1			1		
					SMAI		3	1		1			1		
					MUS		4	1		1			1		
					SUDIRMAN		5	1		1			1		
					TENDUN		5	1		1			1		
					ZUHERMAN		4	1		1			1		
					RIKA		3	1		1			1		
					AMRIL		4	1		1			1		
					NOI		3	1		1			1		
					NUA		3	1		1			1		
					JIDIN		4	1		1			1		
					MIRA		3	1		1			1		
					RA'IN		5	1		1			1		
					SUPI		5	1		1			1		





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					SUMARNI		4	1		1			1		
					SARUDIN		4	1		1			1		
					SURAU PINANG BELARIK		5	1		1			1		
					HEN		3	1		1			1		
					TI MAK HEN		5	1		1			1		
					SAPNOI		5	1		1			1		
					FARIDA		4	1		1			1		
					SAPIAN		5	1		1			1		
					AZMI		5	1		1			1		
					IYAH ROHIMA		4	1		1			1		
					DARNI		4	1		1			1		
					ASWAT		4	1		1			1		
					BANGKIN		3	1		1			1		
					RIA		3	1		1			1		
					MARIANI		3	1		1			1		
					AZIZ		4	1		1			1		
					SMI DUL		5	1		1			1		
					ERMI		3	1		1			1		
					SITI HAWA		4	1		1			1		
					DIN		5	1		1			1		
					SAMI		4	1		1			1		
					MUNAIH		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					NUAH		4	1		1			1		
					BALADIL		5	1		1			1		
					SAMSUIR		5	1		1			1		
					IS NOI		3	1		1			1		
					SUHAIMI		5	1		1			1		
					TAB PUI		3	1		1			1		
					SABUI		4	1		1			1		
					KA'AB		5	1		1			1		
					GAYAH		4	1		1			1		
					AWI		4	1		1			1		
					SOL		4	1		1			1		
					HERMAN		4	1		1			1		
					TARI		3	1		1			1		
					PRISILA		3	1		1			1		
					ATENG NUR		4	1		1			1		
					ROPIT		4	1		1			1		
					BUDI YANSEN		4	1		1			1		
					HAMDAN		5	1		1			1		
					LAMAN		3	1		1			1		
					BAYA		4	1		1			1		
					IBRAHIM		5	1		1			1		
					SIYAH		3	1		1			1		
					PANTO JOMPO		2	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					AS'AD		4	1		1			1		
					MUSHOLLA JOMPO		5	1		1			1		
					UST. MAHLIL		5	1		1			1		
					MCK PANTO JOMPO		5	1		1			1		
					JAMAL		4	1		1			1		
					TOP		5	1		1			1		
					MONA		3	1		1			1		
					IDEP		4	1		1			1		
					JIBUR		3	1		1			1		
					SADAK		4	1		1			1		
					MARWAN		4	1		1			1		
					SMP		5	1		1			1		
5	Renah Pambarap	Desa Simpang Parit			Hasan Basri		4	1		1			1		
					Mega		3	1		1			1		
					Nazari		3	1		1			1		
					Amzad		4	1		1			1		
					Syafi'i		5	1		1			1		
					Yono		4	1		1			1		
					Yakup		5	1		1			1		
					Abdol		4	1		1			1		
					Subhan		5	1		1			1		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Siti Nurbaya		4	1		1			1		
					Posyandu		5	1		1			1		
					Martin		4	1		1			1		
					Sahdan		5	1		1			1		
					Awi		5	1		1			1		
					Gapur		4	1		1			1		
					Sofiyan		4	1		1			1		
					Syukur		4	1		1			1		
					Masjid		5	1		1			1		
					Saipul		5	1		1			1		
					Taher		5	1		1			1		
					H. Syeh		5	1		1			1		
					Zulkifli		5	1		1			1		
					Rosidah		4	1		1			1		
					Hj. Fatimah		5	1		1			1		
					Adi Does		4	1		1			1		
					Leni		4	1		1			1		
					Layli		4	1		1			1		
					Muhammad		5	1		1			1		
					Abdullah		6	1		1			1		
					Saidina Ali		5	1		1			1		
					Izin		4	1		1			1		
					Abdul Manap		6	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Rogayah		4	1		1			1		
					Suhendi		4	1		1			1		
					Mustakin		5	1		1			1		
					Syukur		6	1		1			1		
					Hovi		3	1		1			1		
					Muslim		5	1		1			1		
					Awi		4	1		1			1		
					Agus		4	1		1			1		
					Nazari		4	1		1			1		
					Rumah baru		3	1		1			1		
					Mushalla		5	1		1			1		
					Revan		3	1		1			1		
					H. Bahrin		5	1		1			1		
					Rosyanti		5	1		1			1		
					Saipul		4	1		1			1		
					Zaini		5	1		1			1		
					P. Kadus		5	1		1			1		
					Yanti		4	1		1			1		
					Ismail		3	1		1			1		
					Samsir		4	1		1			1		
					Deta		4	1		1			1		
					Heri		4	1		1			1		
					Hani		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Nurbani		5	1		1			1		
					Nova		4	1		1			1		
					Tena		4	1		1			1		
					Nara Davi		4	1		1			1		
					Tera Wati		4	1		1			1		
					Habib		5	1		1			1		
					Andren		5	1		1			1		
					M. Rapi		6	1		1			1		
					Murtadi		6	1		1			1		
					Anas		5	1		1			1		
					Hayati		5	1		1			1		
					Hanmida		4	1		1			1		
					Mushalla		5	1		1			1		
					Timah		4	1		1			1		
					Tatang		4	1		1			1		
					Ujek		4	1		1			1		
					Sukron		4	1		1			1		
					Anas		4	1		1			1		
					Rinaldi		4	1		1			1		
					Mida Wati		3	1		1			1		
					Bawi		6	1		1			1		
					Hamizah		5	1		1			1		
					Ijal		4	1		1			1		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Evi		4	1		1			1		
					Rizki		5	1		1			1		
					Marsal		4	1		1			1		
					Angga		4	1		1			1		
					Angga		4	1		1			1		
					Odong		3	1		1			1		
					Razak		5	1		1			1		
					Pakde Karto		5	1		1			1		
					Yono		4	1		1			1		
					Basip		4	1		1			1		
					Matiah		5	1		1			1		
					H. Taher		5	1		1			1		
					Marpuah		4	1		1			1		
					Mia		3	1		1			1		
					Bakri		5	1		1			1		
					Jefri		4	1		1			1		
					Mushalla		4	1		1			1		
					Wahidin		5	1		1			1		
					Irfan		4	1		1			1		
					Ani		4	1		1			1		
					Mustari		5	1		1			1		
					Faidil		4	1		1			1		
					Devi		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Faisol		5	1		1			1		
					TK		5	1		1			1		
					Mis		5	1		1			1		
					Rusli		4	1		1			1		
					Safarudin		5	1		1			1		
					Seh Samad		5	1		1			1		
					Salatiah		4	1		1			1		
					Najmi		5	1		1			1		
6	Nalo Tantan	Desa Nalo Gedang			Mulyadi		4	1		1			1		
					Ibrahim		4	1		1			1		
					Holidi		4	1		1			1		
					Samsul Bahri		4	1		1			1		
					Zulkifli		4	1		1			1		
					Halim		4	1		1			1		
					Maskur		3	1		1			1		
					Mardus		4	1		1			1		
					Anasrun		4	1		1			1		
					Anas		4	1		1			1		
					Rajai		5	1		1			1		
					Wahidin		5	1		1			1		
					Jais		5	1		1			1		
					Solamat		4	1		1			1		
					Sukar		3	1		1			1		





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Junaidi		3	1		1			1		
					M. Hatta		5	1		1			1		
					Izhar		5	1		1			1		
					Nuryati		4	1		1			1		
					Rasid		4	1		1			1		
					Akuzar		4	1		1			1		
					Judin		5	1		1			1		
					Madi		5	1		1			1		
					Umar		4	1		1			1		
					Zulhadi		6	1		1			1		
					Taher		6	1		1			1		
					Zulham		3	1		1			1		
					Agusriyanto		4	1		1			1		
					Muhamamd		4	1		1			1		
					Suardi		4	1		1			1		
					Ahmadi. S		5	1		1			1		
					Sihabudin		3	1		1			1		
					Ahmadi		4	1		1			1		
					Samsul Kamal		3	1		1			1		
					Insaidi		4	1		1			1		
					Zul		4	1		1			1		
					Netni		3	1		1			1		
					Mulyadi		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLA H ANGGO TA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Hamdan		4	1		1			1		
					Sopyan		3	1		1			1		
					Pahmi		4	1		1			1		
					Yusup		5	1		1			1		
					Aken		4	1		1			1		
					Ade Irawan		4	1		1			1		
					Dul Wahab		5	1		1			1		
					Antoni		4	1		1			1		
					Budi Setiawan		4	1		1			1		
					Sargawi		4	1		1			1		
					Yakin		5	1		1			1		
					Izhar Sanioni		4	1		1			1		
					Angga		4	1		1			1		
					Mitga		4	1		1			1		
					Supardi		5	1		1			1		
					Kamel		4	1		1			1		
					Mulyarni		4	1		1			1		
					Ramli		5	1		1			1		
					Heri Kuswara		5	1		1			1		
					Ipron		4	1		1			1		
					Sulainam		4	1		1			1		
					Musholla Nurul Huda		5	1		1			1		
					Parli		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Apid		4	1		1			1		
					Akul		4	1		1			1		
					Muslimin		5	1		1			1		
					Sadiya		4	1		1			1		
					M. Akil		5	1		1			1		
					Selamet		5	1		1			1		
					Amri		4	1		1			1		
					Busri		4	1		1			1		
					Marlidin		4	1		1			1		
					Harmun		5	1		1			1		
					Warda		4	1		1			1		
					Hanadi		4	1		1			1		
					Muslaini		4	1		1			1		
					Hapri		5	1		1			1		
					Harmadi										
					Midah		4	1		1			1		
					Canra		4	1		1			1		
					Halawa		4	1		1			1		
					Antani		4	1		1			1		
					Edi SY		5	1		1			1		
					Amil Hurir		4	1		1			1		
					Yusuf Sahrial		5	1		1			1		
					Asep		4	1		1			1		
					M. Yakin. R		5	1		1			1		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Ruslan		4	1		1			1		
					Aditia		3	1		1			1		
					Haikul		3	1		1			1		
					Iskandar		4	1		1			1		
					Sigen		4	1		1			1		
					M. Samsiar		4	1		1			1		
					Zakina		3	1		1			1		
					Yanto		5	1		1			1		
					A. Kori		5	1		1			1		
					Asep Riyadi		4	1		1			1		
					Hanapi		5	1		1			1		
								1		1			1		
7	Tabir Barat	Batang Kibul			Kusai		3	1		1			1		
					Awaludin		4	1		1			1		
					Johar		4	1		1			1		
					Komar		4	1		1			1		
					Bawi		5	1		1			1		
					Sumarni		5	1		1			1		
					Sugeng		4	1		1			1		
					Syamsu Parto		7	1		1			1		
					Yati		5	1		1			1		
					pitok		6	1		1			1		
					Juki		3	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Husin		1	1		1			1		
					Tamrin		4	1		1			1		
					Nopen		3	1		1			1		
					Budi Kurni		4	1		1			1		
					Maget		3	1		1			1		
					Domi		3	1		1			1		
					Miskun		4	1		1			1		
					Bujang R		4	1		1			1		
					Dowi		3	1		1			1		
					Fian		5	1		1			1		
					Alim		5	1		1			1		
					Musholla		5	1		1			1		
					Marzuki		1	1		1			1		
					Kliwan		1	1		1			1		
					Bawadi		4	1		1			1		
					Sihar		5	1		1			1		
					Mandu Biah		1	1		1			1		
					Zulkarnain		4	1		1			1		
					Inan		4	1		1			1		
					Husni		4	1		1			1		
					Widodo		5	1		1			1		
					Dahlan		5	1		1			1		
					Imam		3	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELU M TERL AYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Darwin		5	1		1			1		
					Saleh		6	1		1			1		
					Jalak		2	1		1			1		
					Sugeng		4	1		1			1		
					Dono		3	1		1			1		
					Hamzah		4	1		1			1		
					Pendi		4	1		1			1		
					Rudi		4	1		1			1		
					Sidik		3	1		1			1		
					Harun		5	1		1			1		
					Ilyas		3	1		1			1		
					Kotib		3	1		1			1		
					Ramli		6	1		1			1		
					Hari		3	1		1			1		
					Ibu Hari		3	1		1			1		
					Udik		4	1		1			1		
					Ipin		5	1		1			1		
					Darto		3	1		1			1		
					Yusup		1	1		1			1		
					Nino		4	1		1			1		
					Iswan		4	1		1			1		
					Jaelani		3	1		1			1		
					Nana		2	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Patman		5	1		1			1		
					Sabar		4	1		1			1		
					Rohman		4	1		1			1		
					Edi Catok		3	1		1			1		
					Dola		3	1		1			1		
					Kombordi		2	1		1			1		
					Toprizal		4	1		1			1		
					Suwardi		4	1		1			1		
					Anizar		5	1		1			1		
					Saipul		4	1		1			1		
					Uda		4	1		1			1		
					John		3	1		1			1		
					Saipil		4	1		1			1		
					Suhaimi		3	1		1			1		
					Hasan		2	1		1			1		
					Eko patrio		3	1		1			1		
					Turiman		5	1		1			1		
					Ajis		5	1		1			1		
					Sarjono		2	1		1			1		
					Sobirin		3	1		1			1		
					Alwin		2	1		1			1		
					Ipin Katopang		5	1		1			1		
					Widi		4	1		1			1		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Ohid		3	1		1			1		
					Simai		2	1		1			1		
					Ali Kobar		5	1		1			1		
					Brahim		5	1		1			1		
					Sudirman		2	1		1			1		
					M. Nur		4	1		1			1		
					Indra		4	1		1			1		
					Herianto		4	1		1			1		
					Bustami		4	1		1			1		
					Tona		4	1		1			1		
					Agus		5	1		1			1		
					Endang		4	1		1			1		
					Adi		4	1		1			1		
					Sarbaini		5	1		1			1		
					Brahim 2		4	1		1			1		
					Wahid		3	1		1			1		
					Satil		5	1		1			1		
					Sutrisno		5	1		1			1		
					Dewi		3	1		1			1		
					Masjid		6	1		1			1		
					Kantor Desa		6	1		1			1		
					Kantor Lama		5	1		1			1		
					Puskesmas		6	1		1			1		





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	R W	R T	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA		SUDAH TERLAYANI		BELUM TERLAYANI	JARAK SUMBER AIR KE PENAMPUNGAN PENGOTOR/LIMBAH		AKSI
								MBR	NON MBR	JP	BJP		> 10 M	< 10 M	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					TK Almuhajirin		6	1		1			1		
					Madrasah		6	1		1			1		
					Kiat		3	1		1			1		
					Hamzah 2		1	1		1			1		
					Nana 2		2	1		1			1		
					Syain		5	1		1			1		
					Amin		2	1		1			1		
					Dedet		3	1		1			1		
					Ilyas kandang		2	1		1			1		
					Nopen 2		3	1		1			1		
					Kiran		3	1		1			1		
					Kusdi 2		3	1		1			1		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

Form 3.B.4 Rumah Terlayani SPALD

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
1	Muara Siau	Desa Lubuk Birah				Perdesaan	2	Alex Pindra		4	1	
								Ropiah		2	1	
								Adam Hasan		3	1	
								Samsurizal		4	1	
								Zarkasi		6	1	
								Ahyar		5	1	
								Sudirman		5	1	
								Aditya Yuda		3	1	
								Ahyak Uddin		7	1	
								Kahar		3	1	
								Darma Putra		4	1	
								Haris		4	1	
								Sudirman		4	1	
								Mat Yuti		2	1	
								Nanang		3	1	
								Munawir		5	1	
								Abdul Hamid		4	1	
								Alkhohirin		3	1	
								Septian		3	1	
								Randi		2	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Hetriono		3	1	
								Noval Asrof		3	1	
								Nasution		2	1	
								Damin		3	1	
								M. Isa		2	1	
2	Bangko	Desa Kungkai				Perdesaan	2	Jendra		4	1	
								Zulkifli		3	1	
								Pardausi		4	1	
								Teguh Saputra		4	1	
								Dahlian		5	1	
								Arpandi		4	1	
								Asrul Iswandi		5	1	
								Siti Aminah		3	1	
								Mujiman		6	1	
								Najmi		3	1	
								Mawardi		6	1	
								Mursiwan		5	1	
								Maulana Fajri		4	1	
								Azwardi		5	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Anna Kholillah		3	1	
								Hendra		3	1	
								Zakaria		2	1	
								Helmi		4	1	
								Asnawi		3	1	
								Randa		3	1	
								Azwar		2	1	
								Budianto		2	1	
								Satria		3	1	
								Agus Salim		2	1	
								Supardi		2	1	
3	Tiang Pumpung	Desa Sekancing				Perdesaan	2	Sahrial		5	1	
								Mas'ud		3	1	
								Nuridawati		3	1	
								A. Khatib		3	1	
								Darul Kodni		4	1	
								Tisna Amyani		3	1	
								Hedi Suparman		3	1	
								Rahma Nusiah		1	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Saidina Umar		4	1	
								Haidawati		4	1	
								M. Daud		4	1	
								Muhammad Nuh		6	1	
								Sarpan		2	1	
								Samsu		3	1	
								M. Sidik		4	1	
								Armiza		5	1	
								Nasrun		2	1	
								Ramlah		1	1	
								Sargawi		2	1	
								Ugaiyah		1	1	
								Irwan		3	1	
								Zulkarnaini		3	1	
								Joni Lepender		4	1	
								Deswani		2	1	
								Hendra Praja		3	1	
								Asari		2	1	
								Maisaroh		2	1	
								Rahmad		2	1	
								Mhd.		4	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Akhmadi				
								Itriadi		3	1	
								Ahmad Sulthon. MD		3	1	
								Paroka Apri		2	1	
								Arjoni		3	1	
								Zikri		3	1	
								Zaidin		6	1	
											1	
4	Lembah Masurai	Muara Pangi				Perdesaan	2	Arpani		4	1	
								Makmur		5	1	
								Bustam		6	1	
								Taraas		4	1	
								Mai Munah		2	1	
								Mochtar Anus		4	1	
								Syafriko		4	1	
								Harman		4	1	
								Suharpan		5	1	
								Mutarais		4	1	
								Edy Martono		4	1	
								Amran		4	1	
								Henky		3	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Kristian				
								Metro Wijaya		4	1	
								Agusnadi		3	1	
								Bikarudin		4	1	
								Maryati		3	1	
								Rupianto		4	1	
								Palizar		4	1	
								Suib Aurus		5	1	
								EM. Atral		7	1	
								Rijaludin		3	1	
								Astani		7	1	
								Normaini		3	1	
								Wildan		4	1	
								Ridho		3	1	
								Sulton		2	1	
								Warta Kesuma		3	1	
								Fitriadi		2	1	
								Suratman		2	1	
								Eko Widodo		3	1	
								Azhadi		2	1	
								Supratman		4	1	
								Eka Candra		3	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Sanusi		2	1	
5	Tabir Barat	Desa Ngaol Ilir				Perdesaan	3	As'ari		6	1	
								Sahur		9	1	
								M. Maliki		8	1	
								A. Aziz		5	1	
								Nahris		6	1	
								Sarudin. C		2	1	
								Sudirman		3	1	
								Nurpisah		6	1	
								Sudiono		5	1	
								Sargawi		5	1	
								Saripudin		5	1	
								Abushar		6	1	
								Ajarudin		3	1	
								Devika Amisa		6	1	
								Bayarudin		3	1	
								Johannes		3	1	
								Samsir Alam		6	1	
								Saprianto		3	1	
								Darwis		5	1	
								Ardison		4	1	
								Sulaiman		4	1	





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Andi Candra		3	1	
								Tayib		4	1	
								Basarudin		3	1	
								Riki Saputra		2	1	
								Rumiah		3	1	
								Karmila		2	1	
								Nurhadi		4	1	
								M. Amin		5	1	
								Nasir		3	1	
								Hairil		5	1	
								Ruslan		4	1	
								Jamian		5	1	
								Usman		3	1	
								Aziz		3	1	
								Eva Linda		2	1	
								Musa		2	1	
								Rionsyah		3	1	
								Naruni		1	1	
								Yatiman		4	1	
								Witono		4	1	
								Sariyem		3	1	
								Naila Fatul Ulya		1	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Paudil		2	1	
								Saril		2	1	
6	Nalo Tantan	Desa Nalo Gedang				Perdesaan	2	Abu Gani		6	1	
								Daud		5	1	
								Subhan		3	1	
								M. Ali		6	1	
								Hanapi. A		9	1	
								M. Taher		4	1	
								Andri Andoni		4	1	
								Abdul Rahman		4	1	
								Supian Hadi		5	1	
								M. Irwandi		4	1	
								Ibrahim		5	1	
								Siti Hamnah		2	1	
								Rudi Ardiansyah		4	1	
								Maskur		3	1	
								Zulkifli		4	1	
								Suardi		3	1	
								Arapik		3	1	
								M. Saleh		3	1	
								Offan		2	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Kurniawan				
								Boy Sandi		4	1	
								A. Rahim		4	1	
								Maskur		4	1	
								Umar		4	1	
								Siben		4	1	
								Abul Azmi		4	1	
								Haupi		4	1	
								Muslihad		5	1	
								Mhd. Ali		4	1	
								Narto		3	1	
								Nasution		4	1	
								Haramaini		3	1	
								Taher. U		3	1	
								Mahyudin		5	1	
								Safawi		6	1	
								Slamat		7	1	
7	Pamenang Barat	Desa Pinang Merah				Perdesaan	3	Legowo		3	1	
								Rinto		4	1	
								Sabar Purwanto		3	1	
								Agus Sumarno		4	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Dwi Raden Wibowo		5	1	
								Sunar		2	1	
								Eko Murdiono		3	1	
								Nyono Purwandi		4	1	
								Purnomo		2	1	
								Wanto		4	1	
								Larno		4	1	
								Sugio		4	1	
								Sahril		3	1	
								Dikem		3	1	
								Tukiran		4	1	
								Suryono		4	1	
								Widodo		3	1	
								Slamet		6	1	
								Yahyo		3	1	
								Sigiarto		4	1	
								Ahmad Nuryasin		3	1	
								Tarmin		3	1	
								Sudarsono		3	1	
								Nur Hasim		7	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Yuwadi		3	1	
								Yabu		2	1	
								Supardi		4	1	
								Rahmad Taufiq		3	1	
								ikhsan		5	1	
								Agung Wibowo		3	1	
								Suwarli		2	1	
								Pujianto		5	1	
								Nur Habib		4	1	
								Supri Ardianto		4	1	
								Totok Sutrantono		3	1	
								Santoso Suprihatin		4	1	
								Paryusi		4	1	
								Jiyanto		3	1	
								Yurnalis		4	1	
								Gimin		2	1	
8	Renah Pamenang	Desa Bukit Bungkul				Perdesaan		Subari		3	1	
								Sutiarno		3	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Kuntaryadi		3	1	
								Painem		4	1	
								Titik Yuli Susanti		1	1	
								Soleh Trijoko		2	1	
								Waluyo		2	1	
								Surowiharjo		2	1	
								Sutrisno		3	1	
								Trimapiani		3	1	
								Kuardi Hadi Purnomo		3	1	
								Eko Widodo		2	1	
								Maryanto		2	1	
								Fatkurrohyan		1	1	
								Sumari		2	1	
								Totok Sumarno		2	1	
								Masnis Zulkarnain		4	1	
								Yusli Hermawan		4	1	
								Marsini		2	1	
								Nanang Suganda		5	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								M. Sofyan		3	1	
								Jaja		2	1	
								Masturi		6	1	
								Pahrudin		3	1	
								Yuheldi		3	1	
								Jekson Lubis		4	1	
								Safrudin		4	1	
								Heru Budiono		2	1	
								Siam		3	1	
								Kasio		2	1	
								Agus Suhendra		3	1	
								Sutrisno		3	1	
								Sukrik		2	1	
								Jainal		2	1	
								Suparman		3	1	
9	Muara Siau	Desa Durian Rambun				Perdesaan	2	Hambali		3	1	
								M. Abton		3	1	
								Sapren		3	1	
								Alhadi		3	1	
								Arif Usman		4	1	
								Musa		2	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Mustamri		3	1	
								Muhtar		4	1	
								Rosnita		2	1	
								M. Taher		5	1	
								Niftra		2	1	
								Roma		3	1	
								Rosidi		4	1	
								Zainap		1	1	
								M. Isa		4	1	
								Rozali		2	1	
								Karman		5	1	
								Sayuti		4	1	
								Nurma		1	1	
								Jawariah		1	1	
								Mulyadi		7	1	
								M. Izhar		4	1	
								Amirunas		3	1	
								Muhamad		3	1	
								Nursiah		3	1	
								Hardi		3	1	
								Sarman		4	1	
								Bambang		3	1	
								Sugito		3	1	





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Maryono		2	1	
10	Pamenang	Pauh Menang				Perdesaan	2	M. Rohmat		4	1	
								Edi Kismadi		5	1	
								Anggoro Bowo Laksono		5	1	
								Triono		5	1	
								Rame Widodo		4	1	
								Dedi Puja Kesuma		3	1	
								Mursidi Setiono		4	1	
								Tri Sulissetio		4	1	
								Almus Riadi		4	1	
								Budi Sadewa		4	1	
								Riyan Juliansyah		5	1	
								Syaibani. S		5	1	
								Hudi Utomo Widodo		2	1	
								Rohmad Yulianto		4	1	
								Joko		4	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
								Sugianto				
								Dwi Rusmanto		3	1	
								Heru Subagyo		3	1	
								Dasimin		2	1	
								Sangidi Ngatemen		4	1	
								Sunarwan		5	1	
								Indi Astuti		1	1	
								Maskuri		5	1	
								Haryono		2	1	
								Suyadi		4	1	
								Ahmad Wahono		4	1	
								Ikhsan		5	1	
								Eko Budi		3	1	
								Saminem		6	1	
								Suwanto		5	1	
								Sudarman		5	1	
								Dasimin		3	1	
								Sujiman		2	1	
								Atmorejoko		2	1	
								Mitro		3	1	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	RW	RT	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ha)	KLASIFIKASI PERKOTAAN / PERDESAAN	KONDISI RESIKO SANITASI	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	JUMLAH ANGGOTA RUMAH	KONDISI EKONOMI KELUARGA	
											MBR	NON MBR
											12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								Sorito		3	1	

C. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan dasar

Form 3.C.3 Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	AKSI
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan kebutuhan pokok minum untuk kebutuhan sehari - hari	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Air Minum yang Aman	67,72	%				
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	2	Dokumen	Kab. Merangin	Rp106.080.000	Dinas PUPR Kab. Merangin	
		2. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani Melalui Kegiatan Padat	400	SR	Kab. Merangin	Rp1.671.950.600	Dinas PUPR Kab. Merangin	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	AKSI
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)		
			Karya/ SPAM Berbasis Masyarakat						
						Jumlah	Rp 1.778.030.600		

**Form 3.C.4 Rencana Pemenuhan Air Limbah Domestik**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	AKSI
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentasi Rumah Tangga yang Mendapat Pelayanan Air Limbah yang Layak	74,14	%				
		1. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/ Kota yang Disusun	2	Dokumen	Kab. Merangin	Rp. 75.400.000	Dinas PUPR Kab. Merangin	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		OPD PELAKSANA	AKSI
						LOKASI	ALOKASI DANA (RP)		
		2. Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	266	SR	Kab. Merangin	Rp1.054.626.600	Dinas PUPR Kab. Merangin	
		3. Sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	8	M3/Hari	Kab. Merangin	Rp 150.000.000	Dinas PUPR Kab. Merangin	
						<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.280.026.600</b>		

**D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan**

**Form 3.D.3 Capaian Layanan Air Minum**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
1	Bangko	Kelurahan Pasar Atas Bangko	2195	2088	85	22
		Kelurahan Pasar Bangko	683	650	12	21
		Kelurahan Pematang Kandis	1600	1104	23	473
		Kelurahan Dusun Bangko	1102	411	120	571
		Desa Kungkai	886	146	145	595
		Desa Langling	4466	4372	94	0
		Desa Dusun Mudo	2661	2538	123	0
		Desa Sungai Kapas	319	52	56	211



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
2	Bangko Barat	Desa Bedeng Rejo	389	204	46	139
		Desa Bukit Beringin	837	559	32	246
		Desa Sungai Putih	675	412	43	220
		Desa Pulau Rengas	490	271	56	163
		Desa Pulau Rengas Ulu	447	193	67	187
		Desa Biuku Tanjung	501	440	61	0
3	Batang Masumai	Desa Pulau Baru	377	303	57	17
		Desa Rantau Alai	537	355	75	107
		Desa Lubuk Gaung	289	239	34	16
		Desa Titian Teras	138	59	25	54
		Desa Salam Buku	290	179	59	52
		Desa Tambang Besi	559	419	116	24
		Desa Kederasan Panjang	141	68	40	33
		Desa Pulau Layang	194	47	111	36
		Desa Pelangki	225	70	69	86
		Desa Nibung	264	121	44	99
4	Nalo Tantan	Desa Mentawak	661	291	12	358
		Desa Sungai Ulak	1378	1305	57	16
		Desa Aur Berduri	600	72	41	487
		Desa Danau	541	60	32	449
		Desa Telun	343	72	11	260
		Desa Nalo Gedang	503	431	24	48
		Desa Baru Nalo	640	237	31	372



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
5	Tabir	Kelurahan Mampun	1069	456	103	510
		Kelurahan Kampung Baruh	965	412	214	339
		Kelurahan Pasar Rantau Panjang	1071	389	126	556
		Kelurahan Pasar Baru	653	183	29	441
		Desa Seling	428	108	18	302
		Desa Kandang	525	129	45	351
		Desa Koto Rayo	1504	654	250	600
		Kelurahan Dusun Baru	362	102	38	222
		Desa Beluran Panjang	689	251	130	308
		Desa Tanjung Ilir	467	137	26	304
		Desa Lubuk Napal	120	35	26	59
6	Tabir Lintas	Desa Koto Baru	479	196	38	245
		Desa Sido Lego	655	367	29	259
		Desa Tambang Baru	665	459	107	99
		Desa Mensango	286	117	122	47
		Desa Sidoharjo	286	140	73	73
7	Margo Tabir	Desa Sido Rukun	562	253	156	153
		Desa Tanjung Rejo	1169	397	278	494
		Desa Sumber Agung	1043	603	233	207
		Desa Suko Rejo	667	80	159	428
		Desa Lubuk Bumbun	427	60	176	191
		Desa Tegal Rejo	235	52	69	114



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
8	Tabir Ilir	Desa Air Batu	579	122	139	318
		Desa Rejo Sari	299	155	92	52
		Desa Kota Raja	381	252	79	50
		Desa Ulak Makam	286	123	64	99
		Desa Rantau Limau Manis	564	203	123	238
		Desa Tunggul Bulin	363	160	106	97
		Desa Mekar Limau Manis	326	97	120	109
9	Tabir Timur	Desa Bukit Subur	597	251	101	245
		Desa Sungai Bulian	827	281	88	458
		Desa Sungai Limau	428	124	89	215
		Desa Seri Sembilan	618	303	93	222
10	Tabir Selatan	Desa Sinar Gading	697	327	83	287
		Desa Muara Delang	1925	1373	69	483
		Desa Sungai Sahut	1364	591	116	657
		Desa Rawa Jaya	1603	790	146	667
		Desa Gading Jaya	1214	806	99	309
		Desa Bunga Antoi	1471	654	132	685
		Desa Bungo Tanjung	499	295	12	192
		Desa Mekar Jaya	157	154	3	0
11	Pamenang	Desa Rejo Sari	672	386	82	204
		Desa Pematang Kancil	386	201	45	140
		Desa Tanah Abang	1391	706	121	564
		Desa Empang Benao	478	243	98	137





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
		Desa Tanjung Gedang	304	175	45	84
		Desa Keroya	494	267	23	204
		Desa Pauh Menang	861	379	81	401
		Kelurahan Pasar Pamenang	1671	1053	180	438
		Desa Muara Belengo	510	258	23	229
		Desa Jelatang	759	429	47	283
		Desa Karang Berahi	463	148	72	243
		Desa Sungai Udang	640	380	81	179
		Desa Pelakar Jaya	357	217	60	80
		Desa Sialang	1003	524	58	421
12	Pamenang Barat	Desa Karang Anyar	337	162	34	141
		Desa Simpang Limbur Merangin	446	161	87	198
		Desa Limbur Merangin	551	160	58	333
		Desa Tanjung Lamin	472	113	99	260
		Desa Papit	293	65	80	148
		Desa Mampun Baru	765	387	76	302
		Desa Pinang Merah	1586	558	273	755
		Desa Pulau Tujuh	863	525	48	290
13	Renah Pamenang	Desa Rasau	994	239	116	639
		Desa Meranti	898	532	109	257
		Desa Bukit Bungkul	1319	863	230	226
		Desa Lantak Seribu	1379	552	270	557
14	Pamenang Selatan	Desa Tanjung Benoang	975	408	260	307



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
		Desa Tambang Emas	1594	977	269	348
		Desa Selango	242	94	124	24
		Desa Pulau Bayur	344	133	118	93
15	Tabir Ulu	Desa Kapuk	639	147	272	220
		Desa Medan Baru	116	17	74	25
		Desa Pulau Aro	641	263	120	258
		Desa Muara Seketuk	105	27	54	24
		Desa Muara Jernih	618	142	204	272
		Desa Rantau Ngarau	302	131	98	73
16	Tabir Barat	Desa Muara Langeh	107	34	13	60
		Desa Tanjung Putus	212	49	51	112
		Desa Tanjung Beringin	88	25	14	49
		Desa Pulau Tebakar	240	62	68	110
		Desa Baru Kibul	77	26	10	41
		Desa Muaro Kibul	264	87	69	108
		Desa Pulau Lebar	66	11	26	29
		Desa Batang Kibul	221	166	15	40
		Desa Sungai Tabir	99	19	21	59
		Desa Telentam	304	46	34	224
		Desa Ngaol Ilir	156	67	17	72
		Desa Ngaol	319	150	24	145
		Desa Air Liki	250	28	38	184
		Desa Air Liki Baru	199	24	56	119



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
17	Sungai Manau	Desa Bukit Batu	313	119	34	160
		Desa Sungai Nilau	356	121	54	181
		Desa Sungai Pinang	191	88	21	82
		Desa Palipan	179	100	56	23
		Desa Tiangko	246	84	43	119
		Desa Durian Lecah	246	91	41	114
		Desa Seringat	461	189	40	232
		Desa Sungai Manau	254	215	39	0
		Desa Benteng	311	121	28	162
		Desa Gelanggang	132	57	36	39
18	Pangkalan Jambu	Desa Bukit Perentak	164	61	24	79
		Desa Tiga Alur	129	75	32	22
		Desa Bungo Tanjung	358	192	76	90
		Desa Sungai Jering	177	96	12	69
		Desa Tanjung Mudo	255	87	23	145
		Desa Baru Pangkalan Jambu	224	72	42	110
		Desa Birun	345	278	27	40
		Desa Kampung Limo	196	88	29	79
19	Renah Pembarap	Desa Talang Segegah	167	107	34	26
		Desa Durian Betakuk	268	91	14	163
		Desa Muara Panco Barat	403	149	36	218
		Desa Muara Panco Timur	421	139	27	255
		Desa Parit Ujung Tanjung	307	206	30	71
		Desa Guguk	331	255	18	58



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
		Desa Muara Bantan	233	75	24	134
		Desa Merkeh	277	116	32	129
		Desa Air Batu	669	618	18	33
		Desa Simpang Parit	176	156	17	3
		Desa Marus Jaya	193	89	12	92
		Desa Renah Medan	125	69	10	46
20	Muara Siau	Desa Pulau Raman	256	110	23	123
		Desa Rantau Panjang	338	179	34	125
		Desa Badak Tekurung	109	97	12	0
		Desa Rantau Bidaro	68	59	9	0
		Desa Air Lago	130	100	10	20
		Desa Pasar Muara Siau	225	215	10	0
		Desa Muara Siau	299	255	15	29
		Desa Teluk Sikumbang	171	58	16	97
		Desa Rantau Bayur	102	21	18	63
		Desa Sungai Ulas	142	63	14	65
		Desa Peraduan Temeras	189	114	20	55
		Desa Rantau Macang	162	100	16	46
		Desa Tiaro	180	81	12	87
		Desa Sepantai Renah	108	70	11	27
		Desa Lubuk Beringin	273	112	18	143
		Desa Lubuk Birah	126	54	15	57
		Desa Durian Rambun	74	27	12	35
21	Tiang Pumpung	Desa Rantau Limau Kapas	252	139	23	90



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
		Desa Baru Bukit Punjung	157	77	15	65
		Desa Baru Sungai Sakai	104	44	18	42
		Desa Beringin Sanggul	257	113	24	120
		Desa Sekancing Ilir	357	189	15	153
		Desa Sekancing	392	215	17	160
22	Lembah Masurai	Desa Tanjung Dalam	234	101	35	98
		Desa Muara Pangi	260	151	41	68
		Desa Rantau Jering	485	116	34	335
		Desa Nilo Dingin	659	493	25	141
		Desa Tanjung Berugo	223	85	81	57
		Desa Desa Tuo	391	250	43	98
		Desa Koto Rami	182	152	12	18
		Desa Pasar Masurai	138	72	17	49
		Desa Rancan	175	58	28	89
		Desa Muara Langgayo	109	39	23	47
		Desa Muara Kelukup	162	69	15	78
		Desa Durian Mukut	115	42	32	41
		Desa Talang Paruh	176	112	32	32
		Desa Talang Asal	301	98	54	149
		Desa Sei Lalang	391	111	50	230
23	Jangkat Timur	Desa Rantau Suli	464	255	22	187
		Desa Desa Baru	198	93	35	70
		Desa Talang Tembago	303	175	32	96
		Desa Beringin Tinggi	202	85	12	105



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	TARGET TOTAL	REALISASI (TERLAYANI JP)	REALISASI (TERLAYANI BJP)	REALISASI (BELUM TERLAYANI)
		Desa Koto Teguh	142	45	36	61
		Desa Tanjung Mudo	100	53	46	1
		Desa Pematang Pauh	139	68	25	46
		Desa Gedang	296	195	35	66
		Desa Tanjung Benuang	261	102	51	108
		Desa Jangkat	215	75	27	113
		Desa Koto Baru	125	49	13	63
		Desa Tanjung Alam	94	43	19	32
		Desa Simpang Kabu	105	25	20	60
		Desa Simpang Talang Tembago	95	26	26	43
24	Jangkat	Desa Muara Madras	594	392	96	106
		Desa Lubuk Pungguk	314	198	86	30
		Desa Pulau Tengah	739	399	170	170
		Desa Koto Renah	196	121	45	30
		Desa Renah Alai	309	139	88	82
		Desa Rantau Kermas	107	45	22	40
		Desa Lubuk Mantilin	50	23	15	12
		Desa Tanjung Kasri	102	40	59	3
		Desa Renah Kemumu	193	74	97	22
		Desa Renah Pellaan	141	49	75	17
		Desa Koto Rawang	54	32	20	2



**Form 3.D.4 Capaian Layanan Air Limbah Domestik**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAA)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
1	Bangko	Kelurahan Pasar Atas Bangko	2195				955		1240	1000	240
		Kelurahan Pasar Bangko	683				683		0		
		Kelurahan Pematang Kandis	1600				820		780	780	
		Kelurahan Dusun Bangko	1102				327		775	750	25
		Desa Kungkai	886				886		0		
		Desa Langling	4466				2836		1630	1500	130
		Desa Dusun Mudo	2661				2661		0		
		Desa Sungai Kapas	319				319		0		
2	Bangko Barat	Desa Bedeng Rejo	389				59		330	330	
		Desa Bukit Beringin	837				757		80		80
		Desa Sungai Putih	675				675		0		
		Desa Pulau Rengas	490				290		200		200
		Desa Pulau Rengas Ulu	447				47		400	400	
		Desa Biuku Tanjung	501				101		400	400	
3	Batang Masumai	Desa Pulau Baru	377				377		0		
		Desa Rantau Alai	537				457		80		80
		Desa Lubuk Gaung	289				39		250	250	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAA)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
		Desa Titian Teras	138				108		30	30	
		Desa Salam Buku	290				260		30	30	
		Desa Tambang Besi	559				109		450	450	
		Desa Kederasan Panjang	141				41		100		100
		Desa Pulau Layang	194				194		0		
		Desa Pelangki	225				225		0		
		Desa Nibung	264				264		0		
4	Nalo Tantan	Desa Mentawak	661				661		0		
		Desa Sungai Ulak	1378				278		1100	1000	100
		Desa Aur Berduri	600				600		0		
		Desa Danau	541				141		400	400	
		Desa Telun	343				43		300	300	
		Desa Nalo Gedang	503				118		385	385	
		Desa Baru Nalo	640				190		450	450	
5	Tabir	Kelurahan Mampun	1069				1069		0		
		Kelurahan Kampung Baruh	965				965		0		
		Kelurahan Pasar Rantau Panjang	1071				1071		0		
		Kelurahan Pasar Baru	653				623		30	30	
		Desa Seling	428				128		300	300	





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAA)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
		Desa Kandang	525				125		400	400	
		Desa Koto Rayo	1504				1504		0		
		Kelurahan Dusun Baru	362				362		0		
		Desa Beluran Panjang	689				689		0		
		Desa Tanjung Ilir	467				437		30	30	
		Desa Lubuk Napal	120				120		0		
6	Tabir Lintas	Desa Koto Baru	479				479		0		
		Desa Sido Lego	655				655		0		
		Desa Tambang Baru	665				665		0		
		Desa Mensango	286				286		0		
		Desa Sidoharjo	286				286		0		
7	Margo Tabir	Desa Sido Rukun	562				562		0		
		Desa Tanjung Rejo	1169				1169		0		
		Desa Sumber Agung	1043				1043		0		
		Desa Suko Rejo	667				667		0		
		Desa Lubuk Bumbun	427				427		0		
		Desa Tegal Rejo	235				235		0		
8	Tabir Ilir	Desa Air Batu	579				579		0		
		Desa Rejo Sari	299				299		0		
		Desa Kota Raja	381				381		0		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAA)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
		Desa Ulak Makam	286				286		0		
		Desa Rantau Limau Manis	564				564		0		
		Desa Tunggul Bulin	363				363		0		
		Desa Mekar Limau Manis	326				326		0		
9	Tabir Timur	Desa Bukit Subur	597				97		500	500	
		Desa Sungai Bulian	827				827		0		
		Desa Sungai Limau	428				428		0		
		Desa Seri Sembilan	618				618		0		
10	Tabir Selatan	Desa Sinar Gading	697				697		0		
		Desa Muara Delang	1925				1925		0		
		Desa Sungai Sahut	1364				1364		0		
		Desa Rawa Jaya	1603				1603		0		
		Desa Gading Jaya	1214				214		1000	1000	
		Desa Bunga Antoi	1471				1471		0		
		Desa Bungo Tanjung	499				419		80		80
		Desa Mekar Jaya	157				57		100	100	
11	Pamenang	Desa Rejo Sari	672				122		550	550	
		Desa Pematang Kancil	386				386		0		
		Desa Tanah Abang	1391				391		1000	1000	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAA)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
		Desa Empang Benao	478				478		0		
		Desa Tanjung Gedang	304				54		250	250	
		Desa Keroya	494				94		400	400	
		Desa Pauh Menang	861				126		735	735	
		Kelurahan Pasar Pamenang	1671				1671		0		
		Desa Muara Belengo	510				510		0		
		Desa Jelatang	759				209		550	550	
		Desa Karang Berahi	463				463		0		
		Desa Sungai Udang	640				640		0		
		Desa Pelakar Jaya	357				57		300	300	
		Desa Sialang	1003				1003		0		
12	Pamenang Barat	Desa Karang Anyar	337				337		0		
		Desa Simpang Limbur Merangin	446				446		0		
		Desa Limbur Merangin	551				551		0		
		Desa Tanjung Lamin	472				472		0		
		Desa Papit	293				293		0		
		Desa Mampun Baru	765				215		550	550	
		Desa Pinang Merah	1586				1546		40	40	
		Desa Pulau Tujuh	863				213		650	650	
13	Renah	Desa Rasau	994				219		775	775	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
	Pamenang										
		Desa Meranti	898				898		0		
		Desa Bukit Bungkul	1319				84		1235	1000	235
		Desa Lantak Seribu	1379				229		1150	1150	
14	Pamenang Selatan	Desa Tanjung Benoang	975				225		750	750	
		Desa Tambang Emas	1594				164		1430	1250	180
		Desa Selango	242				242		0		
		Desa Pulau Bayur	344				344		0		
15	Tabir Ulu	Desa Kapuk	639				139		500	500	
		Desa Medan Baru	116				16		100	100	
		Desa Pulau Aro	641				641		0		
		Desa Muara Seketuk	105				105		0		
		Desa Muara Jernih	618				168		450	450	
		Desa Rantau Ngarau	302				102		200	200	
16	Tabir Barat	Desa Muara Langeh	107				22		85	85	
		Desa Tanjung Putus	212				212		0		
		Desa Tanjung Beringin	88				88		0		
		Desa Pulau Tebakar	240				240		0		
		Desa Baru Kibul	77				27		50	50	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAA)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
		Desa Muaro Kibul	264				64		200	200	
		Desa Pulau Lebar	66				16		50	50	
		Desa Batang Kibul	221				31		190	190	
		Desa Sungai Tabir	99				49		50	50	
		Desa Telentam	304				304		0		
		Desa Ngaol Ilir	156				11		145	145	
		Desa Ngaol	319				69		250	250	
		Desa Air Liki	250				50		200	200	
		Desa Air Liki Baru	199				49		150	150	
17	Sungai Manau	Desa Bukit Batu	313				313		0		
		Desa Sungai Nilau	356				56		300	300	
		Desa Sungai Pinang	191				191		0		
		Desa Palipan	179				179		0		
		Desa Tiangko	246				0		246	246	
		Desa Durian Lecah	246				0		246	246	
		Desa Seringat	461				461		0		
		Desa Sungai Manau	254				4		250	250	
		Desa Benteng	311				311		0		
		Desa Gelanggang	132				32		100	100	
18	Pangkalan Jambu	Desa Bukit Perentak	164				164		0		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAA)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
		Desa Tiga Alur	129				129		0		
		Desa Bungo Tanjung	358				358		0		
		Desa Sungai Jering	177				177		0		
		Desa Tanjung Mudo	255				255		0		
		Desa Baru Pangkalan Jambu	224				224		0		
		Desa Birun	345				45		300	300	
		Desa Kampung Limo	196				146		50		50
19	Renah Pembarap	Desa Talang Segegah	167				167		0		
		Desa Durian Betakuk	268				268		0		
		Desa Muara Panco Barat	403				53		350	350	
		Desa Muara Panco Timur	421				71		350	350	
		Desa Parit Ujung Tanjung	307				227		80		80
		Desa Guguk	331				81		250	250	
		Desa Muara Bantan	233				233		0		
		Desa Merkeh	277				77		200	200	
		Desa Air Batu	669				224		445	345	100
		Desa Simpang Parit	176				26		150	150	
		Desa Marus Jaya	193				43		150	150	
		Desa Renah Medan	125				25		100	100	
20	Muara Siau	Desa Pulau Raman	256				256		0		



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAA)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
		Desa Rantau Panjang	338				338		0		
		Desa Badak Tekurung	109				109		0		
		Desa Rantau Bidaro	68				68		0		
		Desa Air Lago	130				130		0		
		Desa Pasar Muara Siau	225				80		145		145
		Desa Muara Siau	299				274		25	25	
		Desa Teluk Sikumbang	171				171		0		
		Desa Rantau Bayur	102				102		0		
		Desa Sungai Ulas	142				142		0		
		Desa Peraduan Temeras	189				39		150	150	
		Desa Rantau Macang	162				162		0		
		Desa Tiaro	180				180		0		
		Desa Sepantai Renah	108				108		0		
		Desa Lubuk Beringin	273				273		0		
		Desa Lubuk Birah	126				101		25		25
		Desa Durian Rambun	74				44		30	30	
21	Tiang Pumpung	Desa Rantau Limau Kapas	252				252		0		
		Desa Baru Bukit Punjung	157				57		100		100
		Desa Baru Sungai Sakai	104				104		0		
		Desa Beringin Sanggul	257				227		30	30	
		Desa Sekancing Ilir	357				7		350	300	50



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTA)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAA)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
		Desa Sekancing	392				27		365	285	80
22	Lembah Masurai	Desa Tanjung Dalam	234				234		0		
		Desa Muara Pangi	260				225		35	35	
		Desa Rantau Jering	485				485		0		
		Desa Nilo Dingin	659				159		500	500	
		Desa Tanjung Berugo	223				23		200	200	
		Desa Desa Tuo	391				351		40	40	
		Desa Koto Rami	182				142		40	40	
		Desa Pasar Masurai	138				138		0		
		Desa Rancan	175				25		150	150	
		Desa Muara Langgayo	109				109		0		
		Desa Muara Kelukup	162				62		100	100	
		Desa Durian Mukut	115				15		100	100	
		Desa Talang Paruh	176				96		80		80
		Desa Talang Asal	301				51		250	250	
		Desa Sei Lalang	391				391		0		
23	Jangkat Timur	Desa Rantau Suli	464				39		425	425	
		Desa Desa Baru	198				48		150	150	
		Desa Talang Tembago	303				53		250	250	
		Desa Beringin Tinggi	202				202		0		





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KECAMATAN	DESA	TARGET (TOTAL)	TARGET (AKSES DASAR/ AKSES LAYAK PERDESAAN)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-S)	TARGET (AKSES AMAN SPALD-T)	REALISASI (TANPA AKSES)	REALISASI (AKSES DASAR)	REALISASI (AKSES LAYAK)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-S)	REALISASI (AKSES AMAN SPALD-T)
		Desa Koto Teguh	142				142		0		
		Desa Tanjung Mudo	100				65		35	35	
		Desa Pematang Pauh	139				39		100	100	
		Desa Gedang	296				296		0		
		Desa Tanjung Benuang	261				261		0		
		Desa Jangkat	215				65		150	150	
		Desa Koto Baru	125				25		100	100	
		Desa Tanjung Alam	94				94		0		
		Desa Simpang Kabu	105				105		0		
		Desa Simpang Talang Tembago	95				45		50	50	
24	Jangkat	Desa Muara Madras	594				94		500	500	
		Desa Lubuk Pungguk	314				214		100		100
		Desa Pulau Tengah	739				139		600	600	
		Desa Koto Renah	196				196		0		
		Desa Renah Alai	309				309		0		
		Desa Rantau Kermas	107				57		50	50	
		Desa Lubuk Mantilin	50				50		0		
		Desa Tanjung Kasri	102				52		50	50	
		Desa Renah Kemumu	193				43		150	150	
		Desa Renah Pellaan	141				16		125	125	
		Desa Koto Rawang	54				54		0		



#### 4.1.5 Bidang Urusan Trantibumlinmas

##### A. Satuan Polisi Pamong Praja

###### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin terkait Pelayanan Dasar Katentraman dan ketertiban umum pada tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, merupakan Jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal untuk jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Katentraman dan ketertiban umum sebagaimana dibawah :

- 1) Untuk pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar Katentraman dan ketertiban umum terkait jumlah Warga Negara yang berada dalam radius 0 – 50 meter dilokasi penegakan Perda dan Perkada yang berhak memperoleh layanan pengobatan akibat dampak penegakan Perda dan Perkada pada Tahun 2022 diperkirakan untuk 10 Jasa pengobatan ringan dengan jumlah anggaran Rp.1.000.000. Belanja ganti rugi akibat penertiban sejumlah Rp. 3.250.000 Sampai akhir Tahun 2022 anggaran tidak terealisasi karena tidak ada Warga Negara yang terdampak akibat Penegakan Perda maupun Perkada, sebagaimana form di bawah ini :

**Form 5.A.1 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0 – 50 Meter Dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada Kab. Merangin**

NO.	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

- 2) Perkiraan daftar fasilitas umum dan fasilitas sosial serta aset Warga Negara yang berada dalam radius 0 – 50 meter di lokasi penegakan Perda dan Perkada yang terdampak sebagaimana form



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

berikut :

**Form 5.A.2 Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0 – 50 Meter Dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada Kabupaten Merangin**

No.	Jenis Fasum Dan Fasos Serta Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara	Jumlah Fasum Dan Fasos Serta Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara	Kondisi Fasum Dan Fasos Serta Aset Yang Dimiliki Oleh Warga Negara
1	2	3	4
-	-	-	-

**3)Form 5.A.3 Rekapitulasi SOP Penegakan Perda Dan Perkada Kabupaten Merangin**

No.	Standar Operasional Prosedur	Jenis Standar Operasional Prosedur Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin	Petunjuk Teknis SOP Penegakan Peraturan Daerah Petunjuk Teknis SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Pengawasan Pejabat/ Orang – Orang Penting Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Pengamanan Tempat – Tempat Penting Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Operasional Patroli	SOP belum sepenuhnya dipahami SOP belum sepenuhnya dipahami SOP belum sepenuhnya dipahami SOP belum sepenuhnya dipahami SOP belum sepenuhnya dipahami	Belum sepenuhnya menjadi acuan petugas dalam operasional lapangan
2.	Standar Operasional Prosedur PPNS	Tata Cara Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.	Belum adanya proses penegakan Perda yang bersifat Pro Justisia (Masuk Pengadilan).	Penegakan Perda masih bersifat non Yustisi.



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

4) Form 5.A.4 Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh Satpol PP Kabupaten Merangin

No.	Jenis Sarana Dan Prasarana	Jumlah Sarana Dan Prasarana	Kondisi Sarana Dan Prasarana	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1.	Gedung Kantor	1 unit	1 unit	-
2.	Kendaraan Roda 6	1 unit	1 unit	-
3.	Kendaraan roda 4	6 unit	3 unit	3 unit
4.	Kendaraan roda 2	13 unit	11 unit	2 unit
5.	Alat komunikasi	5 unit	4 unit	1 unit
6.	Komputer	10 unit	5 unit	5 unit
7.	Laptop	10 unit	8 unit	2 unit
8.	Pakaian anti huru hara	30 set	-	30 set
9.	Radio VHF	1 unit	1 unit	-

1) Form 5.A.5 Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Yang Dimiliki Oleh Satpol Pp (Satpol Pp, Ppns, Satlinmas)

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Personil Satpol Pp			Jumlah Personil Ppns Dan Satlinmas	
		P N S		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		Belum Diklat	Sdh Diklat			
1	2	3	4	5	6	7
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	43 org	43 org	403 org	5 org	1115 org

2) Form 5.A.6 Rekapitulasi Perda Dan Perkada Yang Akan Ditegakkan.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Perda Dan Perkada	Jumlah Perda Dan Perkada Yg Akan Ditegakkan		Ket
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	2 buah	2 buah	0 buah	Keterbatasan anggaran akibat dampak pandemi covid, sehingga focus hanya pada Perda/Perkada prioritas.



**3) Form 5.A.7 Rekapitulasi Warga Negara Yang Terdampak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter**

No	Jenis Penerima Layanan	Jumlah Warga Negara	Jumlah Warga Negara Yg Terdampak Penegakan Perda Dan Perkada		Jumlah Anggaran Yg Untuk Pengobatan
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
	Layanan pengobatan	-	-	-	-

**4) Form 5.A.8 Rekapitulasi Aset Yg Dimiliki Oleh Warga Negara Yg Rusak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter**

No.	Jumlah Aset Yg Dimiliki Oleh Warga Negara	Jumlah Aset Yg Dimiliki Oleh Warga Negara Yg Mengalami Kerusakan			Jumlah Anggaran Yang Untuk Pelayanan Perbaikan Aset
		Ringan	Sedang	Berat	
1	2	3	4	5	6
1.	-	-	-	-	-
2.	Dst				
3.					

**2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pada Tahun 2022 menggunakan format sebagaimana berikut:

**1) Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum	Dampak Kegiatan	Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Trantibum	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kebutuhan penyusunan SOP	Pemberian layanan tidak memiliki standar	SOP layanan Gangguan Trantibum, pelanggaran Perda/Perkada, Informasi Kebakaran dan pembantuan bencana.	
2.		Kebutuhan peningkatan kapasitas SDM(Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)	Kualitas aparatur dalam memberikan layanan kurang baik	Bintek Fungsional pol PP, Bintek PPNS dan Bintek pemberdayaan satlinmas.	
		Kebutuhan	Pemberian	1 unit ruang	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Trantibum	Dampak Kegiatan	Penghitungan Kebutuhan Mutu Minimal Layanan Trantibum	Ket
		pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP.	layanan tidak prima	pelayanan	
3.		Pelayanan perbaikan materil	Hak Warga Negara pengantian Aset yg terkena dampak penegakan Perda tidak terpenuhi	-	
4.		Pelayanan pengobatan	Hak Warga Negara memperoleh Layanan Pengobatan yg terkena dampak penegakan Perda tidak terpenuhi.	10 org	
5.		Kebutuhan lainnya			

**2) Form 5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Penyusunan SOP**

No.	Jenis SOP	Kebutuhan Sop		Harga Satuan Kegiatan Penyusunan	Besaran Biaya
		SOP Baru	Pembaharuan SOP		
1	2	3	4	5	6
1.	Petunjuk Teknis SOP Penegakan Peraturan Daerah	-	-	-	-
2.	Petunjuk Teknis SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	-	-	-
3.	Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa.	-	-	-	-
4.	Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Pengawasan Pejabat/ Orang - Orang Penting	-	-	-	-
5.	Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Pengamanan Tempat - Tempat Penting	-	-	-	-
6.	Petunjuk Teknis SOP Pelaksanaan Operasional Ptroli	-	-	-	-
7.	Tata Cara Pelaksanaan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil	-	-	-	-



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

No.	Jenis SOP	Kebutuhan Sop		Harga Satuan Kegiatan Penyusunan	Besaran Biaya
		SOP Baru	Pembaharuan SOP		
	Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.				

**3) Form 5.B.3 Penghitungan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Personil Satpol Pp, Ppns Dan Satlinmas**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Kebutuhan Pns Dan Non Pns Satpol Pp				Jumlah Kebutuhan Ppns				Jumlah Satlinmas		
		Dikisar	Diknis	Harga Satuan	Besaran Biaya	Eksisting	Kebutuhan	Harga Satuan	Besaran .Biaya	Bimtek	Harga Satuan	Besaran .Biaya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ketertarikan dan Ketertiban Umum Masyarakat							21.300.000	62.600.000			

**4)Form 5.B.4 Penghitungan Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Satpol Pp**

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gedung kantor lantai 2	1 unit	2 unit	1 unit	2.500.000.000	2.500.000.000
2.	Kendaraan operasional truk	1 unit	2 unit	1 unit	450.000.000	450.000.000
3.	Kendaraan Partroli roda 4	1 unit	3 unit	2 unit	250.000.000	500.000.000
4.	Kendaraan dinas jabatan roda 2 eselon IV	13 unit	17 unit	4 unit	25.000.000	200.000.000
5.	Kendaraan dinas jabatan eselon II	1unit	-	-	-	-
6.	Kendaraan	-	5 unit	5 unit	40.000.000	200.000.000



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA			HARGA SATUAN	BESARAN BIAYA
		EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN		
	Partroli roda 2					

**5) Form 5.B.5 Penghitungan Perkiraan Kebutuhan Pelayanan Dasar Warga Negara Yang Terkena Dampak**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Perkiraan Jumlah Warga Negara Terkena Dampak						Perkiraan Kebutuhan Anggaran Lain-Lain	Perkiraan Kebutuhan Total Anggaran
		Cidera Ringan	Cidera Sedang Atau Berat	Perkiraan Kebutuhan Anggaran Pengobatan	Aset Rusak Ringan	Aset Rusak Sedang Atau Berat	Perkiraan Kebutuhan Anggaran Perbaikan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	10 org	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000

**3. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin pada Tahun 2022 telah menetapkan perkiraan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban umum pada Tahun 2022, sebagaimana format berikut:

**1) Form 5.C.1 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Spm Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Dan Kerangka Pendanaan**

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PERKIRAAN SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada di Provinsi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban	Jasa petugas kesehatan (Layanan penggantian pengobatan)	Org	1.000.000	APB D	Target 10 orang, sampai akhir Tahun 2022 tidak terealisasi karna tidak ada yang terdampa





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	PERKIRAAN SUMBER DANA	KONDISI AKHIR
				Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa					k.
	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Perda Dan Perkada	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Belanja Ganti Rugi Akibat Penertiban	Kali	3.250.000	APBD	Target 11 orang, sampai akhir Tahun 2022 tidak terealisasi karna tidak ada yang terdampak.

**2) Form 5.C.5 Rencana Pemenuhan Sarana Dan Prasarana**

NO	Kebutuhan Pemenuhan Layanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Keluaran	Satuan	Alokasi Anggaran	Perkiraan Sumber Dana	Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada di Provinsi	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Atas Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda Dan Perkada Melalui Penertiban Dan Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa	Pengantian aset warga negara yang rusak akibat penegakan Perda	Kali	-	APBD	-

**4. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Pelaksanaan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar Ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin pada tahun 2022, sebagaimana format berikut :



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

**1) Form 5.D.1 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Spm Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum Warga Negara Fasum, Fasos Dan Aset Warga Negara**

No	keluaran (out put)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Jasa petugas kesehatan (Layanan penggantian pengobatan)	Org	10	1.00 0.00 0	-	-	-	-	APBD	Tidak ada warga negara yang terdampak akibat penegakan perda/perkada	Anggaran tdk direalisasikan
2.	Pengantian aset warga negara yang rusak akibat penegakan Perda	Kali	11	3.250.000	-	-	-	-	APBD	Tidak Ada Ganti Rugi Dan Penertiban	Dengan Tidak Adanya Dampak Yang Di Timbulkan Maka Anggaran Ganti Rugi Dan Penertiban Tidak Terealisasi

**2) Form 5.D.3 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Personil Satpol PP**

No	Keluaran (Out Put)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3. FORM 5.D.5 REALISASI PENCAPAIAN PEMENUHAN SARANA PRASARANA**

No	Keluaran (Out Put)	Satuan	Target		Realisasi		Capaian (%)		Sumber Dana	Permasalahan	Solusi
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

**B. Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan**

**1. Pengumpulan Data Damkar**

Form 5.A.1 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter dilokasi Penegakan Perda Dan Perkada

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
1	MERANGIN	87%	-	87%

Form 5.A.2 Perkiraan Rekapitulasi Daftar fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial serta Aset Warga Negara Yang Berada

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI			KET
			KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	
1.	RAIGEN	150200000249	Jangkat	Renah Kemumu	
2	TONO SUMARNO	150200000002	Jangkat	Renah Kemumu	
3	FIKTORA AZRUANSYAH	150200000003	Jangkat	Lubuk Pungguk	
4	ZORWIJAYA	150200000004	Jangkat	Lubuk Pungguk	
5	AIDIT DIKRO	150200000005	Jangkat	Muara Madras	
6	SIRDAN HAPIS	150200000017	Jangkat	Muara Madras	
7	HADIRON	150200000018	Jangkat	Muara Madras	
8	YEBI APRION	150200000019	Jangkat	Muara Madras	
9	RIONO	150200000020	Bangko	Dusun Bangko	
10	RIKI ISMAIL	150200000169	Bangko	Pematang Kandis	
11	SUARDI	150200000021	Bangko	Pematang Kandis	
12	ADI SURYADI	150200000022	Bangko	Pematang Kandis	
13	RICI ROMANSYAH	150200000023	Bangko	Pematang Kandis	
14	AGUS DWI HARTANTO	150200000025	Bangko	Pematang Kandis	
15	MAHARDIAN HUSADA	150200000024	Bangko	Pematang Kandis	
16	APRISON	150200000026	Muara Siau	Rantau Macang	
17	ILFA HIDAYAT	150200000027	Muara Siau	Rantau Macang	
18	ARI KUSMIRAN	150200000028	Muara Siau	Muara Siau	
19	ANDI GUSPARI	150200000029	Muara Siau	Muara Siau	
20	MULIA SUGANDA	150200000030	Muara Siau	Muara Siau	
21	SAHRONI	150200000031	Muara Siau	Muara Siau	
22	RIKENDI	150200000177	Muara Siau	Rantau Bidaro	
23	ZULPIKRI	150200000250	Muara Siau	Pulau Raman	
24	M. KADRI	150200000073	Muara Siau	Pulau Raman	
25	M. AGIZAR FAJRIN	150200000074	Muara Siau	Pulau Raman	
26	ANTONI SAPUTRA	150200000178	Muara Siau	Pasar Muara Siau	
27	HERLLY SAPUTRA	150200000085	Muara Siau	Pasar Muara Siau	
28	AKBA BAPADOL	150200000117	Muara Siau	Sungai Ulas	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI			KET
			KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	
29	AHMAD RIDDI GAZALI	150200000193	Sungai Manau	Sungai Manau	
30	RIKI RIKARDO	150200000179	Sungai Manau	Sungai Manau	
31	ABDUL KODAR	150200000180	Sungai Manau	Benteng	
32	NUR HADI	150200000181	Tabir	Dusun Baru	
33	HARONI	150200000091	Tabir	Dusun Baru	
34	RUKIAH	150200000086	Tabir	Dusun Baru	
35	INTAN EDRIANI	150200000087	Tabir	Pasar R. Panjang	
36	ARDIANTO KUSDI	150200000088	Tabir	Pasar R. Panjang	
37	RINA SOLEHA	150200000088	Tabir	Pasar R. Panjang	
38	HIKMAH NANI	150200000090	Tabir	Mampun	
39	RINI MARLIANI	150200000092	Tabir	Ps.Baru Rantau	
40	IRWANTO	150200000093	Tabir	Kandang	
41	ABU KASIM	150200000094	Tabir	Kandang	
42	JAMALUDIN	150200000094	Tabir	Kandang	
43	ZAM HASARI	150200000096	Tabir	Kandang	
44	SAIPUL	150200000097	Tabir	Kandang	
45	TARMIZI	150200000098	Tabir	Beluran Panjang	
46	MAT NUR	150200000099	Tabir	Beluran Panjang	
47	EDI SUSANTO	150200000100	Pamenang	Pamenang	
48	JHON	150200000101	Pamenang	Pamenang	
49	ROI MARTIN	150200000102	Pamenang	Pamenang	
50	MUHAMMAD NIZAM	150200000103	Pamenang	Pamenang	
51	MUHAMMAD NUH	150200000104	Pamenang	Pamenang	
52	SAYUTI	150200000105	Pamenang	Pamenang	
53	SEH ABDUL KADIR	150200000106	Pamenang	Pamenang	
54	ADE NURROHMAN	150200000157	Pamenang	Tanjung Gedang	
55	DEKO	150200000182	Pamenang	Tanjung Gedang	
56	ZULFIKAR	150200000107	Pamenang	Tanjung Gedang	
57	ABDUL BASIT	150200000108	Pamenang	Empang Benao	
58	MATORI	150200000109	Pamenang	Empang Benao	
59	NAZWIN	150200000110	Pamenang	Empang Benao	
60	FERIYANTO	150200000111	Pamenang	Empang Benao	
61	ARDAN KURTUBI	150200000158	Pamenang	Empang Benao	
62	KOSWARA	150200000112	Pamenang	Pematang Kancil	
63	AHMAD FADILLAH	150200000113	Pamenang	Tanah Abang	
64	WAHYU HIDAYAT	150200000114	Pamenang	Tanah Abang	
65	HERI SUGIANTORO	150200000115	Pamenang	Tanah Abang	
66	MUHAMMAD SAFARI	150200000116	Pamenang	Tanah Abang	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI			KET
			KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	
67	HARIYANTO	150200000059	Pamenang	Sungai Udang	
68	AGUNG WIJAYA	150200000059	Pamenang	Sungai Udang	
69	ENGGY NOFRAHENDI	150200000170	Tabir Ulu	Medan Baru	
70	SARING	150200000171	Tabir Selatan	Muara Delang	
71	WIDODO	150200000172	Tabir Selatan	Muara Delang	
72	SUNGKONO	150200000063	Tabir Selatan	Muara Delang	
73	SULARNO	150200000064	Tabir Selatan	Muara Delang	
74	ANDRIYO	150200000065	Tabir Selatan	Muara Delang	
75	SARIADI	150200000066	Tabir Selatan	Muara Delang	
76	EDI SUWARNO	150200000067	Tabir Selatan	Muara Delang	
77	FAIZUL FUAD	150200000068	Tabir Selatan	Muara Delang	
78	KASIM	150200000069	Tabir Selatan	Rawa Jaya	
79	MISMAN	150200000070	Tabir Selatan	Rawa Jaya	
80	RUDI EKO SAPUTRA	150200000071	Tabir Selatan	Mekar Jaya	
81	AHMAD LUKFIN	150200000072	Lembah Masurai	Nilo Dingin	
82	ENDARTO OKTA PUTRA	150200000061	Lembah Masurai	Nilo Dingin	
83	GEFFI GUSNERI	150200000046	Lembah Masurai	Nilo Dingin	
84	GERIS TOPAL	150200000050	Lembah Masurai	Nilo Dingin	
85	ENDO NOVRIADY	150200000048	Lembah Masurai	Tanjung Berugo	
86	ARLIAN	150200000051	Lembah Masurai	Tanjung Berugo	
87	ADI WIJAYA	150200000053	Lembah Masurai	Tanjung Berugo	
88	HARDIANSYAH	150200000047	Lembah Masurai	Tuo	
89	ABUL YAMIN	150200000049	Lembah Masurai	Tuo	
90	ABD AZIZ	150200000056	Lembah Masurai	Tuo	
91	ZURMAN	150200000057	Lembah Masurai	Tuo	
92	ASPIRIN	150200000058	Lembah	Tuo	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI			KET
			KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	
			Masurai		
93	M.TOTIK	150200000054	Lembah Masurai	Tuo	
94	DEDI IRAWAN	150200000052	Lembah Masurai	Tuo	
95	TATANG LOBY MEO	150200000045	Lembah Masurai	Tuo	
96	ALIF KURNIAWAN	150200000042	Lembah Masurai	Koto Rami	
97	JUANDA	150200000038	Lembah Masurai	Koto Rami	
98	RIKI ONA SUTRA FIRDAUS	150200000041	Lembah Masurai	Koto Rami	
99	HENRA	150200000044	Lembah Masurai	Rancan	
100	NIKO SETIAWAN	150200000045	Lembah Masurai	Rancan	
101	SALIM AHDI	150200000046	Lembah Masurai	Rancan	
102	SAFRION HADI	150200000047	Lembah Masurai	Pasar Masurai	
103	ALI SODIKIN	150200000040	Lembah Masurai	Pasar Masurai	
104	MUHAMMAD AIDIL ADHA	150200000035	Lembah Masurai	Pasar Masurai	
105	ABUZAR ARTOPAR	150200000039	Lembah Masurai	Rantau Jering	
106	BUSTARI	150200000034	Lembah Masurai	Rantau Jering	
107	ALI BERKAH	150200000033	Lembah Masurai	Rantau Jering	
108	ISWANTO	150200000037	Lembah Masurai	Rantau Jering	
109	ANDRI LESMANA	150200000032	Lembah Masurai	Tanjung Dalam	
110	ANDICA CHANDRA	150200000036	Lembah Masurai	Tanjung Dalam	
111	ANDIKA SAPUTRA	150200000075	Lembah Masurai	Tanjung Dalam	
112	JAKA CANIAGO	150200000076	Lembah Masurai	Muaro Pangi	
113	WOWON	150200000078	Lembah Masurai	Muaro Pangi	
114	JENNUGROHO	150200000079	Lembah Masurai	Muaro Pangi	
115	HERI SASTRO	150200000080	Lembah Masurai	Muaro Pangi	
116	EKO BAKTI IRAWAN	150200000083	Lembah	Sungai Lalang	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI			KET
			KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	
			Masurai		
117	JEKI PREN	150200000082	Lembah Masurai	Sungai Lalang	
118	YANDI PERMANA PUTRA	150200000081	Lembah Masurai	Sungai Lalang	
119	WAHIDIN MAULANA	150200000183	Lembah Masurai	Talang Asal	
120	HARJO	150200000122	Lembah Masurai	Talang Asal	
121	NOPERI	150200000123	Lembah Masurai	Talang Asal	
122	ARMIN	150200000124	Lembah Masurai	Muara Kelukup	
123	RONI PRANSISCO	150200000184	Lembah Masurai	Muara Kelukup	
124	NASADI	150200000185	Lembah Masurai	Muara Lengayo	
125	RODI ANDE SAPUTRA	150200000125	Lembah Masurai	Muara Lengayo	
126	AHMAD TAUFIK	150200000124	Lembah Masurai	Muara Lengayo	
127	HERMAN AFANDI	150200000184	Lembah Masurai	Talang Paruh	
128	ABDURAHIM	150200000186	Lembah Masurai	Talang Paruh	
129	DWIKO YUPITER	150200000126	Lembah Masurai	Durian Mukut	
130	RIDO LIWAN DARA	150200000127	Lembah Masurai	Durian Mukut	
131	JOPEN EPIKA	150200000128	Lembah Masurai	Durian Mukut	
132	DENI IKBAL	150200000130	Bangko Barat	Pulau Rengas	
133	JASMAN	150200000131	Bangko Barat	Pulau Rengas	
134	MUHAMMAD ARIZUWAN	150200000132	Bangko Barat	Pulau Rengas	
135	ASWANTURI	150200000133	Bangko Barat	Pulau Rengas	
136	YAYORI HIDAYAT	150200000159	Bangko Barat	Biuku Tanjung	
137	GEBI SAPUTRA	150200000160	Bangko Barat	Biuku Tanjung	
138	RAPSAN JANI	150200000161	Bangko Barat	Biuku Tanjung	
139	JOKI ALE PUTRA	150200000141	Bangko Barat	Biuku Tanjung	
140	M YUSMANTO	150200000121	Bangko	Bedeng Rejo	





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI			KET
			KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	
			Barat		
141	SUJIONO	150200000120	Bangko Barat	Bedeng Rejo	
142	PAIMAN	150200000119	Bangko Barat	Bedeng Rejo	
143	SIGIT PUSPITO	150200000118	Bangko Barat	Bedeng Rejo	
144	AKBAR	150200000162	Bangko Barat	Sungai Putih	
145	IWAN SETIAWAN	150200000129	Bangko Barat	Sungai Putih	
146	DIMAS TRISNOWO	150200000134	Bangko Barat	Sungai Putih	
147	REZQY PRATAMA	150200000194	Bangko Barat	Sungai Putih	
148	NASRI	150200000162	Nalo Tatan	Sungai Ulak	
149	MUJIONO	150200000134	Nalo Tatan	Sungai Ulak	
150	TRI ULVA REZKI ANISA	150200000187	Nalo Tatan	Sungai Ulak	
151	LASMINI	150200000188	Nalo Tatan	Danau	
152	MAHMUDI	150200000189	Batang Masumai	Salam Buku	
153	_SUKRI	150200000190	Batang Masumai	Salam Buku	
154	NOVERIAANGGARA	150200000135	Batang Masumai	Salam Buku	
155	_BRAMAKUMBARA	150200000163	Batang Masumai	Salam Buku	
156	SUPRIANI	150200000164	Batang Masumai	Salam Buku	
157	SYAMSUL ARIPIN	150200000165	Batang Masumai	Tambang Besi	
158	ILYAS	150200000166	Batang Masumai	Tambang Besi	
159	MAHARONI	150200000137	Batang Masumai	Pelangki	
160	MUSRIN	150200000138	Pamenang Barat	Tanjung Lamin	
161	FANDI AHMAD	150200000139	Pamenang Barat	Pinang Merah	
162	UNTUNG SUTARNO	150200000142	Pamenang Barat	Pulautujuh	
163	SUNTORO	150200000143	Pamenang Barat	Pulautujuh	
164	MUSLIKIN	150200000144	Pamenang Barat	Pulautujuh	
165	MUCHSON	150200000191	Pamenang Barat	Pulautujuh	





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI			KET
			KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	
166	DAWAKIT	150200000192	Tabir Ilir	Air Batu	
167	RUDI HARTONO	150200000200	Tabir Ilir	Air Batu	
168	TUMIRAN	150200000197	Tabir Ilir	Air Batu	
169	SURYADI	150200000196	Tabir Ilir	Air Batu	
170	YOGA GALIH MAULANA	150200000201	Tabir Ilir	Kota Raja	
171	NANDA GARI WARAS	150200000199	Tabir Ilir	Kota Raja	
172	MURSALIN	150200000137	Tabir Ilir	Tunggul Bulin	
173	SIANDRI	150200000140	Tabir Ilir	Tunggul Bulin	
174	DARIYUS	150200000195	Tabir Ilir	Tunggul Bulin	
175	SAPAR.A	150200000142	Tabir Timur	Sungai Limau	
176	SAWALUDIN	150200000143	Tabir Timur	Sungai Limau	
177	IBRAHIM	150200000144	Tabir Timur	Sungai Limau	
178	DANIKA INDRA PRATAMA	150200000236	Renah Pembarap	Muaro Panco Barat	
179	MOHD THONTOWI	150200000191	Renah Pembarap	Talang Segegah	
180	HAPAS PUNJABI	150200000198	Renah Pembarap	Talang Segegah	
181	ARIFNI	150200000204	Renah Pembarap	Durian Batakuk	
182	RANTI GUSPITA SARI	150200000200	Pangkalan Jambu	Baru Pangkalan Jambu	
183	CYNTIA PARAMITA	150200000197	Pangkalan Jambu	Baru Pangkalan Jambu	
184	M.ZODI	150200000196	Pangkalan Jambu	Baru Pangkalan Jambu	
185	WIRADAT ALVITO	150200000201	Pangkalan Jambu	Bukit Perentak	
186	ALFITRA EMPRI Z	150200000176	Pangkalan Jambu	Bukit Perentak	
187	ANRIPAL MAULANA	150200000156	Pangkalan Jambu	Bukit Perentak	
188	KURNIA PUTRA RAMADHAN	150200000154	Pangkalan Jambu	Tiga Alur	
189	ROZANDI	150200000155	Pangkalan Jambu	Tiga Alur	
190	AHMAD ZAKIAN	150200000153	Pangkalan Jambu	Tiga Alur	
191	RUDIANTO	150200000174	Pangkalan Jambu	Bungo Tanjung	
192	JANUAR HAMID	150200000175	Pangkalan Jambu	Bungo Tanjung	
193	RIZON FITRA HIDAYAT	150200000173	Pangkalan Jambu	Bungo Tanjung	
194	PEBRI ASJUANDA,AB	150200000215	Pangkalan	Sungai Jering	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI			KET
			KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	
			Jambu		
195	PANJI KURNIAWAN	150200000198	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	
196	HENDRA YANI	150200000237	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	
197	SIISMAN	150200000238	Pangkalan Jambu	Kampung Limo	
198	DERI ANGGANI	150200000210	Pangkalan Jambu	Tanjung Mudo	
199	RANDA RISTIAN	1502	Pangkalan Jambu	Tanjung Mudo	
200	JIMMY	150200000212	Pangkalan Jambu	Tanjung Mudo	
201	JOGE PRATAMA	150200000176	Jangkat Timur	Baru	
202	ZEGI MULYADI	150200000156	Jangkat Timur	Baru	
203	ANDES SAPUTRA	150200000154	Jangkat Timur	Talang Tembago	
204	TOTO AGUSTIA	150200000155	Jangkat Timur	Talang Tembago	
205	ANGGI MARJEKSEN	150200000153	Jangkat Timur	Talang Tembago	
206	EDI GUNAWAN	150200000174	Jangkat Timur	Tanjung Benuang	
207	MUS MULIADI	150200000175	Jangkat Timur	Tanjung Benuang	
208	ADI MARYONO	150200000173	Jangkat Timur	Tanjung Benuang	
209	ARIS SRI WALUYO	150200000151	Renah Pamenang	Meranti	
210	TOPIK ANDIKA	150200000152	Renah Pamenang	Meranti	
211	ASEP SUHARDI	150200000150	Renah Pamenang	Bukit Bungkul	
212	MUHAMMAD MUKHLASIN	150200000149	Renah Pamenang	Bukit Bungkul	
213	MUHAMAD MUKHI ZUDIN	150200000148	Renah Pamenang	Bukit Bungkul	
214	SUPRIYATNO	150200000147	Renah Pamenang	Bukit Bungkul	
215	KARJITO	150200000146	Renah Pamenang	Rasau	
216	ABDUL RAHMAN	150200000145	Renah Pamenang	Rasau	
217	AHADI MUHARTO	150200000168	Renah Pamenang	Lantak Seribu	
218	SOIMAN	150200000167	Renah	Lantak Seribu	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NOMOR REGISTRASI			KET
			KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	
			Pamenang		
219	M.FATKHUL HUDA	150200000001	Pamenang Selatan	Tambang Emas	
220	GUNANTO	150200000016	Pamenang Selatan	Pulau Bayur	
221	MARDI AZWAN	150200000014	Pamenang Selatan	Pulau Bayur	
222	AMRON SAHADI	150200000012	Pamenang Selatan	Pulau Bayur	
223	FERDI PUTRA JHOVIAN SYAH	150200000013	Margo Tabir	Sido Rukun	
224	PUJA AKBAR	150200000229	Margo Tabir	Lubuk Bumbun	
225	PONIMAN	150200000011	Tabir Lintas	Sido Harjo	
226	ENDRIANTO	150200000010	Tabir Lintas	Sido Harjo	
227	MUKRIYATNO	150200000009	Tabir Lintas	Sido Harjo	
228	RANGGA ADIPA	150200000008	Tiang Pumpung	Sekancing Ilir	
229	FAJAR WAHYUDI	150200000007	Tiang Pumpung	Sekancing Ilir	
230	ARI WINDRA JAYA	150200000006	Tiang Pumpung	Sekancing Ilir	
231	DIKO ADRIANSYAH	150200000206	Tiang Pumpung	Beringin Sanggul	
232	ARDIANTO	150200000213	Tiang Pumpung	Baru Bukit Punjung	
233	HENDRI	150200000248	Tiang Pumpung	Rantau Limau Kapas	
234	HELMI	150200000230	Tiang Pumpung	Rantau Limau Kapas	
235	SODRIN HOLIL	150200000231	Tiang Pumpung	Rantau Limau Kapas	
236	ARDIANTO	150200000232	Tiang Pumpung	Baru Sungai Sakai	
237	ANDI PUTRA	150200000233	Tiang Pumpung	Baru Sungai Sakai	
238	ZULMAN	150200000235	Tiang Pumpung	Baru Sungai Sakai	



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

Form 5.A.3 Rekapitulasi SOP Kegiatan Penegakan Perda/ Perkada

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK		NIK	NO. KK	TEMPAT LAHIR	TGL. LAHIR	ALAMAT
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	> 60 tahun	Sehat	Berkebutuhan Khusus					
1	2	3		4					5		6	7	8	9	10
1	UDIN	L					45		Sehat		-	-			Mentawak
2	ABU BAKAR	L					51		Sehat						Mentawak 2
3	SYAWAL	L					47		Sehat						Sungai Ulak
4	ADI SAPUTRA	L					58		Sehat						Waskita

**2. Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar**

Form 5.B.1 Penghitungan Kebutuhan Penerima layanan SPM Trantibumlinmas  
Sub Urusan Trantibum

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT	A. Jumlah komandan lapangan	21	$21 + 8 \times 1.789.375.000$	1789375000
			B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran	8		
			C. Harga unit per jenis	1.789.375.000		
		2. Kesiapan Sarana Pusdalops Damkar				
			A. Jumlah rig di pusdalops	1	$1 + 1 + 1 + 6.500.000$	19.500.000
		B. Jumlah perangkat komputer	1			
		C. Jumlah sound sistem/sirine toa	1			
		D. Harga unit per jenis	6.500.000			
2	Penyediaan	1.	A. Jumlah	7	7+	6.750.000



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
	sistem pelaporan masyarakat/ <i>panic button</i>	Nomor tunggal dan aplikasi smart phone	server B. Jumlah Perangkat Komputer C. Harga unit per jenis	1 250.000 HANDPHONE + KOMPUTER 6.500.000	$1+250.000+6.500.000$	

Form 5.B.2 Penghitungan Kebutuhan Penyusunan SOP

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos	8	$8+1+178937500$	
			B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar	1		
			C. Harga satu unit	1.789.375.000		
		2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	8	$8+8+64.942.500$	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	8		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil	64.942.500 : 8		
						64.942.500



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
			damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya			
		3. Pembelian bahan mobil damkar /kapal damkar /unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	8		
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	100 LITER	+100 LITER+ 16.150	12.920.000/SATU KALI ISI
			C. Harga per liter bahan bakar	16.150		
		4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas	201		
			B. Jumlah pelatihan	-		
			C. Biaya per pelatihan	-	A*B)*C	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	16	16+ 11.769.003.00	1.883.045.00



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	11.769.003.00		
		2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas	16	16+ 11.769.003.00	1.883.045.00
			A. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	11.769.003.00		
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman	-	A*B	
			B. Harga per jumlah/volume	-		
		2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air	-		
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun	-	(A*B)*C	
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon air per unit	-		
4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	201	201 + 1.400.000	281.400.000
			B. honorarium piket jaga	1.400.00 PER BULAN		
		2. Pelaknaan	A. jumlah petugas pemadam	201	201	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIA YA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
		pemadaman kebakaran	kebakaran			
			A. honorarium per kejadian kebakaran	-		

Form 5.B.3 Layanan Pelaksanaan Penyelamatan Dan Evakuasi

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/ BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	1. Penyediaan mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	A. Jumlah pos sektor/pos damkar	8	A*B* C	
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	-		
			C. Harga satu unit			
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	A. Jumlah unit mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	-	(A*B) *C	
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	-		
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )			
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	A. Jumlah unit mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	-	(A*B) *C	
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan ( <i>rescue</i> )	-		
			C. Harga per liter bahan bakar			
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/ unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan		A*B	





**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
			(rescue)			
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit			
3	Kesiapan petugas penyelamatan (rescue)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (rescue)	A. Jumlah petugas penyelamatan (rescue)	24	A*B	
			B. Honorarium piket jaga	-		
		2. Pelaksanaan penyelamatan (rescue)	A. Jumlah petugas penyelamatan (rescue)	24	A*B	
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan	-		
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas	24	(A*B) *C	
			B. Jumlah pelatihan	-		
C. Biaya per pelatihan						

Form 5.B.4 Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH / BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi	12	12 + 4000.000	48.000.000
			B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi	4.000.000		
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan	-	A*B	
			B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan	-		
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKI)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar	338	A*B	
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi	-		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH / BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
		n				
		2. Penyediaan Sarana satlakar	A. Jumlah satlakar	338	(A *B)*C	
	B. Jumlah/unit/jenis /paket sarana satlakar		-			
	C. Harga per jumlah/unit/jenis /paket					
		3. Pembinaan operasi nalisasi satlakar	A. Jumlah satlakar	338	A*B	
			B. Biaya per kegiatan satlakar	-		

Form 5.B.5 Layanan Pendataan, Inspeksi Dan Investigasi Pasca Kebakaran

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH / BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendataan	1.Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan kajian potensi risiko bahaya kebakaran	A. Jenis tenaga ahli		(A*B* C*D)+(E*F))	
			B. Jenis potensi risiko			
			C. Jumlah orang			
			D. Jumlah bulan kerja			
			E. Jumlah pertemuan			
			F. Atk dan penggandaan laporan			
		2.Penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran	A. Jenis tenaga ahli		(A*B* C)+(D *E))	
			B. Jumlah orang			
			C. Jumlah bulan kerja			
			D. Jumlah pertemuan			
			E. Atk dan penggandaan laporan			
		3.Penyediaan tenaga ahli yang kompeten	A. Jenis tenaga ahli		(A*B* C)+(D *E))	
			B. Jumlah orang			
			C. Jumlah			



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH / BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIPERLUKAN
		dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	bulan kerja			
			D. Jumlah pertemuan			
			E. Atk dan penggandaan laporan			
		4. Diskusi publik terhadap dokumen rencana induk sistem proteksi kebakaran yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	A. Penyediaan tempat dan meja, kursi serta <i>sound system</i>		((A+B+C)+((D+E)*F+(D+G)*H)+I)	
			B. Penyediaan peralatan pendukung ( <i>infocus, layar, computer set</i> )			
			C. Penggandaan materi/atk/dokumentasi			
			D. Akomodasi dan konsumsi			
			E. Transport peserta			
			F. Jumlah peserta			
			G. Honor tenaga ahli			
			H. Jumlah tenaga ahli laporan			
			I. Laporan			
		5. Pelaporan kejadian kebakaran	A. Frekuensi pendataan kejadian kebakaran		A*B*C)+D	
			B. Jumlah petugas pendataan			
			C. Honorarium petugas pendataan			
			D. Biaya belanja bahan/atk penyusunan laporan			
2	Inspeksi	1. Inventarisasi sarana	A. Jumlah bangunan gedung		(A*B)*C	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH / BIAYA SATUAN	RUMUS	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
		proteksi kebakaran bangunan gedung	B. Jumlah petugas			
			C. Biaya per kegiatan			
		2. Inspeksi sarana proteksi kebakaran bangunan gedung	A. Jumlah bangunan gedung		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah petugas			
			C. Biaya per kegiatan			
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas Inspeksi	A. Jumlah petugas		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah pelatihan			
			C. Biaya per pelatihan			
3	Investigasi pasca kebakaran	4. Inventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas		$(A*B)*C$	
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung			
			C. Biaya kegiatan			
		5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas		$A*B*C*D$	
			B. Frekuensi investigasi			
			C. Jumlah sarana pendukung			
			D. Biaya per kegiatan investigasi			

### 3. Penyusunan rencana Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Form 5.C.1 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Merangin	24	8	238	2	1000



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

4. Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Form 5.D.1 Rekapitulasi Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Pemadaman Dan Evakuasi)

NO.	KABUPATEN /KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	2	3	4	5
	MERANGIN	87%	-	87%

Form 5.D.2 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Operasi Non Kebakaran)

NO	Kabupaten / Kota	Operasi Non Kebakaran							
		Kecelakaan Transportasi	Water Rescue	Animal Rescue	Penyelamatan Pada Ketinggian	Penyelamatan Pada Bangunan Runtuh	Penanganan Pohon Tumbang	Penanganan Percobaan Bunuh Diri	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Merangin	0	0	10	0	0	0	0	-

Form 5.E.1 Capaian Target Spm (Rekapan)

NO	KABUPATEN / KOTA	TOTAL PERSENTASE (%) CAPAIAN SPM KEBAKARAN (LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN)	JUMLAH OPERASI NON KEBAKARAN	KORBAN JIWA				JUMLAH TAKSIRAN ASET	
				JUMLAH KORBAN JIWA YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH KORBAN MENINGGAL DUNIA	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA BAKAR	JUMLAH KORBAN MENGALAMI LUKA FISIK LAINNYA	JUMLAH TAKSIRAN ASET YANG BERHASIL DISELAMATKAN	JUMLAH TAKSIRAN KERUGIAN ASET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MERANGIN	87%	10	-	-	-	-	± 235 JUTA	± 645JUTA



#### 4.1.6 Bidang Urusan Sosial

##### A. Pengumpulan Data

Form 6.A.1 Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE LANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SESEORANG TIDAK MENGENAL	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	TERDAPAT KEKERASAN TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Penyandang Disabilitas																
1	Eni Susilianti	1502084603680002	Perempuan	Desa Sungai Sahut, 06-03-1968	Jln. Bintang SPA Ds. Sungai Sahut, Kec.Tabir Selatan	Rumah	istri	1502081612090121	-	kawin	tidak bekerja	tuna rungu /wicara	-	-	-	
2	Novan Harianto	1502083011120001	Laki-Laki	Desa Sungai Sahut, 30-11-2012	Jln. Cibrut SPA Ds. Sungai Sahut, Kec.Tabir Selatan							tuna rungu /wicara	-	-	-	
3	Tia Septiana	15173084909340002	Perempuan	Muara Delang SPC,04-09-1993	Jln. Rio Jayo Muara Delang SPC, Kecamatan Tabir Selatan	Rumah	anak	1502082910190000	-	belum kawin	tidak bekerja	tuna rungu /wicara	-	-	-	
4	Sri Dwi Lestari	1502085010980001	Perempuan	Desa Sungai Sahut, 05-01-1998	Sungai Sahut Kec.Tabir Selatan	Rumah	anak	1502081112090080	-	belum kawin	tidak bekerja	tuna rungu /wicara	-	-	-	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE LANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SEORANG TIDAK MENGEURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MERANGIN MERANGIN MERANGIN; TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Mila Dian Nur	1502085203030001	Perempuan	Ds. Sinar Gading, 02/03/2003		Rumah	anak	1502082106210001	-	belum kawin	tidak bekrja	tuna rungu /wicara	-	-	-	
6	Saminten	1502214111760001	Perempuan	Tanjung Rejo,01-11-1976	Tanjung Rejo Rt.006 rw.004 Kec.Margo Tabir	Rumah	istri	1502211612090050	-	kawin	tidak bekrja	fisik	-	-	-	
7	Zulkipli	1502060101500015	Laki-Laki	Pamenang,01/01/1950	Rt.019/Rw.010 Pamenang,Kecamatan Pamenang							fisik	-	-	-	
8	Asmawati	1502234110870001	Perempuan	desa muara langeh,01/10/1987	desa muara langeh kec.Tabir Barat	Rumah	istri	1502232710090017	-	kawin	IRT	fisik	-	-	-	kanker getah benin
9	M.Jainem	1502214708670001	Perempuan	desa tanjung rejo ,01/10/1936	Rt.004/Rw.002 desa tanjung rejo Kecamatan Margo Tabir	Rumah	famili	1502212903110002	-	cerai mati	tidak bekrja	fisik	-	-	-	
10	Defi Saputra	1502020212830002	Laki-Laki	Kel.Pasar atas Bangko Rt.002/Rw.001 ,02/12/1983	Kel.Pasar atas Bangko Rt.002/Rw.001 Kec.Bangko	Rumah	kepala keluarga	1502020812110009	-	kawin	wira swasta	fisik	-	-	-	korban luka bakar
Dst																



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE LANTRAAN				KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SEORANG TIDAK MENGENAL	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MERANGIN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN		
JUMLAH TOTAL: 10																	
Anak																	
1	Natan Muhammad Al Aqla	1502022805090002	Laki-Laki	Jl.M.Taher Lingk.Bangko Tinggi, 28/04/2009	Jl.M.Taher Lingk.Bangko Tinggi	rumah	anak	1502022212090115	-	belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	anak yatim	
2	Zahratul Salsabila	1502165008080002	Perempuan	Desa air Batu, 10/08/2008	Desa air Batu Kec.Renah Pembarap					belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-		
3	Akci Rotama	1502161707110000	Laki-Laki	Desa air Batu, 17/07/2011	Desa markeh Kec.Renah Pembarap	rumah	anak	1502161701120001	-			-	-	-	-		
4	Yolan Dewanda Syam	1502051309050003	Laki-Laki	Jl.Cendrawasih no.34 Rt.029/Rw.004 Kel,Pematang Kandis Kec.Bangko,13-09-2005	Jl.Cendrawasih no.34 Rt.029/Rw.004 Kel,Pematang Kandis Kec.Bangko							-	-	-	-		
5	Albi Ananda Fahri	1502232904160001	Laki-Laki	Desa Ngaol, 29-04-2016	Desa Ngaol Kecamatan Tabir Barat	rumah	anak	1502020307130016	-	belum kawin	-	-	-	-	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	Sulton Juwantoro	1502020106110002	Laki-Laki	Pematang Kandis Rt.021 rw.005,'01/06/2011	Pematang Kandis Rt.021 rw.005 Kecamatan Bangko	rumah	anak	1502021903120003	-	belum kawin	-	-	-	-	-	anak yatim	





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE LANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SEORANG TIDAK MENGERUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MERANGIN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN	
7	Azzuradaya Putri	1502025603120001	Perempuan	Ds.Langling Rt.003, 16-03-2012	Ds.Langling Rt.003 Kecamatan Bangko	rumah	anak	1502022108190008	-	belum kawin	-	-	-	-	-	anak yatim
8	Nahdatul Aulia	15020266101110001	Perempuan	Komplek IBRD Lrg.Rahmat Rt.012/Rw.007, 26-10-2011	Komplek IBRD Lrg.Rahmat Rt.012/Rw.007 Pmtg.Kandis Kec.Bangko	rumah	anak	1502022112090069	-	belum kawin	-	-	-	-	-	anak yatim
9	Abizar al fharizi	1502020706190002	Laki-Laki	rt.036 link,mensawang kel.dusun bangko,07-06-2019	rt.036 link,mensawang kel.dusun bangko kecamatan bangko	rumah	anak	1502020307130016	-	belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	kanker leukimia
10	Dihan indah lestrari	1502022810070001	Perempuan	rt.15.rw.04 kelurahan pmt.kandis,28-10-2007	rt.15.rw.04 kelurahan pmt.kandis kecamatan bangko	rumah	famili	1502020908180010	-	belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	-
11	Messy putri ramadani	1502114302100001	Perempuan	Rt.01 desa mentawak,03-02-2010	Rt.01 desa mentawak, Kecamatan Nalotantan	rumah	anak	1502111910090016	-	belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	kanker pembuluh darah
12	Seva erni mayanti	1502206005030001	Perempuan	Rt.17 Tambang emas, '20/05/2003	Rt.17 Tambang emas,kecamatan pamenang selatan	rumah	anak	1502200111090076	-	belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	-
13	Miskli Maulidin	1502206903070001	Laki-Laki	Rt.17 Tambang emas, '20/03/2007	Rt.17 Tambang emas, kecamatan pamenang selatan	rumah	anak	1502200111090042	-	belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	-
14	Elsa	1502214106130001	Perempuan	Tanjung rejo, '01/06/2013	Tanjung rejo, Kecamatan Margo Tabir	rumah	anak	1502213006150001	-	belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	-



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE LANTRAAN				KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SEORANG TIDAK MENGEURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MENDAPAT KEKERASAN DARI LINGKUNGAN; TETAPI MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN		
15	Yani	1502115012130001	Perempuan	Dusun Petekun desa baru nalo, '01/12/2013	Dusun Petekun desa baru nalo Kecamatan Nalo tantan	rumah	anak	1502110111090089		belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-		
D																	
st																	
JUMLAH TOTAL:15 Orang																	
Lanjut usia																	
1	Cicih	3206125803660003	Perempuan	rt.021/rw.005 dusun 3 desa sungai kapas	rt.021/rw.005 dusun 3 desa sungai kapas kec.bangko							-	-	-	-		
2	Jibah	1502044107320006	Laki-Laki	Desa Gelanggang,01/02/1932	Desa Gelanggang,Kecamatan Sungai Manau	Rumah	famili	1502040904100003	-	cerai mati	tidak bekrja	-	-	-	-		
3	Maimunah	1502026005340001	Perempuan	Rt.016/Rw.006 Kel.Dusun Bangko, 06/05/1934	Rt.016/Rw.006 Kel.Dusun Bangko, Kec.Bangko	Rumah	kepala keluarga	1502020404170005	-	cerai mati	tidak bekrja	-	-	-	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
4	Tumi	1502215210570000	Perempuan	Rt.008/Rw.003 desa tanjung rejo, 21/10/1957	Rt.008/Rw.003 desa tanjung rejo, Kecamatan Margo Tabir	Rumah	istri	1502211612090053	-	kawin	IRT	-	-	-	-		
5	Amir	1502122401660001	Laki-Laki	Desa Salam Buku ,24/01/1966	Desa Salam Buku ,Kecamatan Batang Masumai	Rumah	kepala keluarga	1502123010090001	-	kawin	tidak bekrja	-	-	-	-		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE LANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SEORANG TIDAK MENGEURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MERANGIN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN	
6	Maskur	1502121302640001	Laki-Laki	Desa Salam Buku ,13/02/1964	Desa Salam Buku ,Kecamatan Batang Masumai	Rumah	kepala keluarga	1502122810090040	-	kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	-
7	Fitri Yeni	1502125008890002	Perempuan	Desa Salam Buku ,10/08/1989	Desa Salam Buku ,Kecamatan Batang Masumai	Rumah	anak	150212271180002	-	belum kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	-
8	Aisah	1502045010460001	Perempuan	Desa seringat, 10/10/1946	Desa seringat, Kecamatan Sungai Manau				-			-	-	-	-	-
9	Nurwah	1502164107600006	Perempuan	Desa air Batu,01/07/1960	Desa air Batu Kec.Renah Pembarap	Rumah	kepala keluarga	1502160712090101	-	cerai mati	tidak bekrja	-	-	-	-	-
10	Lukman	1502161608590000	Laki-Laki	Desa markeh ,05/08/1959	Desa markeh Kec.Renah Pembarap	Rumah	kepala keluarga	1502161812090027	-	kawin	tidak bekrja	-	-	-	-	-
11	Nayu	1502096305460001	Laki-Laki	Desa Nilo Dingin,03-05-1946	Desa Nilo Dingin Kec.Lembah Masurai	Rumah	kepala keluarga	1502091609210006	-	cerai mati	tidak bekrja	-	-	-	-	-
12	Nasiha	1502094707500001	Perempuan	Desa Nilo Dingin ,07-07-1950	Desa Nilo Dingin Kec.Lembah Masurai	Rumah	kepala keluarga	1502091409210006	-	cerai mati	tidak bekrja	-	-	-	-	-
13	Surma	1672014208420001	Perempuan	Desa Nilo Dingin Kec.Lembah Masurai, 02-08-1942	Desa Nilo Dingin Kec.Lembah Masurai	Rumah	kepala keluarga	1502090912210008	-	cerai mati	tidak bekrja	-	-	-	-	-
14	Wahidin	1502020505550003	Laki-Laki	Rt.004/Rw.003 Kel.Pasar Atas Bangko , '05-05-1955	Rt.004/Rw.003 Kel.Pasar Atas Bangko , Kec.Bangko							-	-	-	-	-



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT	TINGGAL DI DALAM KELUARGA	HUB DGN KRT DAN KEPALA KELUARGA	NO KK	TINGGAL DI LUAR KELUARGA (PANTI, TERMINAL, PASAR, JALANAN DLL)	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN /SEKOLAH	JENIS DISABILITAS	KONDISI KETRE LANTRAAN			KET
													KELUARGA/MASYARAKAT/SEORANG TIDAK MENGURUS	RENTAN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN DARI LINGKUNGAN	MERANGIN MENGALAMI TINDAK KEKERASAN, PERLAKUKAN SALAH EKSPLOITASI, DAN	
15	Misiyem	1502216306470001	Perempuan	desa tanjung rejo, 23/06/1947	Rt.005/Rw.004 desa tanjung rejo, Kecamatan Margo Tabir	Rumah	famili	1502211612090006	-	cerai mati	tidak bekrja	fisik	-	-	-	-
D st													-	-	-	-
JUMLAH TOTAL: 15 Orang																

Form 6. A.8 Data Dan Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Untuk Pemenuhan Pelayanan dasar  
Pada SPM Bidang Sosial

NO	PELAYANAN DASAR YANG MEMB	JUMLAH SARANA PRASARANA	KONDISI SARANA PRASARANA	TINGKAT KERUSAKAN
----	---------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

		SHELTER/ RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANTARAN	DAPUR UMUM	LDP	MANAJEMEN LOGISTIK	MANAJEMEN SHELTER	KEPOSKOAN	KSB	TRC BENCANA	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sosial																			
1	Jumlah total penyandang disabilitas terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	0	0		3 Unit	0	1 Unit		1 Paket	0	0		2 Orang						
2	Jumlah total anak terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	0	0		3 Unit	0	1 Unit		1 Paket	0	0		2 Orang						
3	Jumlah total lanjut usia terlantar yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	0	0		3 Unit	0	1 Unit		1 Paket	0	0		2 Orang						



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JUMLAH PENERIMA PELAYANAN DASAR YANG MEMBUTUHKAN SARANA PRASARANA	JUMLAH SARANA PRASARANA											KONDISI SARANA PRASARANA			TINGKAT KERUSAKAN			
		SHELTER/ RUMAH SINGGAH	PUSKESOS	CALL CENTER	KENDARAAN KHUSUS KEDARURATAN	TRC KETELANTARAN	DAPUR UMUM	LDP	MANAJEMEN LOGISTIK	MANAJEMEN SHELTER	KEPOSKOAN	KSB	TRC BENCANA	SANGAT BAIK	BAIK	KURANG BAIK	RENDAH	SEDANG	BERAT
4	Jumlah total gelandangan pengemis yang memerlukan layanan di luar panti/lembaga	0	0		3 Unit	0	1 Unit		1 Paket	0	0		2 Orang						
	Total sarana prasarana yang ada	0	0		3 Unit	0	1 Unit		1 Paket	0	0		5 Orang						
	Jumlah sarana prasarana yang dibutuhkan	1 Unit	1 Unit		5 Unit	1 Unit	3 Unit		1 Paket	1 Unit	1 Unit		7 Unit						
Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota																			
1	Estimasi jumlah korban bencana kabupaten/kota						100 Orang		100 Orang										
	Total sarpras yang ada						9 Unit		9 Unit										
	Jumlah sarpras yang dibutuhkan						15 Unit		15 Unit										



**B. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial**

Form 6.B.6 penghitungan Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	RUMUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti		<b>38.18.00</b>	<p>RUMUS:</p> <p>X = Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantr, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p>Y = Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasisosial dasar di luar panti.</p> <p>Indikator</p>



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	RUMUS
	panti		A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis	a. Layanan data dan pengaduan		(a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet.	<b>58,119,101</b>	RUMUS = (a x b) + c + d + e
			B. Standar sarana dan prasarana LKS/ rumah singgah	b. Layanan kedaruratan		(a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat.	<b>26,307,500</b>	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = c + d
			1. Standar SDM				<b>0</b>	Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d
			2. Standar sarana dan prasarana				<b>0</b>	Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	RUMUS
				c. Penyediaan permakanaan		(a) Penerima layanan per tahun;(b) Jumlah hari pemberian layanan permakanaan dalam 1 (satu) tahun;(c) Indeks permakanaan per orang per hari;(d) Transport petugas.	<b>15,44,000</b>	RUMUS = (a x b x c) + d
				d. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian;(b) Pembelian perlengkapan mandi;(c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden;(d) Pembelian alas kaki;(e) Transport	<b>150,02</b>	RUMUS = a + b + c + d + e



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	RUMUS
						petugas.(h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra);		
				e. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda;(b) Kacamata;(c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu;(d) Alat bantu dengar;(e) Kruk;(f) Tripod;(g) Tongkat putih;(i) Transport petugas;(j) Transport penerima layanan.	0	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>PENERIMA LAYANAN</b>	<b>STANDAR LAYANAN</b>	<b>INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN</b>	<b>TARGET/PEMENUHAN SPM</b>	<b>KOMPONEN BIAYA</b>	<b>PERHITUNGAN</b>	<b>RUMUS</b>
				f. Penyediaan perbekalan kesehatan		(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	<b>0</b>	RUMUS = a + b + c + d + f
				g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	-	RUMUS = a + b + c + d
				h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyanda		(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial;	<b>150</b>	RUMUS = a + b + c



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	RUMUS
				<p>ng disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan</p>		<p>(b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.</p>		
				<p>i. pengemis dan</p> <p>j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak</p>		<p>(a) Transport petugas;  (b) Transport penerima layanan.</p>	<p><b>150</b></p>	<p>RUMUS = a + b</p>
				<p>k. Akses ke layanan pendidikan</p>		<p>(a) Transport petugas; (b) Transport penerima</p>	<p><b>0</b></p>	<p>RUMUS = a + b</p>



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	RUMUS
				n dan kesehatan dasar		layanan.		
				l. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	0	Sesuai dengan standar biaya
				m. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	0	Sesuai dengan standar biaya
				n. Layanan rujukan		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	0	RUMUS = a + b



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

Form 6.B.7 Penghitungan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	
	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhannya di wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	1,150,010	<b>100</b>	RUMUS: X = Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya. Y = Populasi Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di wilayah kabupaten/kota. Jumlah LKS/ Rumah Singgah untuk Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti. Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi).	
			A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan makanan		(a) Paket pembelian bahan makanan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian	<b>280,000,150,010</b>	RUMUS = a + b + c *a = d x e x f		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PE MENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN	KET
						layanan permakanan per kejadian bencana dalam 1(satu) tahun; (f) Indeks permakanan per orang per hari.				
			B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks sandang per orang per kejadian.	<b>100,150,001</b>	RUMUS = a + b + c *a = d x e		
			1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	<b>25,150,003</b>	RUMUS = a + b + c *a = d x e		
			2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	<b>0</b>	RUMUS = a + b + c *a = d x e		
				e. Pelayanan dukungan		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan	<b>0</b>	RUMUS = a + b + c *a = d x e		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN	KET
				psikososial		sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.				

C. Penyusunan Data

Form 6.C.1 Rencana Pemenuhan Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Pantii

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI (Tahun-n)	SUMBER DA NA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1	SOSIAL	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakaman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APB D	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	6,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR 'TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan patroli	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APB D	132 Orang	500,000,000	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama yang layak huni kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APB D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DA NA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR 'TAHUN N + 5		
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5					
									TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APB D	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000
		Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di dalam panti kewenangan Kabupaten	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APB D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR 'TAHUN N + 5		
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5					
									TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
			n/Kota																							
		Pemberian bimbingan fisik mental, spritual, dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
		Pemberian bimbingan aktivitas sehari-hari	Jumlah peserta bimbingan aktivitas hidup sehari-hari kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DA NA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR 'TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Aktivitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pembelian layanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR 'TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN	RP (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Pemb erian pelayan an reunifikasi kelua rga	Jumlah orang yang mendapa tkan pelayana n reunifika si keluarga kewenan gan Kabupate n/Kota	Rehabilit asi sosial dasar penyanda ng disabilita s terlantar di dalam panti	Progr am rehab ilitasi sosial	Or ang	0	APB D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NO	PEM ENU HAN LAYAN AN	SUB KEGI ATAN	KEL UAR AN	KEGI ATAN	PRO GRA M	SAT UAN	ANG GAR AN(T)	SUM BER DAN	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDI SI AKHIR
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TAHUN N + 5	25	
TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)
	SOSIAL	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permukiman sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APBD	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	66,000,000	132 Orang
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan patroli	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APBD	132 Orang	500,000.00	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	500	66,000,000	132 Orang	66,000,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

OR	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN(Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
		Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama yang layak huni kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	132 Orang







LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN(Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
		Pemb erian bimbingan aktivitas sehari-hari	Jumlah peserta bimbingan aktivitas harian kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APB D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Aktivitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APB D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemb erian layanan penelusuran	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APB D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

No	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN(Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
		keluarga	penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	tas terlantar di dalam panti																				
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Form 6.C.2 Rencana Pemenuhan Penyandang Anak Terlantar Dalam panti



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KON DISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	SOSIAL	Pengasuhan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan pengasuhan kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APBD	132 Orang	50,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	132 Orang
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dna kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APBD	132 Orang	50,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	132 Orang
		Penyediaan asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan perbekalan kesehatan di Luar	jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KON DISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Panti	kesehatan di Luar Panti kewenangan Kabupaten/ Kota																						
		Pemberian bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	Jumlah pesertabimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	Jumlah peserta bimbingan aktifitas hidup sehari-hari kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktifitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses kelayanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti	Jumlah orang yang mendapatkan pengasuhan keluarga pengganti kewenangan Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di Luar Panti	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial anak terlantar di Luar Panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Form 6.C.3 Renana Pemenuhan Lansia Terlantar Dalam Panti

NO	PEMENUHAN LAYANAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGG	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI DAN KERANGKA															KONDISI
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
							ARAN (Tahun-n)		TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	AK HIR TA HU N N + 5
	SOSIAL	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar permakamanan sesuai dengan gizi maksimal kewenangan Kabupaten/Kotora	Rehabilitasi sosial dasar penyanggandisabilitas terlanterdi dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APBD	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang terjadi dalam 1 tahun kewenangan patroli	Rehabilitasi sosial dasar penyanggandisabilitas terlanterdi dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APBD	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1		Penyediaan Asrama yang mudah diakses	Jumlah orang yang terakses asrama yang layak huni kewenangan Kabupaten/Kotora	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Penyediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantuan dan alat peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kotora	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
		Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan didalam panti kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanter di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pemberian bimbingan fisik, mental dan spritual, kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental dan spritual, kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlanter di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD				0	0		0	0		0	0		0	0		0	0





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		Pemberian bimbingan aktivitas sehari-hari	Jumlah peserta bimbingan aktivitas sehari-hari kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aktivitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlar di dalam panti	Program rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR LUAR PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5		
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5					
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25											
		Pemb erian layan an penel usura n kelua rga	Jumlah orang yang mendapat kan pelayan an penelus uran keluarg a kewena ngan Kabupa ten/Kota	Reha bilitas i sosial dasar penya ndang disabi litas terlan tar di dalam panti	Progra m rehabili tasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pemb erian pelay anan reunifi kasi kelua rga	Jumlah orang yang mendapat kan pelayan an reunifi kasi keluarg a kewena ngan Kabupa ten/Kota	Reha bilitas i sosial dasar penya ndang disabi litas terlan tar di dalam panti	Progra m rehabili tasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Form 6.C.4 Rencana Pemenuhan Gelandangan Dan Pengemis Lansia dalam Panti



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUITA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUITA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUITA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUITA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUITA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	SOSIAL	Penyediaan permukiman	Jumlah orang yang menerima pakainya dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di Luar Panti	rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APBD	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakainya dan kelengkapan	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan	rehabilitasi sosial	Orang	91,530,800	APBD	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang	500,000	66,000,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTA)	RP (JUTA)	
			gkapa n lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	tar di Luar Panti																				
	Penyediaan asrama yang mudah diakses		Jumlah orang yang terakses asrama layak huni kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di Luar Panti	rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	
		Penyeediaan alat bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di Luar Panti	rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	20 Orang	1,500,000	30,000	20 Orang	1,500,000	30,000	20 Orang	1,500,000	30,000	20 Orang	1,500,000	30,000	20 Orang	1,500,000	30,000	
		Penyeediaan Perbekalan kesehatan di Luar Panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di Luar	rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	
			perbekalan kesehatan di Luar Panti kewenangan Kabupaten /Kota	Panti																				
		Pemberian bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental dan spritual kewenangan Kabupaten /Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di Luar Panti	rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pemberian bimbingan aktivitas hidup	Jumlah peserta bimbingan aktifitas	Rehabilitasi sosial dasar penyandang	rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	
		sehari-hari	asidup sehari-hari kewenangan Kabupaten/Kota	disabilitas terlan tar di Luar Panti																				
		Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan bagi penyandang disabilitas	jumlah orang yang terpe nuhi kebut uhan pemb uatan nomor induk kependu dukan bagi penyandang disabilitas	Reha bilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di Luar Panti	rehab ilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUATA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUATA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUATA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUATA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUATA)	RP (JUTA)	
			/Kota																					
	Aktifitas ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		Jumlah orang yang mendapatkan akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di Luar Panti	rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUA)	RP (JUTA)		
		Pemb erian pelay anan penel usuran kelua rga	Juml ah orang yang mend apatkan pelay anan penel usuran kelua rga kewenangan Kabu paten /Kota	Reha bilitas i sosial dasar penyandang disabil itas terlan tar di Luar Panti	rehab ilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pemb erian pelay anan reunifikasi kelua rga	Juml ah orang yang mend apatkan pelay anan reunifikasi kelua rga kewenangan	Reha bilitas i sosial dasar penyandang disabil itas terlan tar di Luar Panti	rehab ilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR Luar Panti DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUJUTAI)	RP (JUTA)	
			Kabupaten /Kota																					
		Pemulasaran	Jumlah pemulasaran kewenangan Kabupaten /Kota	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di Luar Panti	rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan rehabilitasi sosial dasar anak terlan tar di Luar Panti	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pembinaan rehabilitasi sosial anak terlan tar di Luar Panti	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlan tar di Luar Panti	rehabilitasi sosial	Orang	0	APBD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Form 6.C.5 Rencana Pemenuhan Korban Bencana Alam Dan Sosial



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1	SOSIAL	Penyediaan Perumahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan permukiman	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, serta gelandang dan pengemis di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	39,75%		APB D	132 Orang	500,000	666,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1				sosial																				
		Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandang dan Pengemis yang mendapa	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang peng			APB D		132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KEJUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1			tkan Sandang	emis di luar panti sosial																				
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandang dan Pengemis yang	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang			APB D		132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1			men dapatkan Alat Bantu	dang pengemis di luar panti sosial																				
2	SOSIAL	Penyediaan Permkanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandang dan Peng	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	39,75%		APB D	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1			emis yang men dapat kan perm akan an	serta gelan dang peng emis di luar panti sosia l																				
	Penye diaan Sanda ng	Juml ah Peny anda ng Disa bilita s Terla ntar, Anak Terla ntar, Lansia Terla ntar, Serta Gela ndan	Reha bilita si Sosia l Dasar Peny anda ng disab ilitas terla ntar, Anak terla ntar, lanju t usia				APB D		132 Ora ng	500 ,00 0,0 0 0 0 0	6 6, 0 0 0 0 0	1 3 2 0 ra n g	500, 000	66, 000 ,00 0	1 3 2 0 ra n g	500 ,00 0	66, 000 ,00 0	132 Ora ng	5 0 0 0 0	66, 000 ,00 0	132 Ora ng	500 ,00 0	6 6, 0 0 0 0 0	132 Ora ng



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1			g dan Pengemis yang mendapatkan Sandang	terlantar, serta gelang dang pengemis di luar panti sosial																				
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanju			APB D		132 Orang	1,500,000	198,000	132,000	500,000	66,000	132,000	1,500,000	198,000	132,000	198,000	132,000	1,500,000	198,000	132,000	





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1			Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan dampak Alat Bantu	usia terlar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial																				
3	SOSIAL	Penyediaan Perumahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	39,75%		APB D	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
1			ntar, Serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan permukiman	ntar, lanjut usia terlanjar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial																					
	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar,				APB D		132 Ora ng	500 ,00 0.0	66,000 000	132 0 ra ng	500,000	66,000	132 0 ra ng	500,000	66,000	132 0 ra ng	500,000	66,000	132 0 ra ng	500,000	66,000	132 0 ra ng	500,000



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
			a Terlantar Serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Sandang	Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial																				
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terla	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas			APB D		132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang	1,500,000	198,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1			ntar, Lansia Terlantar Serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Alat Bantu	terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial																				
4	SOSIAL	Penyediaan Perumahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar,	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	39,75%	APBD		132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KELUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25									
1			Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan	disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial																				
	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Disabilitas	Rehabilitasi Sosial Dasar Peny				APB D		132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang	500,000	66,000	132 Orang





LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KEJUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5			
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			bilitas s Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar Serta Gelandang dan Pengemis yang mendapatkan Alat Bantu	r Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial							0, 0 0 0 0	0			0				0 0				0, 0 0 0 0	



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

NO	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	SUB KEGIATAN	KEJUARAN	KEGIATAN	PROGRAM	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Tahun-n)	SUMBER DANA	TARGET KINERJA PROGRAM PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DALAM PANTI DAN KERANGKA															KONDISI AKHIR TAHUN N + 5	
									TAHUN N + 1			TAHUN N + 2			TAHUN N + 3			TAHUN N + 4			TAHUN N + 5				
									TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)	TARGET	HARGA SATUAN (JUTA)	RP (JUTA)		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25										
5	SOSIAL	Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana Alam yang Mendapat Makanan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	20%		APB D	500 Orang	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	250,000	500,000	500 Orang





**D. Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar Sosial**

Form 6.D.5 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar,  
Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA	PERMASALAHAN	SOLUSI
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	FISIK	KEUANGAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	19,23 %	61,437,100	100 %	61,189,220			DAU	1. Kurang updatenya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Merangin sehingga menjadi hambatan dalam menghitung total data layanan SPM. 2. Ketatnya peraturan terkait dengan pelaksanaan dana Bantuan Sosial/Hibah di Kabupaten Merangin sehingga mempersulit Dinas SOSPPPA dalam melaksanakan kegiatan berupa bantuan sosial maupun hibah 3. Akurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kurang valid, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan 4. Rendahnya alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin	1. Segera melakukan Pemutakhiran Mandiri Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bagi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), serta meningkatkan kesejahteraan TKSK di Kabupaten Merangin. 3. Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar menaikkan alokasi anggaran untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin dimasa yang akan datang.
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	20%	61,437,100	75%	61,189,220			DAU		
3	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100 %	61,437,100	100 %	61,189,220			DAU		
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	20%	61,437,100	100 %	61,189,220			DAU		



LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2022

5	Persentase korban bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat	%	20%	70,119, 100	55%	62,382, 184			DAU	
---	---	---	-----	----------------	-----	----------------	--	--	-----	--

## **4.2 PENCAPAIAN SPM**

### **4.2.1 URUSAN PENDIDIKAN**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah secara minimal yang berhak diperoleh setiap warganya. Dalam Pasal 3 aturan tersebut juga dinyatakan bahwa SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Mengingat SPM adalah urusan wajib yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Merangin, maka secara substantif jenis pelayanan dan indikatornya harus terintegrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran. Jika tidak, maka sulit bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat menjamin pelaksanaan SPM dalam kegiatan pembangunan, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik yang paling dasar. Oleh sebab itu salah satu indikasi dari dapat diterapkannya SPM ini adalah adanya SPM yang masuk dalam sistem perencanaan maupun penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selain itu, masuknya SPM kedalam perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu tolok ukur dari kinerja atau keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No. 79/2007 Pasal 10 Ayat (1) bahwa Rencana Pencapaian dan Penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah.

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota yaitu :

##### **a. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini oleh Kabupaten/Kota :**

- Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 6 buah Buku Gambar per peserta didik per semester
- Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 set paling sedikit 12 warna peserta didik per semester.

- Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1 Bidang PAUD, Kependidikan lain atau Psikologi.
- Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Profesi Guru PAUD.
- Persentase Kepala Satuan PAUD yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1.
- Persentase Kepala Satuan PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik.
- Persentase Kepala Satuan PAUD yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non Formal dari Lembaga Pemerintah yang berwenang.

**b. Pelayanan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) oleh Kabupaten/Kota:**

- Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 paket Buku Teks Pembelajaran per peserta didik per tahun.
- Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun.
- Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1.
- Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik.
- Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1.
- Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik.
- Persentase Kepala SD paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1.
- Persentase Kepala SD yang memiliki Sertifikat Pendidik.
- Persentase Kepala SD yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah
- Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat.

**c. Pelayanan Pendidikan Dasar (Sekolah Menengah Pertama) oleh Kabupaten/Kota:**

- Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1.

- Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik.
- Persentase Kepala SMP paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1.
- Persentase Kepala SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik.
- Persentase Kepala SMP yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan
- Calon Kepala Sekolah.
- Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat.

#### d. Pelayanan Pendidikan Kesetaraan

- Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 Paket Modul Belajar per peserta didik per tahun.
- Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun.
- Persentase Tutor yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1.
- Persentase Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1.
- Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat.

## 2. Target Pencapaian SPM

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
<b>A</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	
1	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 6 buah Buku Gambar per peserta didik per semester	100%
2	Jumlah Peserta Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 set paling sedikit 12 warna peserta didik per Semester	100%
3	Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1 Bidang PAUD, Kependidikan lain atau Psikologi	65%
4	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Profesi Guru PAUD	50%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
5	Persentase Kepala Satuan PAUD yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	50%
6	Persentase Kepala Satuan PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik	50%
7	Persentase Kepala Satuan PAUD yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non Formal dari Lembaga Pemerintah yang berwenang	50%
<b>B</b>	<b>Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)</b>	
1	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 paket Buku Teks Pembelajaran per peserta didik per tahun	100%
2	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun	100%
3	Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	100%
4	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	80%
5	Persentase Kepala SD paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	100%
6	Persentase Kepala SD yang memiliki Sertifikat Pendidik	100%
7	Persentase Kepala SD yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	70%
8	Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat	100%
<b>C</b>	<b>Pendidikan Dasar (Sekolah Menengah Pertama)</b>	
1	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 paket Buku Teks Pembelajaran per peserta didik per Tahun	100%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
2	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun	100%
3	Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	100%
4	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	70%
5	Persentase Kepala SMP paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	100%
6	Persentase Kepala SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik	100%
7	Persentase Kepala SMP yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	100%
8	Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat	100%
<b>D</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>	
1	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 Paket Modul Belajar per peserta didik per tahun	100%
2	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun	100%
3	Persentase Tutor yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	70%
4	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	70%
5	Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat	100%

**3. A  
l  
o  
k  
a  
s  
i  
A**

**nggaran**

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari, APBD sebesar Rp. 382.980.440.435,00,- rincian sebagai berikut :

**A BELANJA OPERASI**

BELANJA PEGAWAI	272.536.508.814
BELANJA BARANG DAN JASA	48.207.690.079
BELANJA HIBAH	10.204.700.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>330.948.898.893</b>

**B BELANJA MODAL**

BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	18.348.226.992
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	20.694.522.681
BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	128.961.948
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	12.859.829.921
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>52.031.541.542</b>

**4. Dukungan Personil**

Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar maka dibutuhkan dukungan Personil yang memadai, berikut Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2022 :

NO	UNIT KERJA	PNS (Eselon/Orang)					JML	HONOR DAERAH
		II	III A	III B	IV	STAF		
1	Kepala Dinas	1					1	-
2	Sekretaris Dinas		1	-	3	14	31	19
3	Bidang PAUDNI dan PNF			1	3	5	9	3
4	Bidang Pembinaan SD			1	3	4	8	4
5	Bidang Pembinaan SMP			1	3	5	9	2
6	Bidang Pembinaan Ketenagaan			1	3	7	11	2
7	Bidang Kebudayaan			1	3	2	6	5
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>35</b>

**5. Hasil Capaian SPM**

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN 2022
<b>A</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>		
1	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 6 buah Buku Gambar per peserta didik per semester	100%	100%
2	Jumlah Peserta Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 set paling sedikit 12 warnapeserta didik per semester	100%	100%
3	Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1 Bidang PAUD, Kependidikan lain atau Psikologi	65%	35,46%
4	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Profesi Guru PAUD	50%	5,89%



<b>NO</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET TAHUN 2021</b>	<b>CAPAIAN 2022</b>
5	Persentase Kepala Satuan PAUD yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	50%	50%
6	Persentase Kepala Satuan PAUD yang memiliki Sertifikat Pendidik	50%	22,06%
7	Persentase Kepala Satuan PAUD yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah untuk PAUD Formal atau Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Kepala Satuan PAUD Non Formal dari Lembaga Pemerintah yang berwenang	50%	22,06%
<b>B</b>	<b>Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)</b>		
1	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 paket Buku Teks Pembelajaran per peserta didik per tahun	100%	70%
2	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun	100%	70%
3	Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	100%	91%
	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	80%	58%
5	Persentase Kepala SD paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	100%	78%
6	Persentase Kepala SD yang memiliki Sertifikat Pendidik	100%	58%
7	Persentase Kepala SD yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	70%	30%
8	Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat	100%	50%
<b>C</b>	<b>Pendidikan Dasar (Sekolah Menengah Pertama)</b>		
1	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 paket Buku Teks Pembelajaran per peserta didik per Tahun	100%	60%
2	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per	100%	60%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2021	CAPAIAN 2022
	peserta didik per tahun		
3	Persentase Guru yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	100%	97%
4	Persentase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik	70%	62%
5	Persentase Kepala SMP paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	100%	90%
6	Persentase Kepala SMP yang memiliki Sertifikat Pendidik	100%	62%
7	Persentase Kepala SMP yang memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	100%	53%
8	Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat	100%	58,12%
<b>D</b>	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>		
1	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 1 Paket Modul Belajar per peserta didik per tahun	100%	100%
2	Jumlah Peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu memperoleh 2 Set Buku Tulis dan Alat Tulis per peserta didik per tahun	100%	100%
3	Persentase Tutor yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	70%	60%
4	Persentase Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah D-IV/S1	70%	50%
5	Persentase Tenaga Penunjang Lainnya yang berpendidikan paling rendah memiliki Ijazah SMA/Sederajat	100%	80%
	<b>PENCAPAIAN RATA-RATA</b>	<b>83,62%</b>	<b>61,13%</b>

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, masih mengalami kendala yang antara lain :

- Penyampaian laporan dari lapangan baik dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan selalu terlambat, sehingga

langkah-langkah penyelesaian laporan SPM Bidang Pendidikan terhambat.

- Adanya pemotongan anggaran/ rasionalisasi dari beberapa kegiatan yang juga menghambat didalam pencapaian target realisasi anggaran.

#### **b. Solusi**

- Meningkatkan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendidikan Kecamatan secara berkelanjutan sehingga diharapkan keterlambatan didalam penyampaian laporan bisa diminimalisir juga untuk mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dilapangan.
- Memperbaiki/mengubah petunjuk operasional kegiatan yang tekena pemotongan anggaran/rasionalisasi agar sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan.

### **4.2.2 URUSAN KESEHATAN**

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Kabupaten Merangin sebagai berikut:

<b>N O</b>	<b>JENIS LAYANANDASAR</b>	<b>MUTU LAYANAN DASAR</b>	<b>PENERIMA LAYANAN DASAR</b>	<b>PERNYATAAN STANDAR</b>
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayibaru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

<b>N O</b>	<b>JENIS LAYANANDASAR</b>	<b>MUTU LAYANAN DASAR</b>	<b>PENERIMA LAYANAN DASAR</b>	<b>PERNYATAAN STANDAR</b>
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usiaproduktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usialanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atasmendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderit a Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa(ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN DASAR</b>	<b>MUTU LAYANAN DASAR</b>	<b>PENERIMA LAYANAN DASAR</b>	<b>PERNYATAAN STANDAR</b>
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

## 2. Target Pencapaian SPM

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN DASAR</b>	<b>TARGET</b>
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%

## 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah,

yang bersumber dari APBD Dengan rincian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	PAGU (Rp)	
		TARGET	REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp. 155.769.100	Rp. 155.769.100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp. 500.964.700	Rp. 116.270.500
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Rp. 55.755.300	Rp. 19.049.800
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Rp. 23.087.000	Rp. 23.087.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Rp. 23.025.000	Rp. 23.025.000
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp. 137.622.950	Rp. 137.622.950
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp. 36.378.500	Rp. 36.378.500
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp. 29.147.500	Rp. 29.147.500
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp. 26.062.000	Rp. 26.062.000
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp. 8.500.000	Rp. 8.500.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Rp. 50.094.750	Rp. 50.094.750
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Rp. 27.121.500	Rp. 27.121.500

#### 4. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan Pelayanan Dasar di Kabupaten Merangin. Dinas Kesehatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2022 dilaksanakan oleh semua Pegawai kesehatan baik yang berada di Dinas Kesehatan dan puskesmas sehingga dapat tercapai beberapa indikator kerja bidang kesehatan.

#### 5. Hasil Pencapaian SPM

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	83.5 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	83.4 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	83.5 %
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	76.5 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikandasar	100%	91.95 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	74.01 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	97.62 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	79.3 %
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes	100%	98.3 %

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI
	Melitus		
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	98 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	100 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	50.97 %
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>	<b>84.75%</b>

## 6. Permasalahan dan Solusi

Berikut permasalahan Internal dan eksternal SPM Bidang Kesehatan;

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Masih rendahnya capaian pelayanan kesehatan ibu hamil menurut (K4), dari target : 100%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi nakes ANC yang menurut standar.</li> <li>2. Penguatan P4K di puskesmas.</li> <li>3. Optimalisasi kelas ibu hamil yang berkualitas.</li> <li>4. Koordinasi LS dan LP untuk Peningkatan Cakupan K4 di Puskesmas.</li> <li>5. Penguatan kemitraan bidang dan dukun.</li> <li>6. Penyediaan sarana prasarana ANC di puskesmas, pustu, poskesdes.</li> <li>7. Penyediaan sarana kelas Bumil.</li> </ol>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih rendahnya capaian target pelayanan kesehatan ibu bersalin menurut standar (fasilitas kesehatan) dari target : 100 %	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas, pustu, poskesdes menurut standar untuk pertolongan persalinan.</li> <li>2. Orientasi P4K di puskesmas.</li> <li>3. Penguatan koordinasi LS dan LP upaya peningkatan persalinan Faskes</li> <li>4. Optimalisasi puskesmas PONE.</li> <li>5. Promosi persalinan aman di faskes di wilayah puskesmas.</li> <li>6. Peningkatan kemitraan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan untuk cakupan program.</li> </ol>

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih tingginya kematian Neonatal</li> <li>Tenaga kesehatan penolong persalinan dipuskesmas belum semua kompeten tatalaksana Neonatal Esensial</li> <li>ANC belum berkualitas</li> <li>Deteksi dini Resti Bumil belum optimal</li> <li>Kasus Resti Bumil belum ditangani dengan adekuat</li> <li>Kasus rujukan belum ditindak lanjutisegera</li> <li>Perilaku pendidikan masyarakat terhadap kepedulian &amp; antisipasi kasus Resti Neonatal</li> <li>P4K belum optimal</li> <li>Kelas ibu</li> <li>Penggunaan dana</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan SDM kesehatan tentang tatacara laksana Neonatal Esensial</li> <li>Peningkatan SDM kesehatan tentang PPGDON</li> <li>Kualitas kelas ibu Hamil</li> <li>Kasus Resti Bumil/ Neonatal ditemui dini di tindak lanjuti sesuai standarrujukan efektif</li> <li>Pemenuhan sasaran prasarana puskesmas untukbidan desa</li> <li>Pemberdayaan dan sosialisasi masyarakat dukungan &amp; pengetahuan P4K</li> <li>Koordinasi LS dan LP</li> <li>Kualitas ANC, PNC dan Kunjungan Neonatal</li> <li>Penggunaan dana jampersal</li> <li>Kemitraan bidan dandukun</li> </ol>
4.	Pelayanan kesehatan balita	Masih rendahnya cakupan pelayanan kesehatan balita dari target 100%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi fungsi posyandu di puskesmas.</li> <li>Penigkatan integrasi LS dan LP.</li> <li>Optimalisasi kelas ibu Balita yang berkualitas.</li> <li>Peningkatan kompetensi Nakes tentang kelas Ibu balita.</li> </ol>
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Belum tercapainya target pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar kelas I SD Sampe kelas VII dari target 100%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya sarana dan prasarana UKS disekolah</li> <li>Peningkatan kompetensi Guru UKS di sekolah.</li> <li>Optimalisasi Sweaping penjangingan kesehatan di puskesmas.</li> <li>Peningkatan koordinasi LS dan LP upaya peningkatan cakupan program.</li> </ol>
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>Masih kurangnya peran serrta masyarakat terhadap penyakit menular</li> <li>Masih belum maksimalnya pembentukan posbindu PTM di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perlunya sosialisasi dan promosi kesehatan usia produktif</li> <li>Meningkatkan peran petugas di puskesmas dan peran sertakader kesehatan.</li> </ol>



NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
		Desa untuk pelayanan penduduk usia produktif	
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Belum tercapainya pelayanan kesehatan lanjut usiadari target 100%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi GIATRI bagi petugas puskesmas.</li> <li>2. Home Care lansia Resti di puskesmas.</li> <li>3. Peningkatan dan optimalisasi posyandu lansia di puskesmas.</li> <li>4. Peningkatan kompetensi GIATRI bagi petugas puskesmas.</li> <li>5. Home Care lansia Resti di puskesmas.</li> <li>6. Peningkatan dan optimalisasi posyandu lansia di puskesmas</li> <li>7. Pembinaan posyandu lansia di puskesmas.</li> <li>8. Terbentuknya PERBUB Santu Lansia di Fasilitas Kesehatan.</li> <li>9. Puskesmas Santun Lansia`</li> <li>10. Koordinasi LP dan LS dalam Upaya peningkatan cakupan program.</li> <li>11. Peningkatan Kerjasama jejaring Fasilitas pelayanan kesehatan upaya peningkatan pelayanan Santun Lansia.</li> </ol>
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya penganggaran dana dalam penanggulangan P2PTM</li> <li>2. Masih kurangnya laporan dari puskesmas</li> <li>3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di posbindu P2PTM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar adanya kebijakan yang serius dalam penanggulangan dalam P2PTM</li> <li>2. Peningkatan program P2PTM di Dinas Kesehatan Kab. Merangin</li> <li>3. Perlunya promosi penyuluhan terkait penyakit tidak menular dan pentingnya hidup sehat.</li> </ol>
9.	Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Militus (DM).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih Kurangnya penganggaran dana dalam penanggulangan P2PTM</li> <li>2. Masih kurangnya laporan dari puskesmas Kurangnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar adanya kebijakan yang serius dalam penanggulangan dalam P2PTM</li> <li>2. Peningkatan program P2PTM di Dinas Kesehatan Kab. Merangin</li> <li>3. Perlunya promosi penyuluhan terkait penyakit tidak menular dan Pentingnya hidup Sehat</li> <li>4. Perlunya monitoring dan</li> </ol>

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
		kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan di posbindu P2PTM 4. Masih kurangnya sosialisasi terkait program DM di puskesmas 3. Tidak adanya pertemuan evaluasi kegiatan P2PTM dengan puskesmas	evaluasi program DM yang maksimal di puskesmas 5. Perlu diadakan rapat evaluasi kegiatan P2PTM 6. Perlunya dilakukan inovasi-inovasi kebijakan program P2PTM di kabupaten Merangin 7. Perlunya strategi dalam penanggulangan penyakit P2PTM terkait kedalam kebijakan.
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1. Belum adanya kebijakan dalam penanganan pasien jiwa	1. Membentuk Tim Satuan petugas dalam penanganan Pasien Jiwa dan Membuat regulasi penanganan Pasien Jiwa
11.	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	1. Target dari pusat sangat tinggi 2. Penemuan Rendah 3. Penganggaran Rendah	1. Tingkatkan Cakupan Penemuan 2. Tambah Tenaga terutama Analis di Labor 3. Tambah Anggaran
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	1. Masih Kurangnya sosialisasi ke puskesmas 2. tidak ada pertemuan dengan puskesmas dikarenakan anggaran tidak ada untuk pertemuan 3. Alat Laboratorium yang kurang dan tenaga Analis	1. Tambah Anggaran 2. Perlu diadakan pertemuan dengan puskesmas 3. Adanya pelatihan/tambah tenaga Analis 4. Kerja sama untuk sektor untuk penjangkaran/pelacakan di tempat-tempat yang berisiko HIV. 5. Sosialisasi dengan masyarakat tentang bahaya HIV.

### 4.2.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

#### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana pada SPM pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

## 2. Target Pencapaian SPM

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022
I	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1 Dokumen
2	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	13 Unit
3	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	9 Unit
II	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen
2	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5 Unit
3	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	13 Unit

## 3. Alokasi Anggaran

Adapun dana yang dianggarkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin tahun 2022 adalah:

No	Bidang SPM	Dana Yang Dianggarkan
1	Bidang Air Minum	Rp. 11.615.414.000
2	Bidang Air Limbah	Rp. 6.123.240.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 17.738.654.000</b>

## 4. Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin dalam Melaksanakan Pelayanan Dasar Tahun 2022 sebanyak **10** orang

## 5. Hasil Pencapaian SPM

Pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui sarana air minum jaringan perpipaan (PDAM, SPAM Perdesaan, keran/hidran umum, Pamsimas dan lainnya) dan sarana air minum bukan jaringan perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap air) pada Kabupaten Merangin.

Pencapaian SPM Sub Bidang Air Limbah adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui pelayanan SPALD-S akses dasar, pelayanan SPALD-S akses aman dan pelayanan SPALD-T akses aman pada seluruh kabupaten/kota di Kabupaten Merangin.

Berikut merupakan pencapaian SPM Air Minum dan Air Limbah di Kabupaten Merangin pada Tahun 2022:

**Tabel Capaian SPM Air Minum dan Air Limbah Tahun 2022**

No	Bidang SPM	Total Rumah Tangga dalam Wilayah	Capaian SPM Air Minum	
			Rumah Tangga Terlayani	Persentase Capaian
1	Bidang Air Minum	103.643	68.2164	65,82%
2	Bidang Air Limbah	103.643	33.960	32,77%

Berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sub bidang air minum pada Kabupaten Merangin yang telah terdata diketahui bahwa persentase capaian adalah sebesar 65,82% rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan air minum. Sedangkan sisanya sebesar 34,18% rumah tangga di Kabupaten Merangin belum mendapatkan pelayanan air minum. Pencapaian SPM tersebut masih berada dibawah target Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya Sub Bidang Air Minum Tahun 2020-2024 dengan target 88% air minum dan Tahun 2030 dengan target 100% air minum.

Bila melihat pada capaian diatas, untuk dapat memenuhi target Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya Sub Bidang Air Minum diperlukannya suatu peningkatan pelayanan dengan memberikan suatu perhatian serta kerja sama yang lebih antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi target yang ada.

Sedangkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sub bidang air limbah di Kabupaten Merangin yang telah terdata diketahui bahwa persentase capaian adalah sebesar 32,77% rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan air limbah. Sedangkan sisanya sebesar 67,23% rumah tangga di Kabupaten Merangin belum mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pencapaian SPM tersebut masih berada jauh dibawah target Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya Sub Bidang Sanitasi Tahun 2020-2024 dengan target 85% Sanitasi dan Tahun 2030 dengan target 100% Sanitasi.

Rendahnya capaian SPM Air Limbah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi disebabkan karena masih minimnya rumah tangga yang melakukan penyedotan air limbah domestik pada tangki septik individual secara berkala minimal 5 tahun sekali. Dengan capaian SPM sub bidang air limbah tersebut, diperlukannya suatu sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan peningkatan pelayanan pengolahan air limbah domestik agar mampu memenuhi target Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya Sub Bidang Air Limbah.

## 6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi serta tindak lanjut dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum dan Air Limbah pada Kabupaten Merangin Adalah:

<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>	<b>Rencana Tindakan</b>
A. Data tidak lengkap dan kurang valid	Dilakukannya pengumpulan data secara lengkap pada instansi atau dinas terkait dan penganggaran untuk melakukan pengambilan data primer	Akan dimasukkan ke rencana kerja untuk pendataan data primer
B. Minimnya koordinasi antar instansi atau dinas	Mengadakan rapat koordinasi secara rutin	Mengadakan rapat untuk pembahasan tersebut
C. Kurangnya anggaran dana untuk memenuhi target capaian SPM	Penambahan anggaran dana SPM	Tersedianya anggaran dana untuk meningkatkan pemenuhan SPM

#### **4.2.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dijelaskan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah secara minimal yang berhak diperoleh setiap warganya. Dalam Pasal 3 aturan tersebut juga dinyatakan bahwa SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.

Mengingat SPM adalah urusan wajib yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Merangin, maka secara substantif jenis pelayanan dan indikatornya harus terintegrasi ke dalam perencanaan dan penganggaran. Jika tidak, maka sulit bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dapat menjamin pelaksanaan SPM dalam kegiatan pembangunan, khususnya yang terkait dengan pelayanan publik yang paling dasar. Oleh sebab itu salah satu indikasi dari dapat diterapkannya SPM ini adalah adanya SPM yang masuk dalam sistem perencanaan maupun penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selain itu, masuknya SPM kedalam perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu tolok ukur dari kinerja atau keberhasilan daerah dalam pelaksanaan pembangunan sebagaimana disebutkan dalam Permendagri No. 79/2007 Pasal 10 Ayat (1) bahwa Rencana Pencapaian dan Penerapan SPM merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar pada urusan wajib Pemerintah Daerah.

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota yaitu :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100 % (Sesuai dengan jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena lokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota)	Setiap Tahun

## 2. Target Pencapaian SPM

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	KET
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>	50 %	Tidak Terjadi Bencana
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagikorban bencana	16 Unit	
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	20 Unit	
3	Pembangunan kembali rumah bagikorban bencana	16 Unit	
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	1 Lokasi	
<b>B</b>	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	50 %	Tidak ada relokasi
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	20 Unit	
2	Subsidi uang sewa	16 Unit	
3	Penyediaan rumah layak huni	20 nit	

### 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bidang Perumahan ditetapkan dalam APBD tahun 2022 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD Sebesar RP. 49.999.900,-

#### Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Serta Alokasi Anggaran Capaian SPM Kabupaten Merangin Tahun 2022

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SPM 2022		PAGU	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
01.00	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab/Kota	1 Dok	1 Dok	49.999.900	49.999.900

### 4. Dukungan Personil

Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar maka dibutuhkan dukungan Personil yang memadai, berikut Personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tahun 2022:

**Tabel 1**  
**Keadaan Sumber Daya Pegawai Per Bidang**

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1	SEKRETARIAT	9	19
2	BIDANG PERUMAHAN	9	10
3	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	8	22
4	BIDANG PERTANAHAN	8	9
JUMLAH		34	60

**Tabel 2**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jabatan**

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	GOLONGAN				KET
			I	II	III	IV	
1	ESELON II B	1				1	



NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	GOLONGAN				KET
			I	II	III	IV	
2	ESELON III A	1				1	
3	ESELON III B	3			2	1	
4	ESELON IV A	11			10	1	
Jumlah		<b>16</b>			<b>12</b>	<b>4</b>	

## 5. Hasil Pencapaian SPM

Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2022 tidak terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan kategori parah sehingga Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Merangin baru melaksanakan pengumpulan data yaitu pada tahap Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi atau Kota dan tidak menganggarkan pada indikator kinerja Kegiatan Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

### a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;

- Tidak ada bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dikarenakan selama tahun 2022 tidak terjadi bencana di Kabupaten Merangin.
- Tidak ada rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak ada rumah yang rusak akibat bencana.
- Tidak ada pembangunan kembali rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak ada rumah yang hancur/ rusak berat akibat bencana.
- Tidak ada pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana dikarenakan tidak ada bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah di Kabupaten Merangin.

### b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Tidak ada Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dikarenakan tidak ada Tanah atau Bangunan yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Merangin.

- Tidak ada Subsidi Uang Sewa akibat relokasi Program Kabupaten/kota
- Tidak ada Penyediaa Rumah Layak Huni karena tidak ada masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2022	REALISASI 2022	KET
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>50 %</b>	<b>50 %</b>	
<b>TIDAK TERJADI BENCANA</b>				
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi	16 Unit	0 %	Tidak ada akses sewa rumah layak huni karena tidak
2	Rehabilitasi rumah bagi korban	20 Unit	0 %	Tidak ada rehabilitasi rumah karena
3	Pembangunan kembali rumah bagi	16 Unit	0 %	Tidak ada pembangunan kembali karena
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	1 Lokasi	0 %	Belum ada SK Penetapan relokasi bencana
<b>B</b>	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah</b>	<b>50 %</b>	<b>0 %</b>	Tidak adanya relokasi
<b>TIDAK ADANYA RELOKSI</b>				
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	20 Unit	0 %	Tidak ada penggantian hak karena tidak ada relokasi
2	Subsidi uang sewa	16 Unit	0 %	Tidak ada subsidi uang sewa karena tidak ada relokasi
3	Penyediaan rumah layak huni	20 Unit	0 %	Tidak ada penyediaan rumah layak huni untuk program relokasi
<b>PENCAPAIAN RATA-RATA</b>		<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	

## **6. Permasalahan Dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat masih mengalami kendala antara lain

- Untuk tahun 2022 Kab. Merangin belum menganggarkan untuk Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana karena masih melakukan Tahap pengumpulan data terlebih dahulu yaitu Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota
- Belum adanya data penetapan bencana di Kabupaten Merangin dengan kategori parah yang menyebabkan kerusakan pada Rumah Warga, sehingga Pemerintah Kabupaten Merangin belum menganggarkan untuk penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.
- Belum adanya data penetapan relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten Merangin sehingga Pemerintah Kabupaten Merangin tidak memberikan Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah, tidak ada subsidi uang sewa dan tidak ada penyediaan rumah layak huni akibat relokasi

### **b. Solusi :**

- Melakukan Tahap Pendataan terlebih dahulu untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yaitu Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah, dilanjutkan dengan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dan melakukan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat , Rumah Susun dan Rumah Khusus.
- Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pendataan Rumah Korban Bencana untuk percepatan pendataan Rumah yang mengalami kerusakan parah.
- Pemerintah Kabupaten Merangin membuat Surat Keputusan (SK) Rumah Korban Bencana dengan kategori parah dan SK Rumah jika terjadi relokasi akibat program pemerintah sehingga dapat menganggarkan

kedepannya untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah

#### 4.2.5 URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

##### a. Satuan Polisi Pamong Praja

##### 1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan / atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Trantibumlinmas untuk daerah adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Daerah Sebagaimana Berikut yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Transtibumlinas untuk Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
01.00	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten Merangin	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % (sesuai Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan berupa barang, jasa dan SDM sesuai dengan yg ditetapkan dalam Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar

##### 2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya sesuai dengan ketentuan. Untuk target pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin Tahun 2022 sebagaimana Form dibawah ini :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Kabupaten Merangin	100 %	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	Tuntas paripurna

### 3. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD, APBN dan Sumber dana lain yang sah. Untuk anggaran pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian SPM yang meliputi Peningkatan kapasitas Satpol PP, PPNS dan Satlinmas, Sarana dan prasarana serta anggaran khusus untuk pemenuhan Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai mutu layanan dasar Ketentraman dan Ketertiban umum dengan alokasi anggaran Rp. 4.250.000 Namun tidak terealisasi karena tidak ada warga negara yang terdampak akibat penegakan perda/perkada.

### 4. Dukungan Personil

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak :

- Pejabat Struktural : 17 orang
- Pejabat Fungsional Tertentu : 16 orang
- Fungsional Umum : 10 orang
- Pegawai Tidak Tetap : 403 Orang

## 5. Hasil Pencapaian SPM

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan. Untuk capaian target pencapaian SPM Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin Tahun 2022 sebagaimana Form dibawah ini :

### CAPAIAN TARGET CAPAIAN SPM SUB URUSAN TRANTIBUM

No	Jenis Pelayanan dasar	Jumlah penegakan perda / perkada sesuai mutu			Pelayanan ganti rugi			Capaian SPM	Kategori
		Jumlah pelaksanaan penegakan perda/perkada	Jumlah penegakan perda/perkada yg sesuai mutu layanan dasar	Capaian (%)	Jumlah Warga Negara yg terkena dampak penegakan perda/perkada yg berhak mendapat layanan	Jumlah Warga Negara yg terkena dampak penegakan perda/perkada yg terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin	48	48	100	-	-	-	100	Tuntas paripurna

## 6. Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Dalam melaksanakan pelayanan dasar satpol pp kabupaten merangin mengalami beberapa permasalahan anatra lain :

- Kegiatan ini yang melibatkan aparat keamanan di luar satpolpp tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.
- Kurang proaktif kepala desa dalam melengkapi anggota satlinmas di desanya.

### b. Solusi

untuk memecahkan permasalahan tersebut maka satpol pp kabupaten merangin memiliki solusi antar lain :

- Kegiatan hanya dilakukan oleh satpolpp saja tanpa melibatkan aparat keamanan diluar satpolpp.
- Kegiatan patroli dilaksanakan dengan sistem skala prioritas.
- Menyurati seluruh camat agar memerintahkan dan memonitoring kepala desa untuk kelengkapan data satlinmas.

## **b. Dinas Pemadam Kebakaran**

### **1. Pelayanan Dasar**

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Pada Bab. II. Standar Pelayanan Sub Urusan Kebakaran, Pasal 2. Dijelaskan Jenis pelayanan dasar sub urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota Yaitu Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran. Paling sedikit memuat:

- Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan Kejadian kebakaran;
- Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
- Layanan pendataan, inspeksi dan infestasi kebakaran

### **2. Target Pencapaian SPM**

Target capaian SPM Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut telah ditetapkan 4 (empat) indikator capaian SPM Penanggulangan Bencana Kebakaran yaitu:

- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota.
- Target waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).
- Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi.
- Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran.

Target capaian dan batas waktu capaian 4 (empat) indikator tersebut sebagai berikut :

<b>Jenis Pelayanan Dasar</b>	<b>SPM</b>			<b>Batas Waktu Pencapaian (Tahun)</b>
	<b>Indikator</b>		<b>Nilai</b>	
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana	pelayanan kebakaran	87,65%	2022

	kabupaten/kota		
	Target waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	80,00%	2022
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	85%	2022
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	90%	2022

Mengacu pada target SPM tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kondisi infrastruktur jalan, jarak tempuh, kecepatan rata-rata mobil pemadam kebakaran untuk menuju lokasi, dan ketersediaan anggaran pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin, maka ditetapkan target Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar	SPM		Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Nilai	
Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	6,9%	2022
	Target waktu tanggap ( <i>response time rate</i> ) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	75%	2022
	Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	85%	2022
	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).	90%	2022

### 3. Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran yang berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Merangin untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar **Rp.4.819.162.584,60** dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Setelah Perubahan
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>6.974.765.479.00</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.197.650.000.00</b>



5.1.1	Belanja Pegawai	2.197.650.000.00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>4.777.115.479.00</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	1.890.600.000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.100.400.000.00
5.2.3	Belanja Modal	1.786.115.479.00

Sehubungan dengan adanya rasionalisasi anggaran, jumlah anggaran tersebut mengalami perubahan yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan	Jumlah Setelah Perubahan
<b>5</b>	<b>Belanja</b>	<b>6.925.728.479.00</b>	<b>6.974.765.479.00</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.148.613.000.00</b>	<b>2.197.650.000.00</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.148.613.000.00	2.197.650.000.00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>4.777.115.479.00</b>	<b>4.777.115.479.00</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	1.906.800.000.00	1.890.600.000.00
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.276.700.000.00	1.100.400.000.00
5.2.3	Belanja Modal	1.593.615.479.00	1.786.115.479.00

#### 4. Dukungan Personil

Jumlah Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin sebagai berikut:

Bulan Januari s/d Desember 2022

No	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah Personil	
		PNS	Tenaga Kontrak
1.	Kepala Dinas	1 org	
2.	Sekretariat		
	a. Sekretaris Dinas	1 org	
	b. Kasubbag Umum & Kepegawaian	1 org	
	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	6 org
	c. Kasubbag Perenc & Keuangan	-	-
	Staf Subbag Perenc & Keuangan	2 org	4 org
3.	Kabid Pembinaan & Pengembangan	1 org	
	a. Kasi Bina Kualitas Personil	1 org	
	Staf Seksi Bina Kualitas Personil	1 org	1 org
	b. Kasi Keselamatan dan Kebakaran	1 org	
	Staf Seksi Keselamatan dan Kebakaran	1 org	2 org
	c. Kasi Pengembangan Sarpras	1 org	
	Staf Seksi Pengembangan Sarpras	-	-
4.	Kabid Pengendalian Operasional	1 org	
	a. Kasi Pengendali Kesiagaan & Operasi	1 org	
	Staf Seksi Pengendali Kesiagaan & Ops	1 org	2 org
	b. Kasi Pencarian & Penyelamatan	1 org	
	Staf Seksi Pencarian & Penyelamatan	1 org	1 org

No	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah Personil	
		PNS	Tenaga Kontrak
	c. Kasi Pengendali Penyuplai Bahan Pemadam	1 org	
	Staf Seksi Pengendali Penyuplai Bhn Pemadam	-	1 org
	Satuan Tugas Pemadam Kebakaran	-	181 org
	<b>Sub Total</b>	<b>17 org</b>	<b>197 org</b>
	<b>Total</b>		<b>214 org</b>

## 5. Realisasi Pencapaian SPM

### a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran (PPK) adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).

WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan resiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: pemukiman di perkotaan dan pedesaan, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depo bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Pembentukan per 1 (satu) WMK ditentukan oleh cakupan luas maksimal masing-masing kawasan sebagai berikut:

- Pada pemukiman perkotaan dengan luas 100 KM<sup>2</sup> atau 10.000 Ha
- Pada pemukiman pedesaan dengan luas 250 KM<sup>2</sup> atau 25.000 Ha;
- Pada lingkungan industri dan/atau pabrik dengan luas 25 KM<sup>2</sup> atau 2.500 Ha; dan
- Pada lahan dengan luas 250 KM<sup>2</sup> atau 25.000 Ha.

Cara perhitungan indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml luas WMK Kabupaten}}{\text{Jml luas potensi ancaman kebakaran Kabupaten}} \times 100\%$$

Meskipun ketentuan pembentukan WMK telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana tersebut di atas, akan tetapi

untuk di Kabupaten Merangin pembentukan WMK ditetapkan dengan pertimbangan waktu tempuh dan jarak tempuh. Hal ini dilakukan mengingat perkotaan, perdesaan, lingkungan industri/pabrik dan lahan di Kabupaten Merangin keberadaannya tidak dalam satu kawasan, akan tetapi tersebar di beberapa wilayah kecamatan

dengan kondisi geografis yang sangat beragam.

*Sumber Data : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2012*

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Km)
1	2	3	4
1.	Jangkat	Muara Madras	137
2.	Sungai Tenang	Rantau Suli	157
3.	Muara Siau	Pasar Muara Siau	45
4.	Lembah Masurai	Pasar Masurai	62
5.	Tiang Pumpung	Sekancing	32
6.	Pamenang	Pamenang	32
7.	Pamenang Barat	Simpang Limbur Merangin	15
8.	Renah Pamenang	Meranti	26
9.	Pamenang Selatan	Tambang Emas	31
10.	Bangko	Pasar Atas Bangko	0
11.	Bangko Barat	Pulau Rengas Ulu	12
12.	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	8
13.	Nalo Tantan	Sungai Ulak	5
14.	Sungai Manau	Sungai Manau	42
15.	Renah Pembarap	Simpang Parit	28
16.	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	58
17.	Tabir	Pasar Rantau Panjang	28
18.	Tabir Ulu	Muara Jernih	42
19.	Tabir Selatan	Rawa Jaya	33
20.	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	38
21.	Tabir Timur	Sungai Bulian	68
22.	Tabir Lintas	Mensango	14
23.	Margo Tabir	Tanjung Rejo	30
24.	Tabir Barat	Muara Kibul	58

Jarak antar Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten dapat dasar pertimbangan kondisi geografis, kondisi infrastruktur jalan, jarak tempuh, dan kecepatan rata-rata mobil pemadam kebakaran untuk menuju lokasi, maka untuk saat ini di Kabupaten Merangin ditargetkan sebanyak 13 (tiga belas) Wilayah Manajemen Kebakaran. Setiap WMK akan didirikan 1 (satu) unit Pos

Pemadam Kebakaran. Selengkapnya sebagai berikut:

- WMK I, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Bangko yang sekaligus sebagai Markas Komando (Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Batang Masumai dan sebagian Kecamatan Tabir Lintas.
- WMK II, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Tabir, sebagian Kecamatan Tabir Lintas, sebagian Kecamatan Tabir Ilir.
- WMK III, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir Selatan. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Tabir Selatan, sebagian Kecamatan Margo Tabir dan sebagian Kecamatan Pamenang Barat.
- WMK IV, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Pamenang. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Pamenang dan sebagian Kecamatan Pamenang Barat.
- WMK V, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Pamenang Selatan. Adapun wilayahnya meliputi: Kecamatan Pamenang Selatan dan Kecamatan Renah Pamenang.
- WMK VI, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Sungai Manau. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Renah Pembarap dan Kecamatan Pangkalan Jambu.
- WMK VII, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Lembah Masurai. dengan cakupan wilayahnya meliputi Sebagian Kecamatan Jangkat Sebagian Kecamatan Muara Siau
- WMK VIII, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Jangkat dengan cakupan wilayahnya meliputi Sebagian Kecamatan Jangkat Timur.
- WMK IX, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Jangkat Timur dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Jangkat.
- WMK X, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir Timur. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Tabir Timur dan sebagian Kecamatan Tabir Ilir.

- WMK XI, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Margo Tabir dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Margo Tabir, Kecamatan Tabir Lintas.
- WMK XII, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tiang Pumpung. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Bangko Barat.
- WMK XIII, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir Ulu dengan cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Tabir Barat.

Rencana pembentukan WMK sebanyak 13 (tiga belas) WMK sebagaimana tersebut di atas, sampai dengan Tahun 2020 baru dapat direalisasikan sebanyak 6 (enam) WMK, yaitu:

- WMK I, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Bangko yang sekaligus sebagai Markas Komando (Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Bangko, Kecamatan Bangko Barat, Kecamatan Nalo Tantan, Kecamatan Batang Masumai dan sebagian Kecamatan Tabir Lintas; dan
- WMK II, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir. Adapun cakupan wilayahnya meliputi: Kecamatan Tabir, Kecamatan Tabir Timur, Kecamatan Tabir Selatan, Kecamatan Tabir Ilir, Kecamatan Margo Tabir sebagian Kecamatan Tabir Lintas.
- WMK III, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Pamenang Selatan. Adapun wilayahnya meliputi: Kecamatan Pamenang, Kecamatan Pamenang Selatan, Kecamatan Pamenang Barat dan Kecamatan Renah Pamenang.
- WMK IV, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Sungai Manau. Adapun wilayahnya meliputi: Kecamatan Sungai Manau, Kecamatan Renah Pembarap dan Kecamatan Pangkalan Jambu.
- WMK V, Pos Pemadam Kebakaran terletak di Kecamatan Kecamatan Lembah Masurai. Adapun wilayahnya meliputi: Kecamatan Lembah Masurai, Kecamatan Muara Siau, Kecamatan Tiang Pumpung, Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Jangkat Timur.

- WMK VI, Pos Pemdand Kebakaran terletak di Kecamatan Tabir Ulu. Adapun wilayahnya meliputi: Kecamatan Tabir Ulu dan Kecamatan Tabir Barat.

Dengan demikian, maka realisasi cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Merangin pada Tahun 2020 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{6}{13} \times 100\% = 46,15\%$$

#### **b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran.**

Pengertian *Tingkat Waktu Tanggap* daerah layanan WMK adalah pelayanan pemadam kebakaran pada saat tanggap darurat yang efektif dan bereaksi cepat dan tepat tiba di lokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan resiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda.

Secara operasional, *Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)* daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Kebakaran di Kabupaten Merangin pada Tahun 2022 terjadi sebanyak 12 (dua belas) kasus. 10 (sepuluh) kasus terjadi dalam Wilayah

Manajemen Kebakaran dan 2 (dua) kasus terjadi di luar Wilayah Manajemen Kebakaran. Dari 12 (dua belas) kasus kebakaran yang terjadi dalam WMK, hanya 10 (sepuluh) kasus yang mampu ditangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Dengan demikian, maka realisasi tingkat waktu tanggap pada Tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{10}{12} \times 100\% = 85,71\%$$

**c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi**

Aparatur Pemadam Kebakaran adalah satuan petugas pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi sebagai aparat dinas atau organisasi perangkat daerah yang membidangi pemadam kebakaran dengan keahlian untuk melakukan inspeksi proteksi kebakaran, investigasi penyebab kebakaran, pemadaman api dan penyelamatan korban jiwa serta aset harta benda. Satuan tugas pemadam kebakaran ini memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

Perhitungan persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah satgas damkar yg memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\text{Jumlah Satgas Damkar}} \times 100\%$$

Jumlah Satgas Damkar pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin pada Tahun 2022 sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang. Dari jumlah tersebut, Satgas Damkar yang telah mengikuti pendidikan dasar Pemadam I. Dengan demikian, maka realisasi pemenuhan capaian tingkat persentase cakupan Satgas Damkar yang memenuhi standar kualifikasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{156}{181} \times 100\% = 75,39\%$$

**d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).**

Mobil Damkar dan/atau mesin Damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh Satuan Tugas Pemadam Kebakaran, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil Damkar dan/atau mesin Damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada dilingkungan dan/atau kawasan potensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin Damkar di atas 3.000-5.000 liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang

disediakan Pemerintah Daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Cara perhitungan indikator tersebut menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jml WMK memiliki mobil yg laik pakai}}{\text{Jml WMK berpotensi kebakaran}} \times 100\%$$

Pada Tahun 2022, Kabupaten Merangin memiliki 6 WMK yang berpotensi kebakaran yang wajib mendapat perlindungan bahaya kebakaran dari Pemerintah Daerah. Sedangkan jumlah mobil Damkar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang laik pakai sebanyak 7 (tujuh) unit. 1 (satu) unit mobil damkar berkapasitas 5.000 liter, 5 (lima) unit mobil damkar berkapasitas 4,000 liter dan 1 (satu) unit mobil damkar berkapasitas 3.000 liter. Mobil tersebut ditempatkan pada WMK I sebanyak 2 (dua) unit dengan rincian 1 (satu) unit berkapasitas 5.000 liter dan (satu) unit berkapasitas 4.000 liter. Pada WMK II ditempatkan 1 (satu) unit mobil damkar dengan kapasitas 4.000 liter. Pada WMK III ditempatkan 1 (satu) unit mobil damkar kapasitas 4.000 liter. Pada WMK IV ditempatkan 1 (satu) unit mobil damkar kapasitas 4.000 liter. Pada WMK V ditempatkan 1 (satu) unit mobil damkar kapasitas 3.000 liter. Pada WMK VI ditempatkan 1 (satu) unit mobil damkar kapasitas 4.000 liter.

Dengan demikian maka persentase cakupan WMK yang memiliki mobil Damkar laik pakai pada Tahun 2019 adalah:

$$\frac{7}{13} \times 100\% = 53,84\%$$

## **6. Permasalahan dan Solusi**

Berbagai permasalahan yang ditemui dalam pencapaian SPM Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai (rusak dan sempit) pada beberapa wilayah di Kabupaten Merangin sangat berpengaruh terhadap kecepatan kendaraan Pemadam Kebakaran untuk menuju Tempat Kejadian Kebakaran. Hal ini mengakibatkan tingkat waktu tanggap pada beberapa kejadian kebakaran dalam WMK melebihi 15 (lima belas) menit. Solusinya adalah menyampaikan usulan perbaikan jalan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.



2. Keingintahuan masyarakat pada saat terjadinya kebakaran sangat tinggi (kebiasaan masyarakat untuk melihat kejadian kebakaran) dan pada waktu yang bersamaan kebiasaan masyarakat adalah memarkirkan kendaraan bermotornya pada ruas jalan yang akan dilalui mobil pemadam kebakaran. Kondisi yang demikian menyebabkan mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk menuju sasaran titik terjadinya kebakaran yang pada akhirnya dapat menyebabkan tingkat waktu tanggap pada beberapa kejadian kebakaran melebihi standar yang telah ditetapkan dalam SPM (yakni 15 menit). Solusinya adalah dengan rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pada saat terjadi kebakaran tidak memarkirkan kendaraan bermotornya pada ruas jalan yang akan dilalui mobil pemadam kebakaran. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian harus ditingkatkan dalam rangka mengatur arus lalu lintas dan parkir kendaraan pada saat terjadinya kebakaran.
3. Pola pemukiman penduduk yang menyebar dengan jarak yang sangat berjauhan dan kondisi jalan penghubung yang kurang baik menyebabkan cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Merangin sangat luas. Sementara pada saat ini hanya terdapat 6 (enam) Wilayah Manajemen Kebakaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Merangin. Solusinya adalah dengan membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran baru dengan mempertimbangkan potensi kebakaran, jarak tempuh, waktu tempuh dan kondisi geografis serta kondisi infrastruktur jalan penghubung yang ada.
4. Mobil pemadam kebakaran yang dimiliki sebagian besar telah berumur (tua) dan jumlahnya masih sangat terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian cakupan pelayanan bencana kebakaran. Solusinya adalah dengan melakukan perawatan rutin secara teratur agar mobil selalau dalam keadaan laik pakai. Selain itu juga menyampaikan usulan agar dapat dilakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran yang baru.
5. Belum semua Satuan Tugas Pemadam Kebakaran dilatih pendidikan dasar Pemadam I dan belum memiliki sertifikat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dalam melakukan kegiatan

pemadaman kebakaran. Solusinya adalah dengan melakukan pelatihan bagi Satgas Damkar yang belum mengikuti pendidikan

### **c. Penanggulangan Bencana**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 yang terdiri dari :

#### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin yang berfungsi sebagai pelaksana Pelayanan Dasar dibidang bencana melaksanakan pelayanan dasar sebagai berikut :

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

#### **2. Target Pencapaian SPM**

Adapun indikator Bidang Kebencanaan sesuai standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana berupa :  
Persentase Jumlah Kecamatan yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 24 Kecamatan.
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa  
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 334,673 Orang.
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.  
Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 287 KK.

Selanjutnya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan

yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 1 Target SPM Bidang Kebencanaan Kabupaten Merangin Tahun 2019-2022**

No	Indikator	Data Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Target Capaian SPM/Tahun
			Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana : Persentase Jumlah Kecamatan yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana								24	20	24	20	20%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa : Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana								335	20	335	20	20%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana berupa: Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								287	20	287	20	20%

Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi.

### 3. Alokasi Anggaran

Jumlah keseluruhan anggaran yang dipergunakan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Merangin pada Tahun 2022 sebesar Rp. 1.544.859.408,- (*Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah*), dari total Belanja Langsung APBD sebesar Rp. 2.610.657.858,- jika dikalkulasikan ada persentase sebesar 59,18% anggaran yang dialokasi untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kebencanaan di Kabupaten Merangin. Untuk total Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Merangin pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 4.699.716.569,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2 Realisasi Anggaran dan Target Kinerja Tahun 2022**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan PD Berjalan yang dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		% Target Kinerja	% Realisasi Anggaran
			K	Rp. (000)		K	Rp. (000)		
1	2	3	4			5		6	7
1	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan</b>	100	%	1.544.859.408	95	1.474.268.344	95,43%	95,43%
1	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi Rawan Bencana yang tersedia</b>	100	%	17.748.000	100	17.748.000	100%	100%
1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana yang terlaksana	3	Kali	17.748.000	3	17.748.000	100%	100%
2	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Berkurangnya Dampak Bencana Alam akibat dari Kelalaian dan Ulah Masyarakat</b>	100	%	1.509.317.408	95	1.438.726.344	95%	95%
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat dan Relawan yang terlatih	2	Kali	8.505.000	2	8.505.000	100%	100%
2	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan tangguh bencana yang terbentuk	215	Desa/Ke-lurahan	437.594.300	215	393.413.500	100%	90%
3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pasca Bencana yang tertangani	2	Dokumen	615.315.532	2	589.059.268	100%	96%
4	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TRC dan Psudalops yang terlatih	30	Orang	447.902.576	30	447.748.576	100%	100%
3	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Dampak Bencana</b>	100	%	17.794.000	100	17.794.000	100%	100%
1	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana yang tertangani	8	Lokasi	9.253.000	8	9.253.000	100%	100%
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Logistik pada Lokasi Bencana	24	Lokasi	8.541.000	24	8.541.000	100%	100%
2	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah</b>	100		3.154.857.161	97	3.071.988.522	97%	97%

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan PD Berjalan yang dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		% Target Kinerja	% Realisasi Anggaran
			K		Rp. (000)	K	Rp. (000)		
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>	4	Dokumen	7.973.000	4	7.973.000	100%	100%
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD dan RKA Perubahan SKPD	2	Dokumen	7.973.000	2	7.973.000	100%	100%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>2.167.791.211</b>	<b>1</b>	<b>2.142.025.442</b>	100%	99%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	2.089.058.711	1	2.063.292.942	100%	99%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bulan	78.732.500	12	78.732.500	100%	100%
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>38.840.000</b>	<b>1</b>	<b>38.801.000</b>	100%	100%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas dan Atributnya yang disediakan	55	Orang	38.840.000	55	38.801.000	100%	100%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1</b>	<b>Tahun</b>	<b>454.177.950</b>	<b>1</b>	<b>442.467.852</b>	100%	97%
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	54	Jenis	52.237.500	54	52.237.500	100%	100%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	8100	Eks	10.425.800	8100,4	10.425.800	100%	100%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6	Eks	3.584.000	6	3.200.000	100%	89%
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi perjalanan dinas kedalam dan keluar daerah	225	Kali	387.930.650	225	376.604.552	1	97%
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>183.385.000</b>	<b>99,9</b>	<b>183.194.300</b>	100%	100%
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan	1	Unit	100.505.000	1	100.480.100	100%	100%

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan PD Berjalan yang dievaluasi (2022)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022		% Target Kinerja	% Realisasi Anggaran
			K	Unit	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	9	Unit	82.880.000	9	82.714.200	100%	100%
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100	%	47.850.000	96	46.092.071	96%	96%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Bulan	47.850.000	12	46.092.071	100%	96%
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100		254.840.000	83	211.434.857	83%	83%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan Kendaraan dinas/operasional perangkat daerah yang dipelihara	14	Unit	254.840.000	14	211.434.857	100%	83%
<b>JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM</b>					<b>4.699.716.569</b>		<b>4.546.256.866</b>		

#### 4. Dukungan Personil

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin di dukung sumberdaya yang tersebar dalam Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin diperlukan SDM yang kompeten dan berkualitas. Kondisi SDM di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 19 (sembilan belas) orang pegawai yang terdiri 6 (enam) orang pejabat

struktural, 8 (delapan) orang pejabat fungsional tertentu, dan 5 (lima) orang pejabat fungsional umum dengan rincian sebagai berikut :

**Table 3 Daftar Personil BPBD Kabupaten Merangin**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNIT</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	MARDANSYAH SAIDI, SE, ME Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630330 198603 1 005	Kepala Pelaksana BPBD	<b>SEKRETARIAT</b>
2	SARIFUDDIN, S.Pd Penata Tk.I (III/d) NIP. 19660703 199212 1 001	Sekretaris BPBD	
3	YUNILAWATI, SE Penata Tk.I (III/d) NIP. 19770601 200901 2 004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
4	ZAIRIANTONI INDRA, SE, ME Pembina (IV/a) NIP. 19800123 200501 1 005	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	
5	HERYANTO, Bsc Penata Tk.I (III/d) NIP. 19651105 199009 1 001	Perencana	
6	HERA DATI SALPIA, SE Penata (III/c) NIP. 19790211 201212 2 001	Bendahara	
7	ABET NEGGO, ST Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19850518 201001 1 009	Analisis Sumber Daya Aparatur	
8	EKO SAMIHARJO Pengatur Muda (III/a) NIP. 19680409 199102 1 002	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	
9	ASEP DEDI DARMAWAN Pengatur (II/c) NIP. 19690328 200810 1 001	Pengadministrasi Kepegawaian	
10	DEWI SARTIKA	Pusdalops	
11	REVOLIDA, SE	Pusdalops	
12	NINI CARLINA	Pusdalops	
13	SRI YANTI, S.Pd	Pusdalops	
14	HARYANI, SE	Pusdalops	
15	ERLI AWINANTI	Pusdalops	
16	TUGIRAN, SE Pembina (IV/a) NIP. 19691220 199303 1 006	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	<b>BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN (BIDANG I)</b>
17	YASRUL, SP Penata Tk.I (III/d)	Penata Penanggulangan	

NO	NAMA	JABATAN	UNIT
	NIP. 19671111 199403 1 005	Bencana	
18	ANGGIE YUWANA, S.STP, MH Penata Tk.I (III/d) NIP. 19810226 199912 2 001	Penata Penanggulangan Bencana	
19	RIB BUDIATI, S.Pd.I	Pusdalops	
20	HASIATIR RAUDOH, SE	Pusdalops	
21	RUDI, SH Pembina (IV/a) NIP. 19720123 200012 1 002	Kabid Kedaruratan dan Logistik	<b>BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK (BIDANG II)</b>
22	SUMIARTO, S.Sos Penata Tk.I (III/d) NIP. 19710728 199403 1 002	Penata Penanggulangan Bencana	
23	EDI IRWAN TOMI, SE Penata (III/c) NIP. 19790907 200701 1 006	Penata Penanggulangan Bencana	
24	ABDUL RAHMAN Pengatur (II/c) NIP. 19650614 200701 1 003	Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik	
25	WENNY TRA COMBA	Pusdalops	
26	NIA DAHLIAWATI, S, Pd	Pusdalops	
27	AHMANIZAR, ST Pembina (IV/a) NIP. 19680615 199003 1 015	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	<b>BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI (BIDANG III)</b>
28	MUHAMMAD TAIB, SE Penata Tk.I (III/d) NIP. 19650607 198603 1 027	Penata Penanggulangan Bencana	
29	MUHAMMAD BAKRI, SE Penata Tk.I (III/d) NIP. 19690210 199002 1 001	Penata Penanggulangan Bencana	
30	YUNIL RAMA RIATATI	Pusdalops	
31	EVILIANI, S.Pd.I	Pusdalops	
32	RD. A. RONI PASLA	Komandan TRC Tim I	<b>TIM REAKSI CEPAT (TRC) TIM I</b>
33	RUSTAMA	Anggota TRC	
34	EVKA SYAPUTRA, SH	Anggota TRC	
35	SUMARLIN	Anggota TRC	
36	CATUR SANTOSO	Anggota TRC	
37	M. YUSUF	Anggota TRC	
38	ANDRI MILSA, SE	Anggota TRC	
39	DEDI EFRIADI	Komandan TRC Tim II	<b>TIM REAKSI CEPAT (TRC) TIM II</b>
40	NOPRIANTO	Anggota TRC	
41	AHMAD WIJAYA, SE.I	Anggota TRC	
42	SUDARSO, S.IP	Anggota TRC	



NO	NAMA	JABATAN	UNIT
43	ANSORY	Anggota TRC	
44	HERI KUSMANTO, S.Pd	Anggota TRC	
45	AHMED INDRA YOGI	Anggota TRC	
46	M. SUKRI, A.Md	Anggota TRC	
47	OKY YOAN FIRMANDA, S.Pd	Komandan TRC Tim III	<b>TIM REAKSI CEPAT (TRC) TIM III</b>
48	IMAM SUHARYADI, S.Pd	Anggota TRC	
49	FIRDAUS, S.Pd	Anggota TRC	
50	ALHADAT	Anggota TRC	
51	FAIZ YUGE. A	Anggota TRC	
52	MUSRIPAN	Anggota TRC	
53	M. JANUARI	Anggota TRC	

## 5. Hasil Pencapaian SPM

Adapun Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan mengintegrasikan target pencapaian SPM ke dalam Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang pada intinya untuk melaksanakan 3 (tiga) jenis pelayanan dasar dan 3 (tiga) indikator SPM Bidang Kebencanaan yang telah ditetapkan.

Berikut kami sajikan realisasi SPM Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin sebagai berikut:

**Table 4 Realisasi Capaian SPM BPBD Tahun 2022**

No	Indikator	Data Awal	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
			Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana : Persentase Jumlah Kecamatan yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana		24	16,6	24	12,6	24	16,6	24	16,6
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa :Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		335	18,8	335	10	335	20	335	20
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana :Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		287	20	287	20	287	20	287	14

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kebencanaan triwulan I sampai dengan IV yang sudah dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Merangin pada Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana berupa :

Persentase Jumlah Kecamatan yang memperoleh Pelayanan Informasi Rawan Bencana pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 20% yaitu sebanyak 24 Kecamatan dengan realisasi capaian SPM sebanyak 24 Kecamatan yaitu mencapai 100%.

2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana berupa :

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 334,673 Orang dengan realisasi capaian SPM sebanyak 334,673 Orang yaitu mencapai 100%.

3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Persentase Jumlah Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar 20% yaitu sebanyak 287 KK dengan realisasi capaian SPM sebanyak 287 KK yaitu mencapai 100%.

## **6. Permasalahan dan Solusi**

### **a. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin tahun 2022, terdapat beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala, diantaranya sebagai berikut :

- Kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana, sehingga cukup sulit untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam yang secara tidak langsung berdampak pada kerawanan terjadinya bencana alam.
- Belum seragamnya persepsi para pemangku kepentingan dan stackholder yang terkait mengenai penanganan bencana, hal tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi para pihak tersebut dalam upaya penanggulangan bencana. Harus diingat bahwa Bencana bukan hanya urusan pemerintah tetapi merupakan urusan bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- Jumlah desa yang ada di Kabupaten Merangin cukup banyak dan masih terdapat daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, sehingga hal

tersebut menjadi salah satu hambatan dalam upaya pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

- Masih kurangnya Jumlah personil dalam upaya penanggulangan bencana jika dibandingkan dengan besaran wilayah Kabupaten Merangin.
- Terbatasnya jumlah logistik yang tersedia guna memenuhi kebutuhan korban yang terdampak bencana.
- Ketatnya peraturan terkait dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana sehingga menyulitkan dalam penanganan dampak bencana.

b. Solusi

Adapun solusi yang ditempuh guna menghadapi permasalahan tersebut diatas diantaranya :

- Merangkul Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintahan Desa agar dapat menghimbau warganya untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing.
- Mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang melibatkan instansi terkait guna menyeragamkan persepsi tentang upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Merangin.
- Berupaya meningkatkan Kualitas SDM Penanggulangan Bencana sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan kondisi dilapangan.
- Mengupayakan permintaan bantuan logistik ke pemerintah tingkat provinsi melalui BPBD Provinsi Jambi maupun ke tingkat pemerintah pusat melalui BNPB RI.
- Dalam penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin guna mengatasi bencana berupaya mencari solusi dengan merangkul dunia usaha maupun masyarakat untuk terlibat membantu agar dampak bencana yang terjadi tidak meluas.

#### **4.2.6 URUSAN SOSIAL**

Berdasarkan Peraturan Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota yang pada intinya melaksanakan 5 jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2019 – 2023 yang meliputi :

## **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Pelayanan dasar bidang sosial merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dari tahun 2019-2023 yang terdiri atas :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di LuarPanti Sosial
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi KorbanBencana Kabupaten/Kota

## **2. Target Pencapaian SPM**

Adapun Indikator Bidang Sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial berupa:
  - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 19,23% atau setara dengan 10 orang pada tahun 2022.
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti, berupa:
  - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 20 orang pada Tahun 2022.
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial, Berupa:
  - Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhana dasarnya di luar panti dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 100 orang pada Tahun 2022.
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar panti Sosial, berupa:
  - Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

di Luar panti dengan target sebanyak 20 % atau setara dengan 2 orang pada Tahun 2022

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/ kota, berupa:

- Persentase Korban Bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat dengan target sebanyak 20% atau setara dengan 500 Orang pada tahun 2022.

**Tabel 2.1. TARGET SPM BIDANG SOSIAL KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2019-2023**

Indikator	Data Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Target Capaian SPM / Tahun
		JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti : a. Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	52 Orang	10	19,2 3	10	19,23	10	19,23	10	19,23	12	23,2 8	19,23%
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Luar Panti : a. Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 Orang	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20%
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti : a. Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	500 Orang	100	20	100	20	100	100	100	20	100	20	20%
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti : a. Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	10 Orang	2	20	2	20	2	20	2	20	2	20	20%
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota : a. Persentase korban bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan	2.500 Orang	500	20	500	20	500	20	500	20	500	20	20%

Indikator	Data Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Target Capaian SPM /Tahun
		JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	JLH	%	
dasar pada saat tanggap darurat												

### 3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2021 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari, APBD Dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah : Rp. 5,614,965,95
- Alokasi Anggaran SPM : Rp. 277,559,100

### 4. Dukungan Personil

Adapun personil dan pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2022 adalah sebanyak 9 orang, sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP.	JABATAN	KET
1	Dr.ELVIS SURYADINATA NIP. 19640509 199303 1 003	Kepala Dinas	
2	M. YASMI, S.Pd NIP. 19660623 198801 1 002	Plt.Sekretaris Dinas	
3	M. YASMI, S.Pd NIP. 19660623 198801 1 002	Kabid Rehabilitasi, Linsjamsos dan Penanggulangan Kemiskinan	
4	WINALTI, SE NIP. 19750914 200012 2 001	Kasi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
5	A.SA'AD, S.Sos NIP. 19820410 200701 1 004	Kasi Penanggulangan Korban Bencana	
6	MUSTABRI, SE NIP. 19850415 201001 1 015	Kasubbag Program dan Keuangan	
7	WAHYUDI, SKM	Staf Program dan Keuangan	
8	ANDI RAHMAD R, ST	Staf Program dan Keuangan	
9	YUDI PURWANINGSIH, A.Md	Staf Program dan Keuangan	

## 5. Hasil Capaian

Adapun Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan mengintegrasikan target pencapaian SPM ke dalam Rencana Kerja SKPD (Renja- SKPD) dan Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dalam Rencana Kerja *Pemerintah* Daerah (RKPD) yang pada intinya untuk melaksanakan 5 jenis pelayanan dasar dan 5 indikator SPM Bidang Sosial yang telah ditetapkan.

Berikut kami sajikan realisasi SPM dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 Bidang Sosial, Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun, sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Realisasi Capaian SPM Tahun 2022**

Indikator	Data Awal	Capaian 2020		Capaian 2021		Target 2022		Capaian 2022	
		JLH	Jlh	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti : ❖ Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	52 Orang	10 Orang	18 Orang	18 Orang	180%	10 Orang	19,23%	10 orang	100 %
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Luar Panti : ❖ Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 Orang	0	3	3	15%	20 Orang	20%	15 orang	75 %
3.Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti : ❖ Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	500 Orang	507 Orang	42 Orang	42 Orang	42%	16 Orang	100%	16 orang	100 %
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti : ❖ Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	10 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0%	1 Orang	20%	1 Orang	100 %
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota :									

Indikator	Data Awal	Capaian 2020		Capaian 2021		Target 2022		Capaian 2022	
		JLH	Jlh	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
❖ Persentase korban bencana cakupan penanganan skala Kabupaten yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat	2.500 Orang	39 Orang	43 Orang	43 Orang	8,60%	100 Orang	20%	55 Orang	55 %

## 6. Permasalahan Dan Solusi

### a. Permasalahan

Dalam melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2022, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala, di antaranya sebagai berikut:

- Adanya Recofusing Anggaran akibat Corona Virus 2019 sehingga menghambat pencapaian program dan kegiatan.
- Kurang updatenya data base Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Merangin sehingga menjadi hambatan dalam menghitung total data layanan SPM.
- Ketatnya peraturan terkait dengan pelaksanaan dana Bantuan Sosial/ Hibah di Kabupaten Merangin sehingga berupa bantuan sosial maupun hibah.
- Akurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kurang valid, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan.
- Rendahnya alokasi anggaran yang di tetapkan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

### b. Solusi

Adapun solusi yang di tempuh guna menghadapi permasalahan tersebut diatas diantaranya:

- Segera melakukan Pemuktakhiran Mandiri Data Penyandang masalah Kesejahteraan sosial.
- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bagi Tenaga Kerja Sosialkecamatan (TKSK), serta meningkatkan kesejahteraan TKSK di



Kabupaten Merangin.

- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar menaikkan alokasi anggaran untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin dimasa yang akan datang.

### 4.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 4.3.1 URUSAN PENDIDIKAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD</li><li>2. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, bahan Ajar dan Pembelajaran PAUD.</li><li>3. Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini</li><li>4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri</li><li>5. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru Beserta Sanitasinya</li><li>6. Rehabilitasi Ruang kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta perabotnya.</li></ol>
2	Program Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan Pendidikan Non Formal.</li><li>2. Operasional UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar ((SKB)</li><li>3. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B, dan Paket C</li><li>4. Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotnya.</li><li>5. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya.</li><li>6. Pengadaan peralatan Pendidikan (TIK)</li></ol>
3	Program Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Dasar</li></ol>

No	Program	Kegiatan
	Sekolah Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pelaksanaan Ujian Akhir SD/ Sederajat</li> <li>3. Pembangunan Ruang Kelas Barru (RKB) beserta Perabotnya</li> <li>4. Bantuan Operasional Sekolah Dasar</li> <li>5. Pengelolaan Jaminan Pendidikan SD/MI</li> <li>6. Pengelolaan Kesiswaan jenjang sekolah Dasar (SD)</li> <li>7. Operasional Koordinasi satuan Pendidikan wilayah</li> <li>8. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya</li> <li>9. Pembangunan toilet (Jamban) siwa/ Guru beserta sanitasinya.</li> <li>10. Pembangunan ruang perperpustakaan beserta perabotnya</li> <li>11. Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotrnya.</li> </ol>
4	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP</li> <li>2 Pelaksanaan Ujian AKhir SMP/ Sederajat</li> <li>3 Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya</li> <li>4 Pengadaan peralatan alat peraga matematika SMP.</li> <li>5 Pengadaan Media Pendidikan SMP</li> <li>6 Pengadaan peralatan PJOK SMP</li> <li>7 Pengadaan alat kesenian tradisional SMP</li> <li>8 Penyusunan dan pengembangan kurikulum SMP</li> <li>9 Pengelolaan jaminan Pendidikan sekolah menengah pertama.</li> <li>10Pengelolaan kesiswaan jenjang sekolah menengah pertama</li> </ol>

No	Program	Kegiatan
		<p>11 Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.</p> <p>12 Rehabilitasi ruang laboratorium IPA beserta perabotnya.</p> <p>13 Rehabilitasi ruang laboratorium computer beserta perabotnya.</p> <p>14 Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.</p> <p>15 Rehabilitasi ruangan guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.</p> <p>16 Rehabilitasi jamban siswa/ guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.</p> <p>17 Pembangunan ruang perpustakaan beserta sanitasinya</p> <p>18 Pembangunan jamban siswa/ guru beserta sanitasinya</p> <p>19 Pembangunan jamban siswa/ guru beserta sanitasinya</p> <p>20 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam fisika</p> <p>21 Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam biologi.</p> <p>22 Pengadaan peralatan laboratorium computer.</p> <p>23 Pengadaan alat peraga ilmu pengetahuan social</p> <p>24 Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah</p> <p>25 Bantuan operasional sekolah menengah pertama</p>

No	Program	Kegiatan
5	Program peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	a. Penilaian angka kredit tenaga fungsional guru b. Peningkatan peran dewan Pendidikan c. Peningkatan dan pengembangan kapasitas mutu pendidik, tenaga kependidikan jenjang Pendidikan dasar d. Peningkatan dan pengembangan kapasitas mutu pendidik, tenaga kependidikan jenjang PAUD e. Pengelolaan data dan informasi Pendidikan.
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Penyusunan database kebudayaan kabupaten merangin. 2. Penyelenggaraan pegelaran, festival, promosi seni dan budaya serta pelacakan peninggalan kepurbakalan.

#### 4.3.2 URUSAN KESEHATAN

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Orientasi Kapasitas Bidan 2. Manajemen Program KIA 3. Kelas ibu Hamil 4. Kelas Ibu Balita 5. Pengadaan Instrumen manajemen program (buku KIA dll) supervise fasilitatif monitoring pasca latih 6. ANC terpadu 7. Bimtek Manajemen Program KIA 8. Sosialisasi kesehatan Reproduksi bagi calon pengantin. 9. Supervise fasilitatif
		2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	1. Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanggulangan HDK (hipertensi dalam kehamilan) dan HPP (hemoragie post partum) pelatihan PPGDON bagi Bidan 2. Pelaksanaan Rumah Tunggu Kelahiran 3. jaminan persalinan (jampersal) 4. investigasi kematian ibu dan neonatal 5. pertemuan AMP (audit Maternal Neonatal)
		3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Pelatihan Asfiksia dan BBLR pada bayi baru lahir 2. Pelatihan tatalaksana MTBS dan MTBM

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	PROGRAM	KEGIATAN
		4 Pelayanan Kesehatan balita	Program Peningkatan keselamatan Ibu dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan tatalaksana MTBS bagi nakes</li> <li>2. Orentasi kelas ibu Balita</li> <li>3. Lomba balita sehat</li> <li>4. Sosialisasi pemberian makanan bayi dan anak</li> <li>5. Tatalaksana gizi buruk investasi gizi buruk</li> </ol>
		5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LCT dokter kecil sosialisasi dan pembentukan jejaring puskesmas mampu mengatasi KTPA</li> <li>2. Pertemuan Penguatan Jejaring UKS</li> </ol>
		6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penyakit Tidak Menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan diteksi dini kanker metode IVA TEST</li> <li>2. Skrining Hipertensi</li> <li>3. Skrining DM</li> <li>4. Skrining Obesites</li> <li>5. Deteksi Gangguan Mental</li> </ol>
		7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi puskesmas santun lansia</li> <li>2. Skrining Hipertensi</li> <li>3. Pemeriksaan Kadar Gula darah untuk mendeteksi DM</li> <li>4. Deteksi kadar kolestrol</li> <li>5. Deteksi Gangguan mental menyediakan alat FKRTL</li> </ol>
		8 Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	Penyakit Tidak Menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining Hipertensi</li> <li>2. Pemeriksaan, Penemuan dan Pengobatan Hipertensi</li> <li>3. Melakukan rujukan untuk pencegahan komplikasi</li> <li>4. Menyediakan peralatan kesehatan hipertensi</li> </ol>
		9 Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes militus	Penyakit Tidak Menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skrining Diabetes Melitus (DM)</li> <li>2. Pengobatan penderita Diabetes Melitus (DM)</li> <li>3. Penyediaan Peralatan Kesehatan</li> <li>4. Penyediaan nObat DM melakukan Rujukan FKRTL</li> </ol>
		10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan jiwa berat	keswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjaringan ODGJ, rujukan Pasien ODGJ</li> <li>2. Pemantauan pasca pemulangan dari Rumah Sakit Jiwa.</li> <li>3. Pelayanan promotif dan preventif untuk mencegah kekambuhan dan pemasangan</li> <li>4. Pelaksanaan kunjungan rumah</li> </ol>
		11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penemuan dan pengobatan TB paru Rujukan kasus TB</li> <li>2. Pencatatan dan pelaporan</li> </ol>
		12 Pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ARV</li> <li>2. Deteksi diri/ skrining yang berisiko</li> <li>3. Skrining di lapas</li> <li>4. Pertemuan dengan pemegang program puskesmas dan RSD</li> <li>5. Skrining ibu hamil</li> </ol>

#### 4.3.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan dasar	Program	kegiatan
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1. Penunjang Kegiatan Pamsimas 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)
2	Penyediaan pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik		1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah 2. Pembangunan Sanitasi (DAK)

#### 4.3.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada table berikut:

No				
1	<b>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.</b>	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab/Kota. 2. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai lokasi relokasi Perumahan. 3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani. 4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana. 5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota 6. Pendataan Rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus.
2	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat</b>	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	4.3.4.1 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/

No				
	<b>yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			Kota. 4.3.4.3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana. 4.3.4.4 Pembangunan rumah bagi korban bencana. 5. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota. 6. Operasional dan

#### 4.3.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

##### a. Satuan Polisi Pamong Praja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2022 sebagaimana tabel dibawah ini :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (RP)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Merangin	1. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Merangin	1. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	4.250.000	

Perencanaan penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2022 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang belum memuat Sub Kegiatan Khusus untuk pemenuhan Layanan Dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin yang khusus untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum pada Tahun 2022 ditempatkan pada anggaran Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Terakhir berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah mencantumkan Sub Kegiatan *Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada* yang khusus untuk pemenuhan Layanan Dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

## **b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuatlah langkah operasional dalam bentuk program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin guna mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dapat ditampilkan pada tabel berikut :

**Table 5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan</b>	<b>1.544.859.408</b>	<b>1.474.268.344</b>	95,43%
a	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi Rawan Bencana yang tersedia</b>	<b>17.748.000</b>	<b>17.748.000</b>	100%
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana yang terlaksana	17.748.000	17.748.000	100%
b	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Berkurangnya Dampak Bencana Alam akibat dari Kelalaian dan Ulah Masyarakat</b>	<b>1.509.317.408</b>	<b>1.438.726.344</b>	95%
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat dan Relawan yang terlatih	8.505.000	8.505.000	100%



No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan tangguh bencana yang terbentuk	437.594.300	393.413.500	90%
-	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pasca Bencana yang tertangani	615.315.532	589.059.268	96%
-	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TRC dan Psudalops yang terlatih	447.902.576	447.748.576	100%
<b>c</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Dampak Bencana</b>	<b>17.794.000</b>	<b>17.794.000</b>	100%
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana yang tertangani	9.253.000	9.253.000	100%
-	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Logistik pada Lokasi Bencana	8.541.000	8.541.000	100%

### c. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Program dan kegiatan yang terkait langsung dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) jenis pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
	<b>Program</b>			
	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	<b>2.197.650.000</b>	<b>2.097.656.925</b>	<b>95,45%</b>
	<b>Kegiatan</b>			
	Kesiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	31.800.000	31.759.232	99,87%
	Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Investigasi Kejadian Kebakaran	360.425.000	334.676.000	92,85%
	Penyediaan Jasa dan Petugas Teknis Pemadam Kebakaran	1.692.000.000	1.688.200.000	99,77%
	Pengenalan DiniKebakaran	6.750.000	6.748.000	99,97%

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
	Penyuplaian Bahan Pemadam	26.800.000	26.272.400	98,03%
	Penyuluhan, Simulasi, Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha	31.005.000	30.020.620	96,82%
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	13.800.000	13.785.000	99,89%
	Pemeliharaan dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	150.000.000	149.150.000	99,43%

Selain Program dan kegiatan yang mendapat alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran juga melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran pada beberapa Unit Kerja/Instansi yang ada di Kabupaten Merangin, yaitu:

No	Lokasi Kegiatan
1.	Desa Telun. Kecamatan Nalo Tantan
2.	Desa Bunga Antoi. Kecamatan Tabir Selatan
3.	Desa Sungai Sakai, Kecamatan Tiang Pumpung
4.	Desa Muara Lengayo. Kecamatan Muara Siau
5.	Desa Sungai Bulian. Kecamatan Tabir Timur
6.	Desa Langling. Kecamatan Bangko

Kegiatan tersebut di Danai oleh Unit Kerja/Instansi penyelenggara masing-masing. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin sangat menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Bencana Kebakaran. Khusus kegiatan yang diselenggarakan di Desa, peserta kegiatannya adalah para Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). Para anggota SATLINMAS yang telah mendapatkan Pelatihan dan Simulasi pencegahan dan penanganan bencana kebakaran tersebut ke depannya diharapkan bersedia untuk direkrut menjadi Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR).

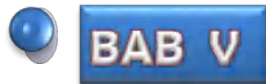
Kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan bencana kebakaran juga dilaksanakan di beberapa pertemuan bekerja sama dengan beberapa organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

#### 4.3.6 URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin guna mendukung penerapan Standar Pelayanan Maksimal (SPM) Bidang Sosial Triwulan I sampai IV pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Proram dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
<b>1</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>96,436,100</b>	<b>96,001,052</b>	<b>100</b>
<b>a.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial</b>	<b>61,437,100</b>	<b>61,189,220</b>	<b>100</b>
-	Penyediaan Permakanan	31,274,300	31,033,870	99
-	Penyediaan Sandang	30,162,800	30,155,350	100
<b>b.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA di luar panti sosial</b>	<b>34,999,000</b>	<b>34,811,832</b>	<b>99</b>
-	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota	34,999,000	34,811,832	99
<b>2</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>70,119,100</b>	<b>62,382,184</b>	<b>89</b>
<b>a.</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>70,119,100</b>	<b>62,382,184</b>	<b>89</b>
-	Penyediaan Makanan	40,004,900	<b>32,550,584</b>	<b>81</b>
-	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian	30,114,200	<b>29,831,600</b>	<b>99</b>
<b>Total</b>		<b>166.555.200,-</b>	<b>158.383.236</b>	<b>95%</b>



## **PENUTUP**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap capaian kinerja seluruh program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan.

Berbagai hasil dan capaian dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2022 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaian itu diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik dari jajaran eksekutif (Pemerintah Daerah), legislatif (DPRD) maupun masyarakat secara luas. Hasil-hasil yang dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang.

Selain itu, pada kesempatan ini, kami juga ingin menginformasikan atas keberhasilan yang diraih putra-putri Merangin yang mampu bersaing baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Untuk tahun 2022, dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki namun dengan tekad dan kemauan serta semangat juang yang tinggi dapat memberikan yang terbaik dan

mengharumkan nama Kabupaten Merangin untuk bersaing ditengah-tengah daerah-daerah lain yang mungkin telah memiliki fasilitas memadai. Adapun prestasi yang telah mengharumkan nama Kabupaten Merangin dibagi dalam dua tingkatan even, yaitu tingkat Nasional dan tingkat Provinsi. Rincian perolehan prestasi baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional adalah sebagai berikut :

### 1. Tingkat Nasional

- Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia untuk Tahun 2022, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin**
- Piagam Penghargaan Peraih Mendali Perunggu Tingkat Nasional Olimpiade Sains Pelajar Nasional Tingkat SMP/MTS Sederajat, **atas nama SMP Negeri 4 Kabupaten Merangin**
- Piagam Penghargaan Peraih Mendali Perak Tingkat Nasional Olimpiade Sains Sigma Nasional Tingkat SMP/MTS Sederajat, **atas nama SMP Negeri 4 Kabupaten Merangin**
- Atlet Karate Sotokan Kandaga Indonesia SHOKAIDO asal Kabupaten Merangin, wakili Provinsi Jambi pada Kejurnas SHOKAIDO di Jakarta, **atas nama Raditya Aryadinata.**
- Juara III (Tiga) Bersama Tunggal Pra Usia Dini Putri pada Turnamen Badminton Padang Open I, **atas nama Divianisa Tantri Haryono**

### 2. Tingkat Provinsi

- Peringkat II (dua) sebagai Pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Stunting, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin**
- Penghargaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi Tahun 2022 bidang Bina Kontruksi, **Peringkat II (dua) Tim Kabupaten Merangin pada Lomba Pekerja Konstruksi Tingkat Provinsi Jambi.**

- Juara I (satu) katagori kelompok BKB Bina Keluarga Balita **Apresiasi Kelompok Kegiatan Unggulan Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2022**
- Apresiasi Katagori Pengelola Data dan Informasi Terbaik Pada Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 **atas nama Kanita Agustina,SE**

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ Bupati ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Merangin dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Merangin kedepannnya dalam mewujudkan **“Merangin MANTAP Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”**.

Kemudian dalam penyajian laporan ini, apabila ada yang kurang cermat dan kurang jelas, maka akan diperbaiki dan disempurnakan setelah mendapat masukan, saran dan kritikan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada sidang paripurna berikutnya. Sekian dan Terima Kasih.